



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Sekerariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memerlukan peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah ditetapkan Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa dengan adanya penambahan Alat Kelengkapan Dewan yaitu Komisi XII, Komisi XIII, dan Badan Aspirasi Masyarakat yang mengakibatkan perubahan struktur organisasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 126);
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien;
- b. menjadi sarana komunikasi bagi pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis di lingkungan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- d. mengidentifikasi potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mencapai solusi penyempurnaan proses yang lebih terarah; dan
- e. mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4

Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 22 Desember 2025
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

TTD.

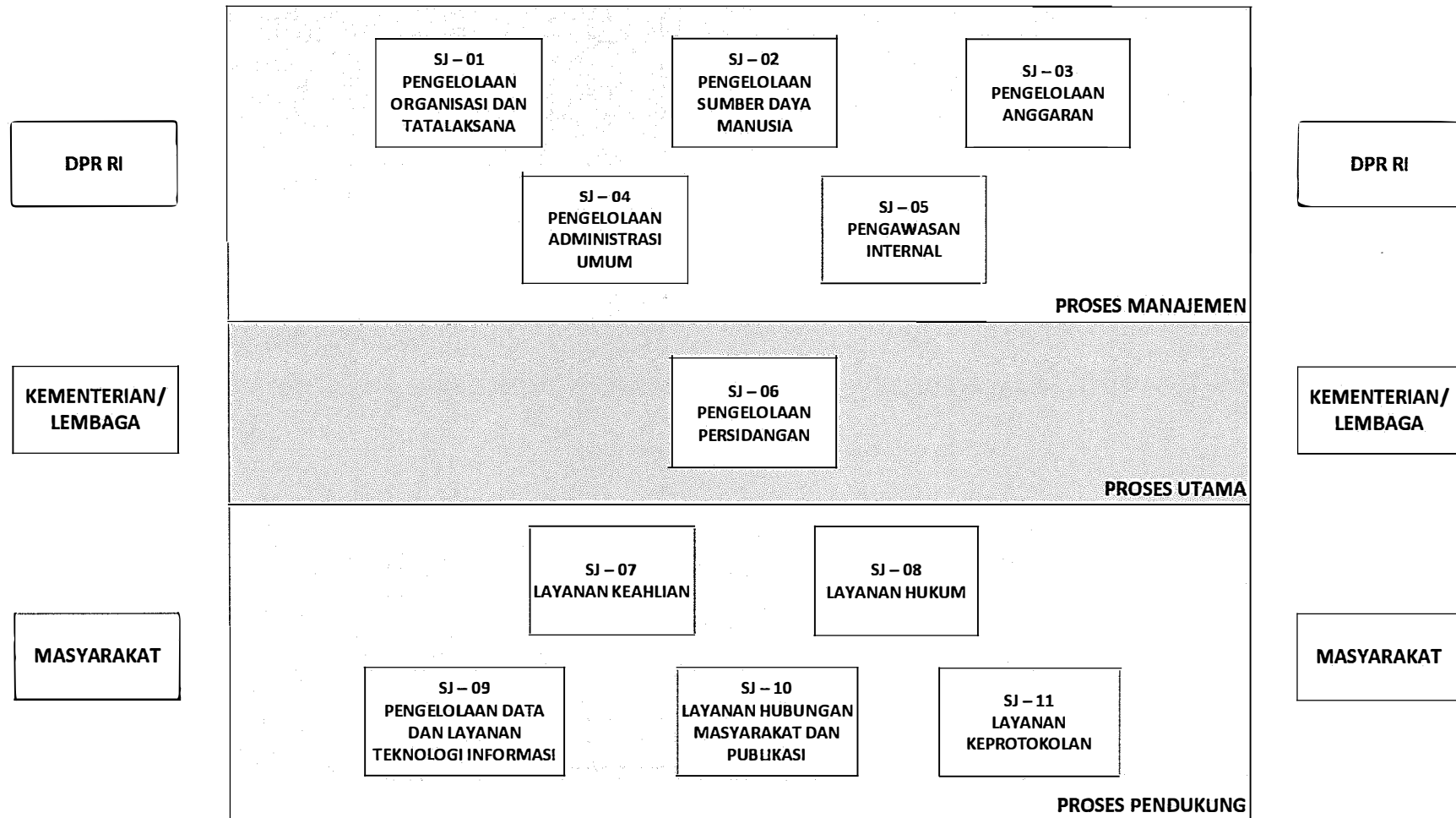
Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

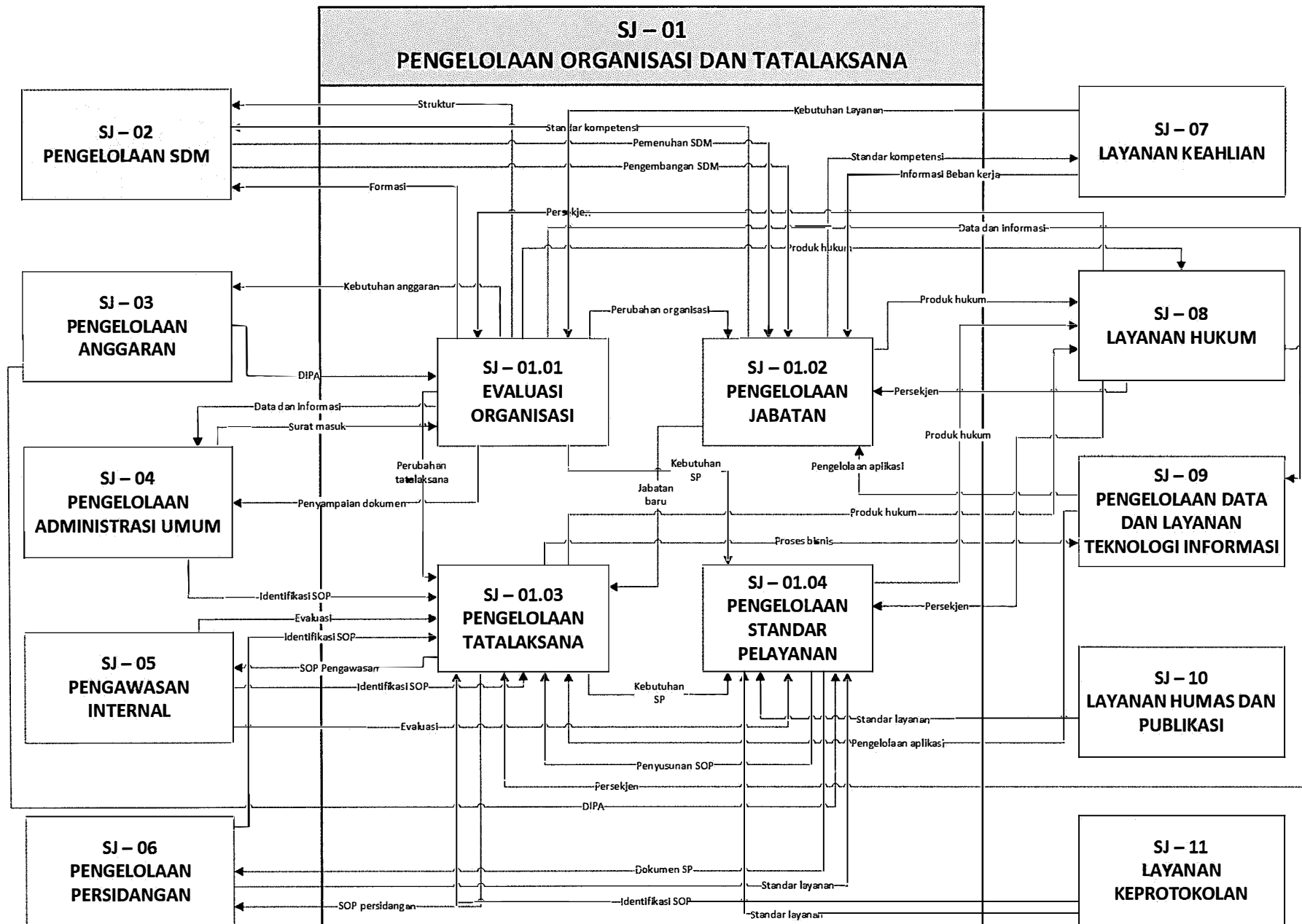
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	NOMOR DOKUMEN	OT.03.01
	TANGGAL PEMBUATAN	DESEMBER 2025
	NO & TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	DESEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS JENDERAL DPR RI TTD. <u>INDRA ISKANDAR</u>
	NAMA DOKUMEN	PETA PROSES BISNIS
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411); 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2024		
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
	1. Peraturan yang berkaitan dengan Sekretaris Jenderal DPR RI 2. Komputer/ ALat Tulis	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
	Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik sebagai bahan referensi	

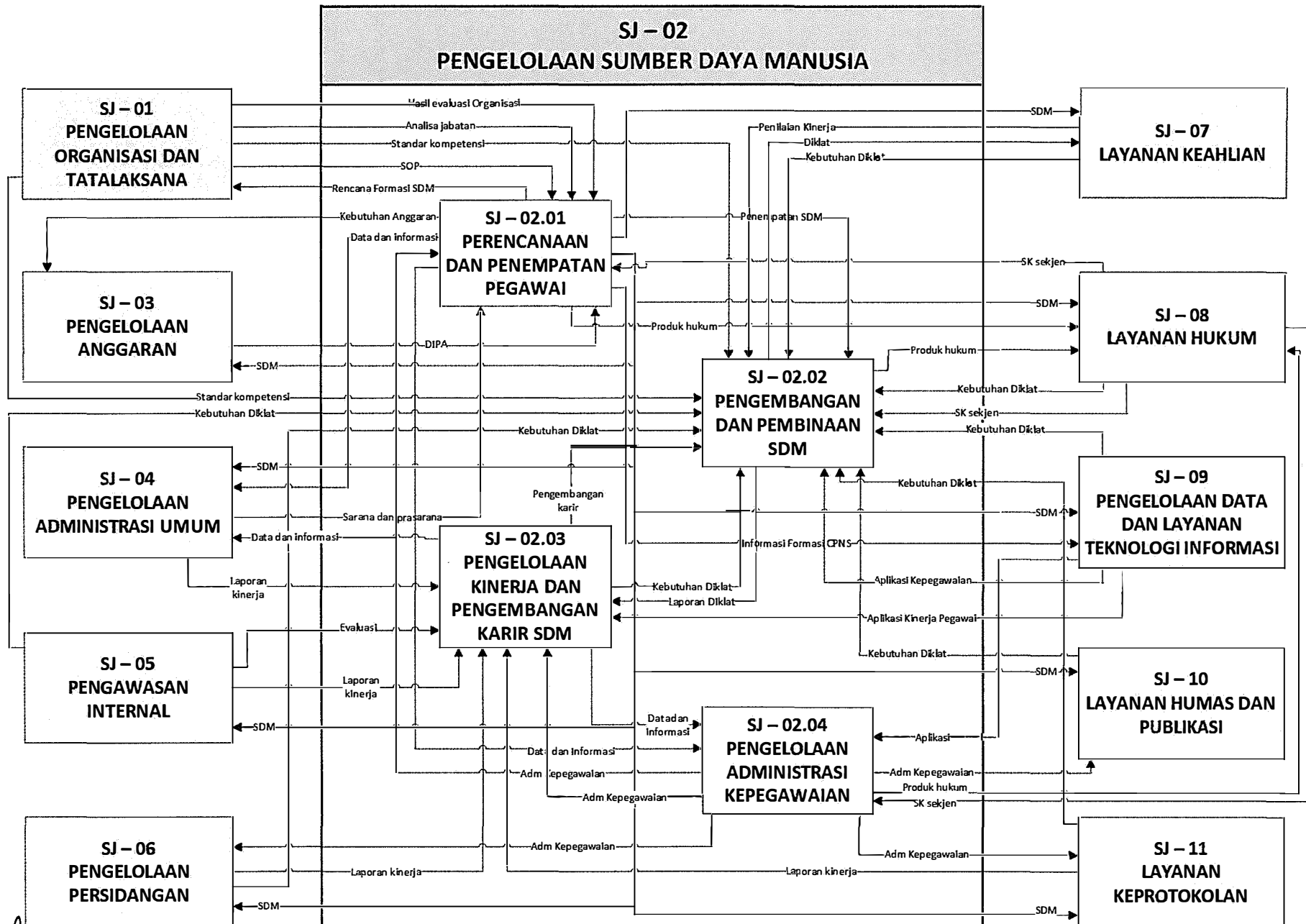
1. PETA PROSES

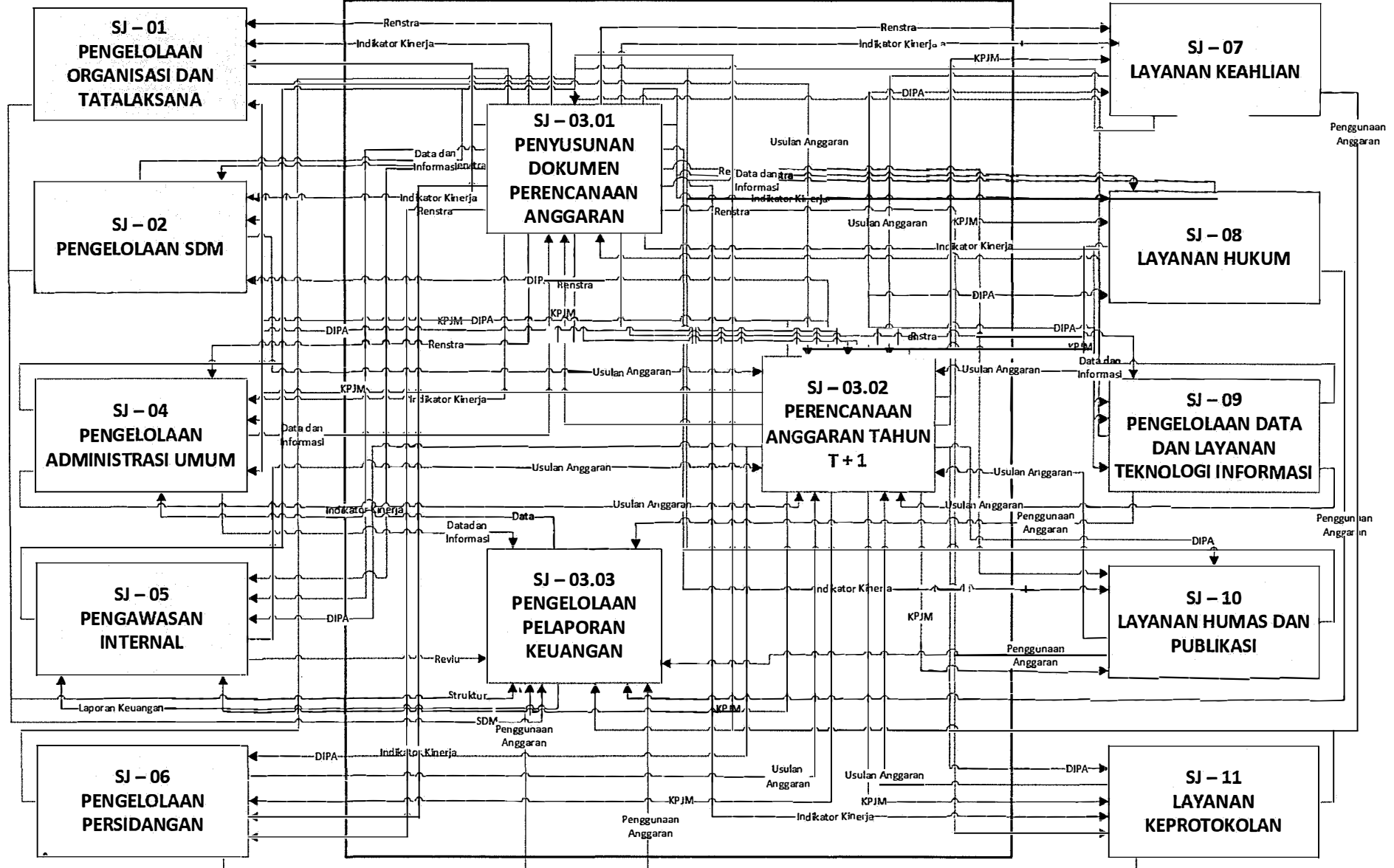
PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

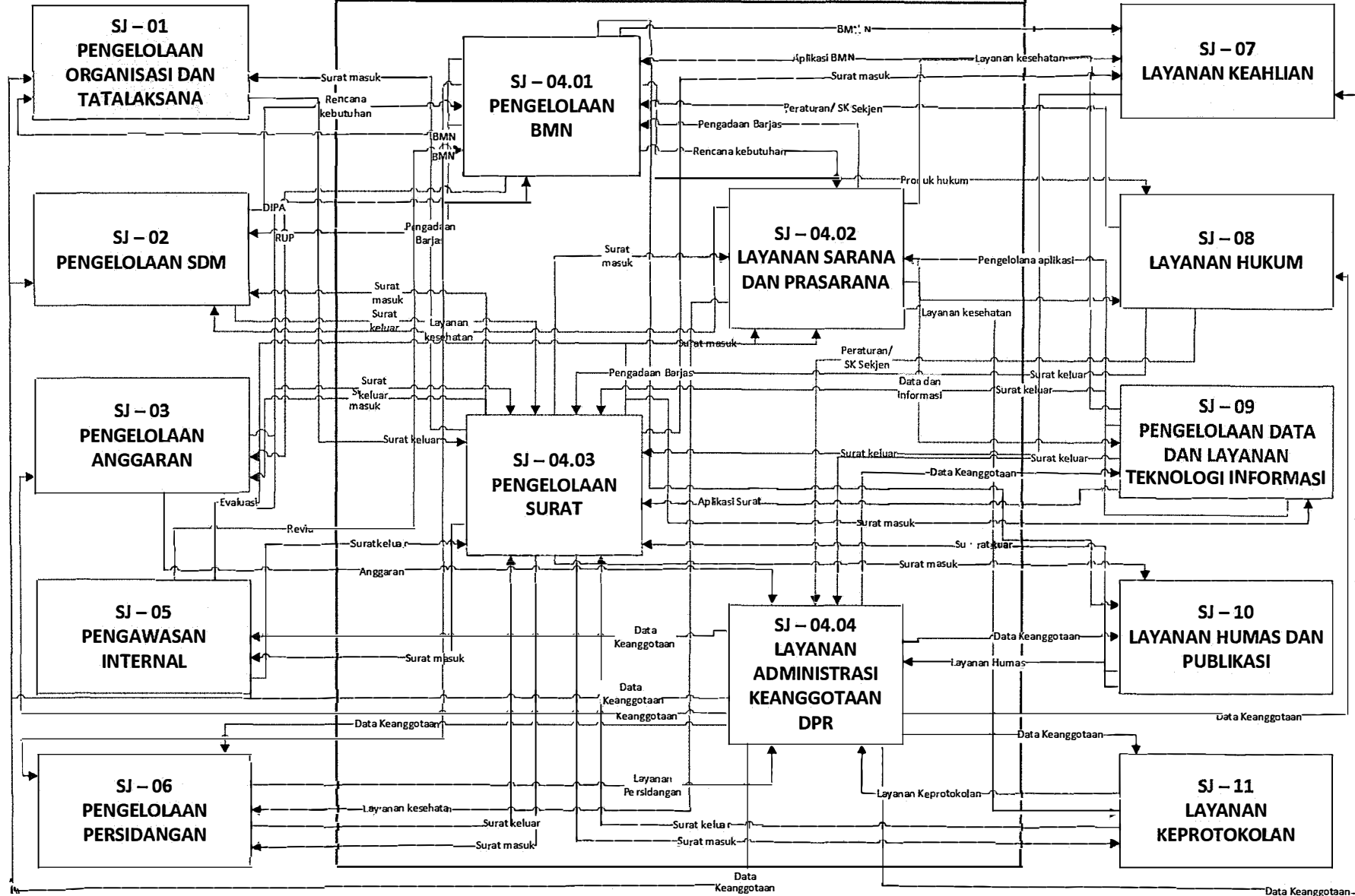


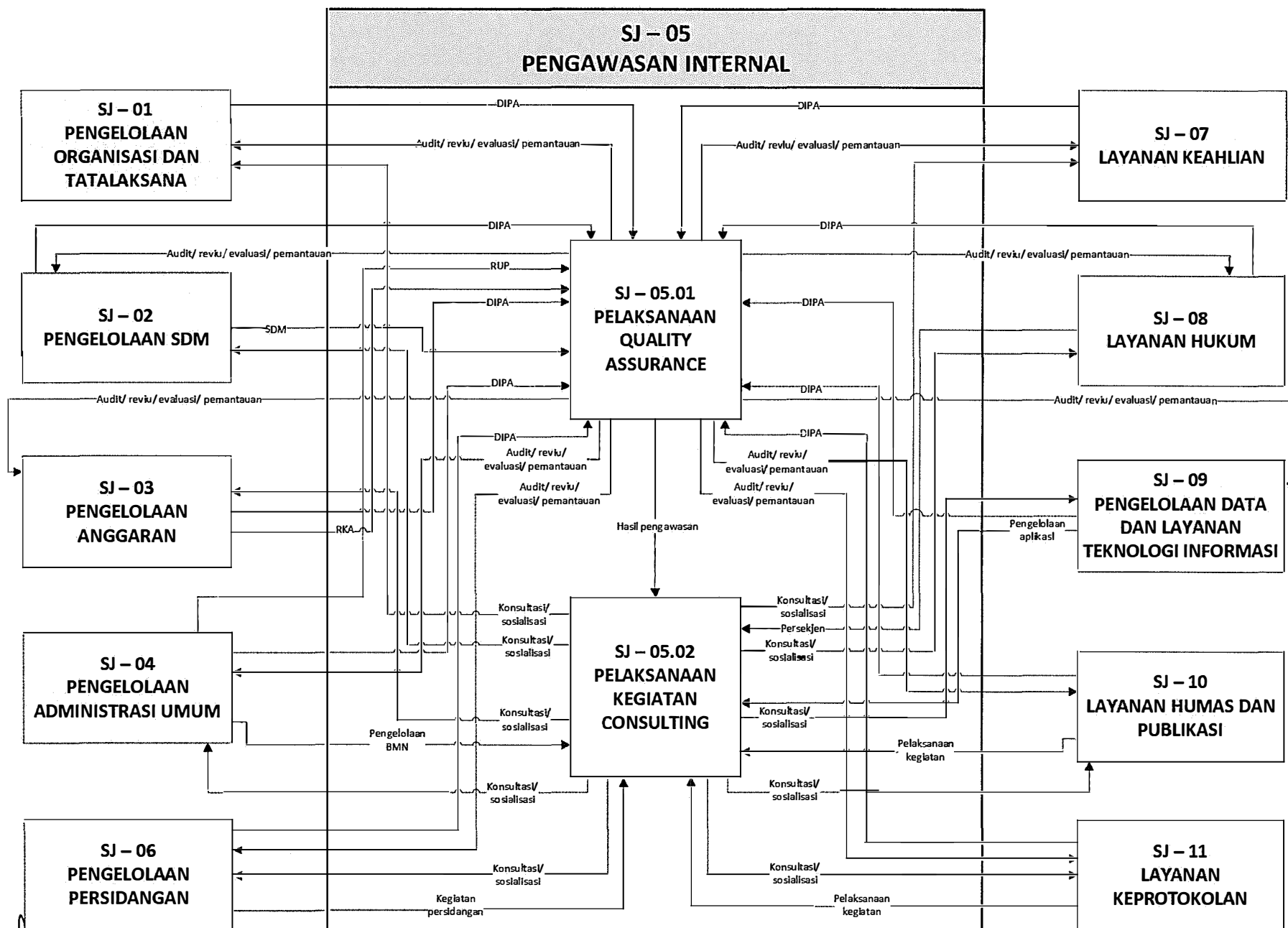
2. PETA SUB PROSES

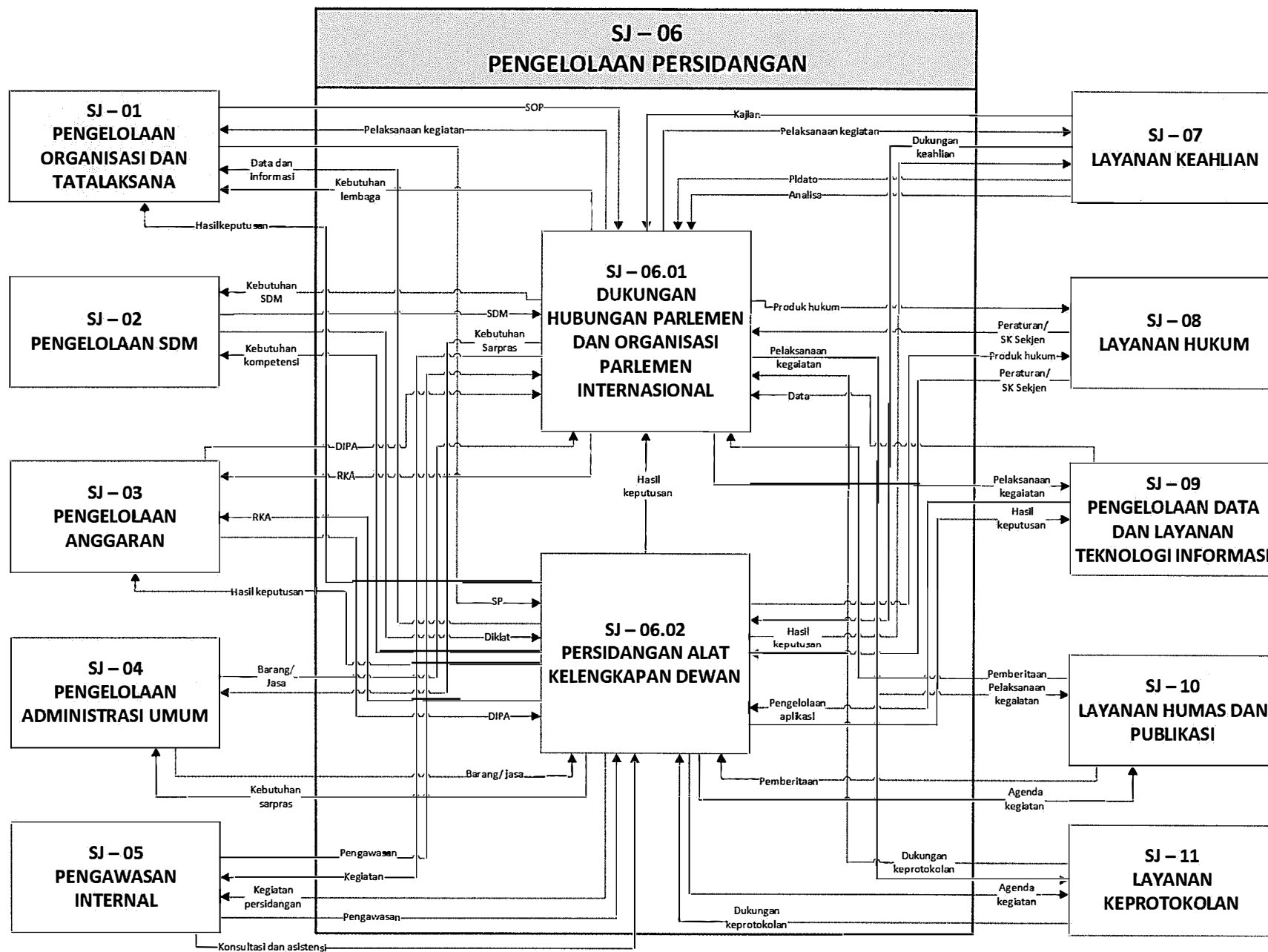


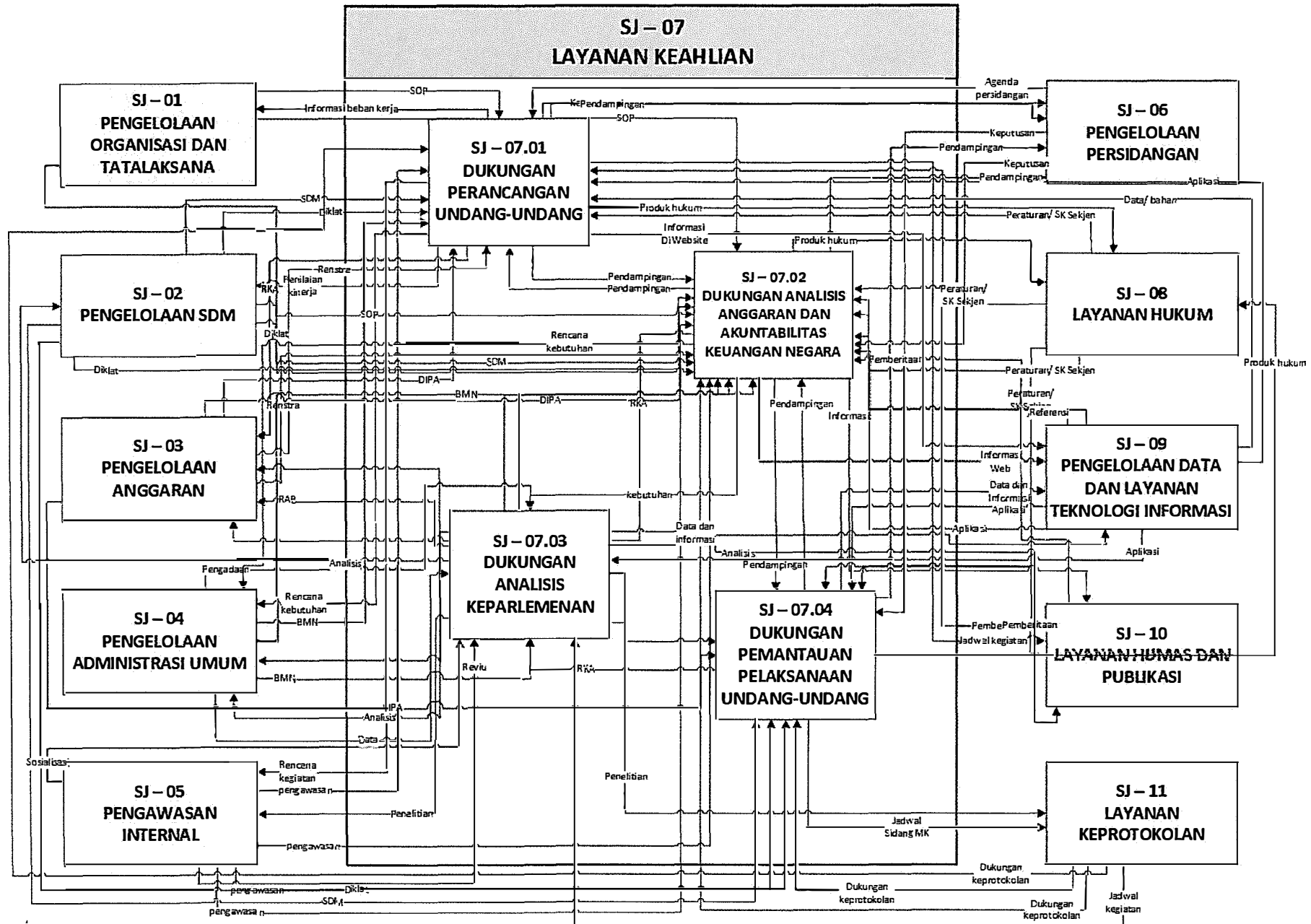


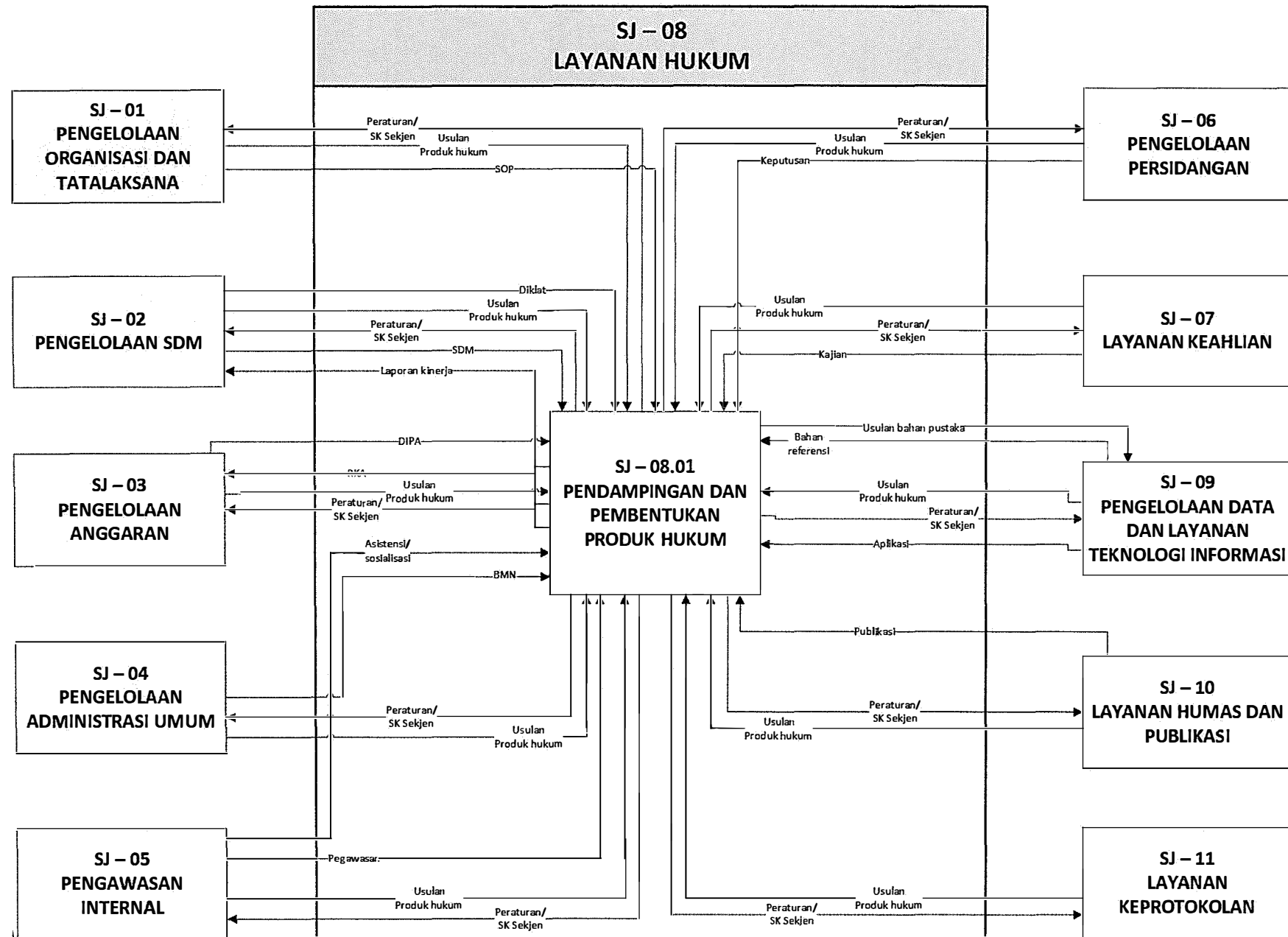


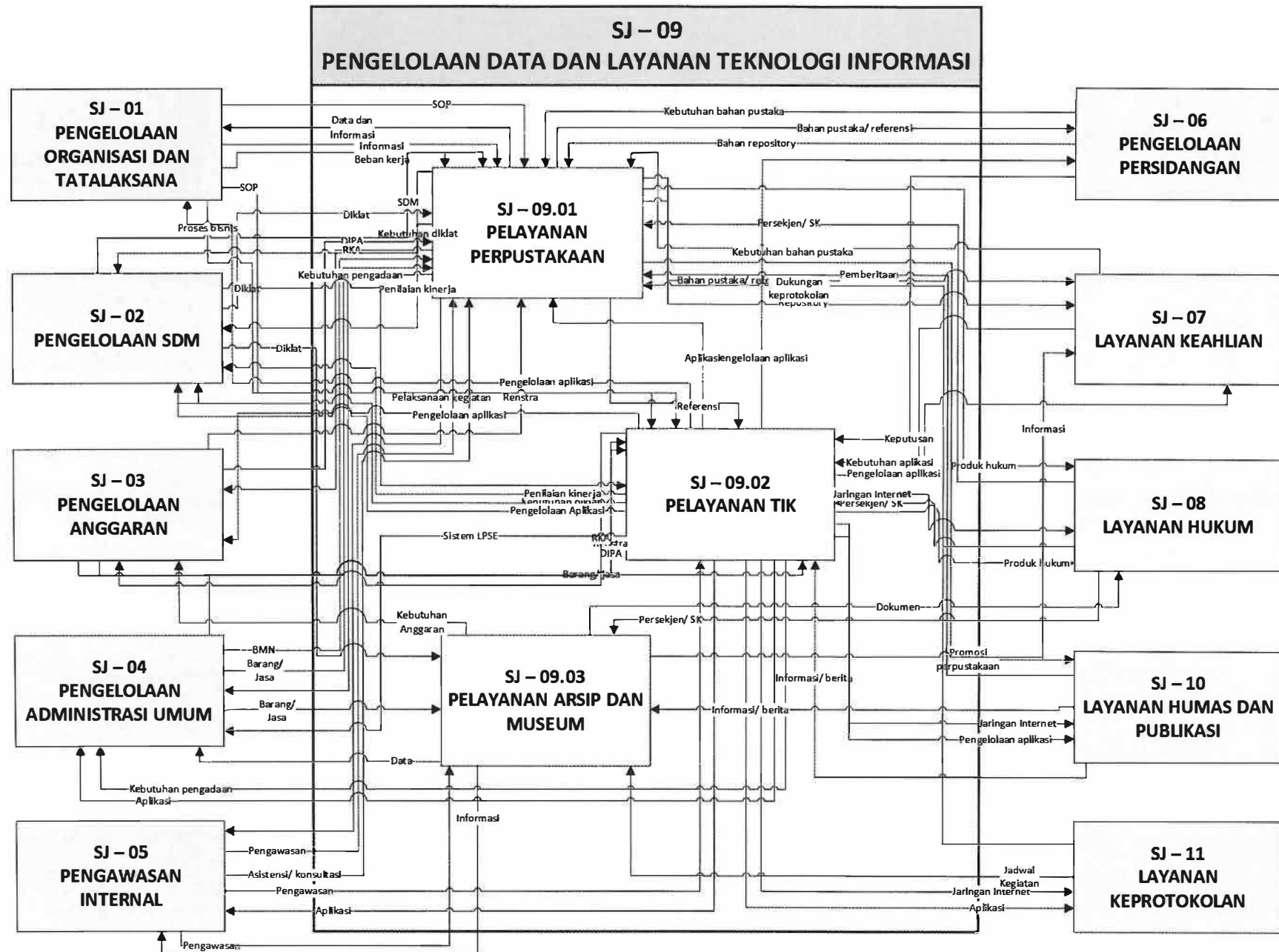


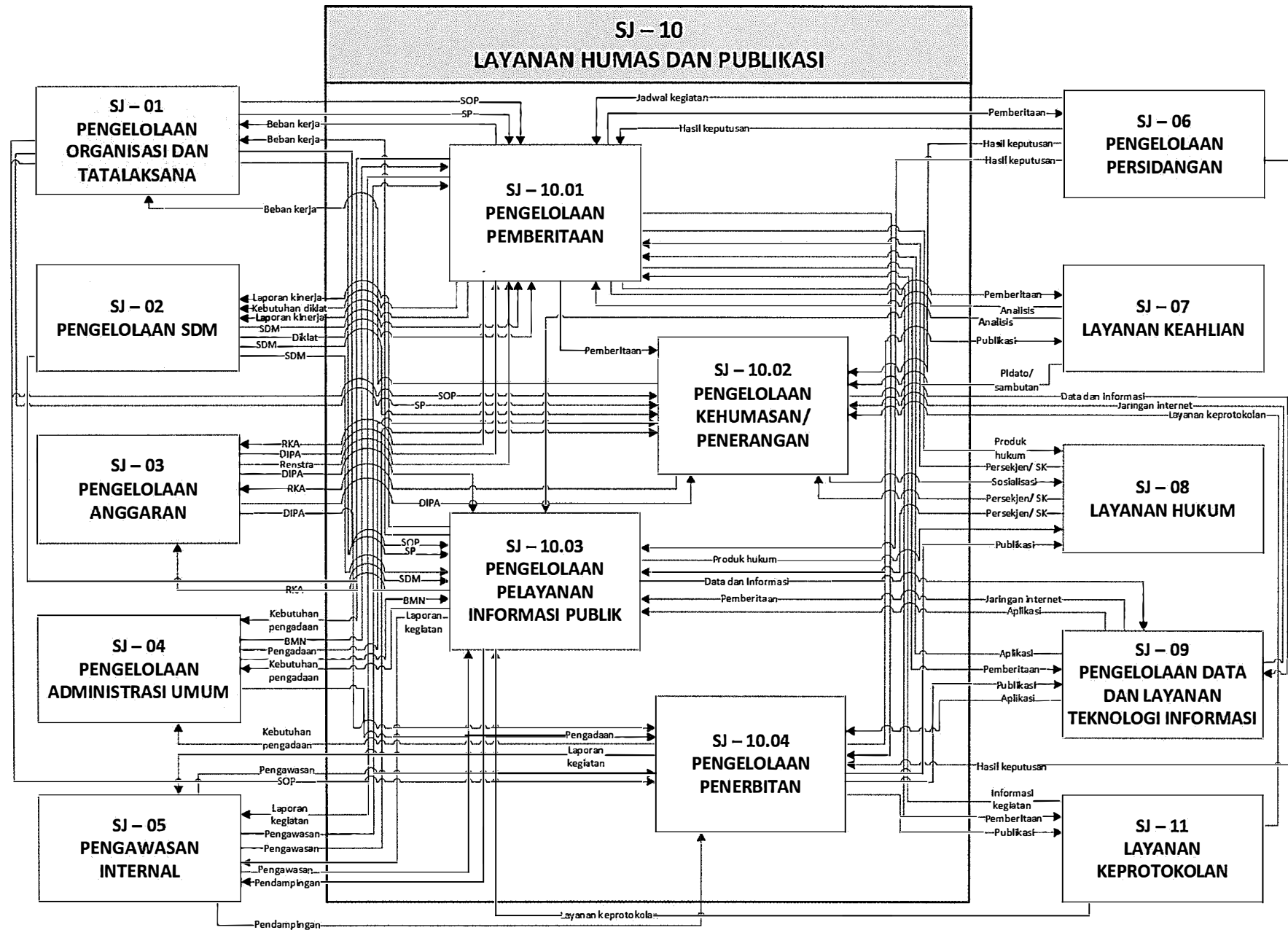


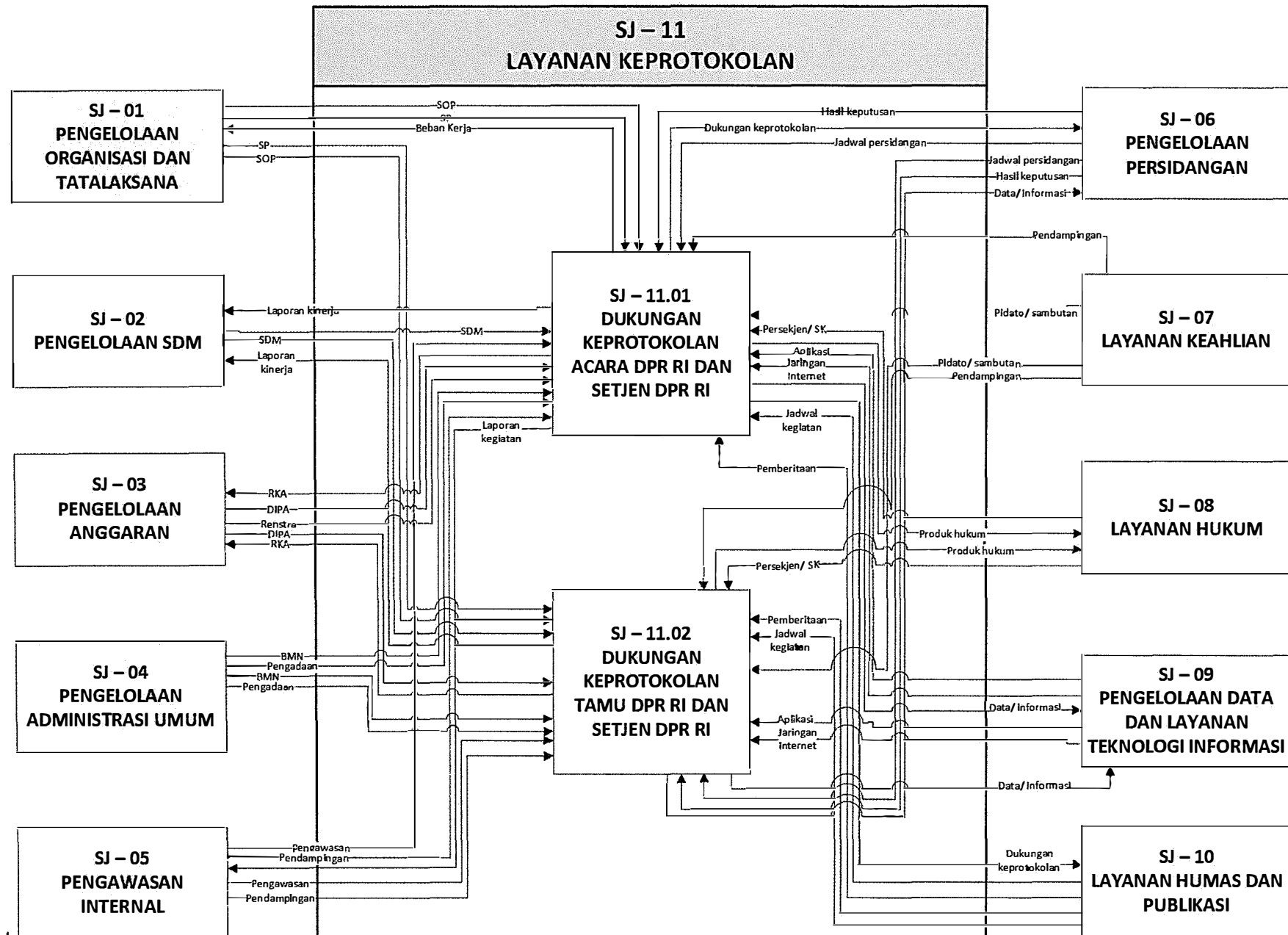






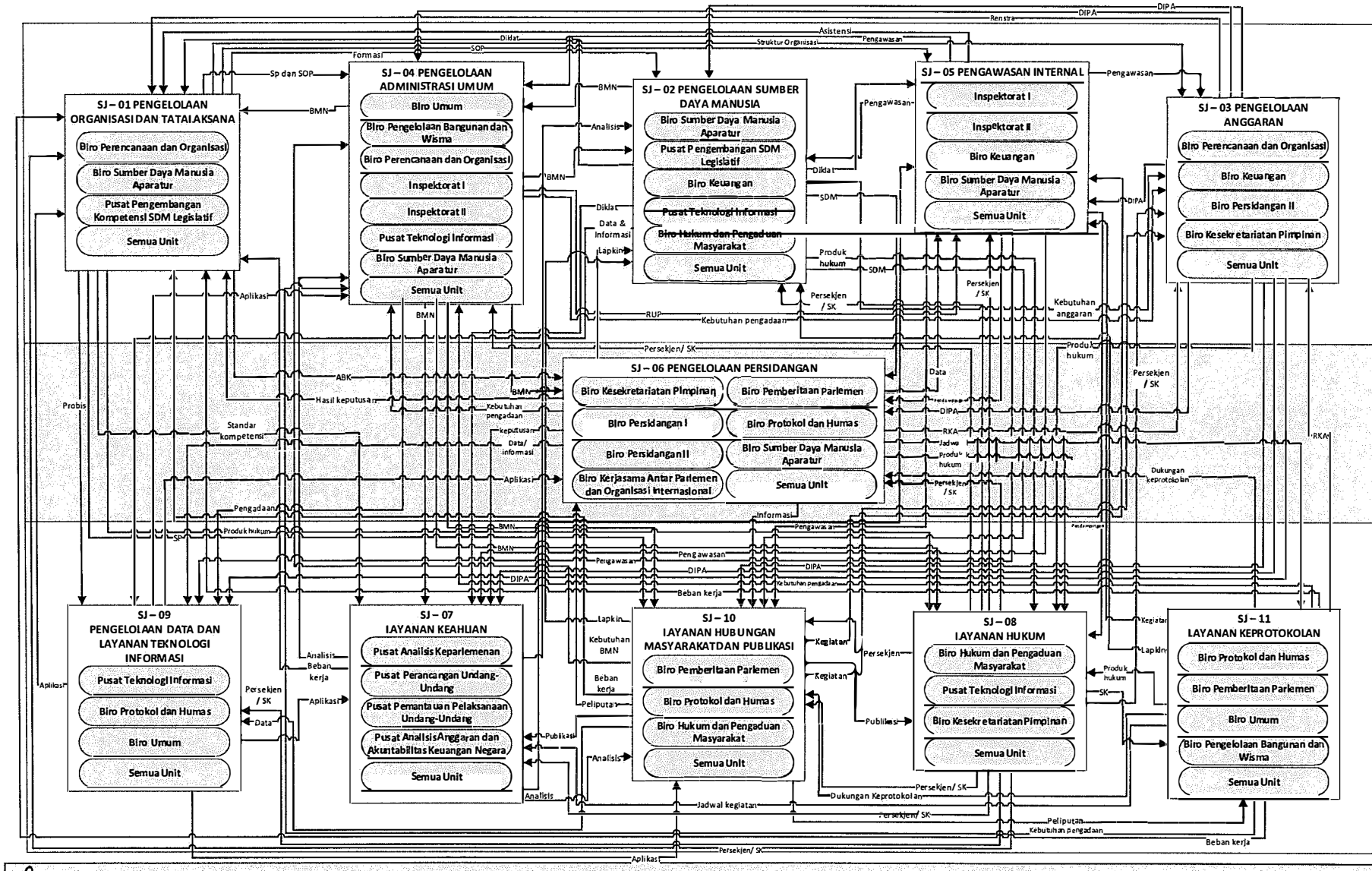




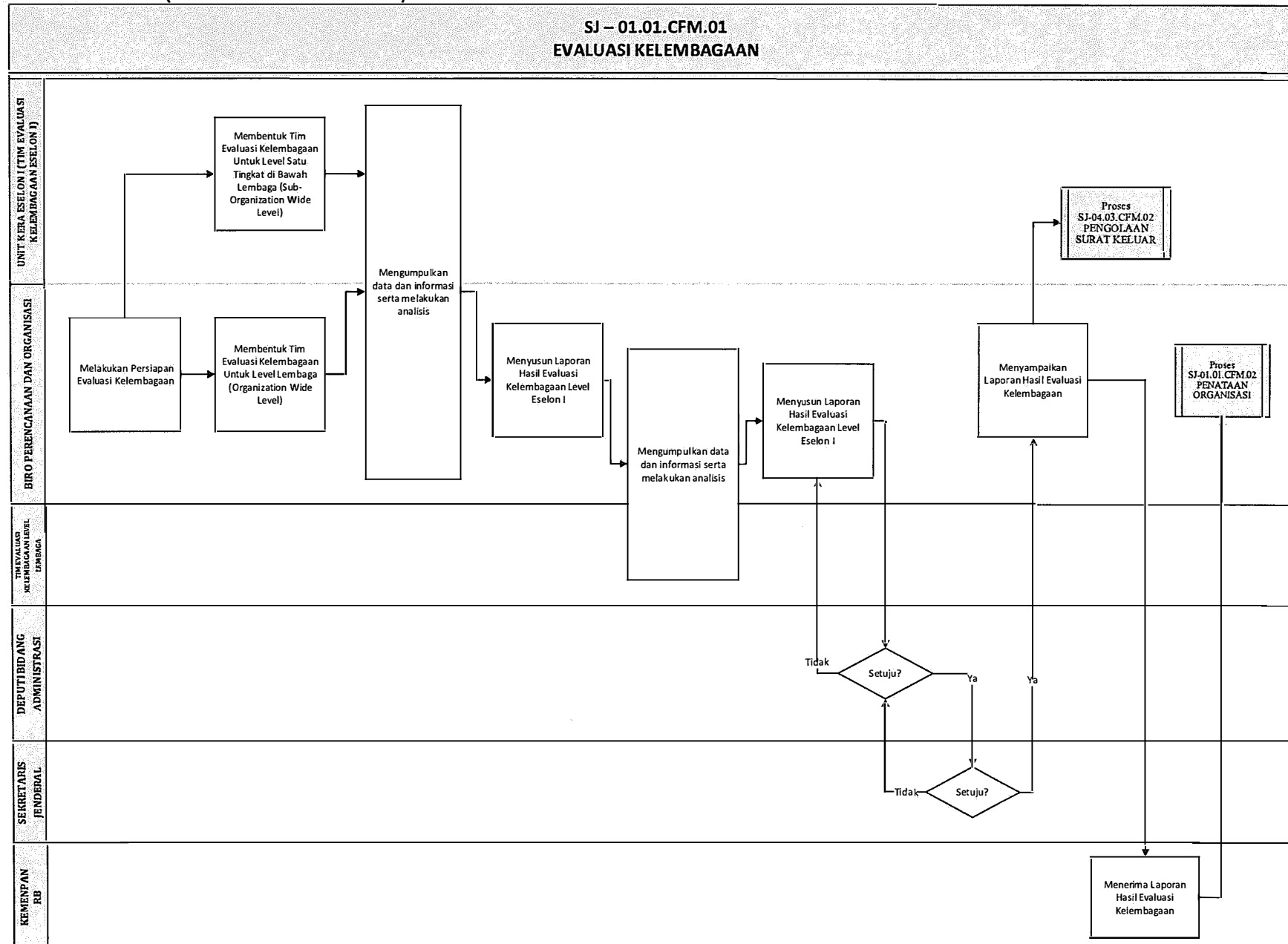


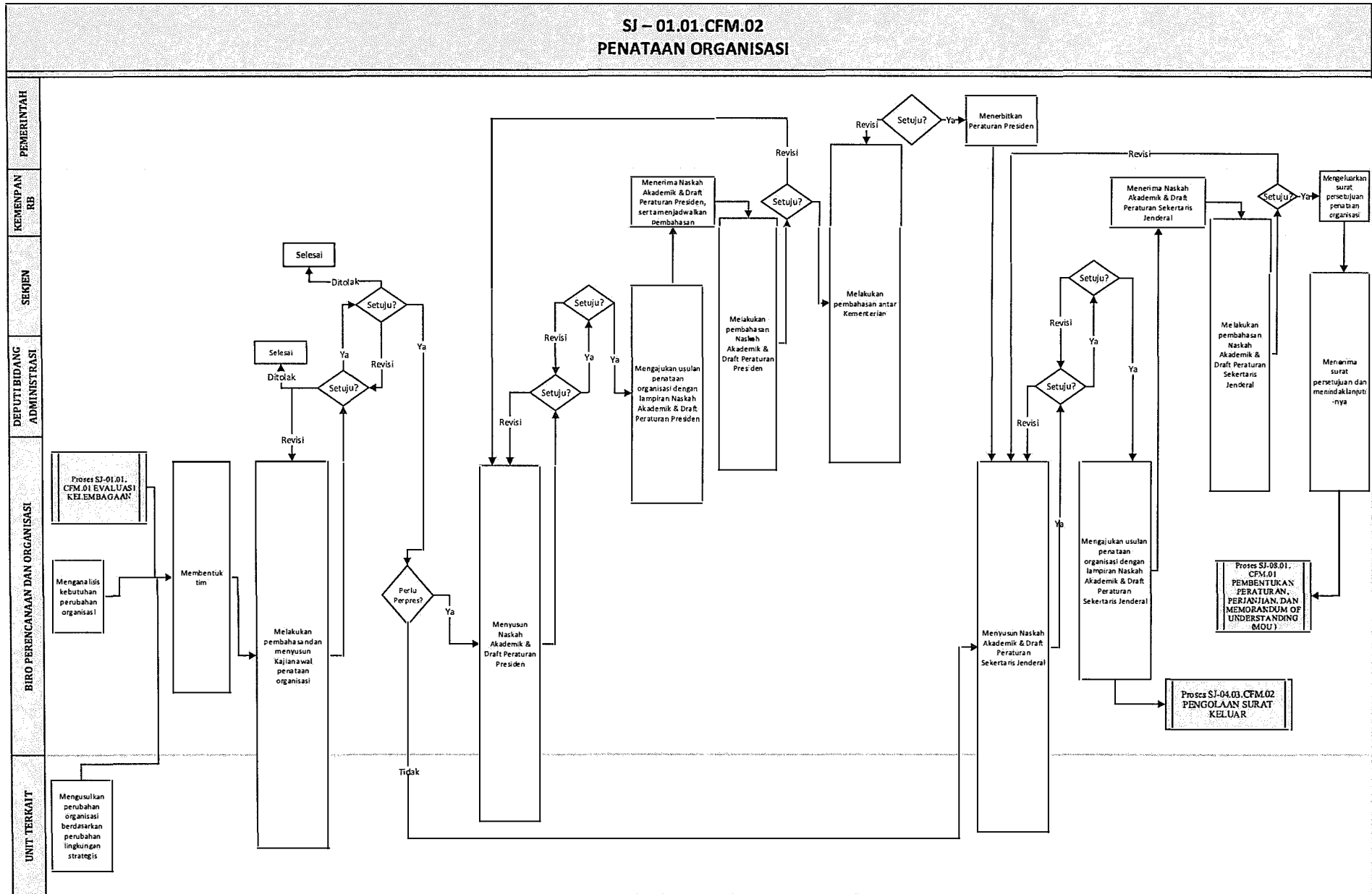
3. PETA RELASI

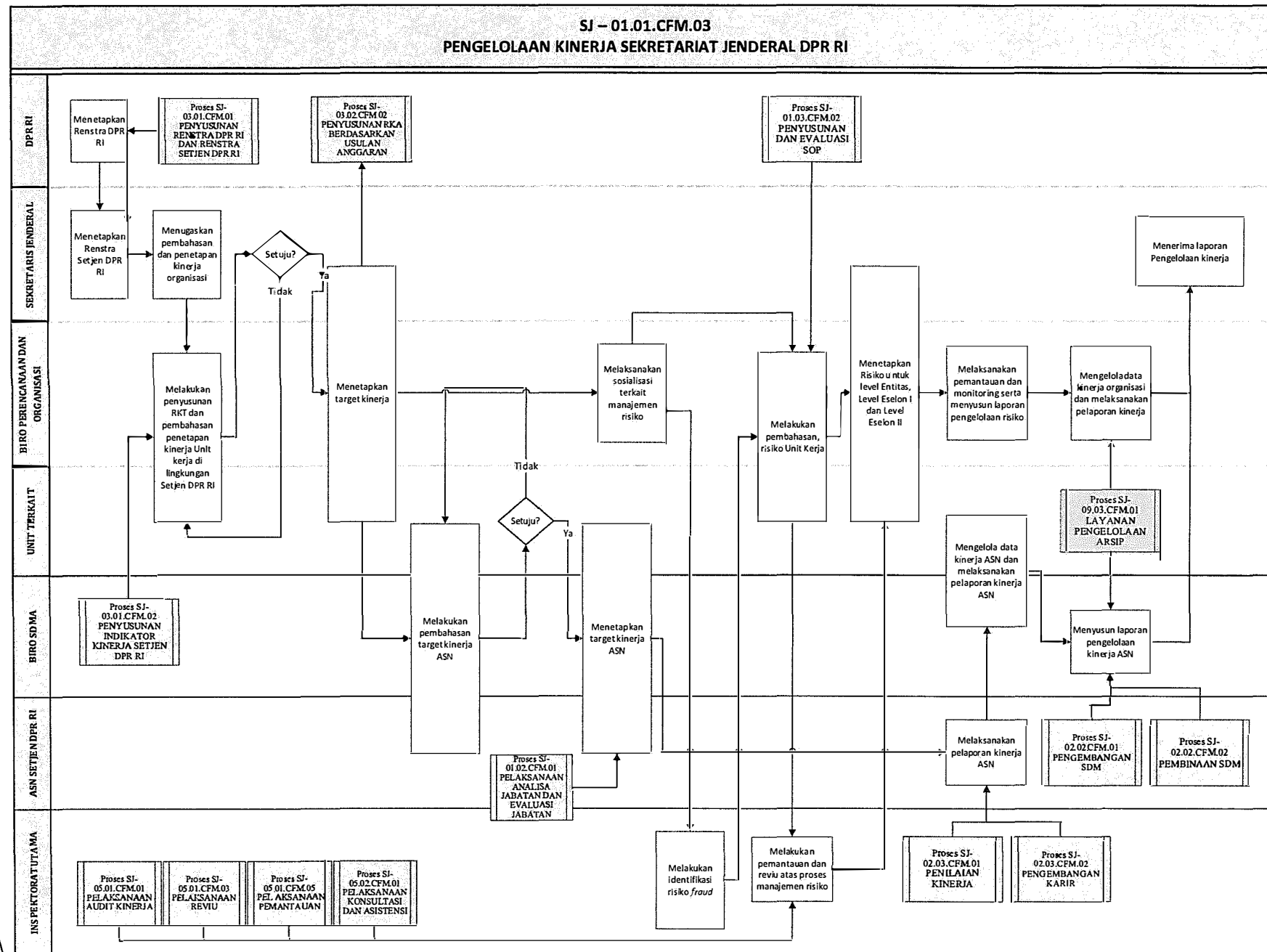
PETA RELASI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

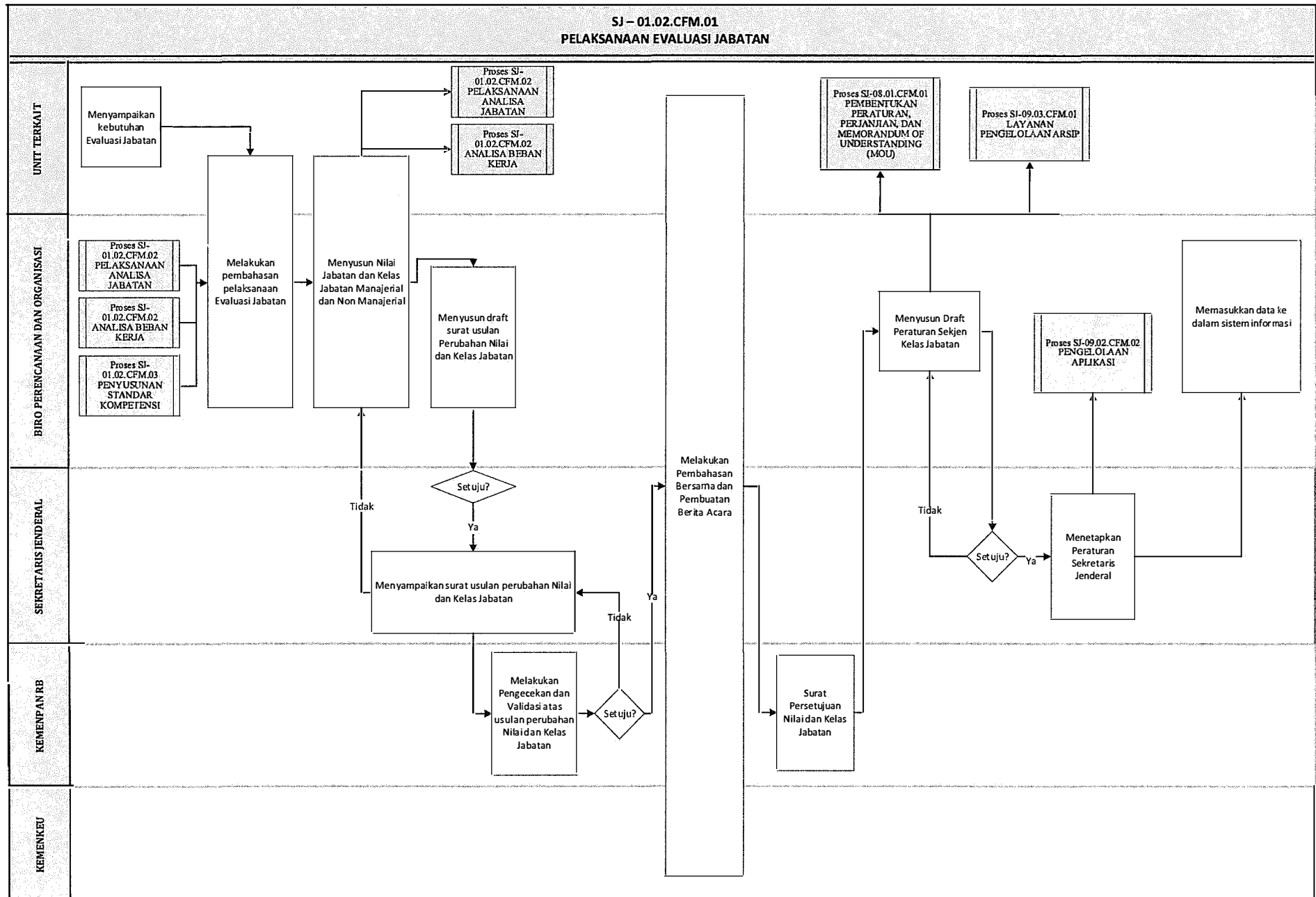


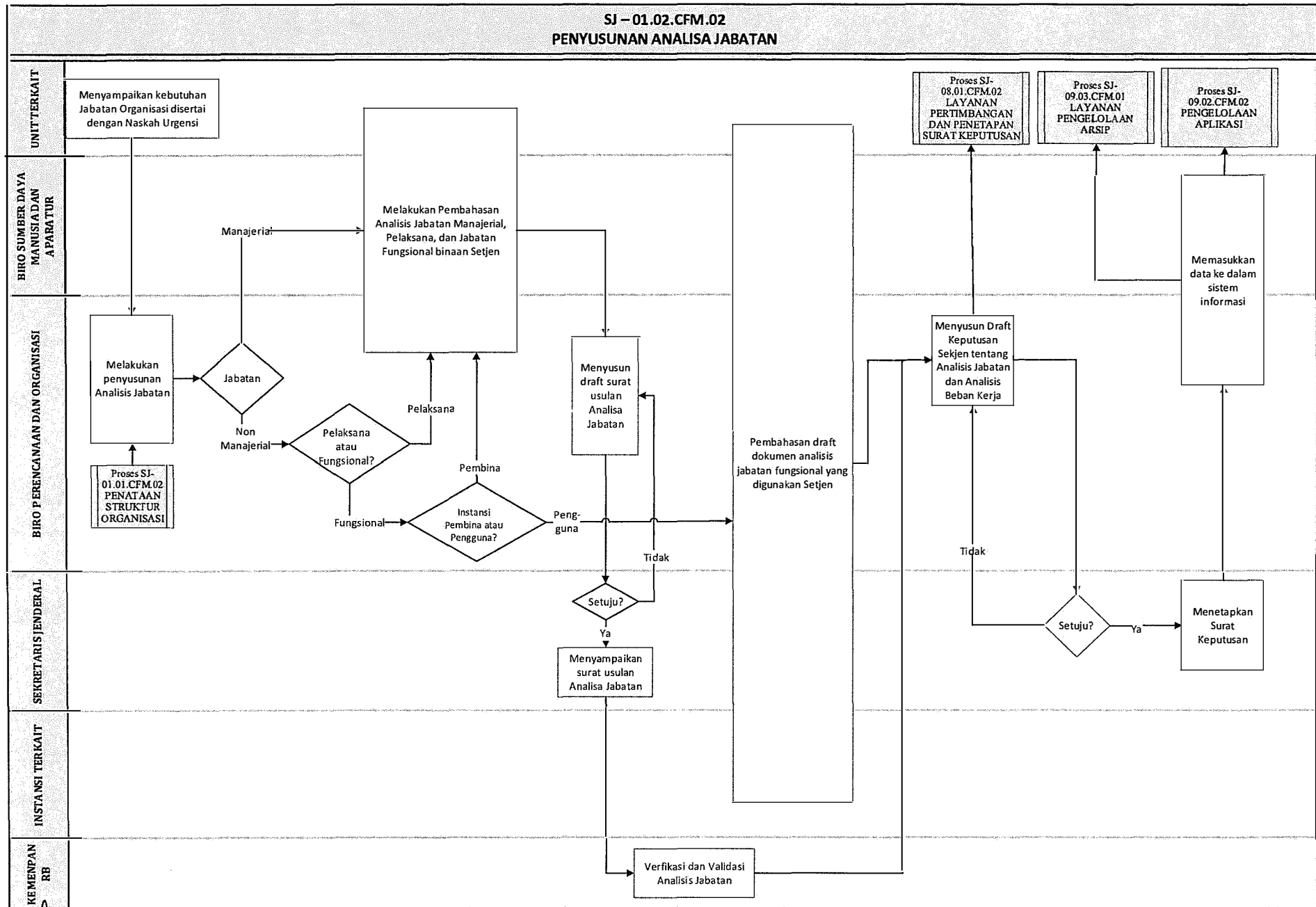
4. PETA LINTAS FUNGSI (CROSS FUNCTIONAL MAP)



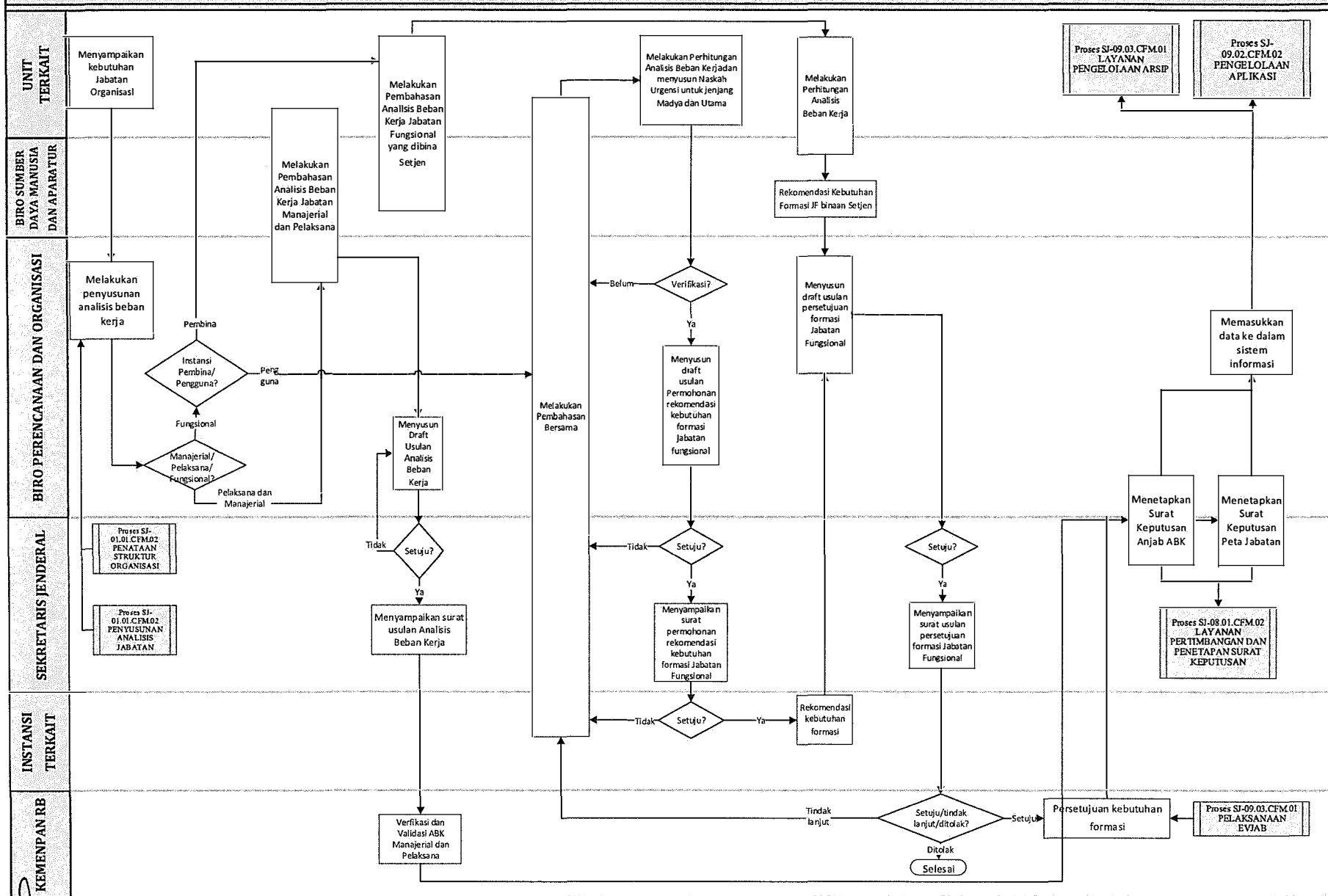


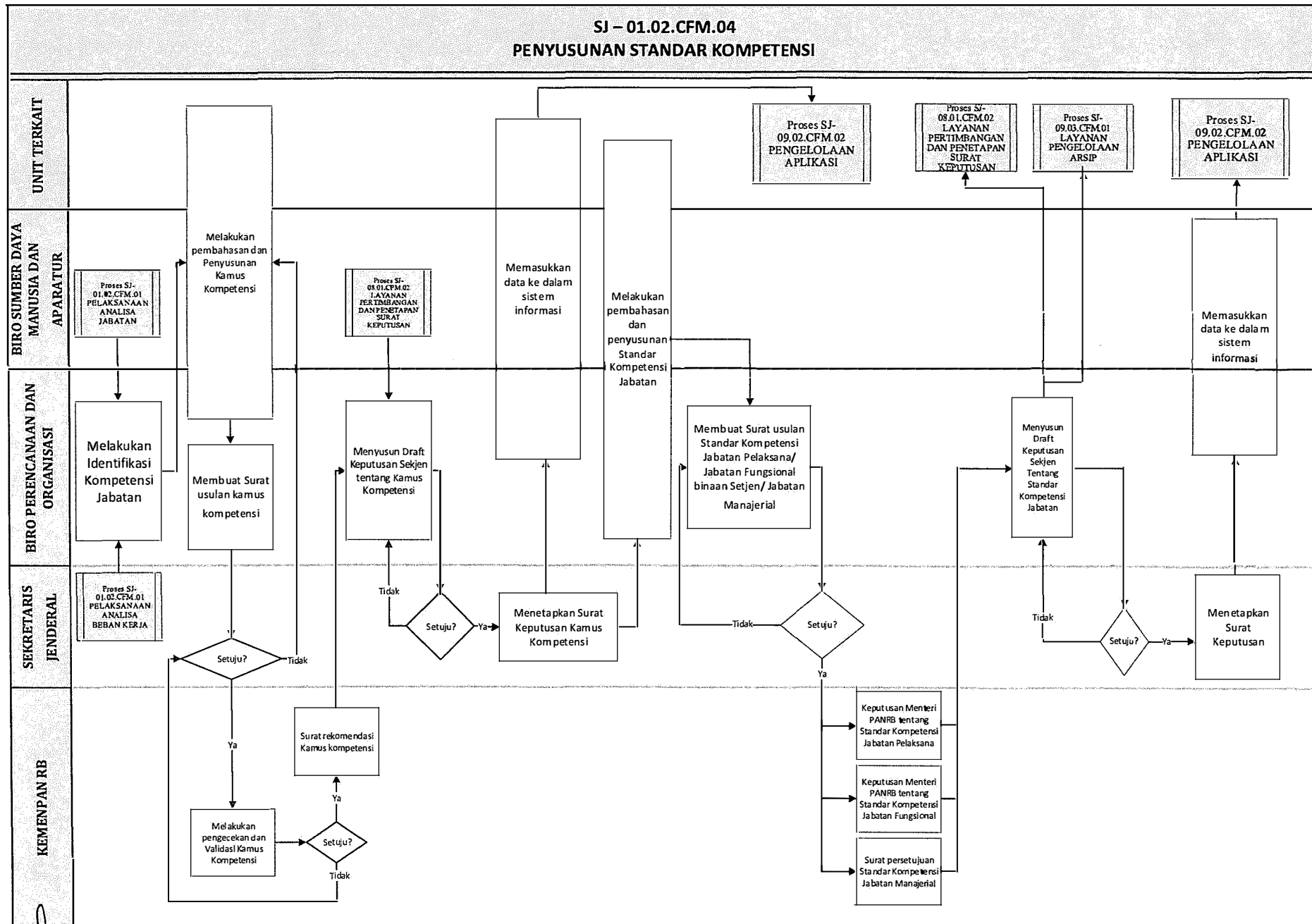




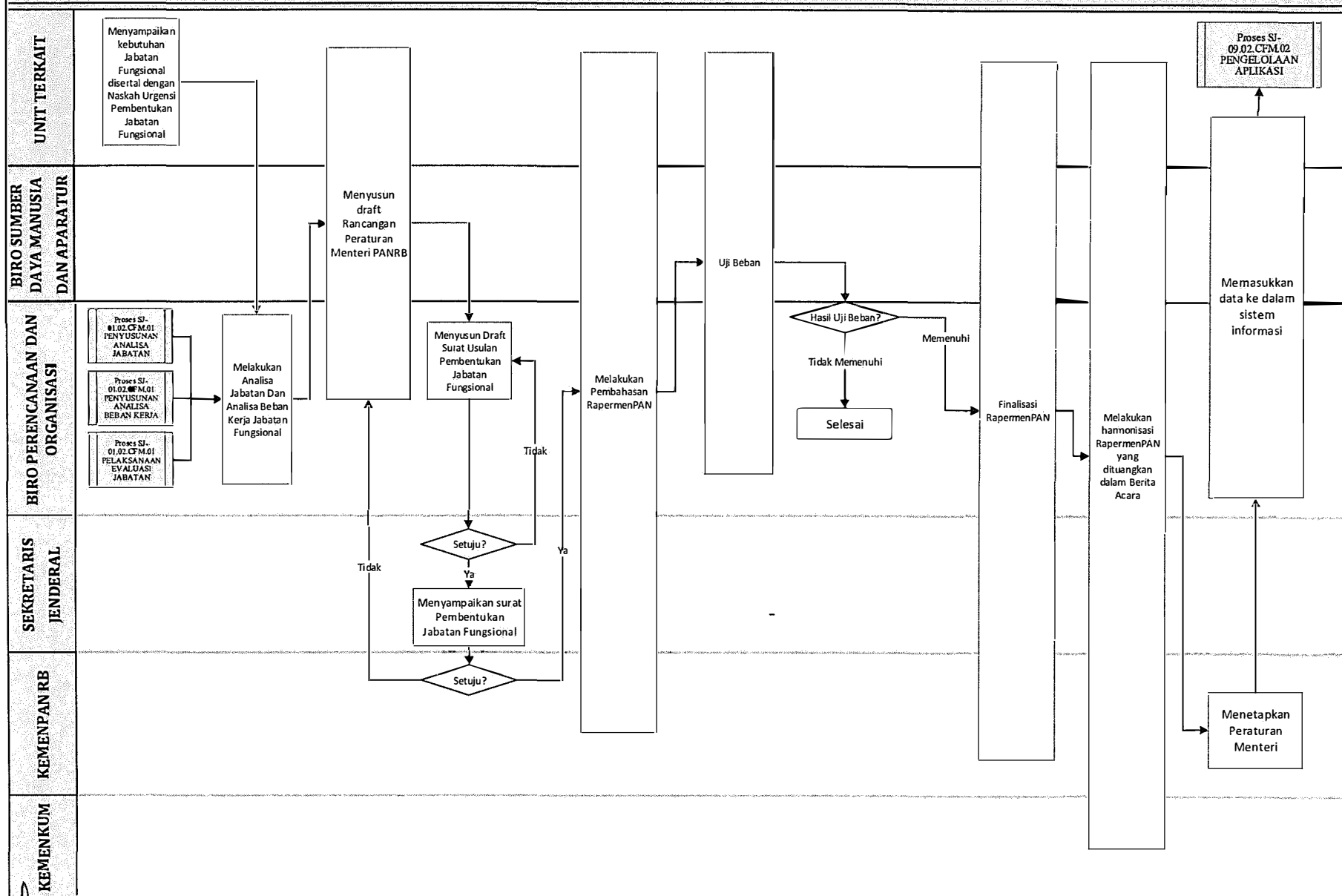


SJ – 01.02.CFM.03
PENYUSUNAN ANALISA BEBAN KERJA

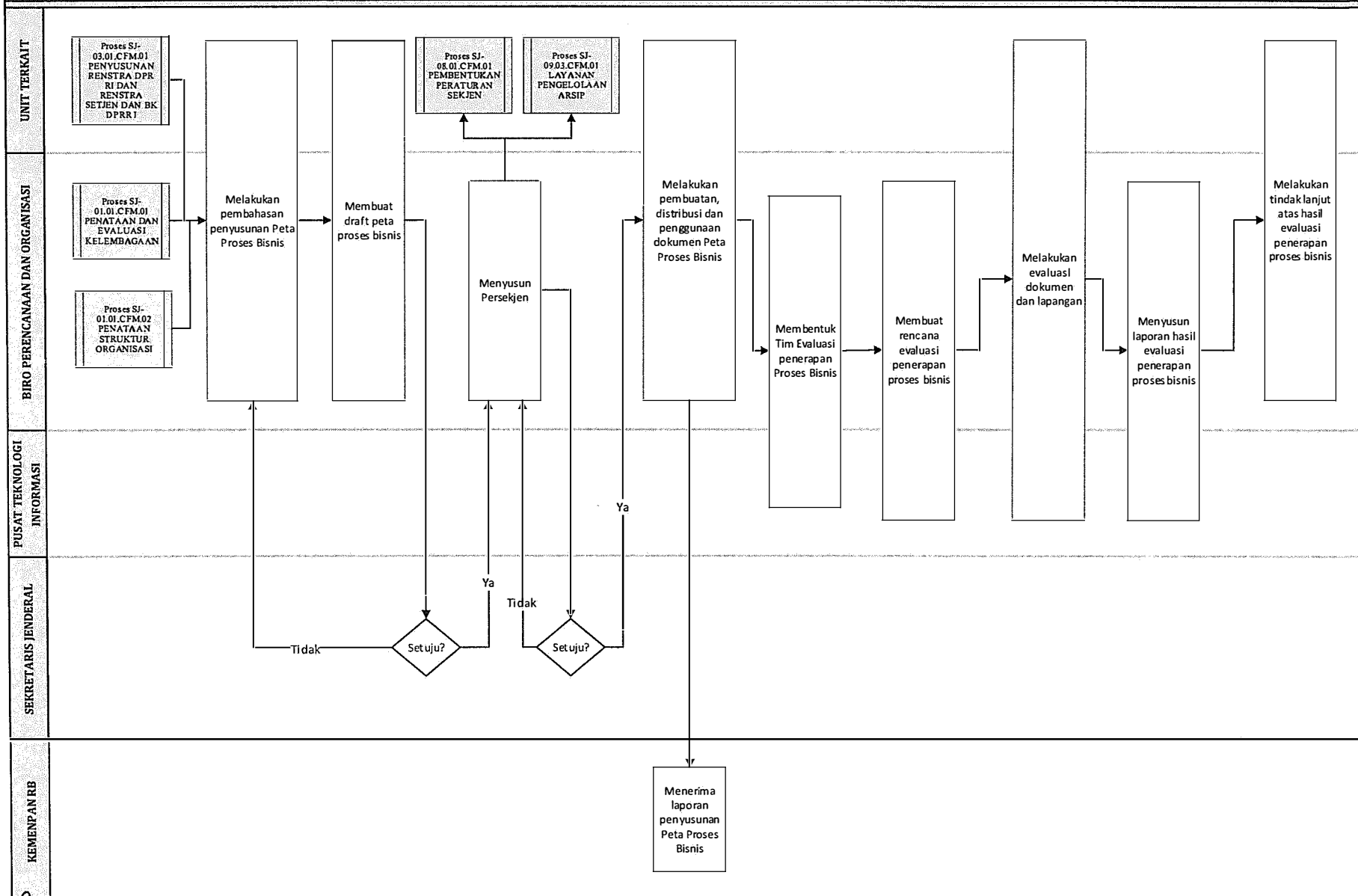




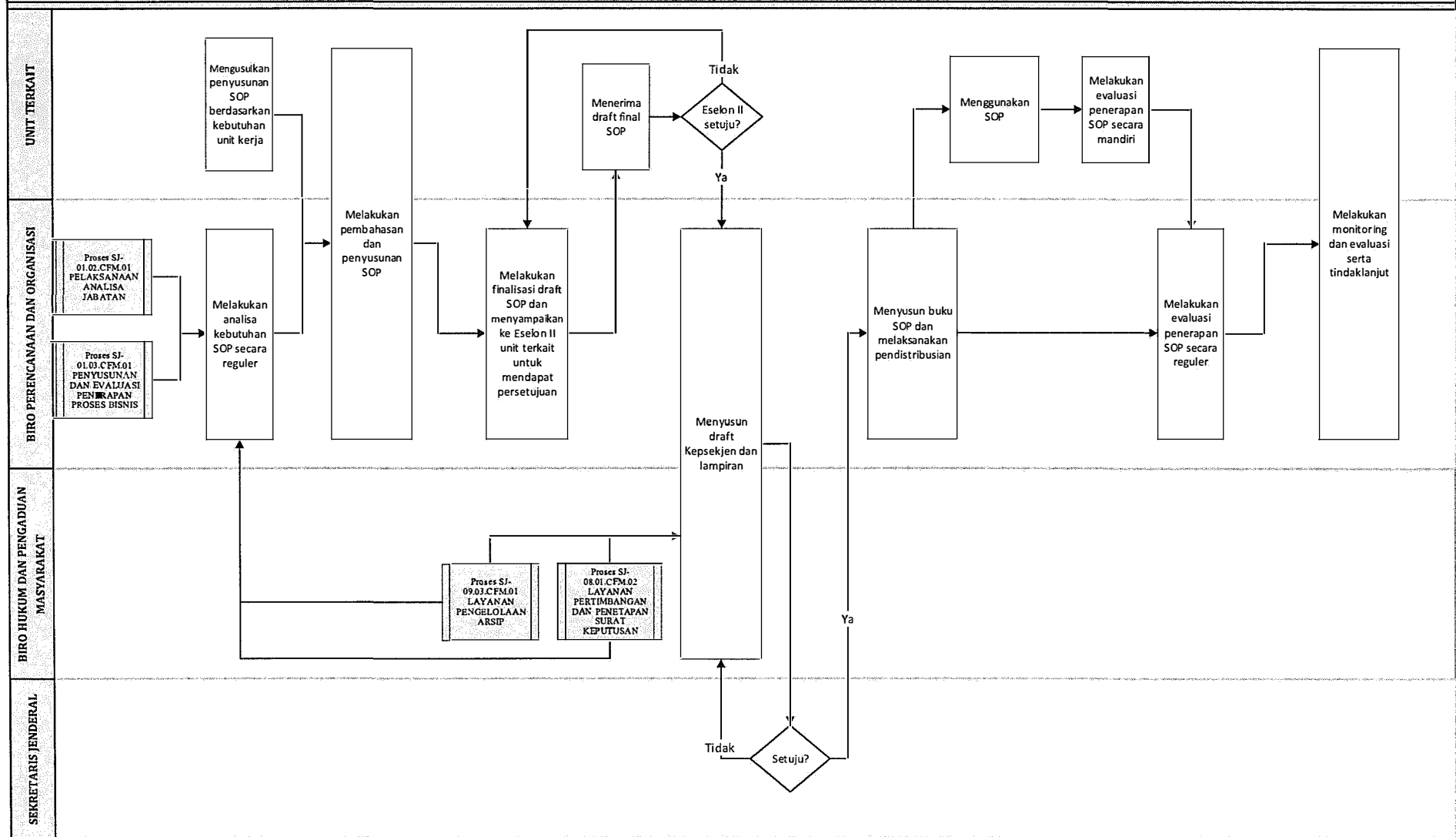
SJ – 01.02.CFM.05 PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL

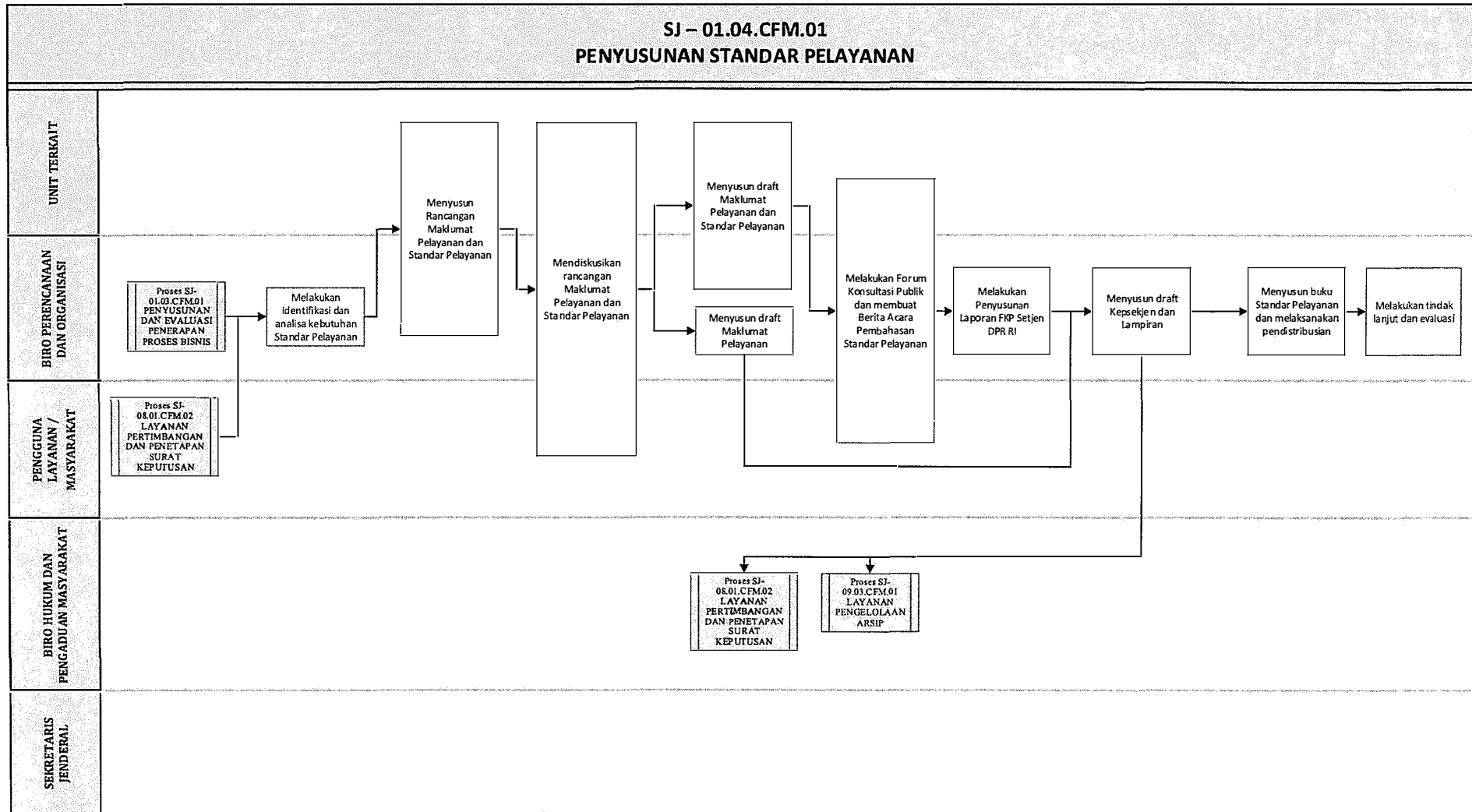


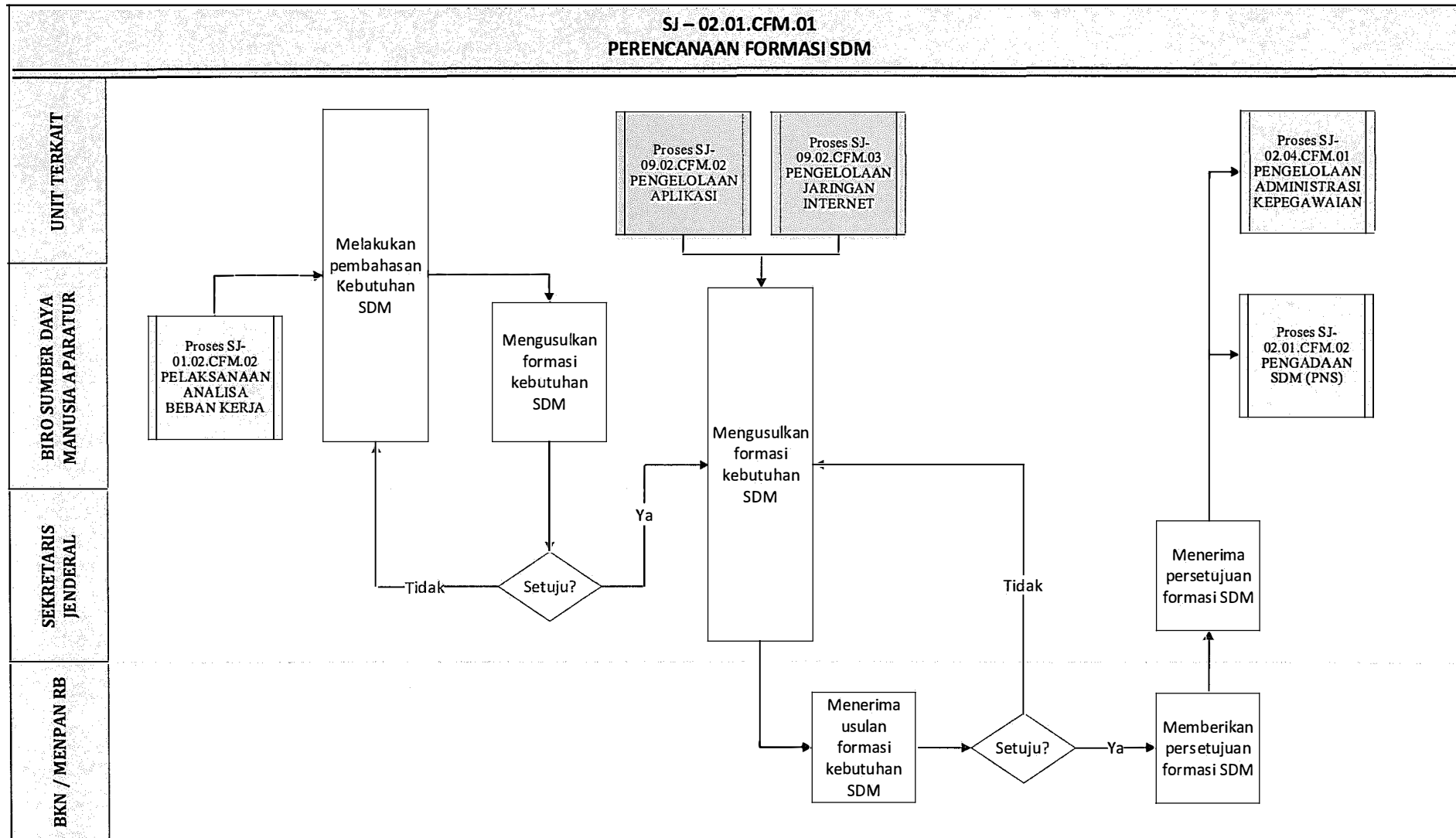
SJ – 01.03.CFM.01
PENYUSUNAN DAN EVALUASI PENERAPAN PROSES BISNIS



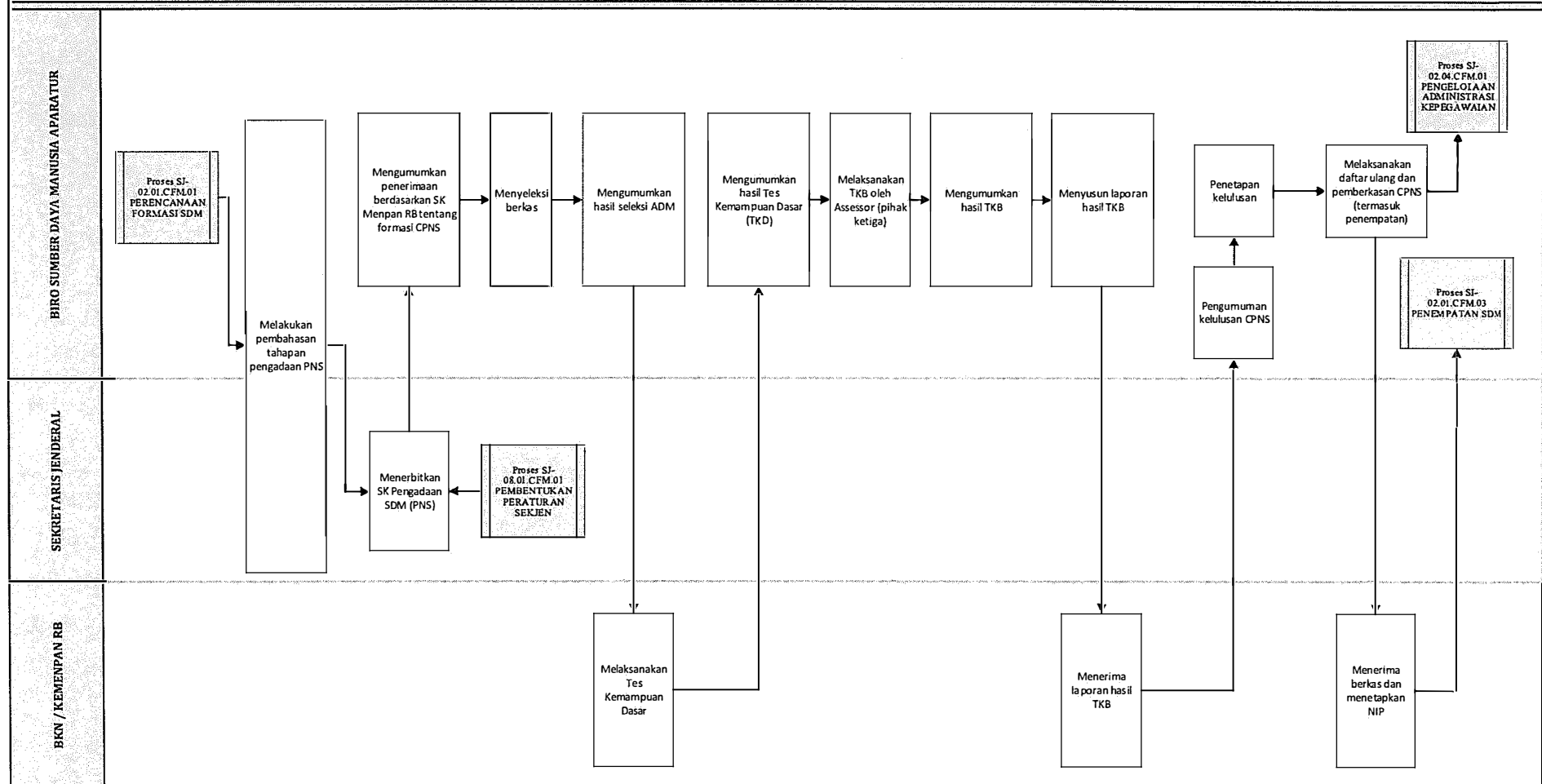
SJ – 01.03.CFM.02
PENYUSUNAN DAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



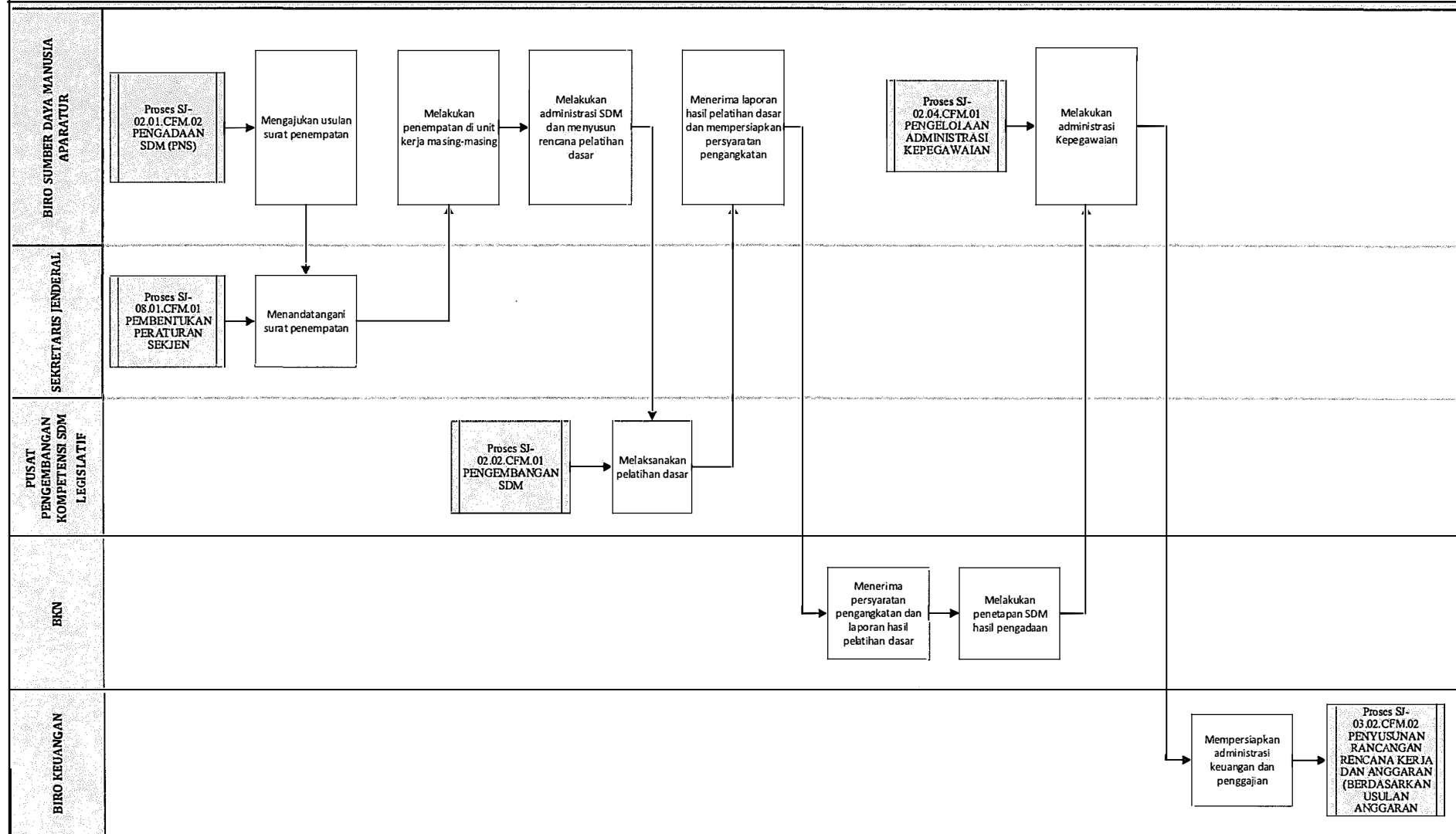


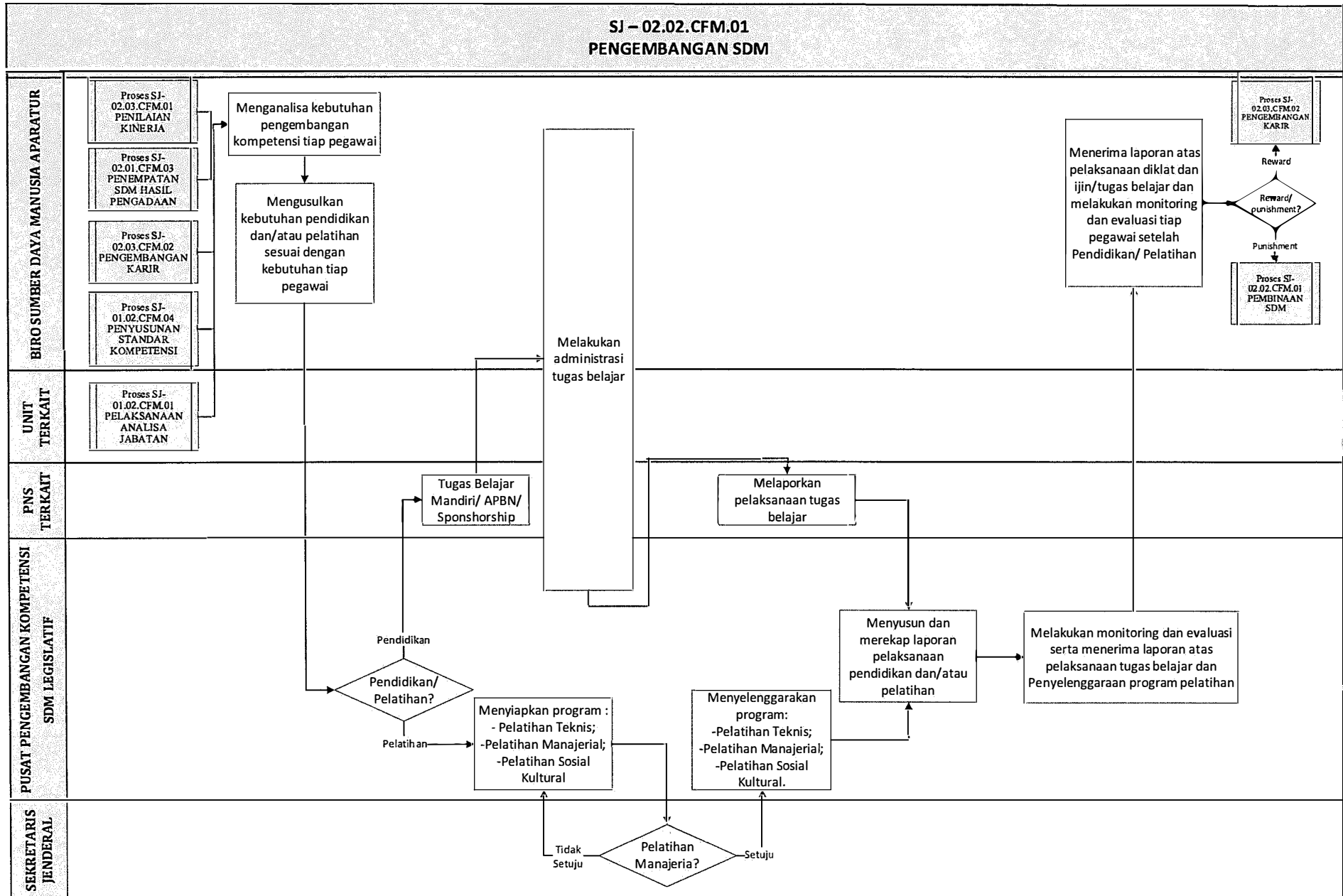


SJ – 02.01.CFM.02 PENGADAAN SDM (PNS)

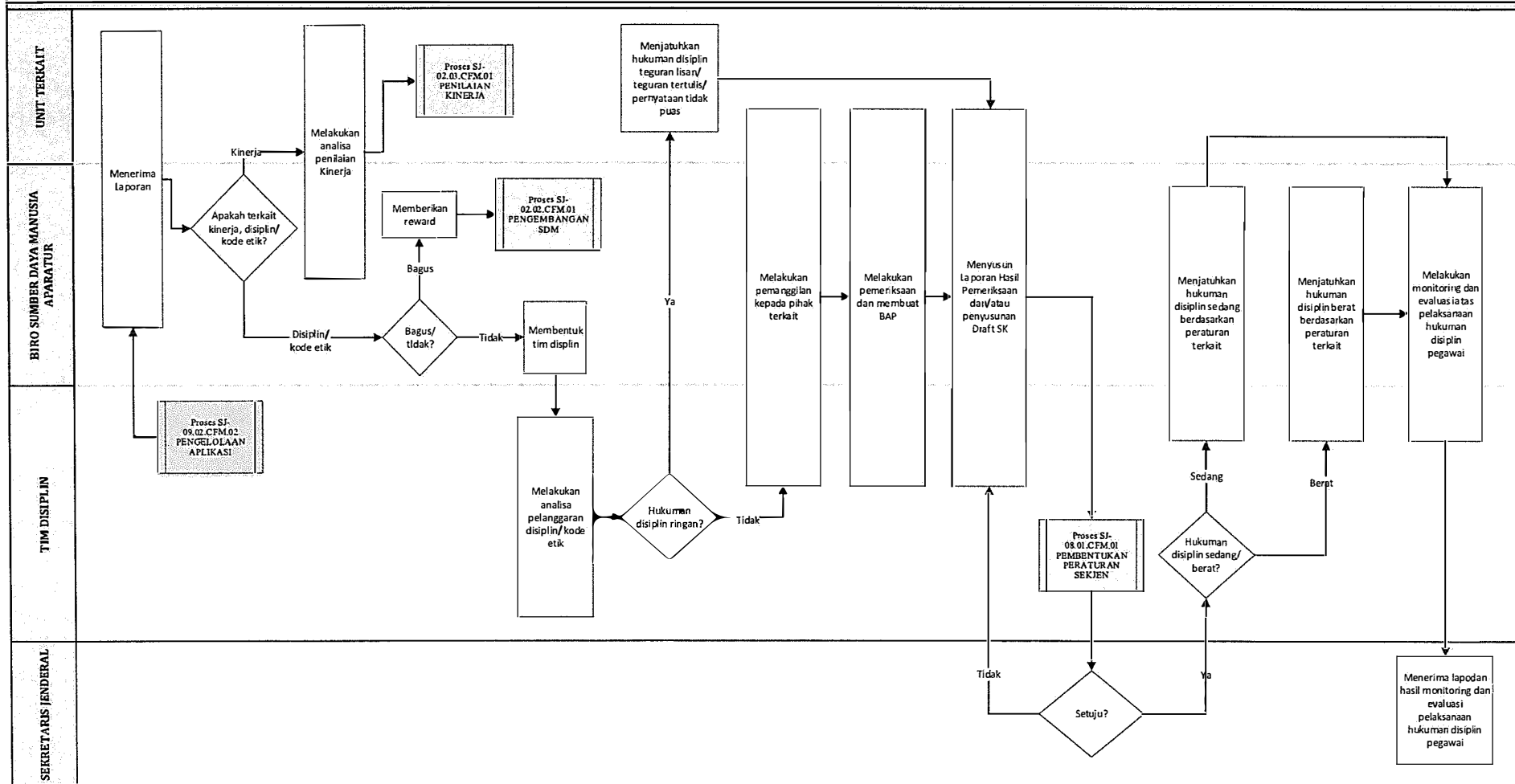


**SJ – 02.01.CFM.03
PENEMPATAN SDM HASIL PENGADAAN**

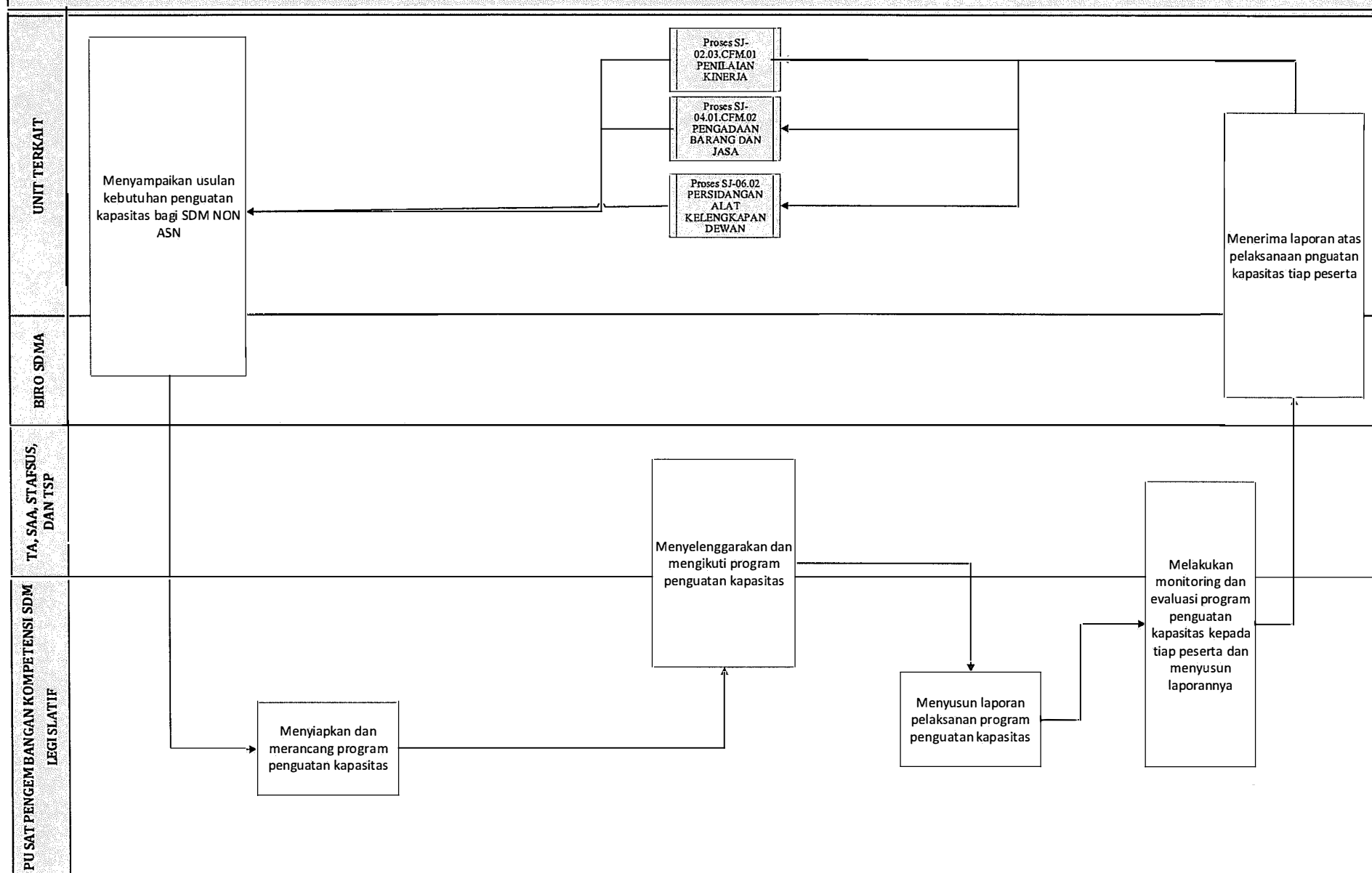




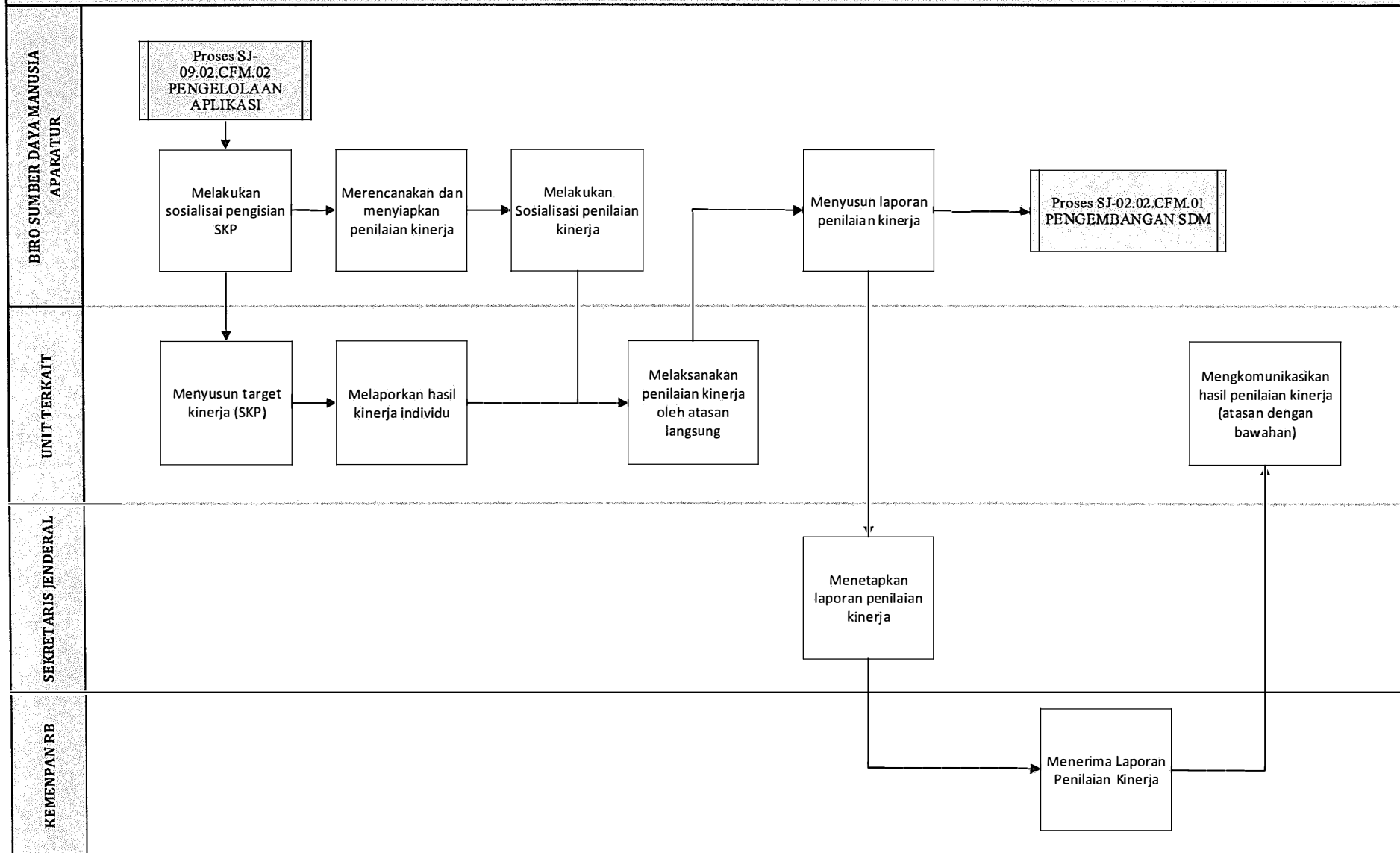
SJ – 02.02.CFM.02 PEMBINAAN SDM



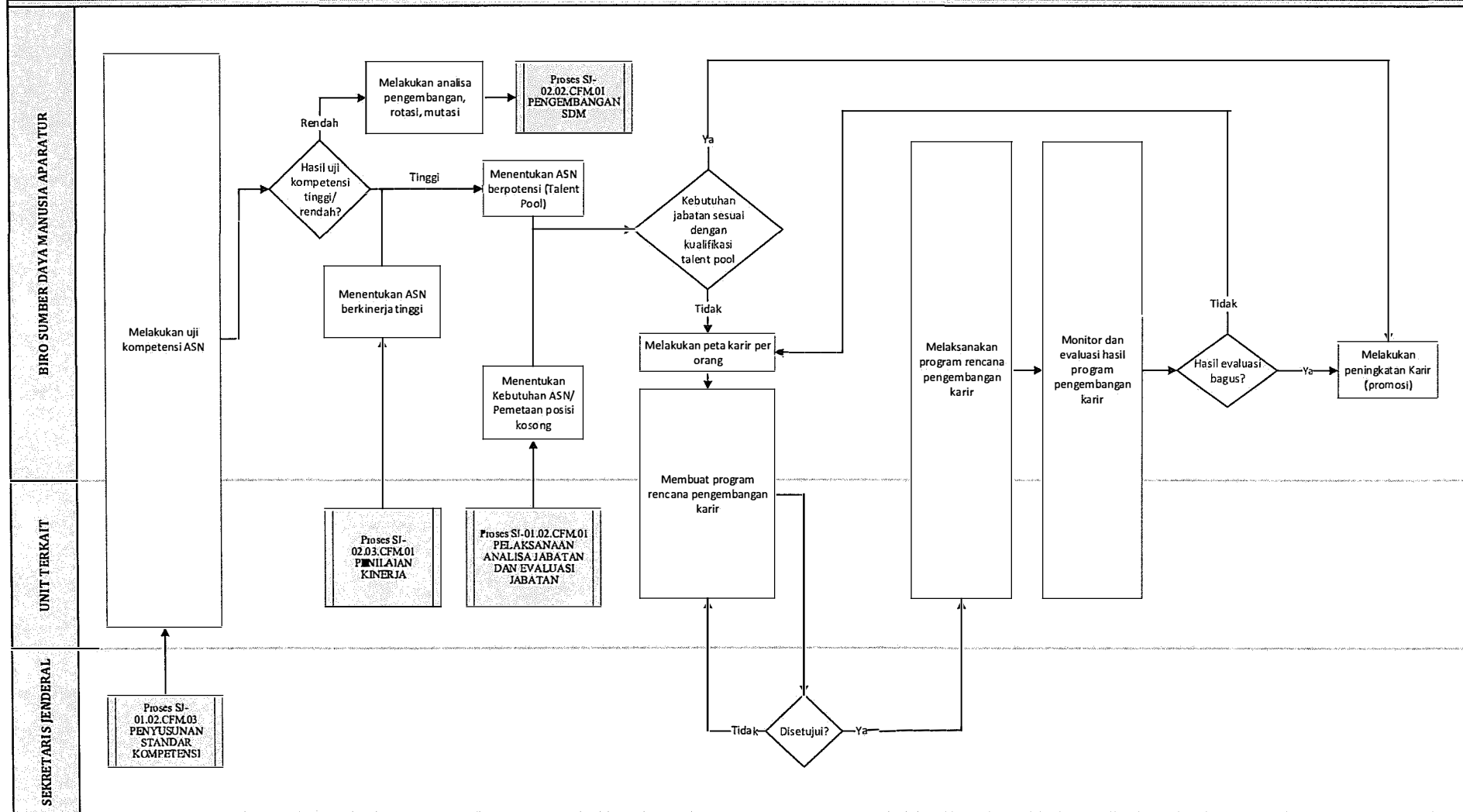
SJ – 02.02 CFM 03
PENGUATAN KAPASITAS NON ASN

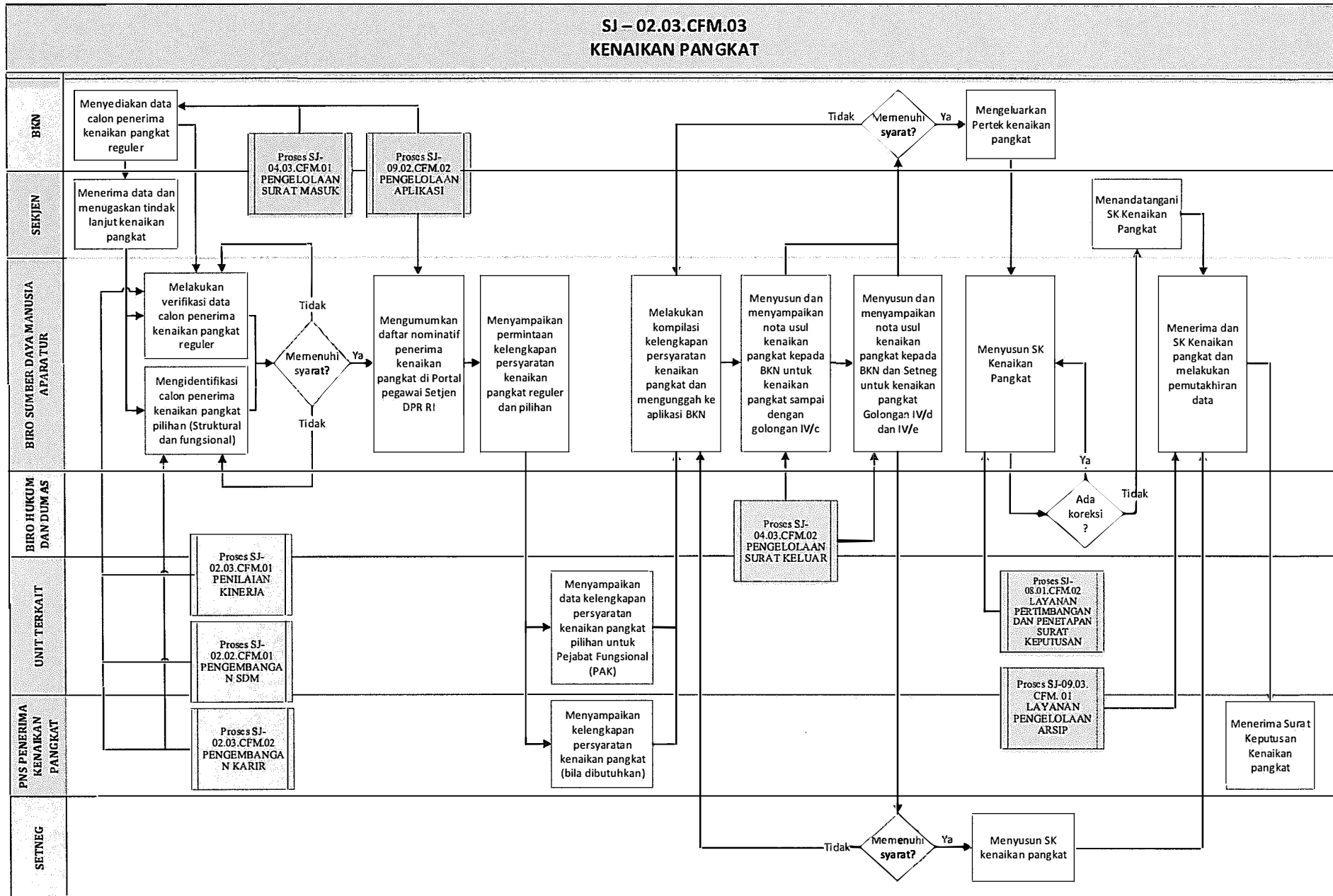


SJ – 02.03.CFM.01 PENILAIAN KINERJA

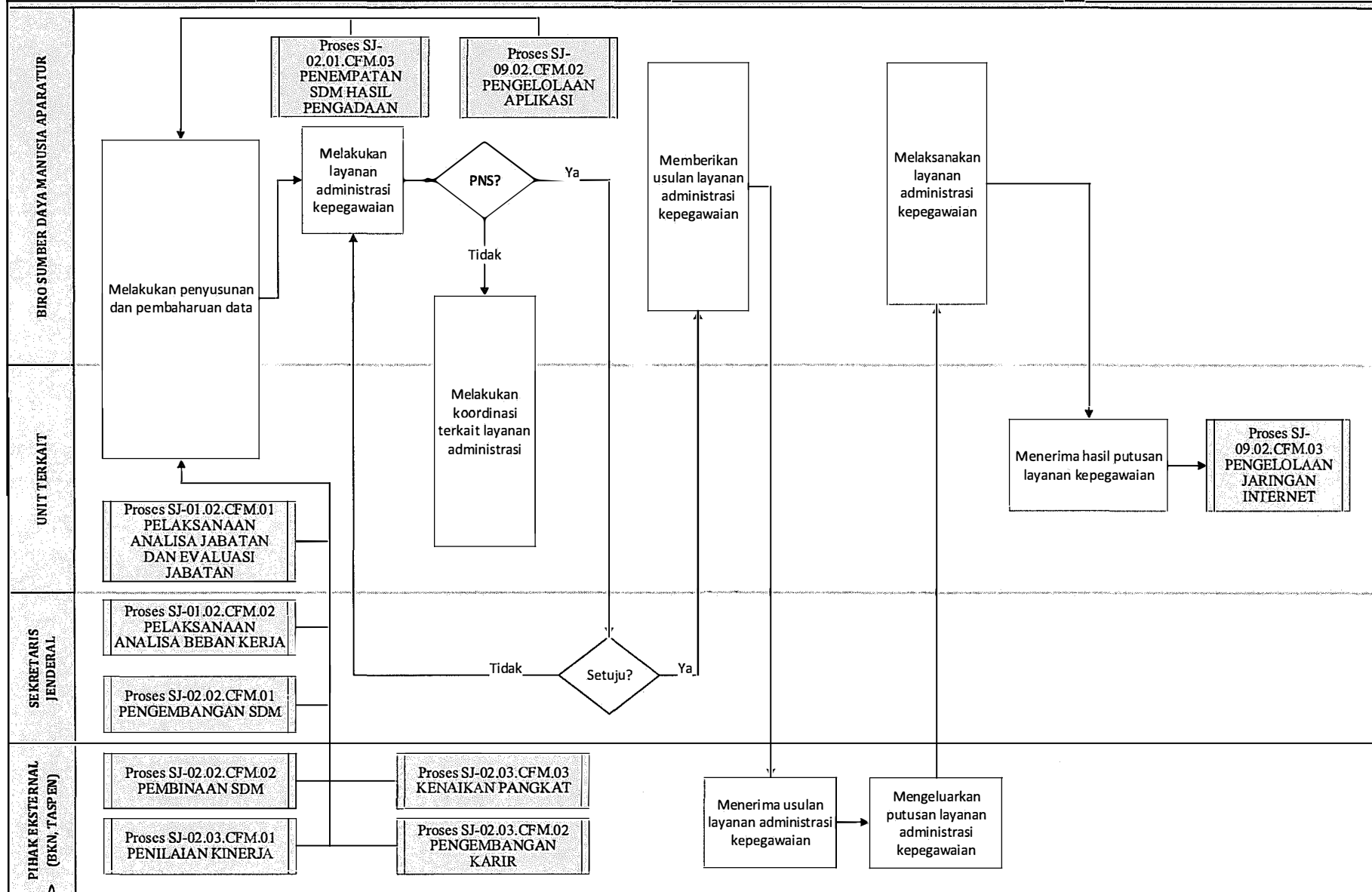


SJ – 02.03.CFM.02 PENGEMBANGAN KARIR

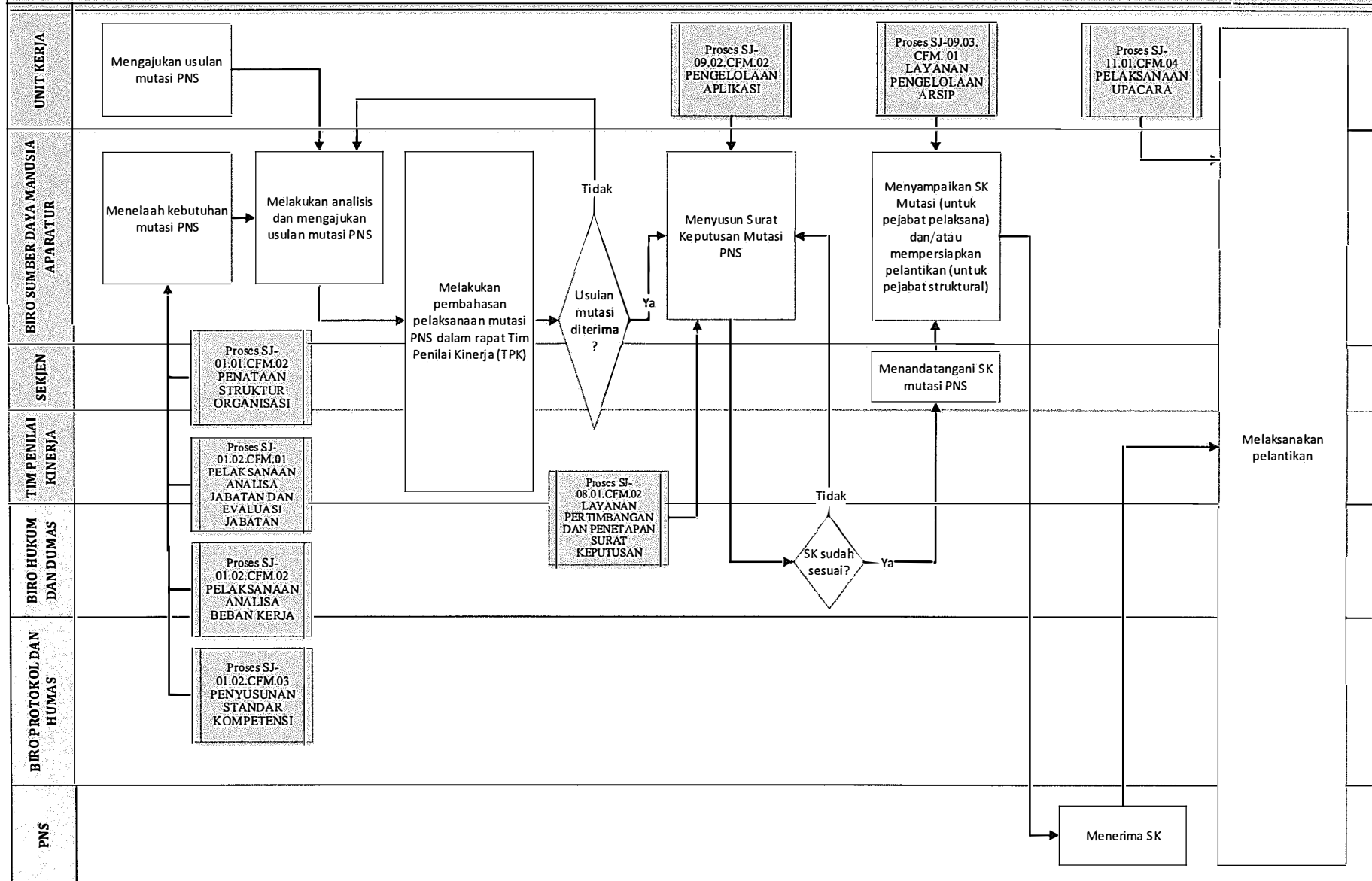




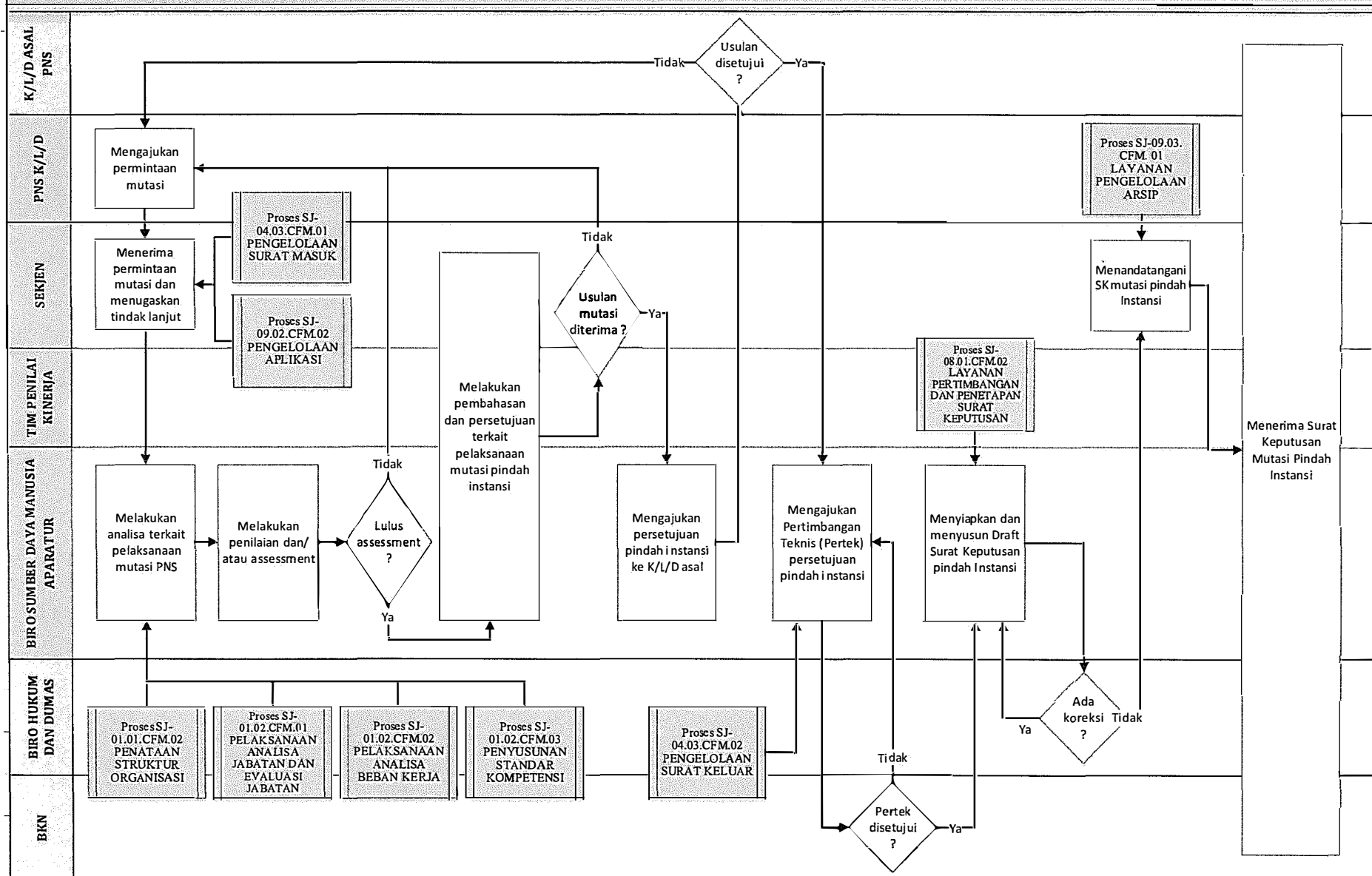
SJ – 02.04.CFM.01
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

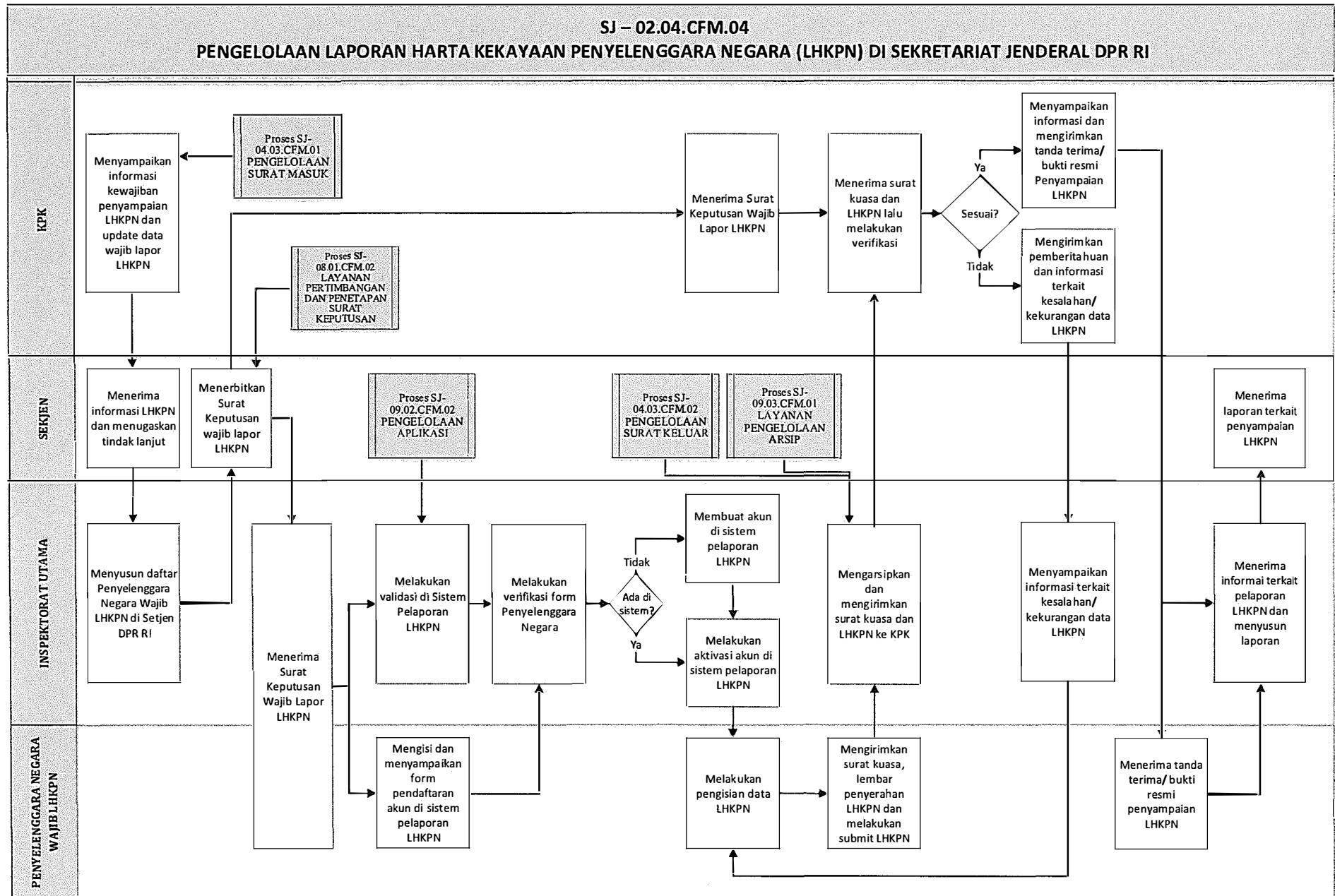


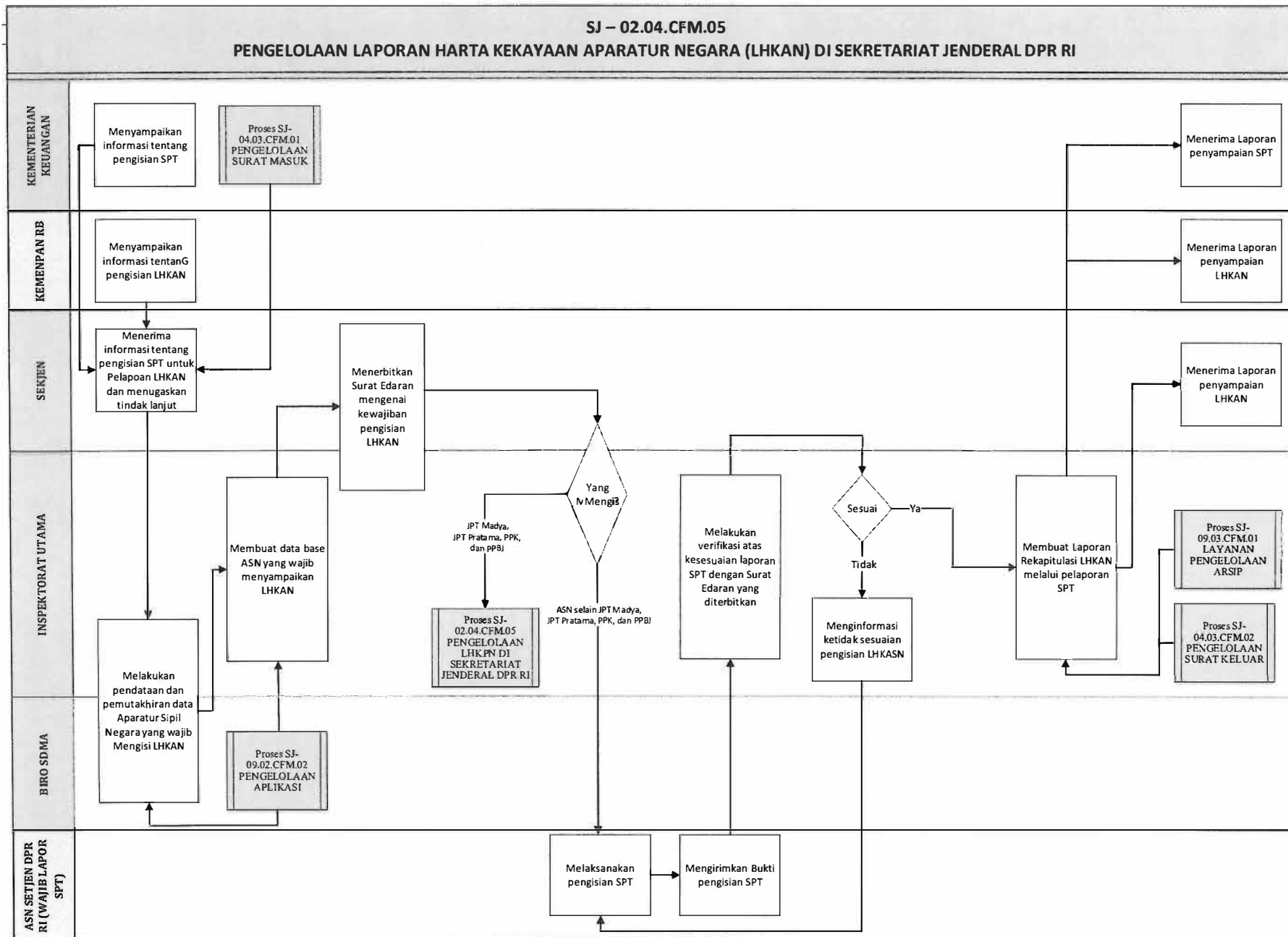
SJ – 02.04.CFM.02
MUTASI INTERNAL PEGAWAI NEGERI SIPIL



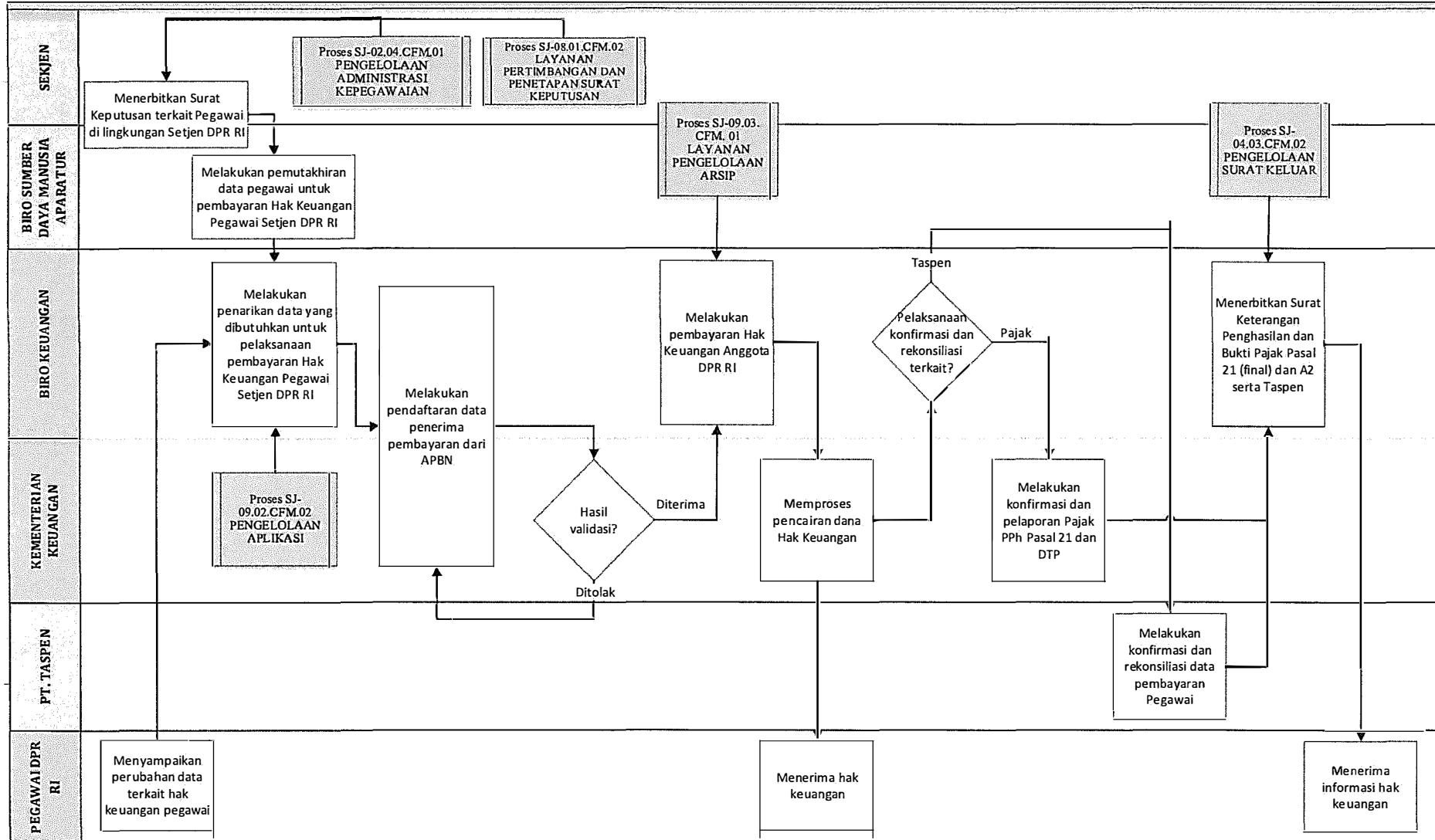
SJ – 02.04.CFM.03 MUTASI PINDAH INSTANSI



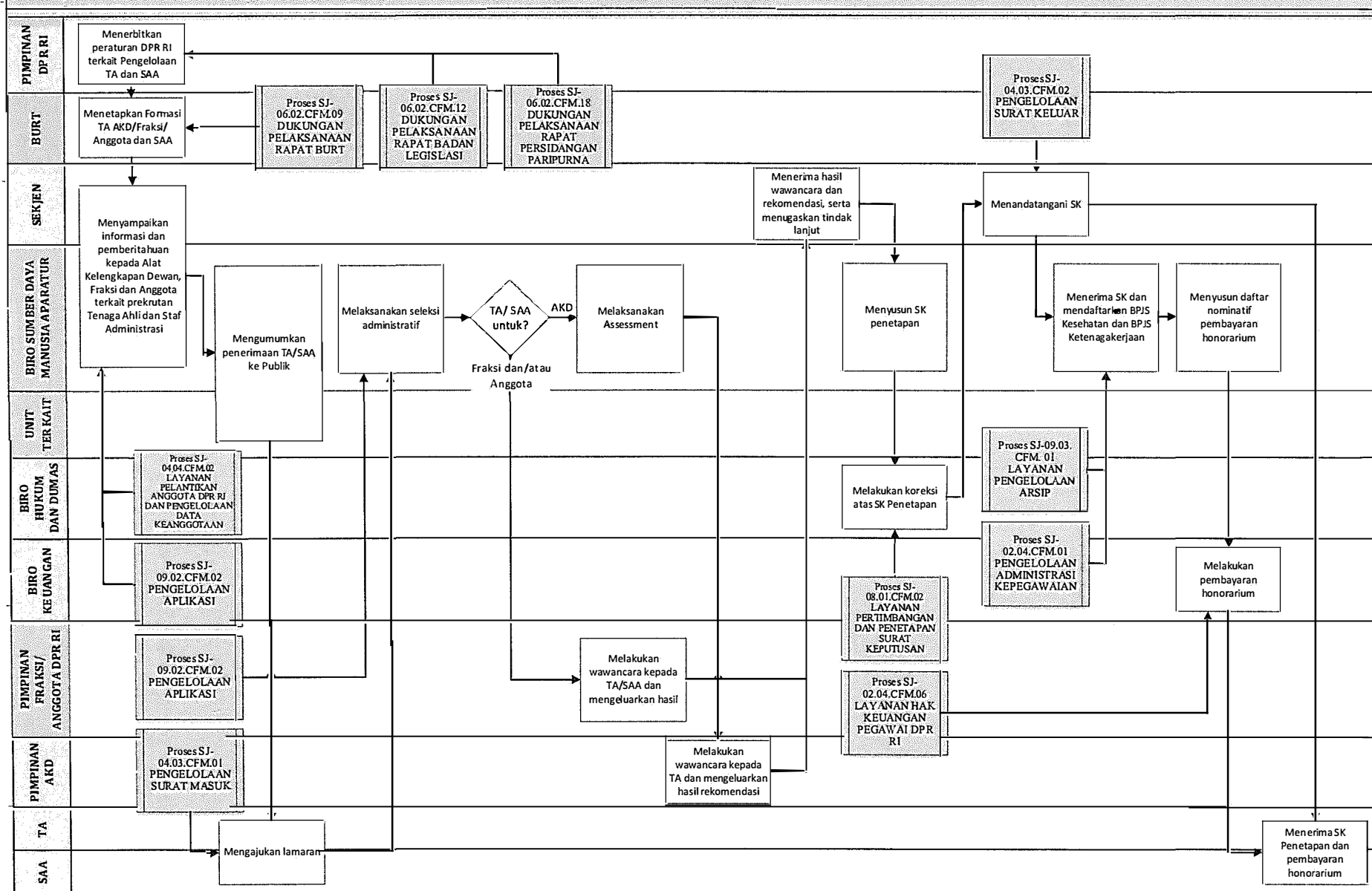


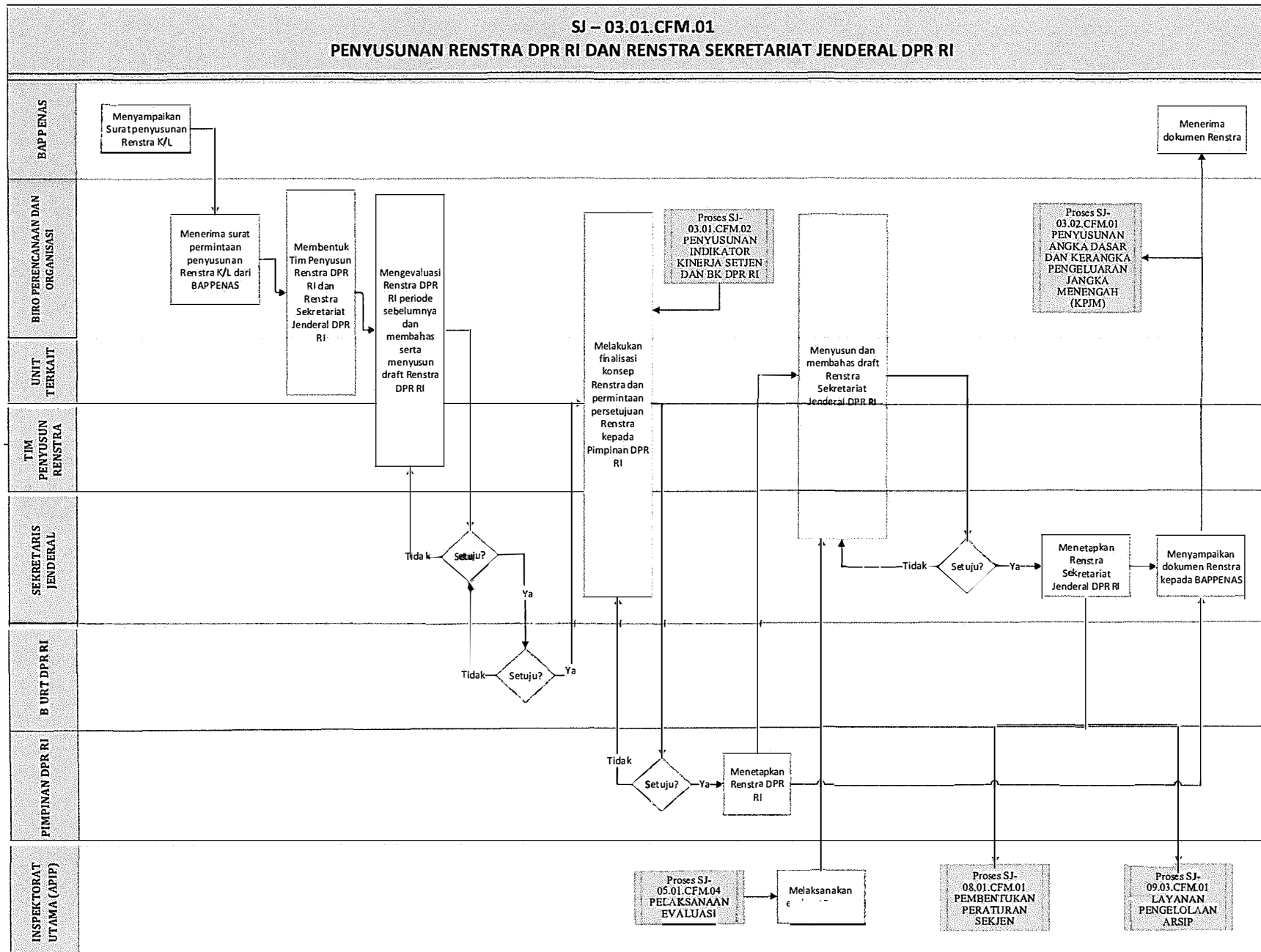


SJ – 02.04.CFM.06
LAYANAN HAK KEUANGAN PEGAWAI DPR RI

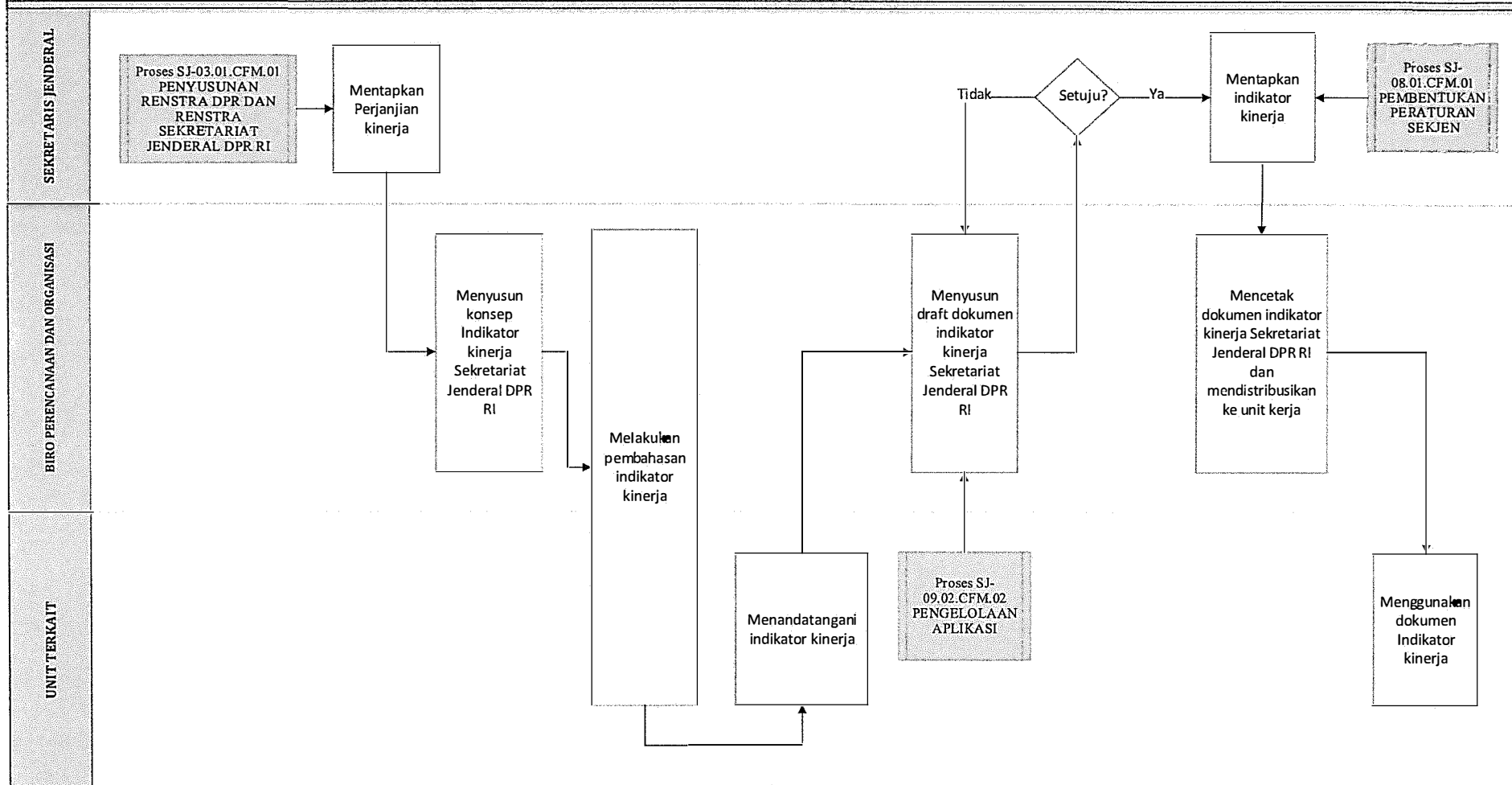


SJ – 02.04.CFM.07
PENGELOLAAN TENAGA AHLI (TA) ALAT KELENGKAPAN DEWAN/ FRAKSI/ ANGGOTA DAN STAF ADMINISTRASI ANGGOTA

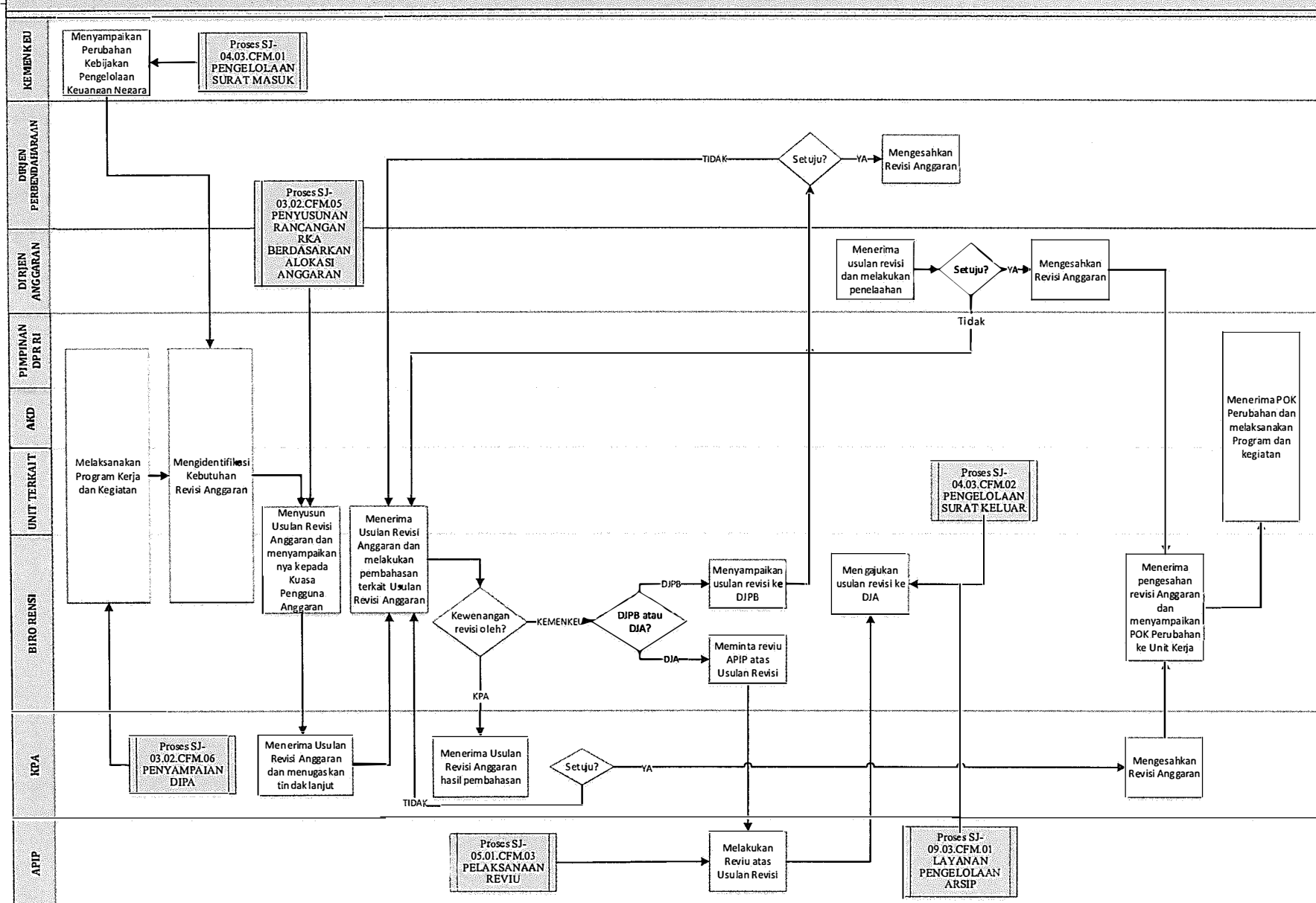




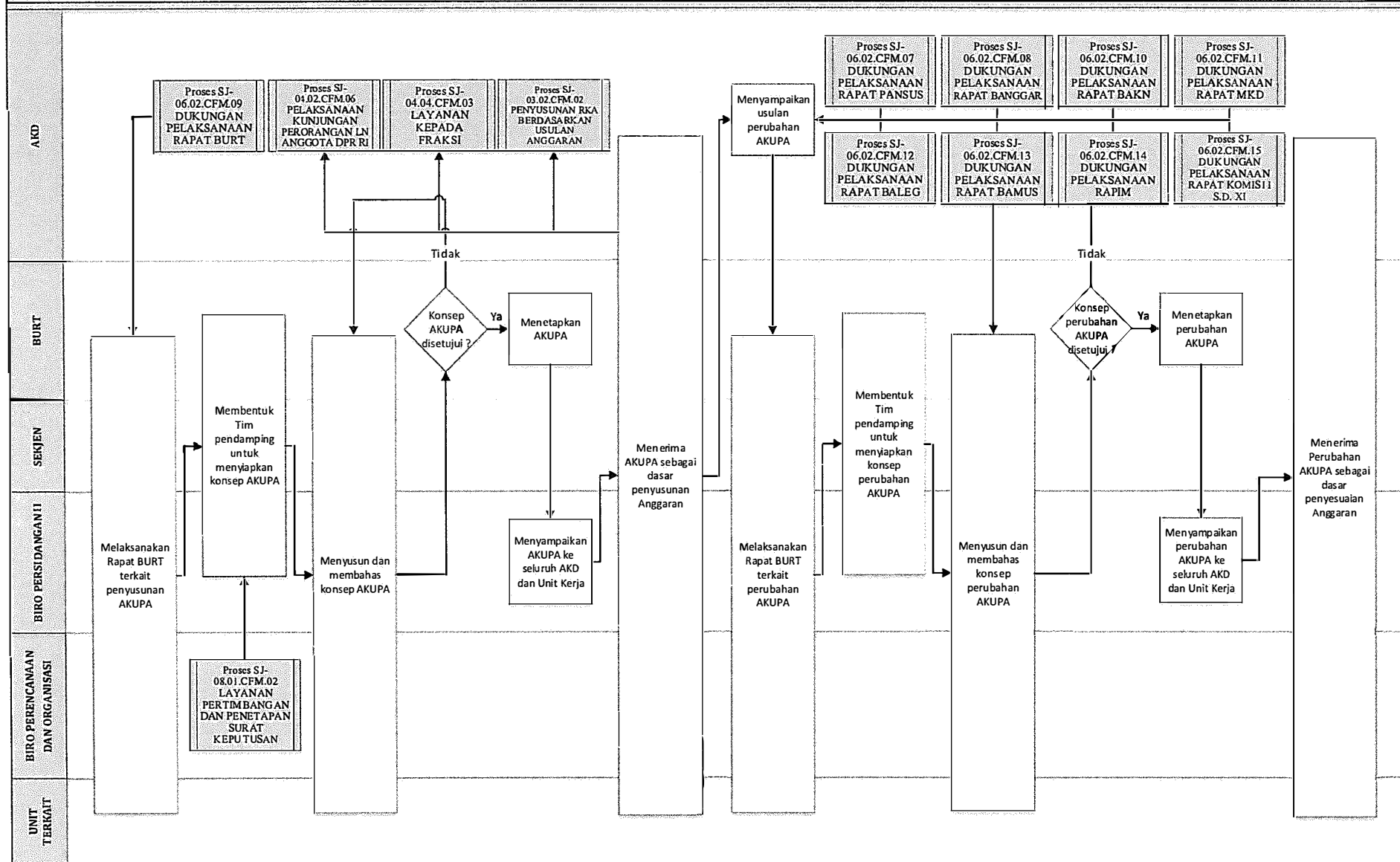
SJ – 03.01.CFM.02
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

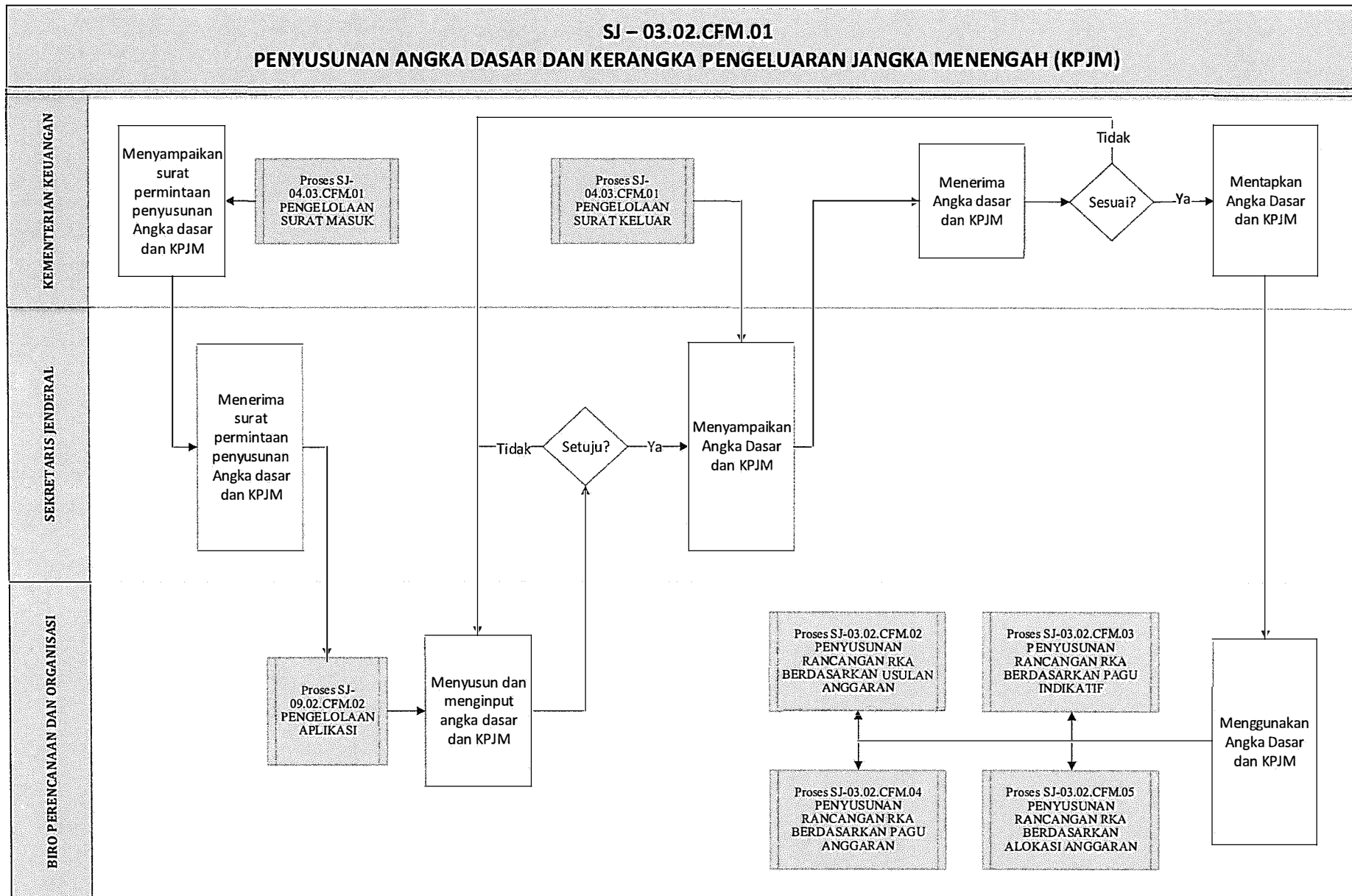


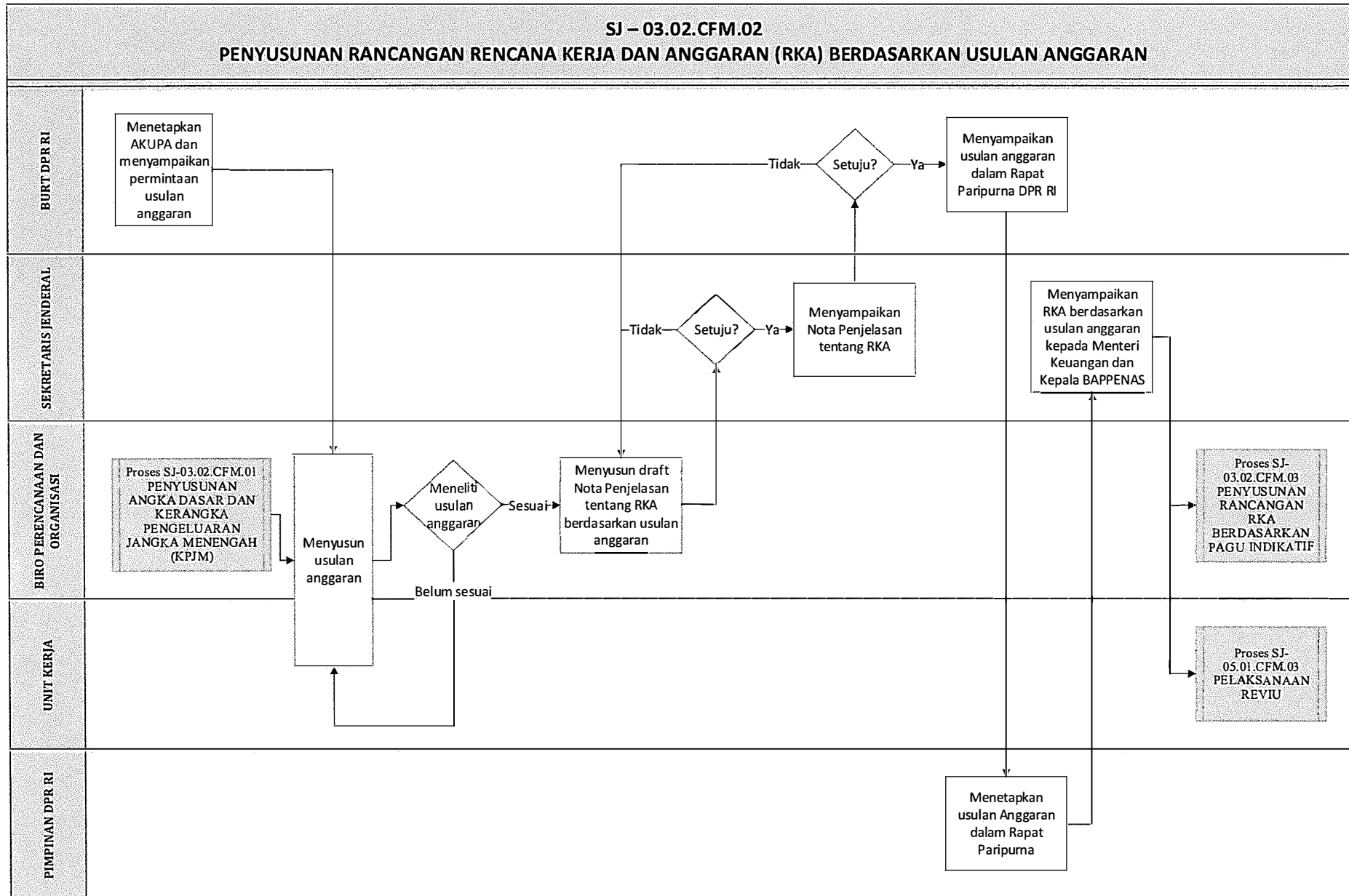
SJ – 03.01.CFM.03
PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN



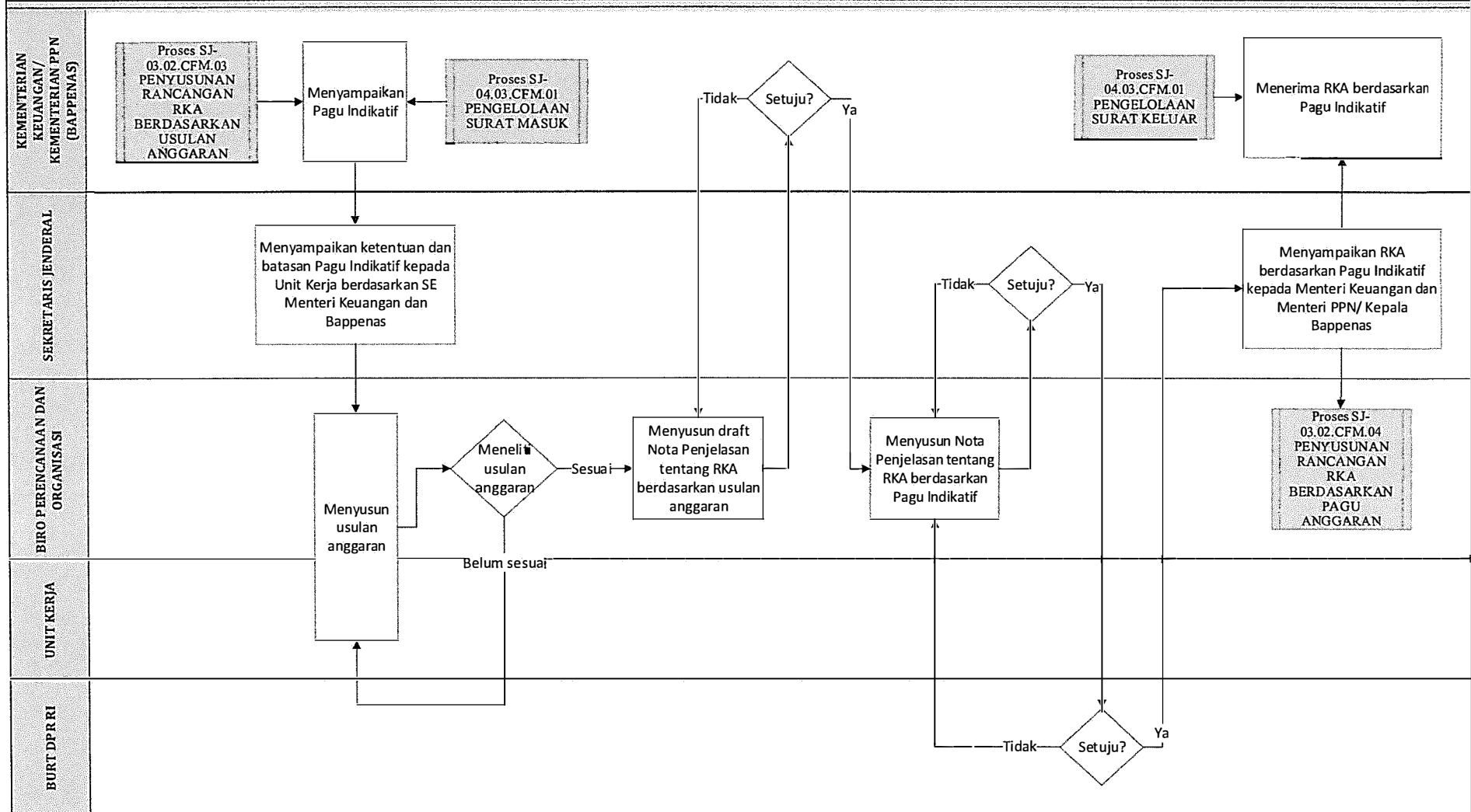
SJ – 03.01.CFM.04
PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ANGGARAN (AKUPA)



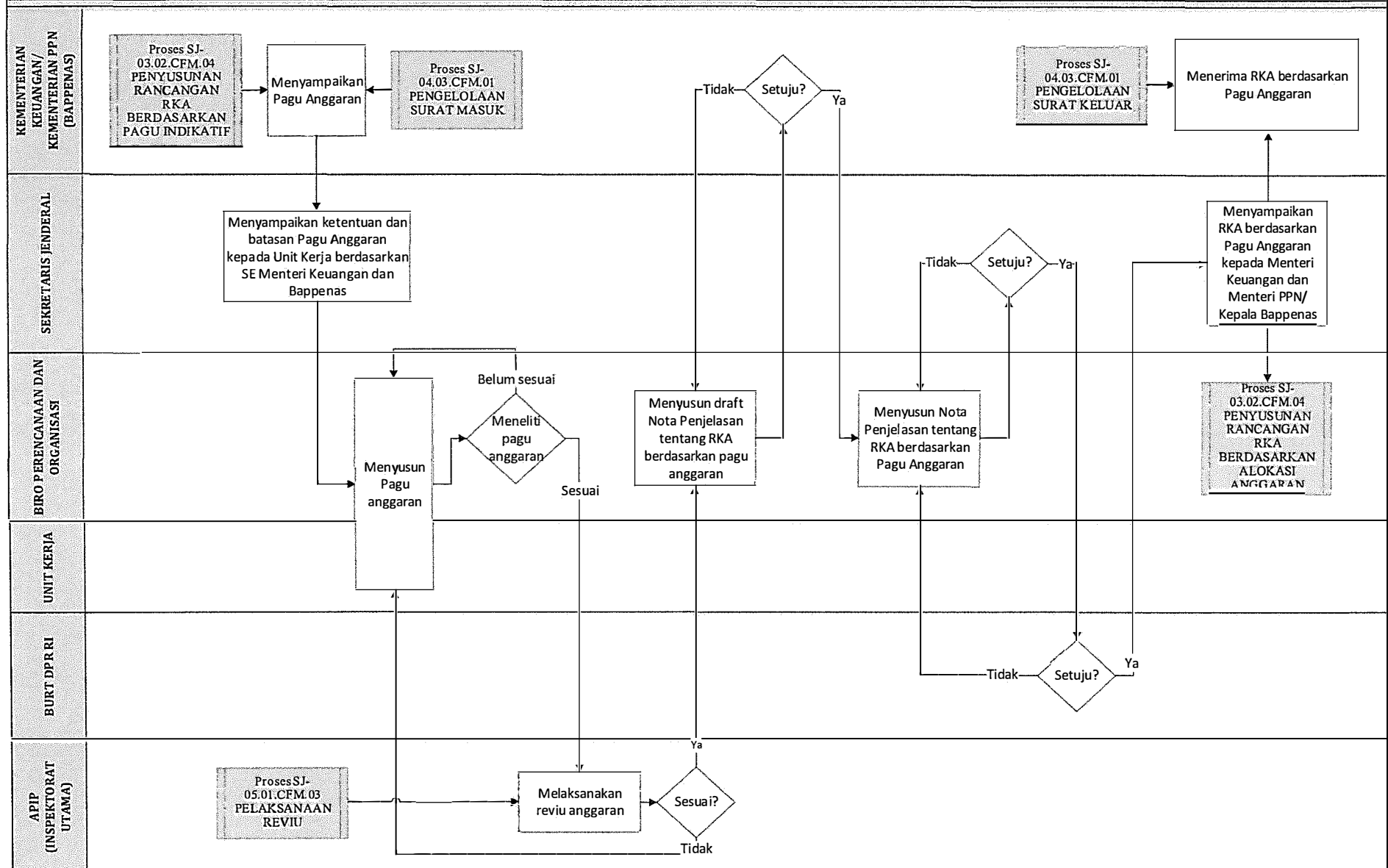




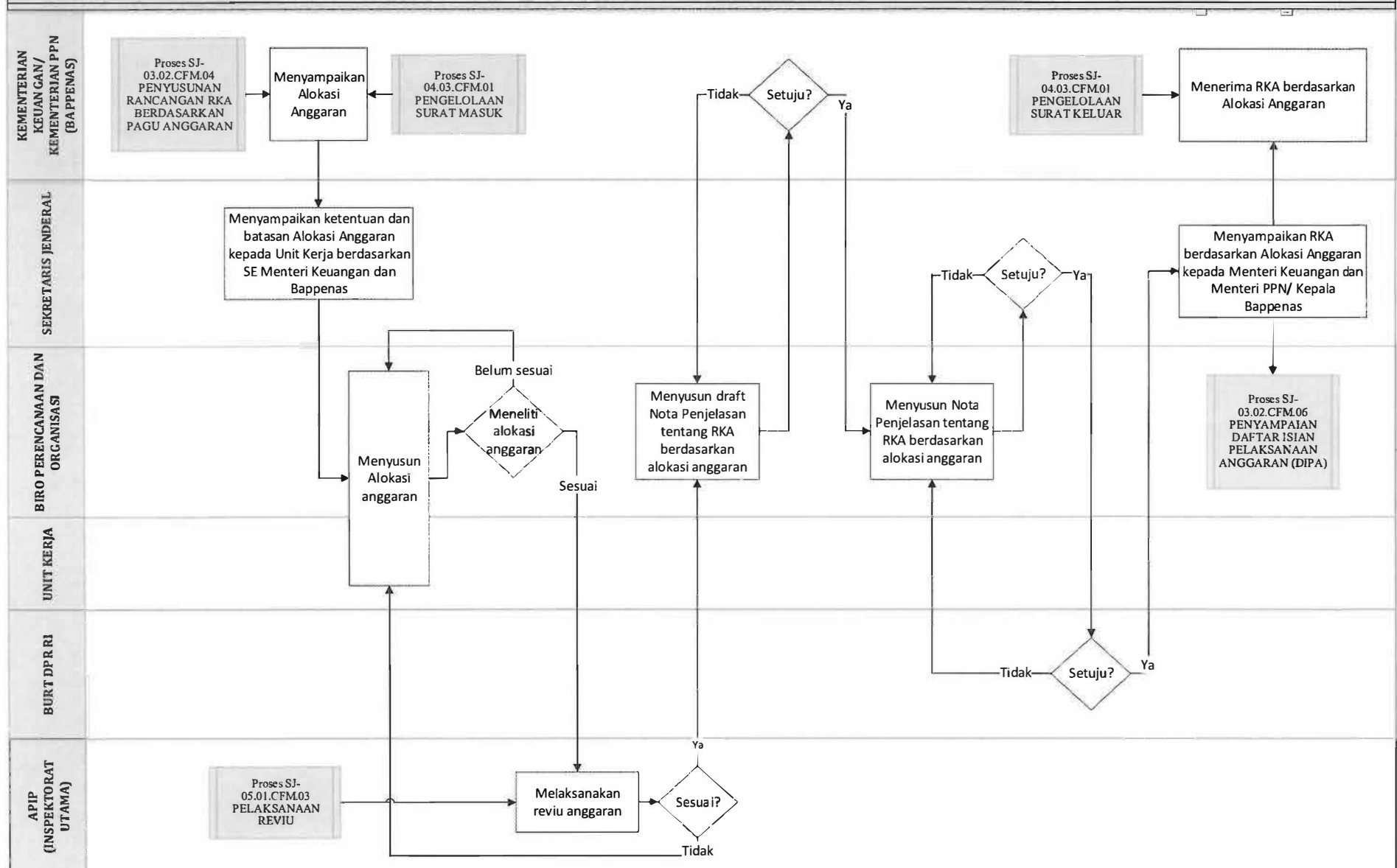
SJ – 03.02.CFM.03
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

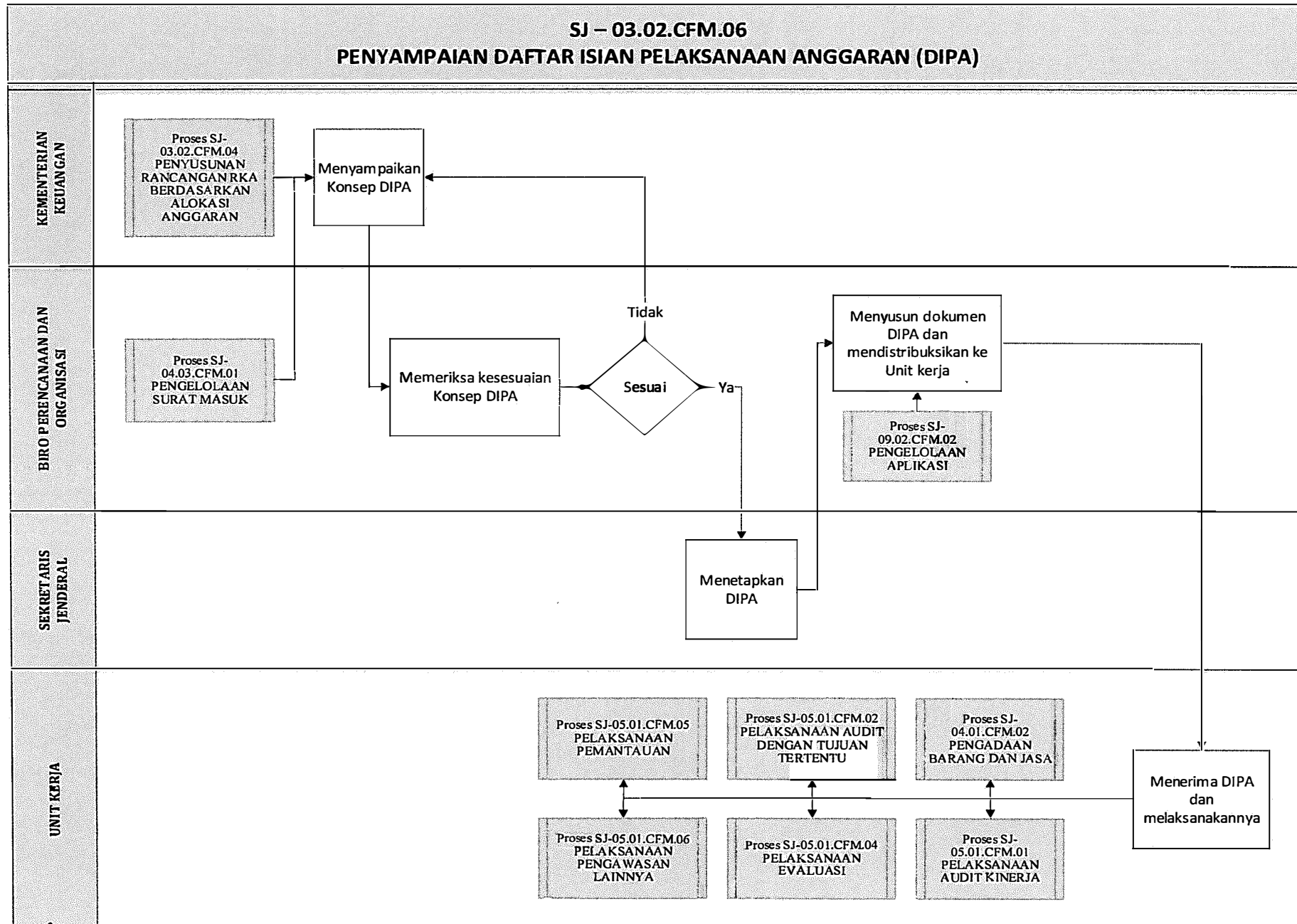


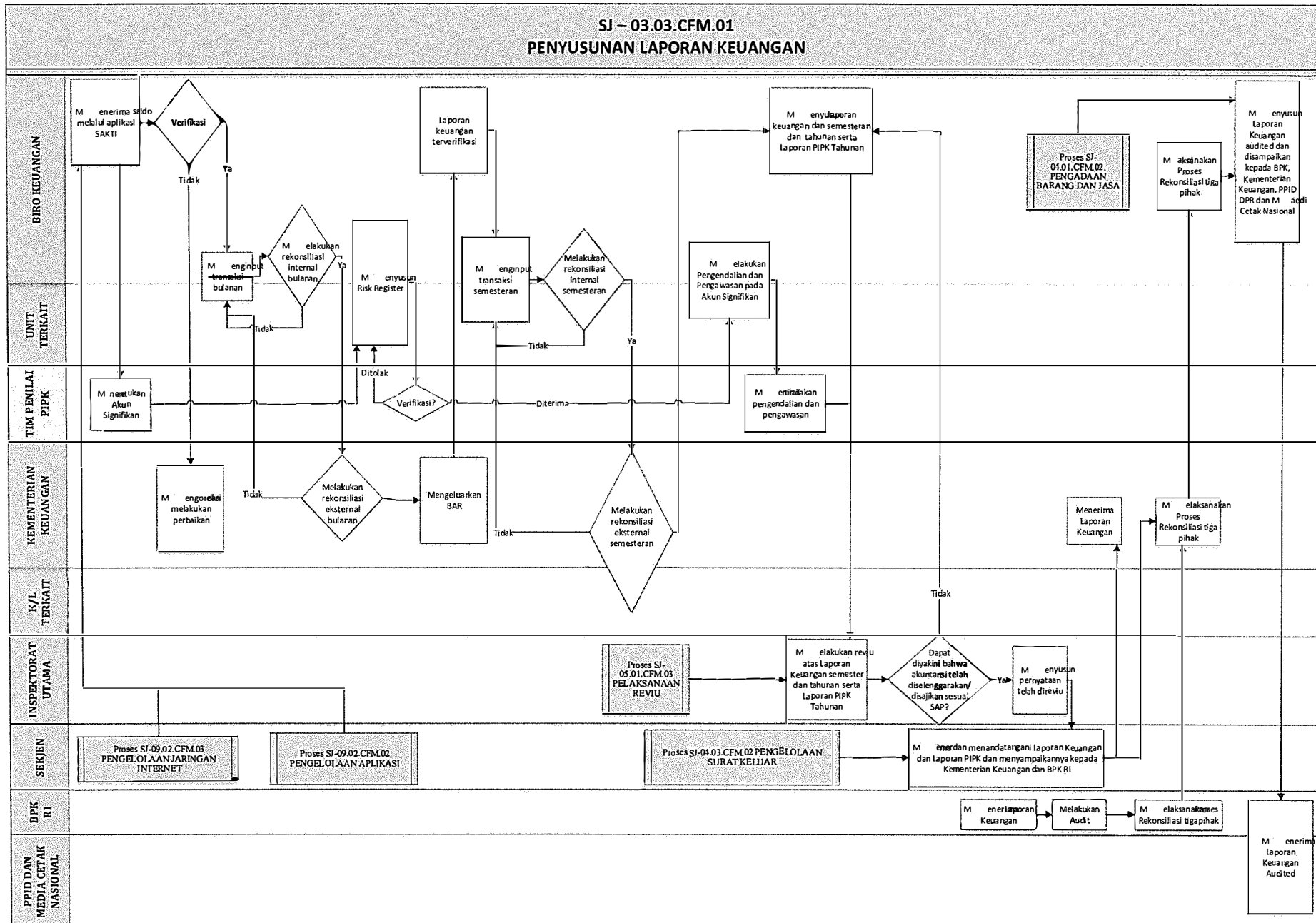
SJ – 03.02.CFM.04
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU ANGGARAN



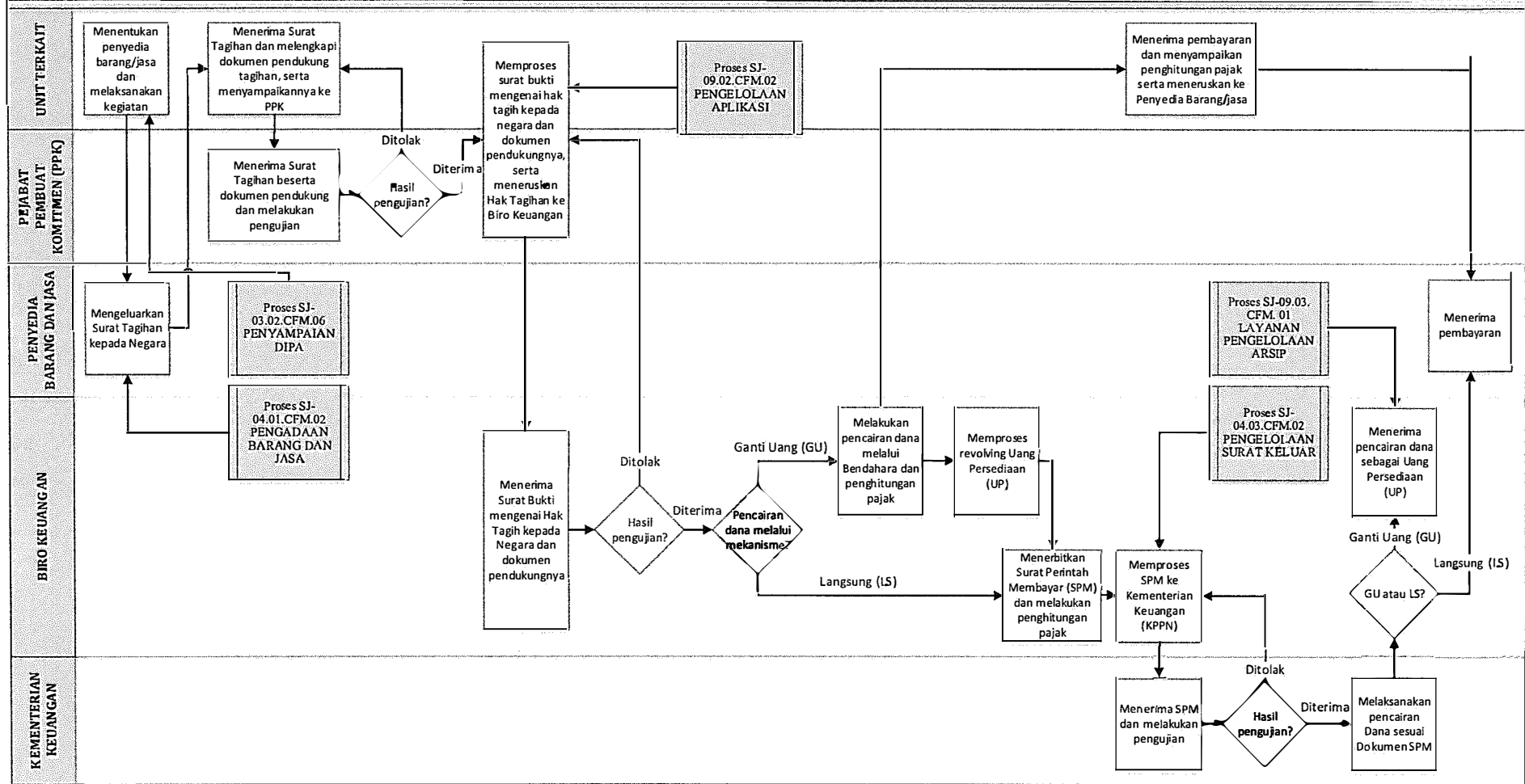
SJ – 03.02.CFM.05
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN



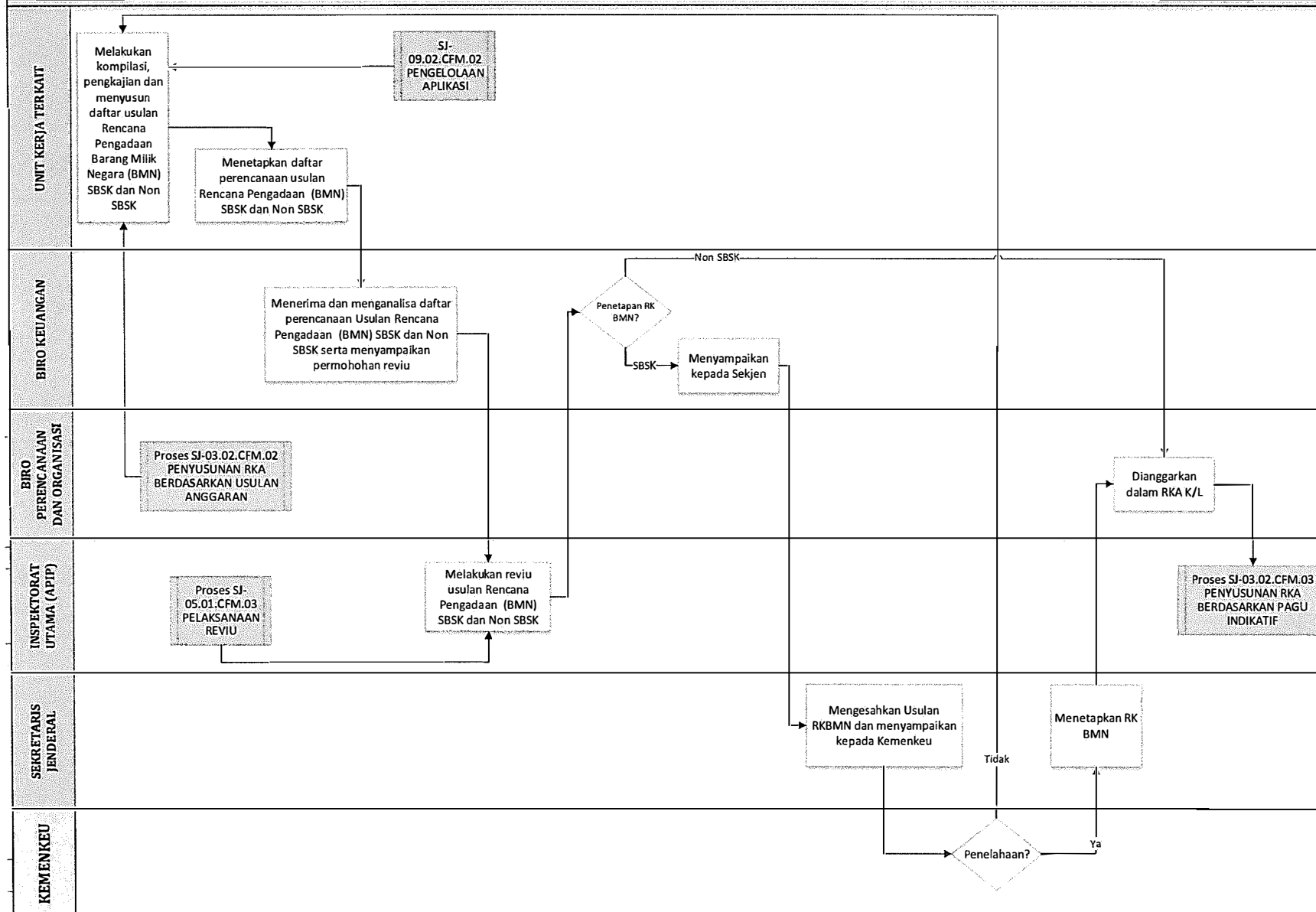




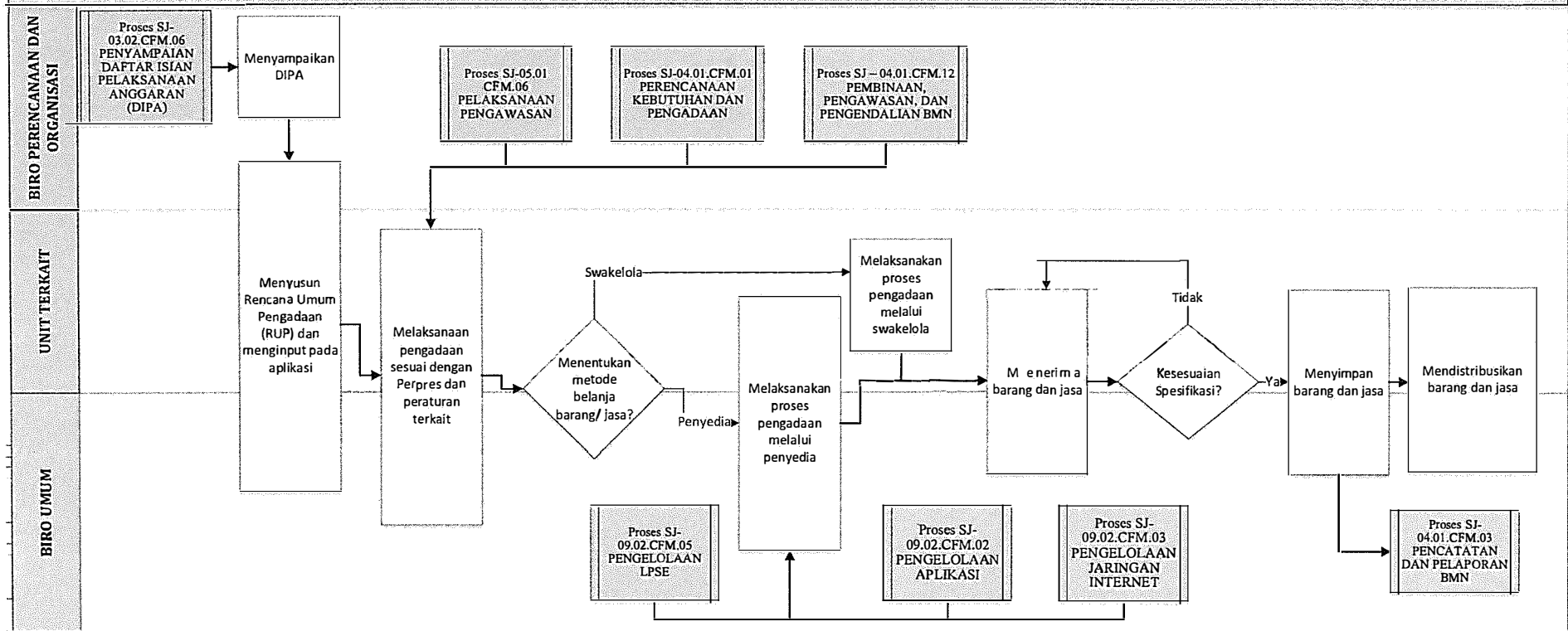
SJ – 03.03.CFM.02
LAYANAN PENGELOLAAN TAGIHAN



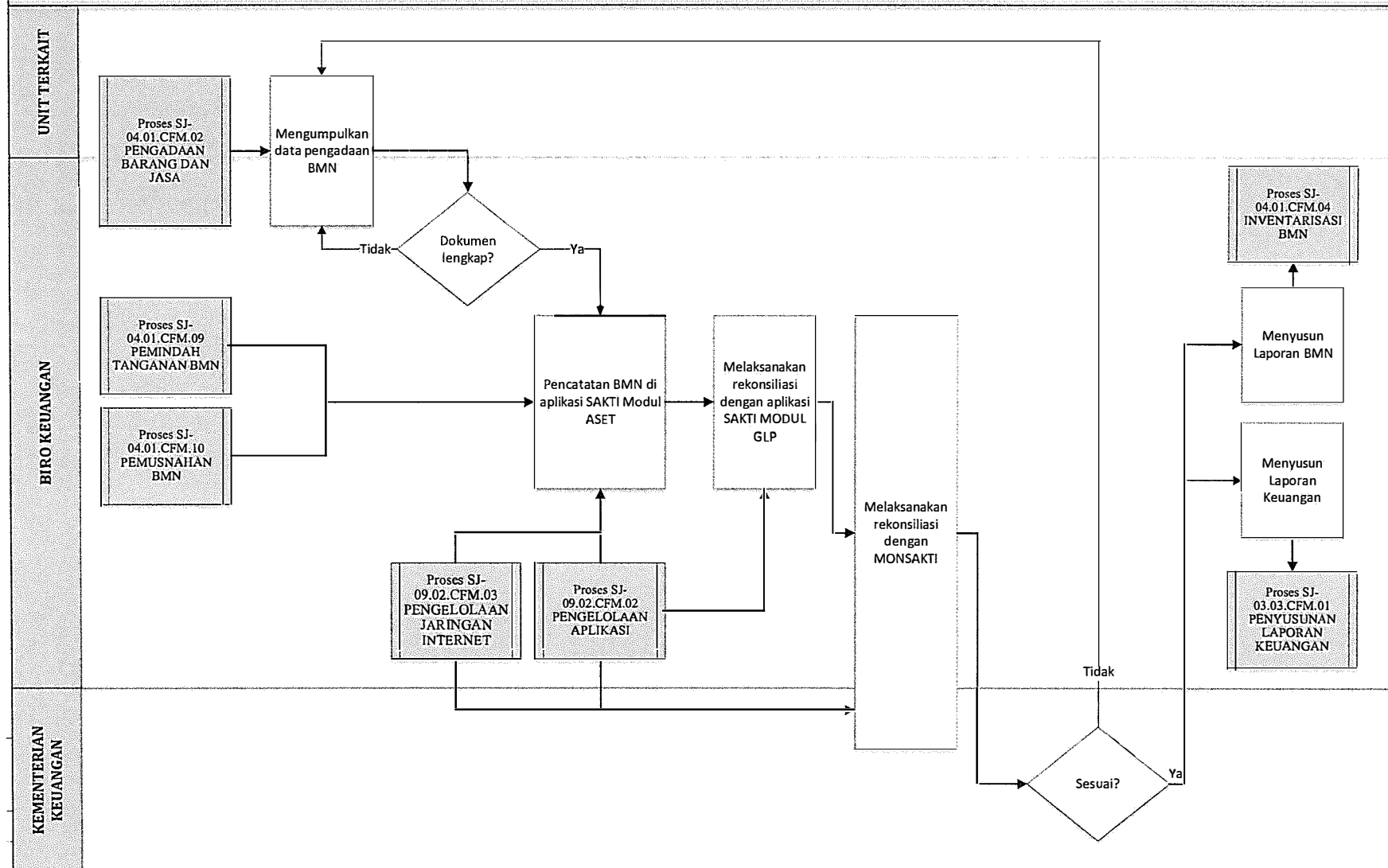
SJ – 04.01.CFM.01
PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA



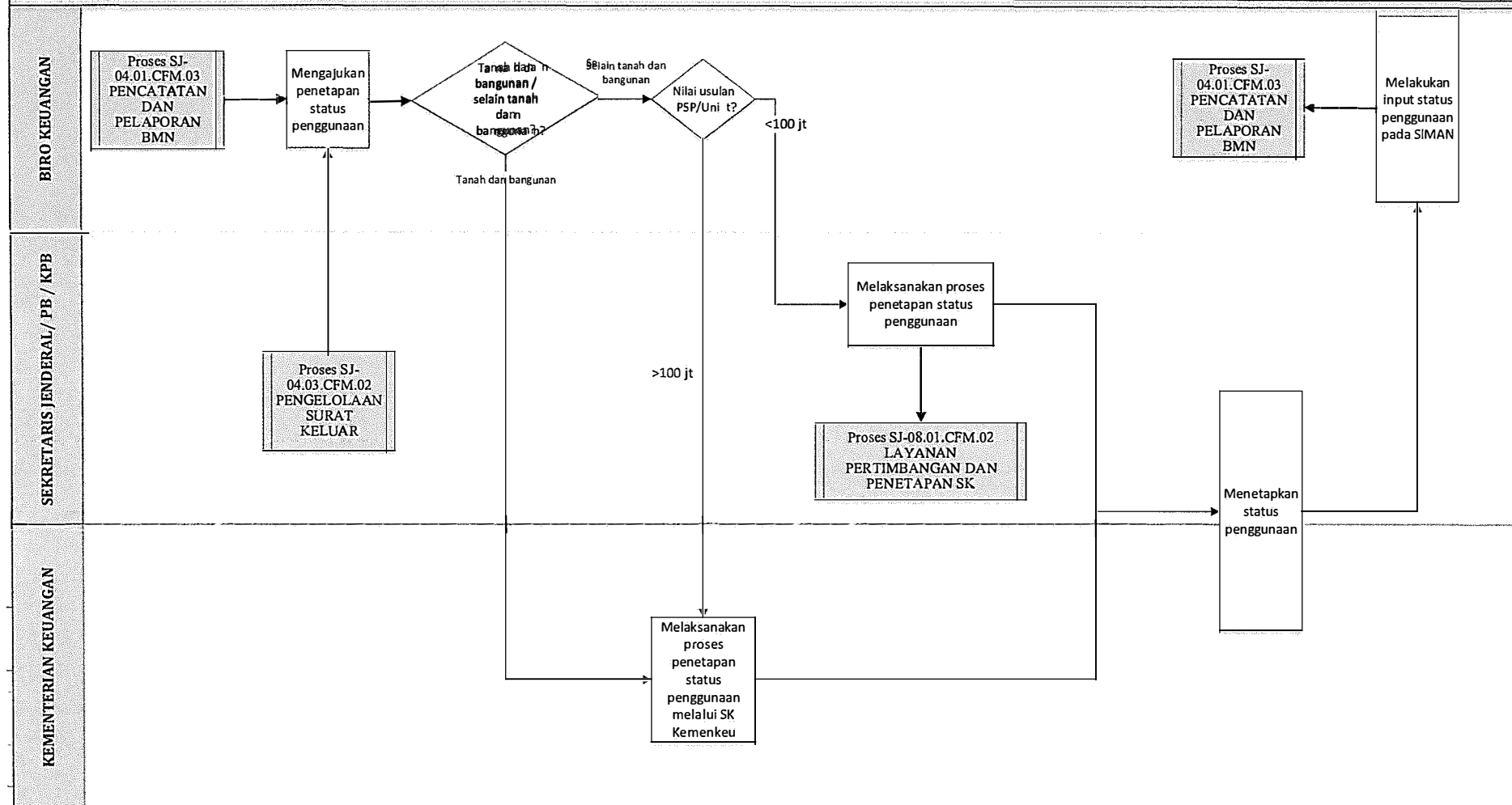
SJ-04.01.CFM.02 PENGADAAN BARANG DAN JASA



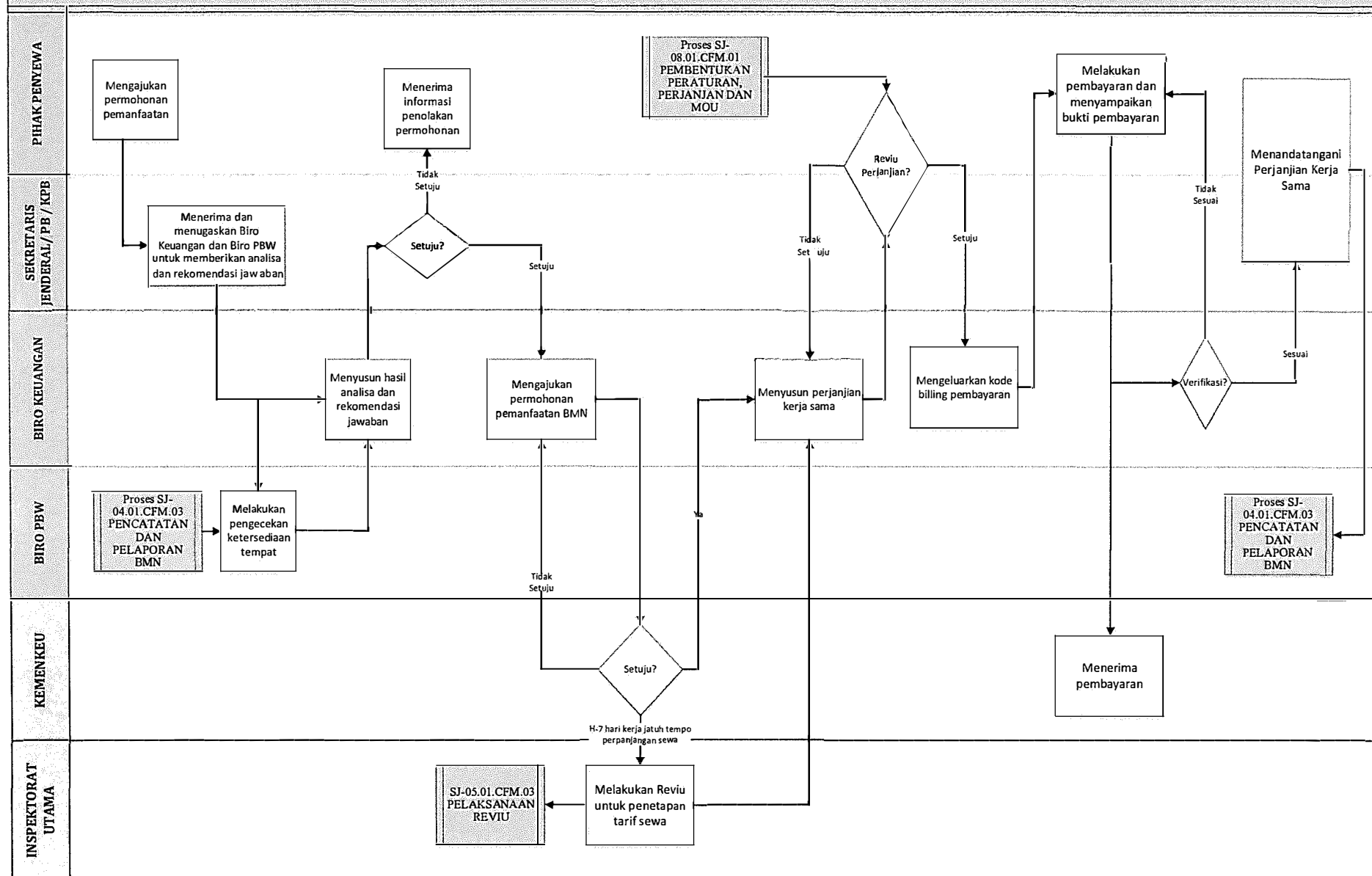
SJ – 04.01.CFM.03
PENCATATAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA



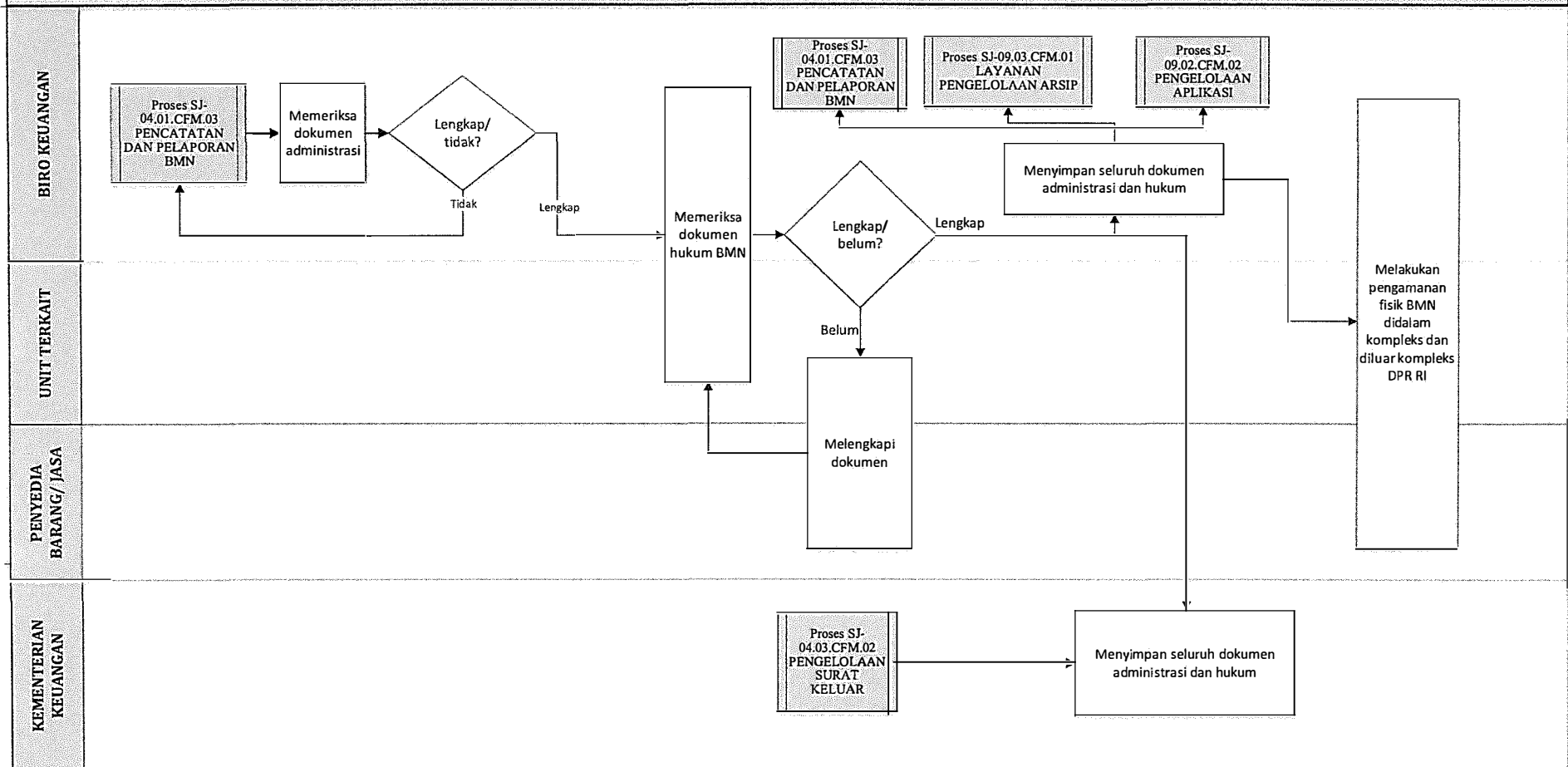
**SJ – 04.01.CFM.04
PENGUNAAN BARANG MILIK NEGARA**



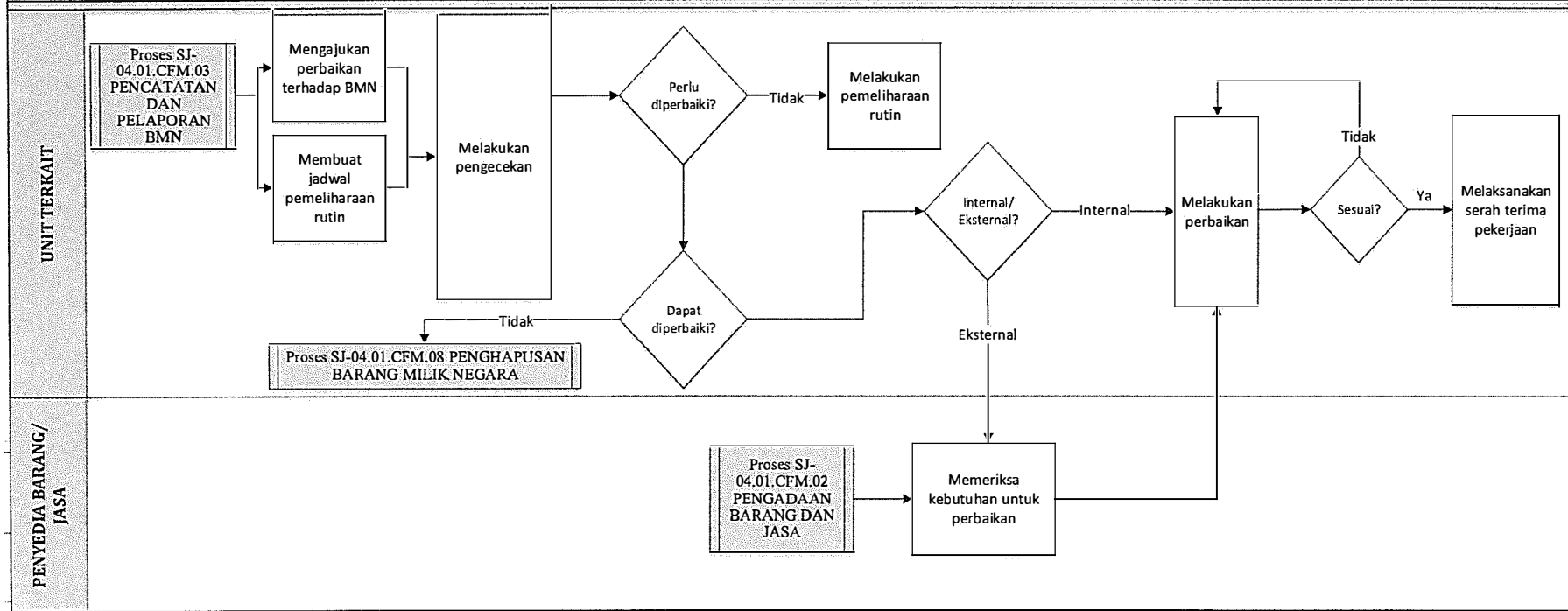
SJ – 04.01.CFM 05
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI SEWA



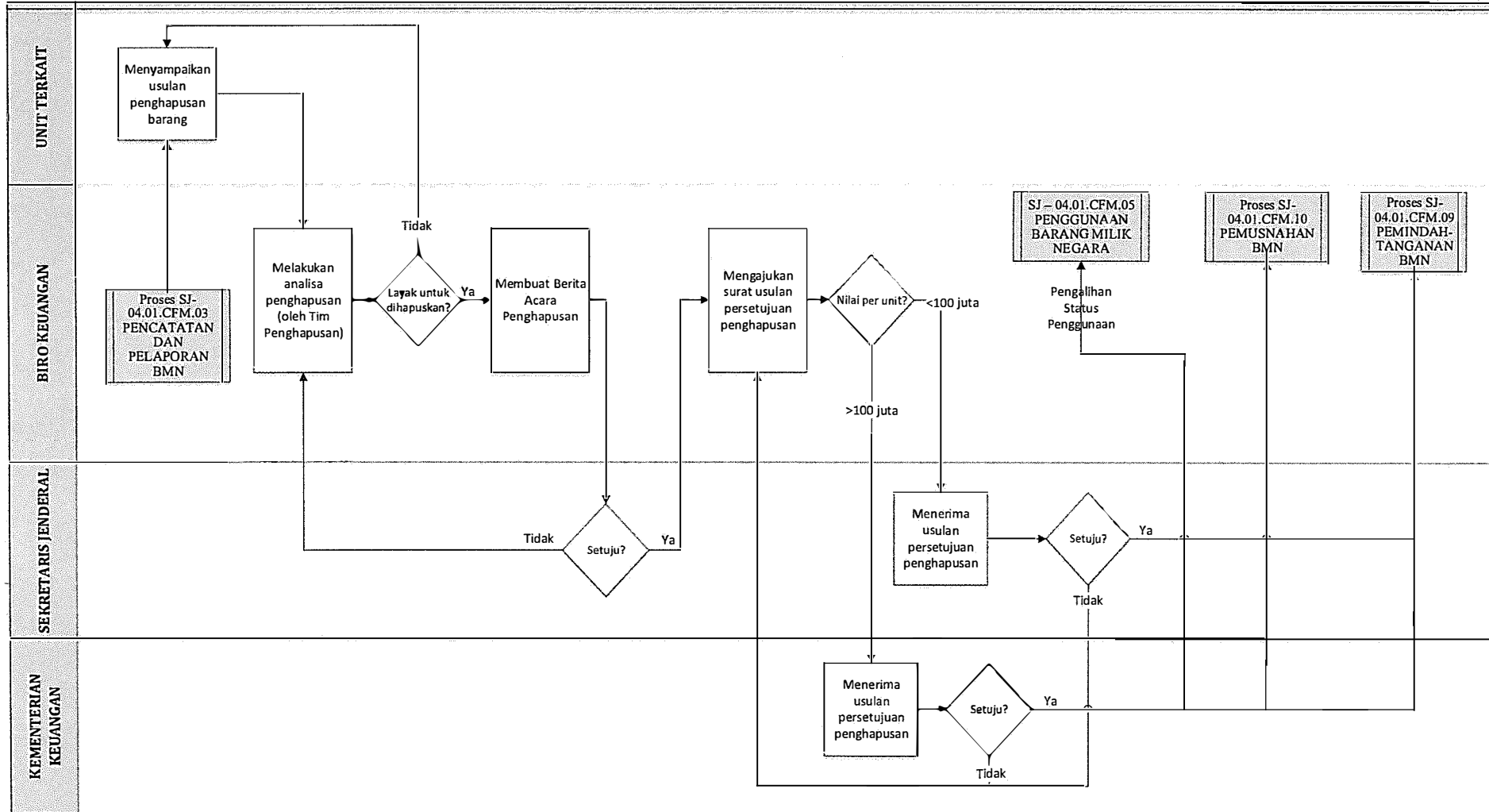
SJ – 04.01.CFM.06
PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA



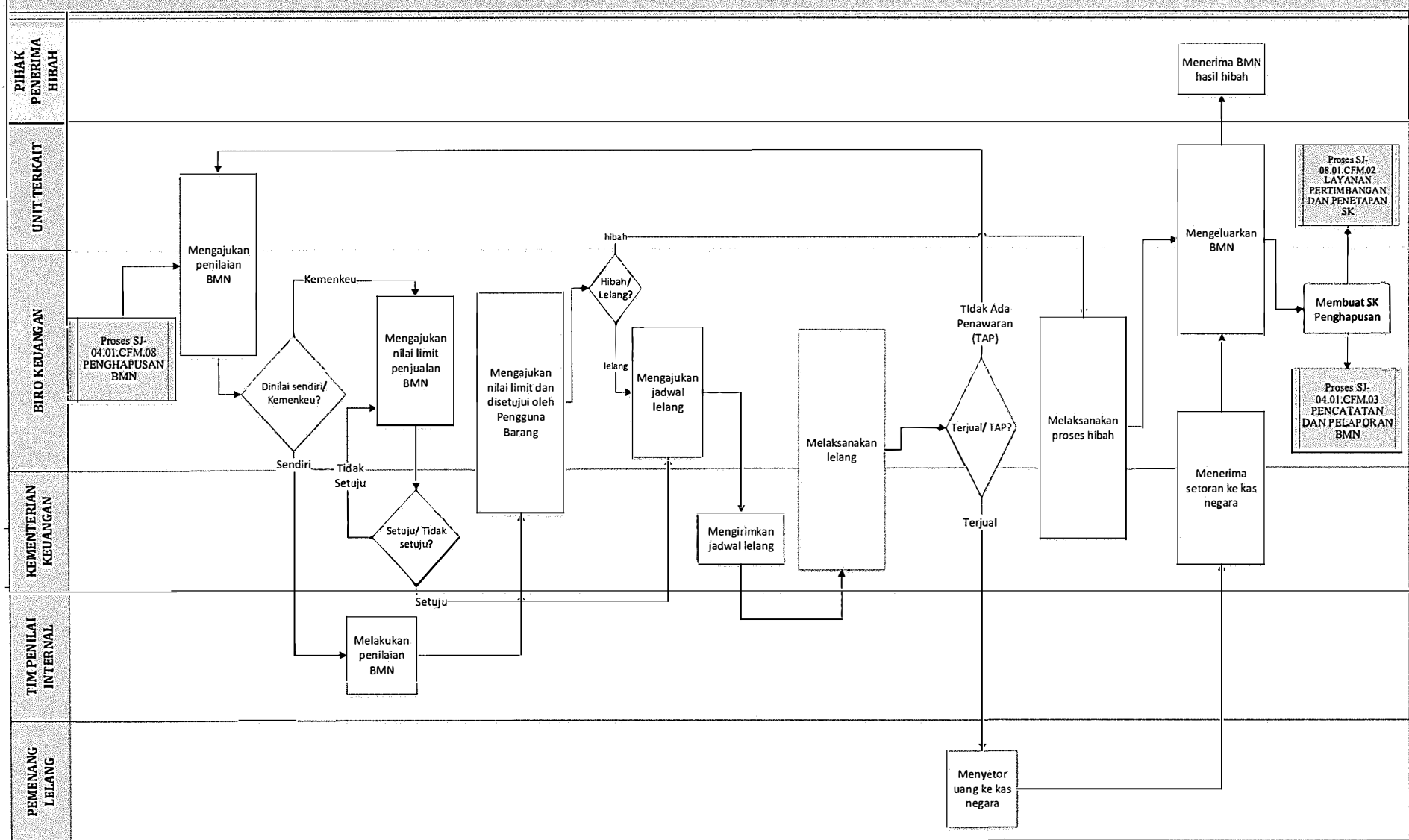
SJ – 04.01.CFM.07
PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA



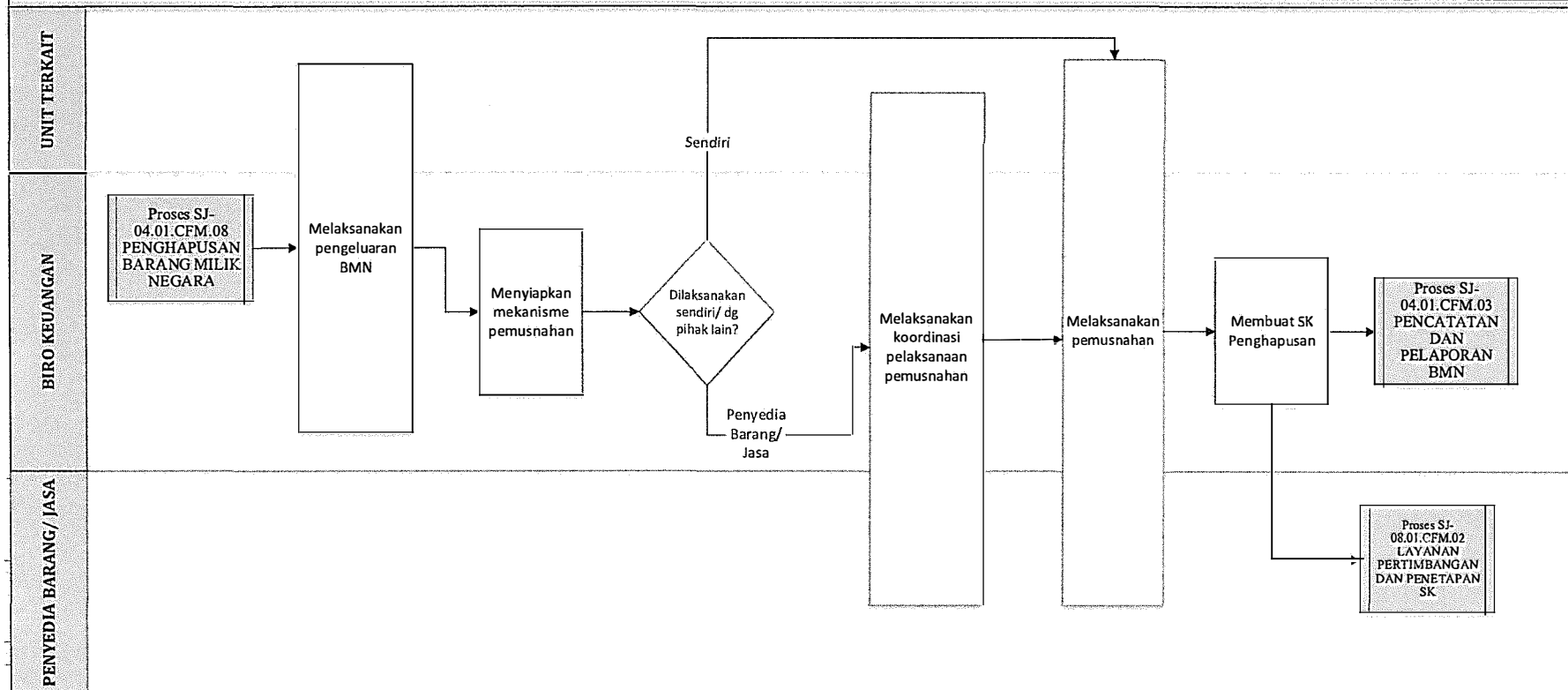
SJ – 04.01.CFM.08
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA



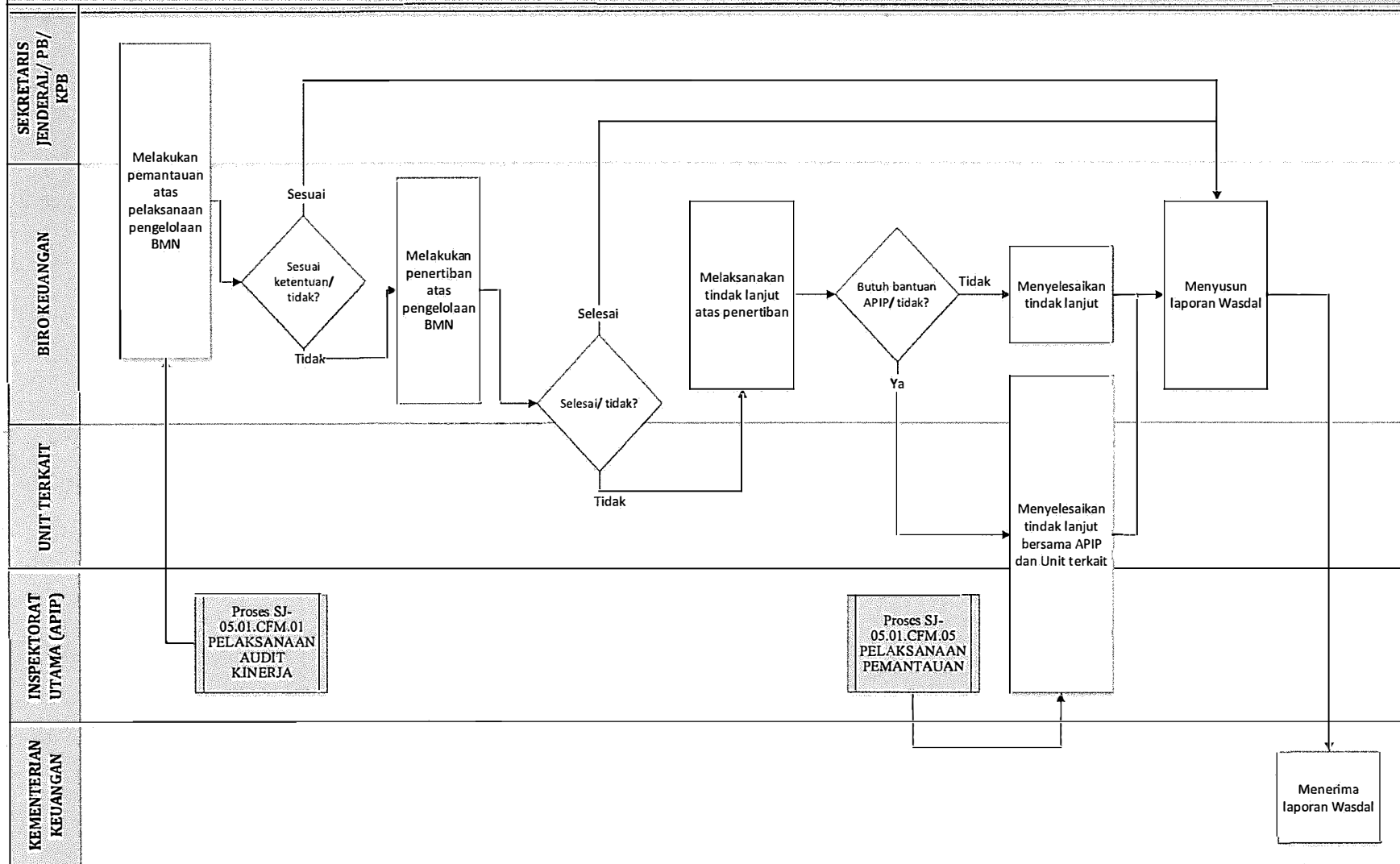
SJ – 04.01.CFM.09
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA



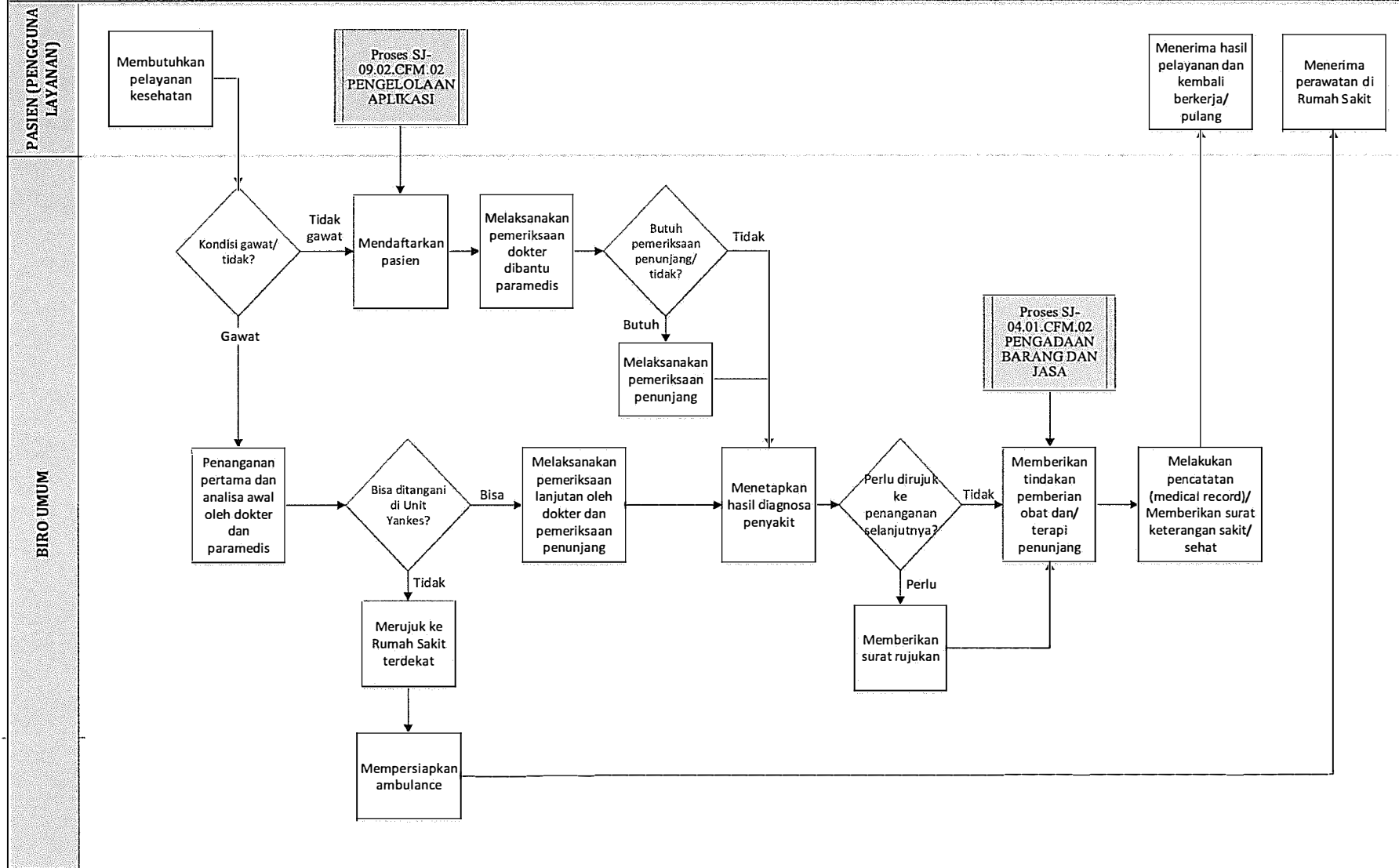
SJ – 04.01.CFM.10
PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA

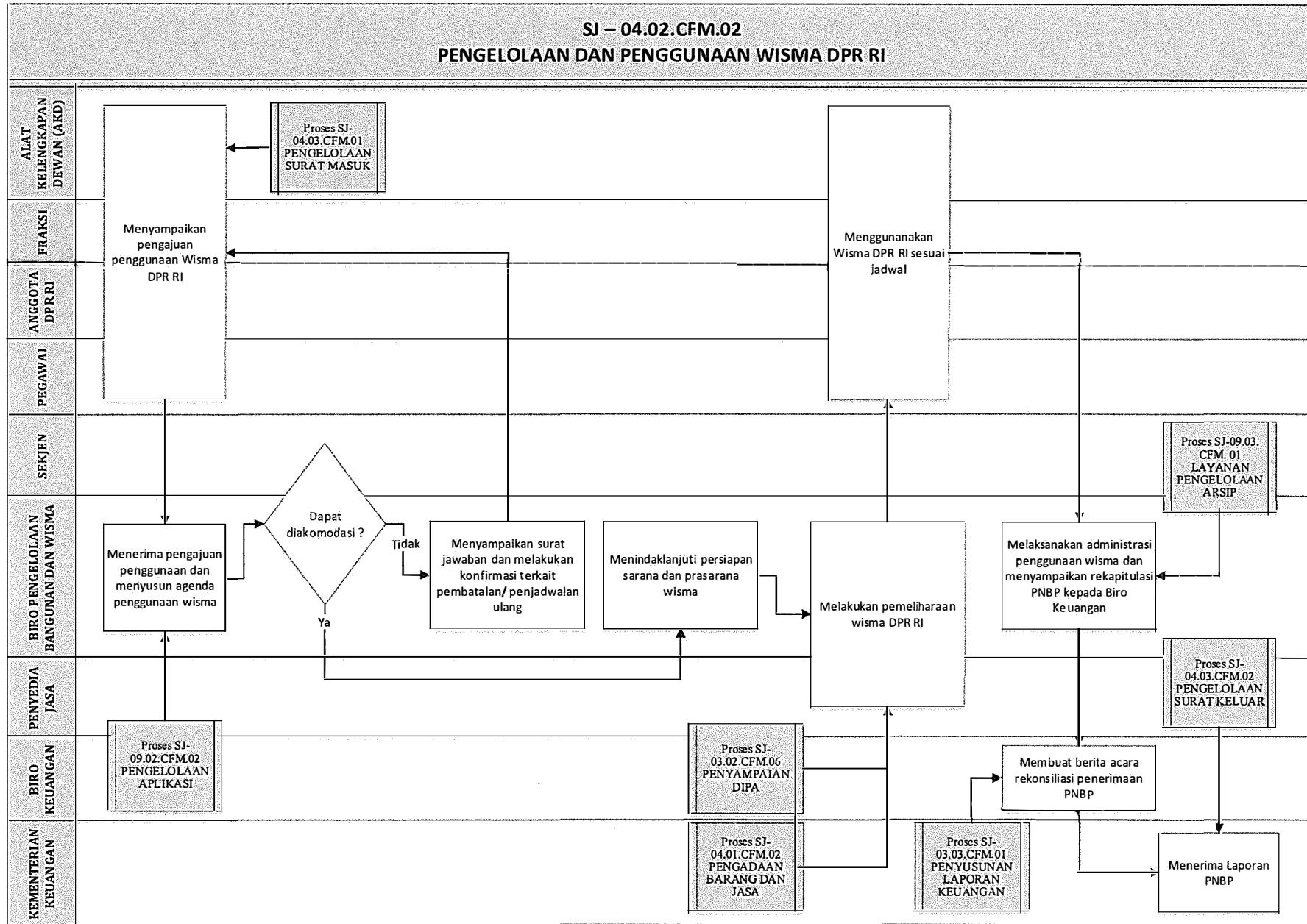


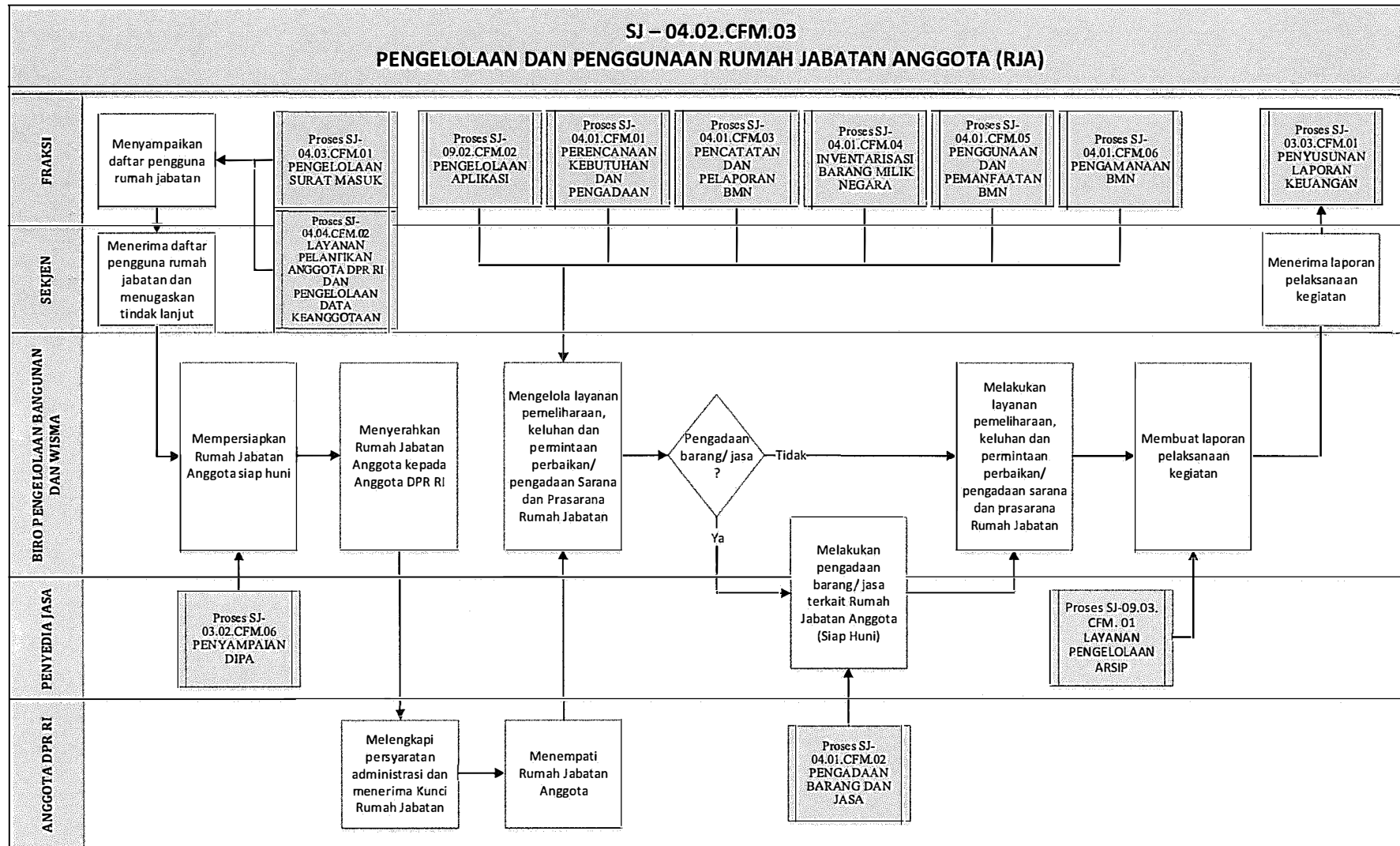
SJ – 04.01.CFM.11
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA



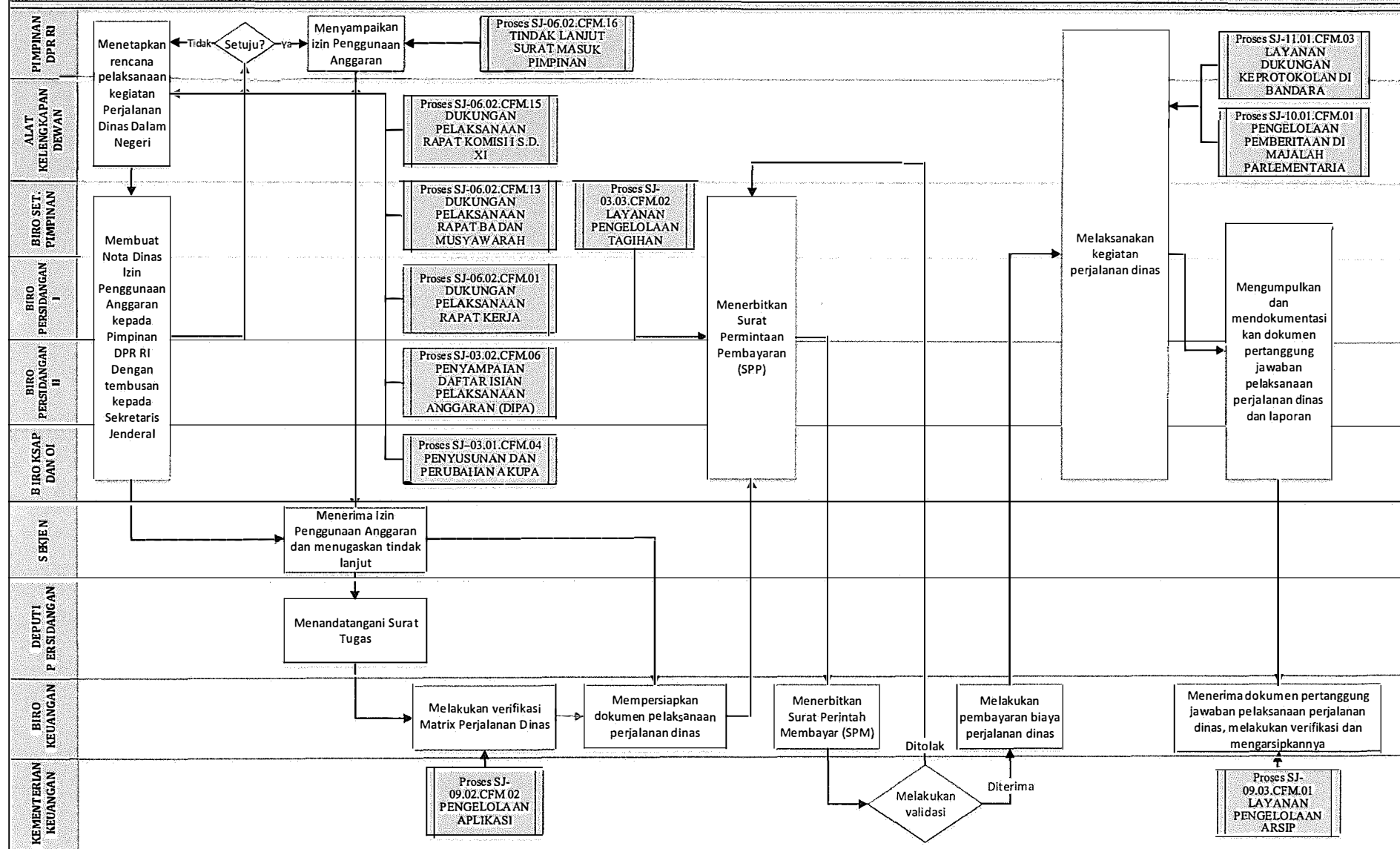
SJ – 04.02.CFM.01
PELAYANAN KESEHATAN





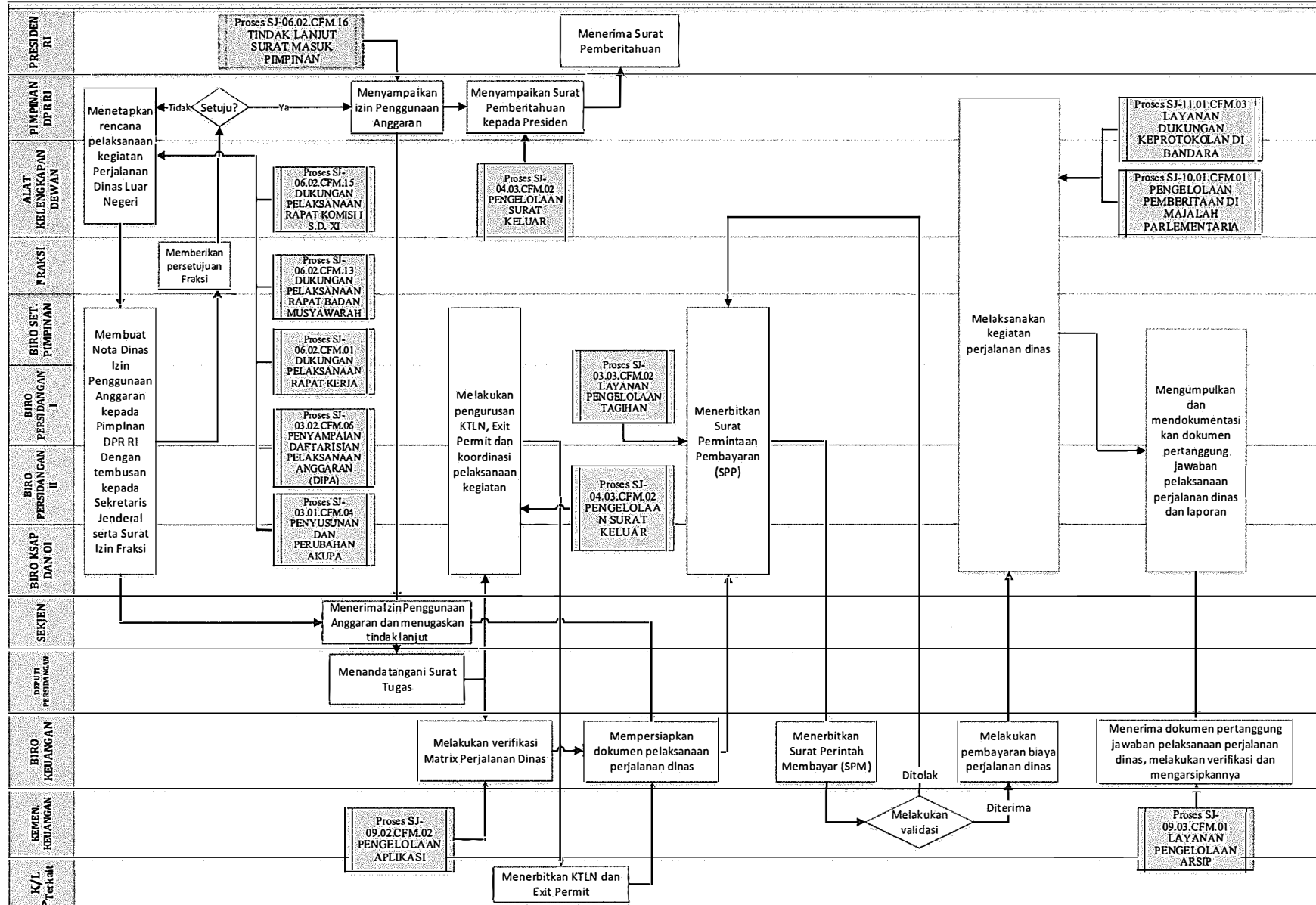


SJ – 04.02.CFM.04
LAYANAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ANGGOTA DPR RI

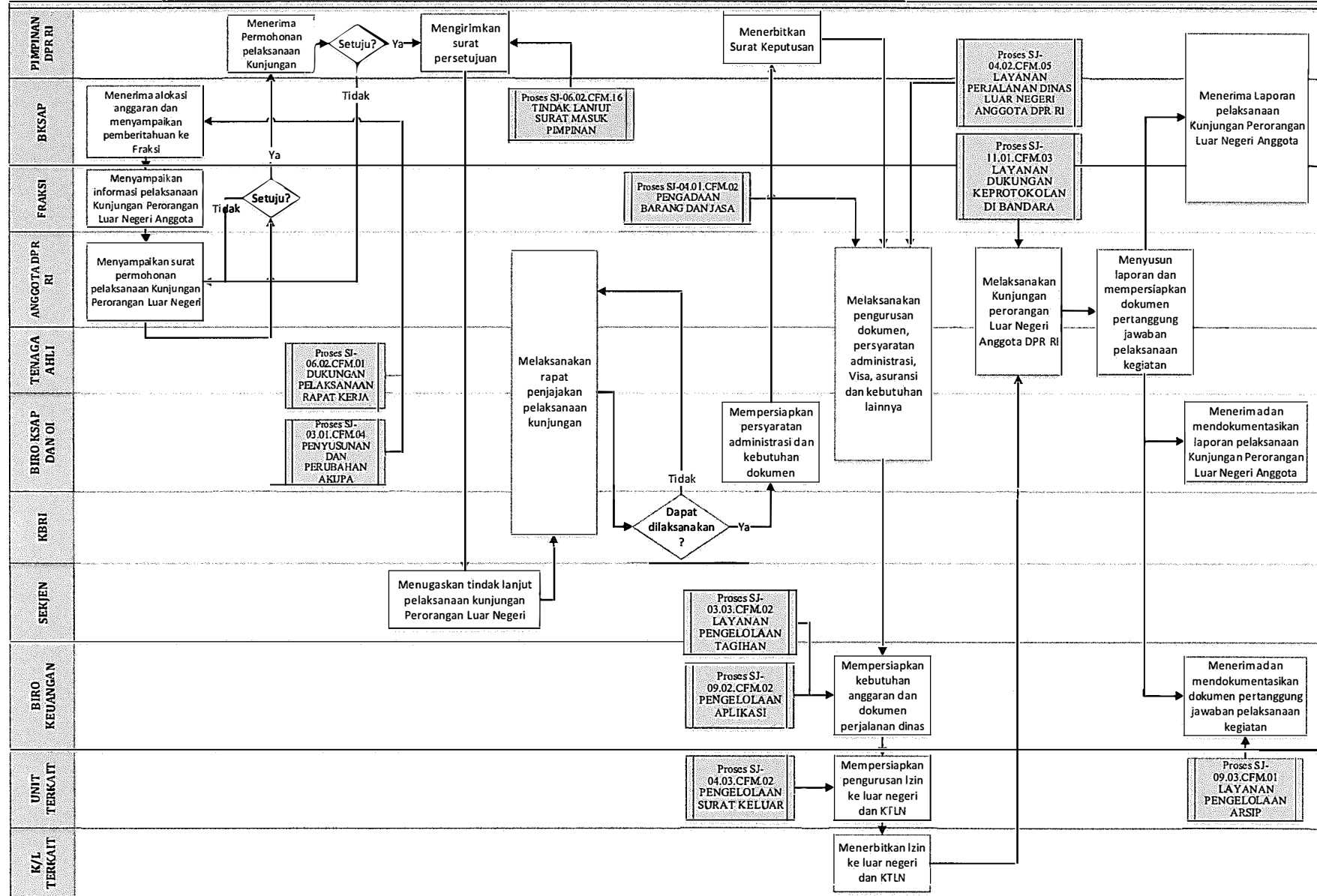


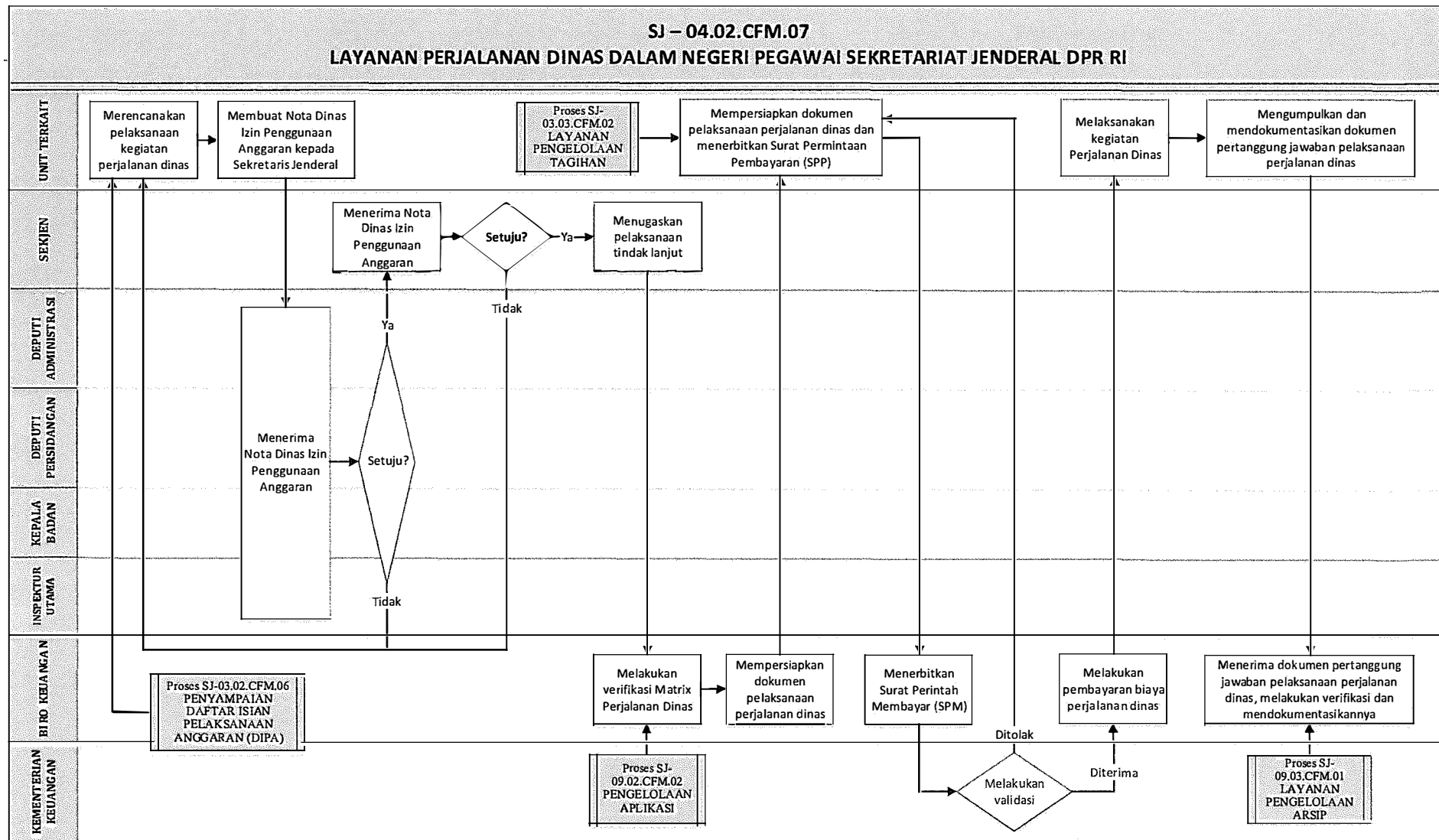
SJ – 04.02.CFM.05

LAYANAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI ANGGOTA DPR RI

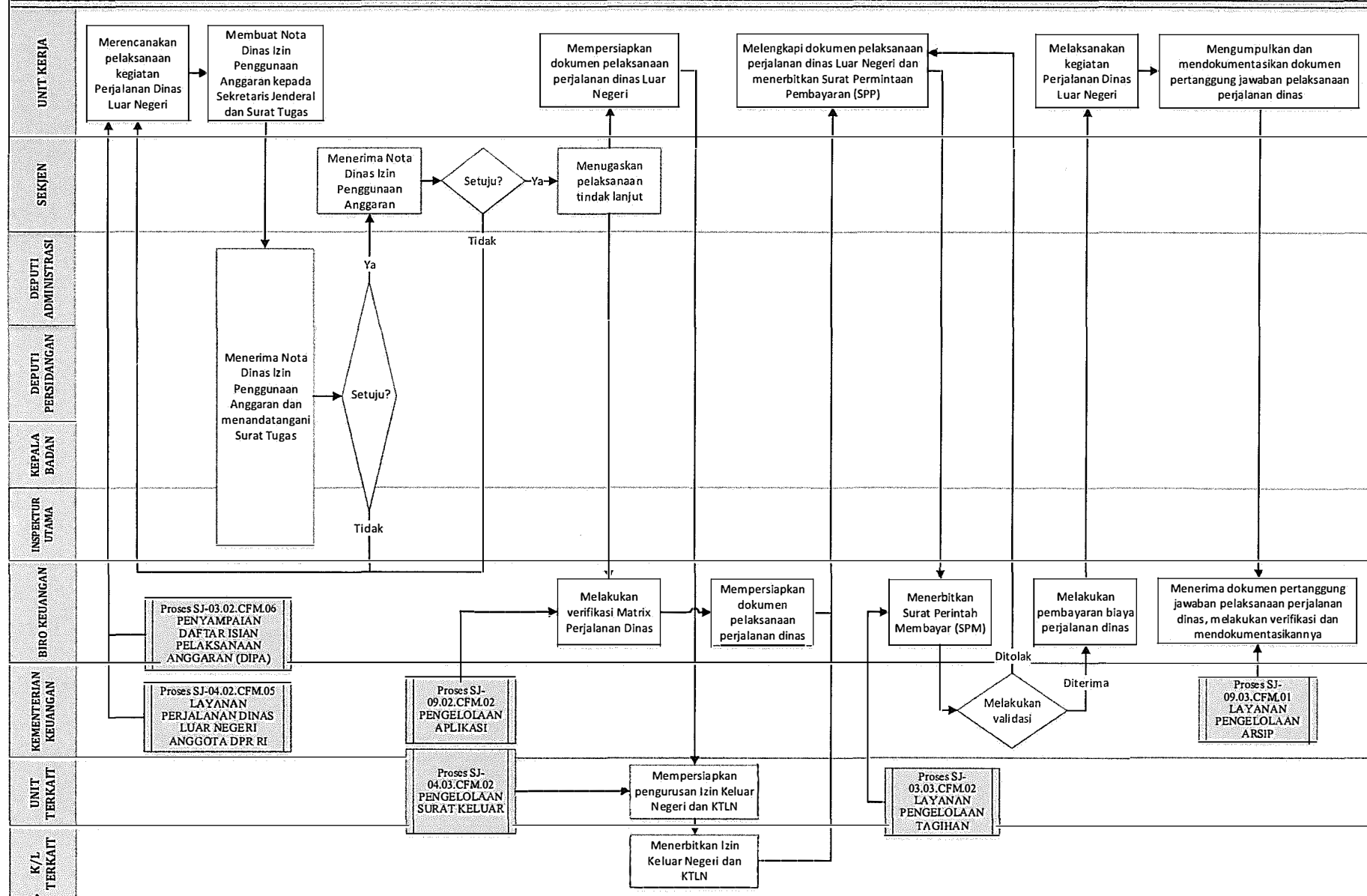


SJ – 04.02.CFM.06
PELAKSANAAN KUNJUNGAN PERORANGAN LUAR NEGERI ANGGOTA DPR RI

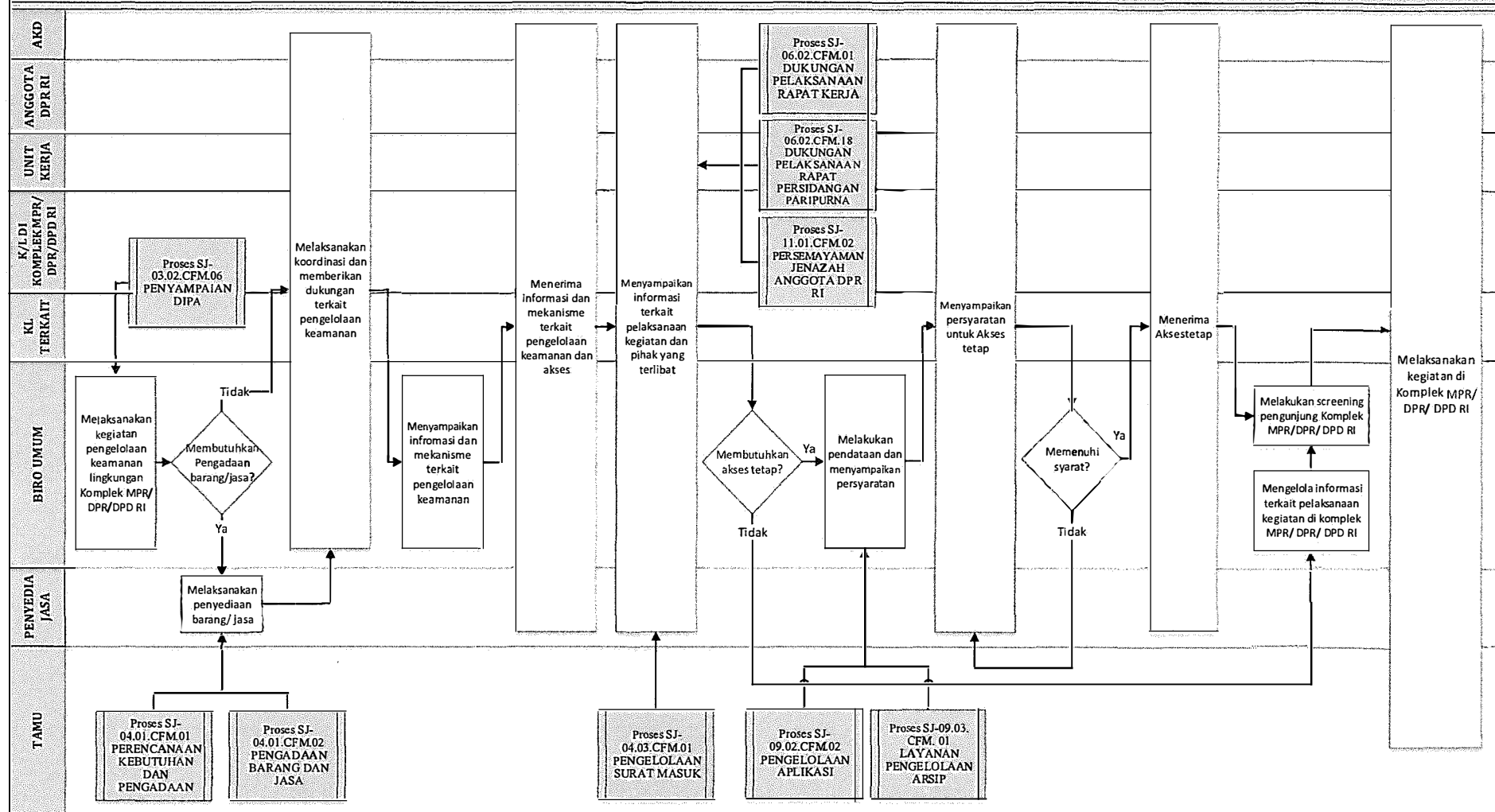




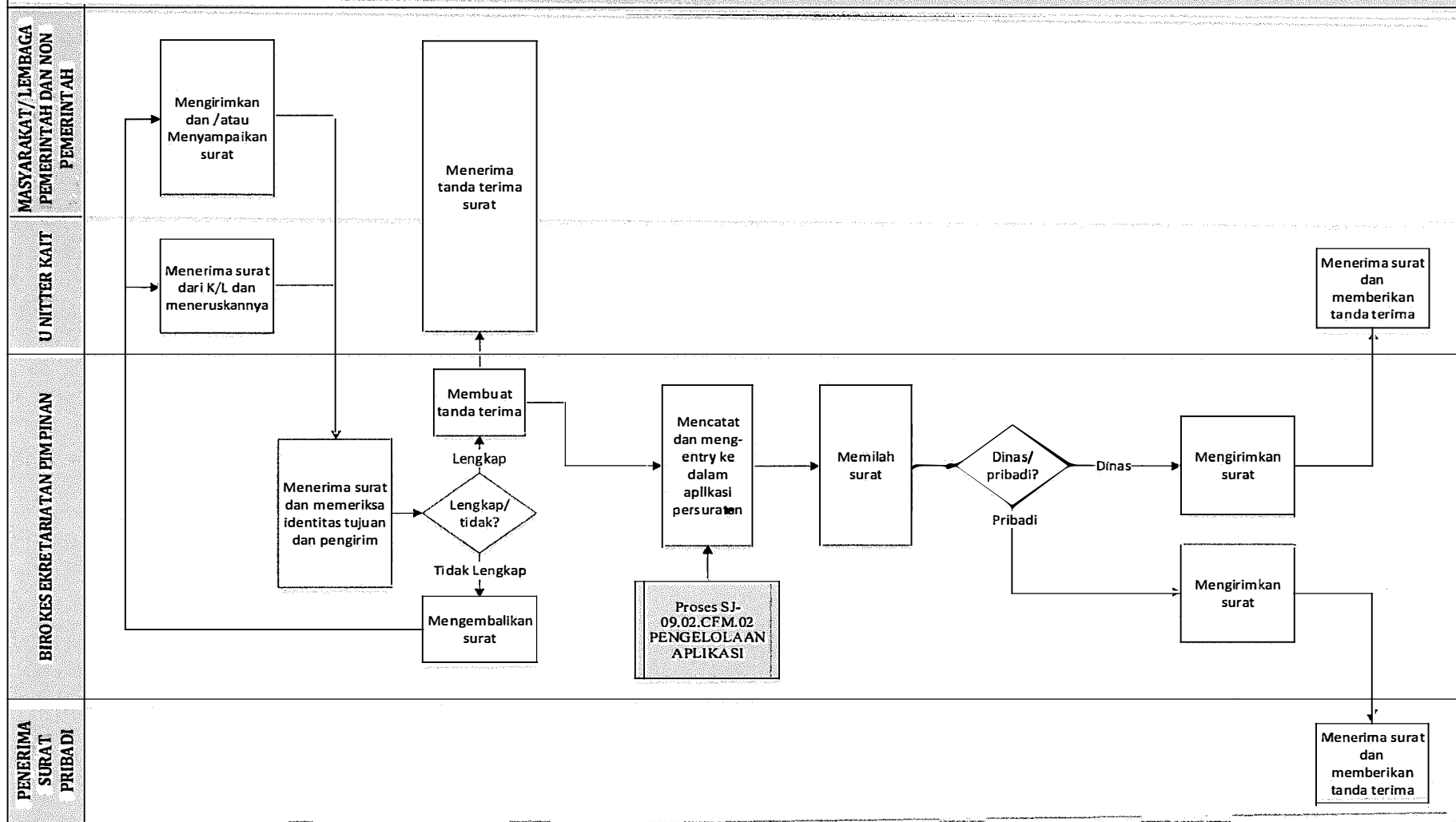
SJ – 04.02.CFM.08
LAYANAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



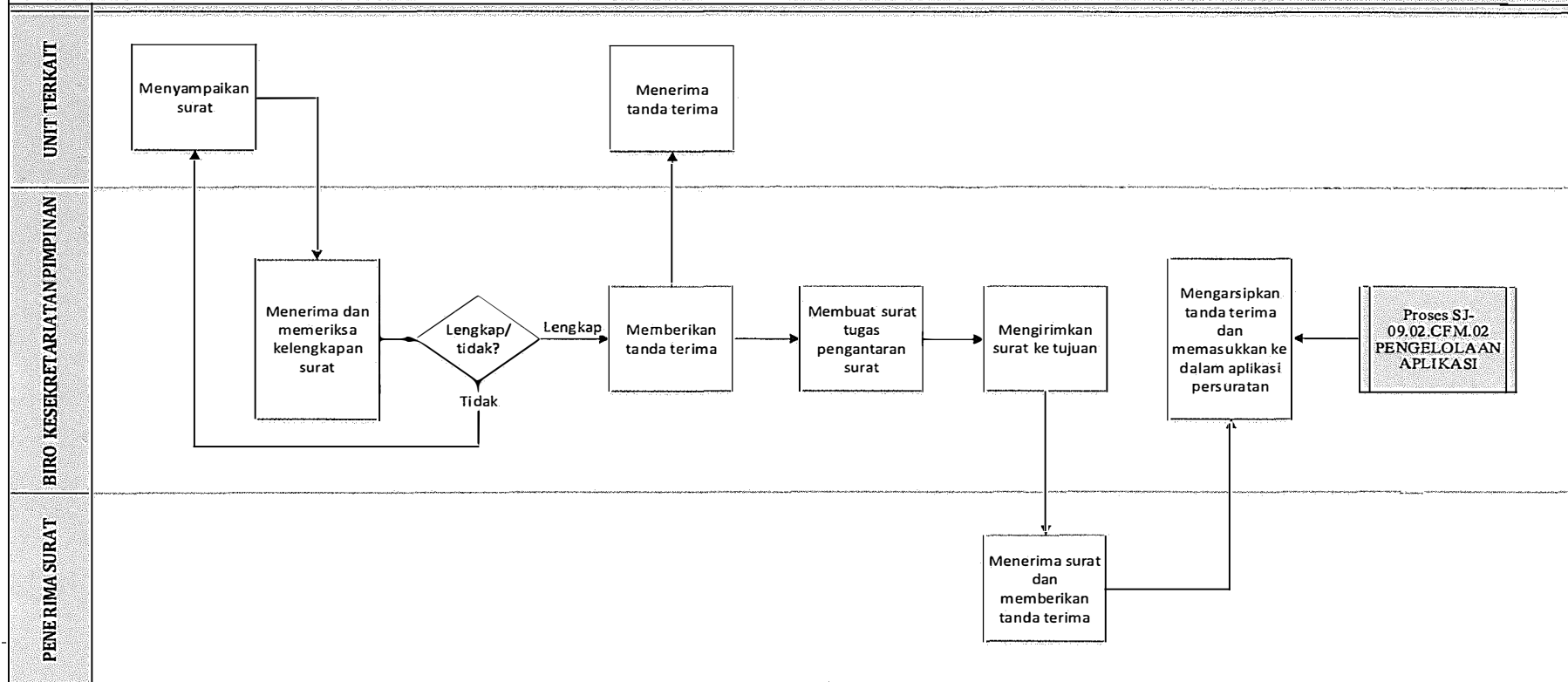
SJ - 04.02.CFM.09
PENGELOLAAN KEAMANAN DAN AKSES KOMPLEK PERKANTORAN DPR RI

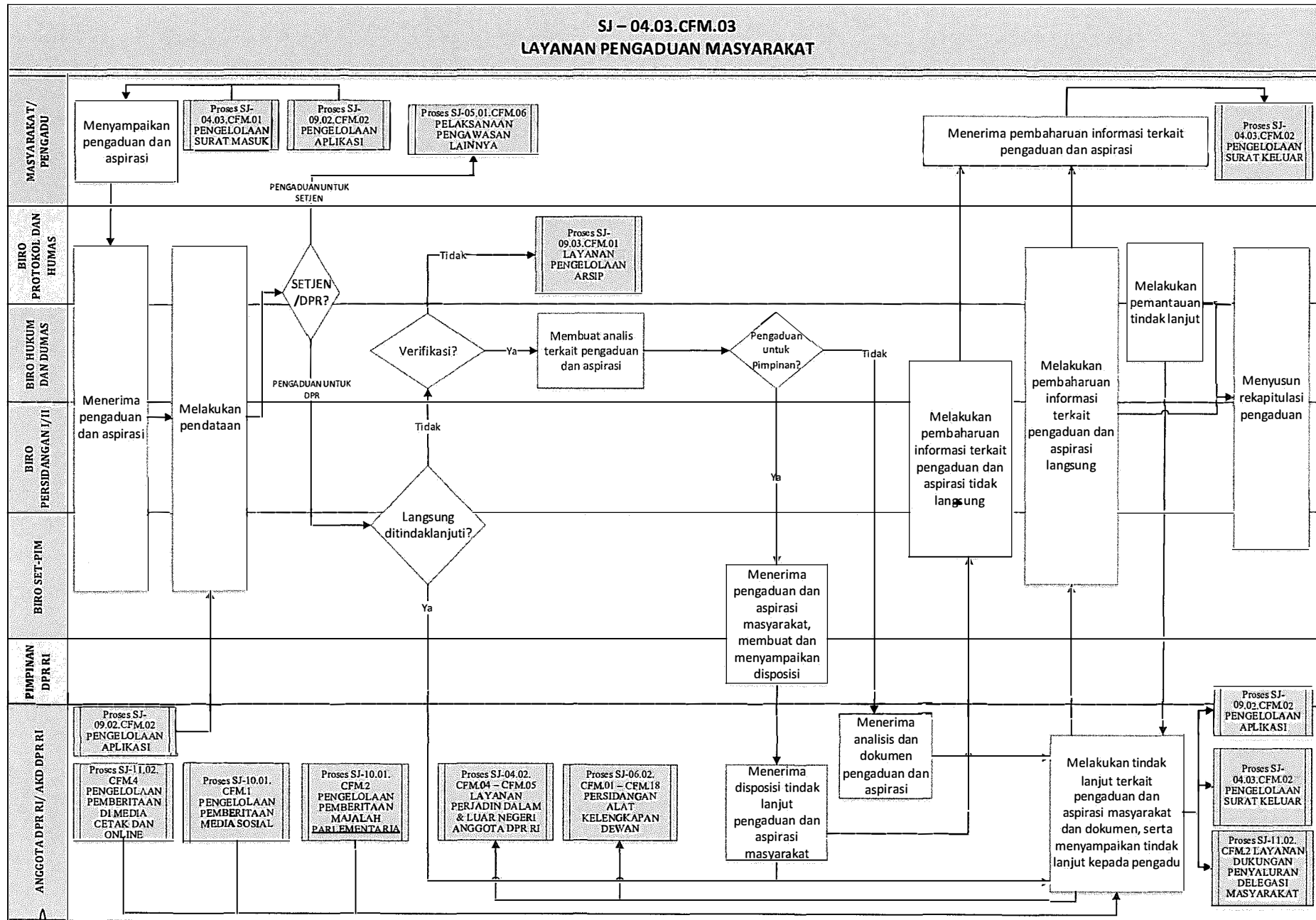


SJ – 04.03.CFM.01
PENGELOLAAN SURAT MASUK

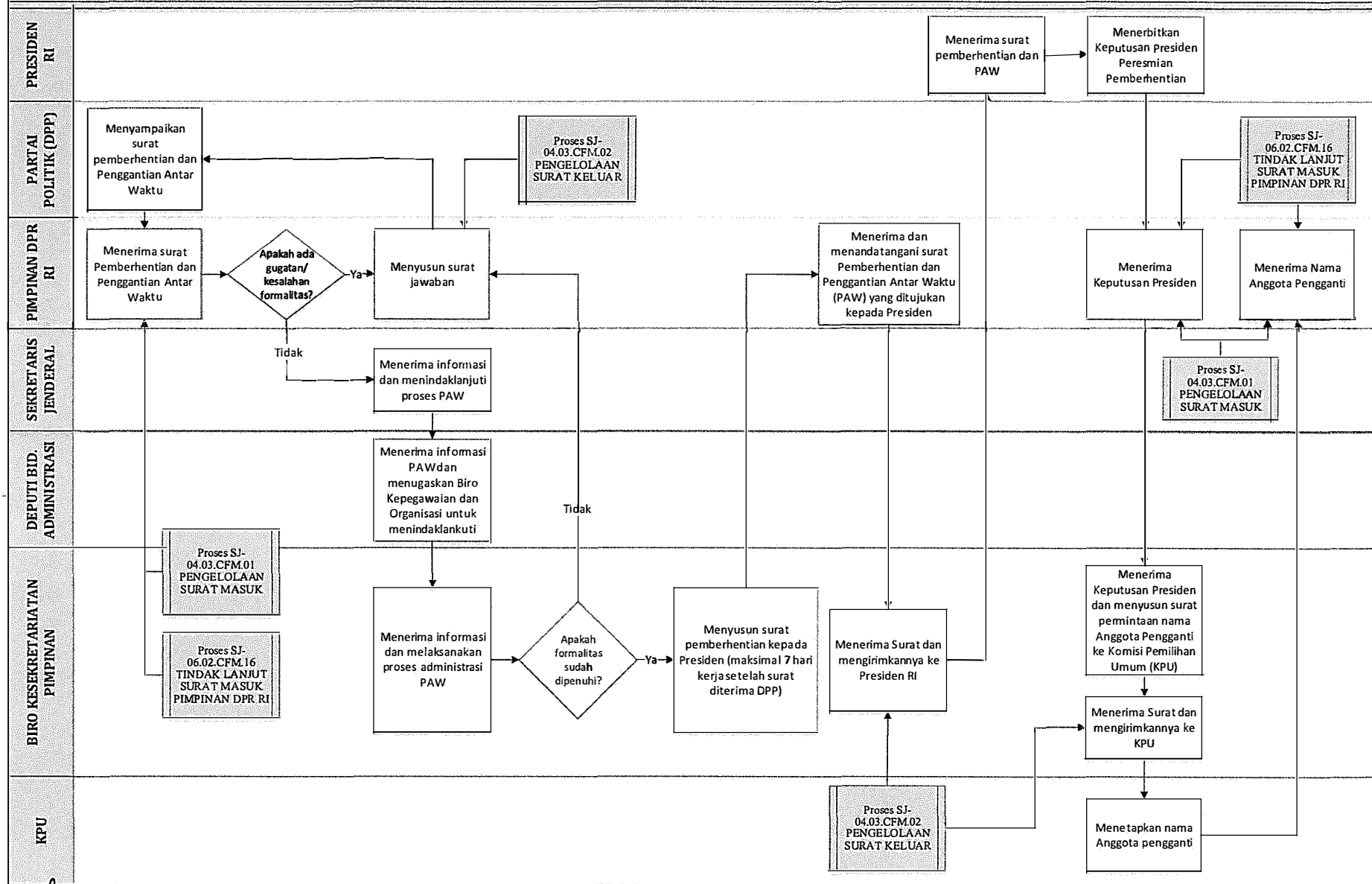


SJ – 04.03.CFM.02
PENGELOLAAN SURAT KELUAR

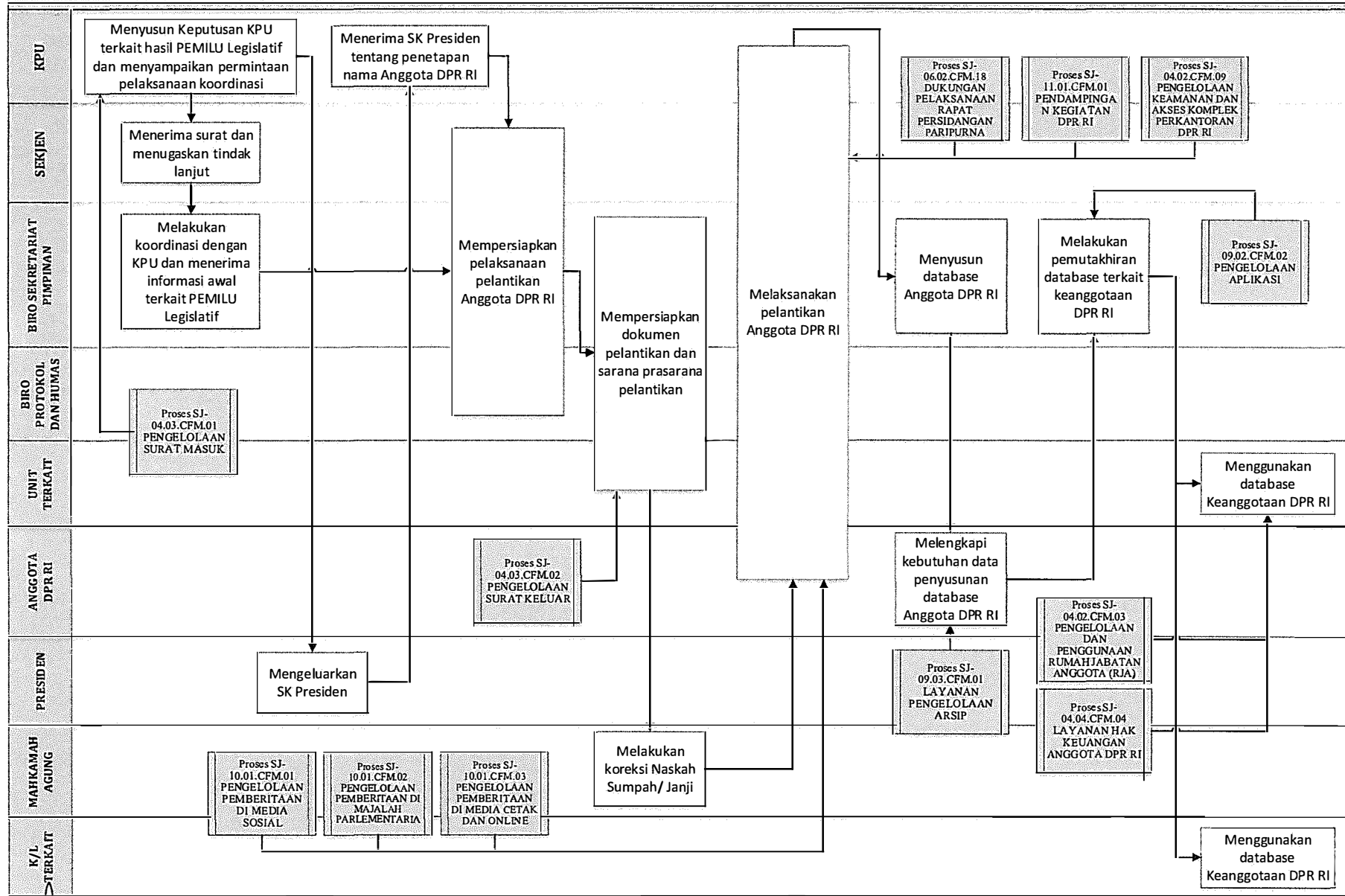




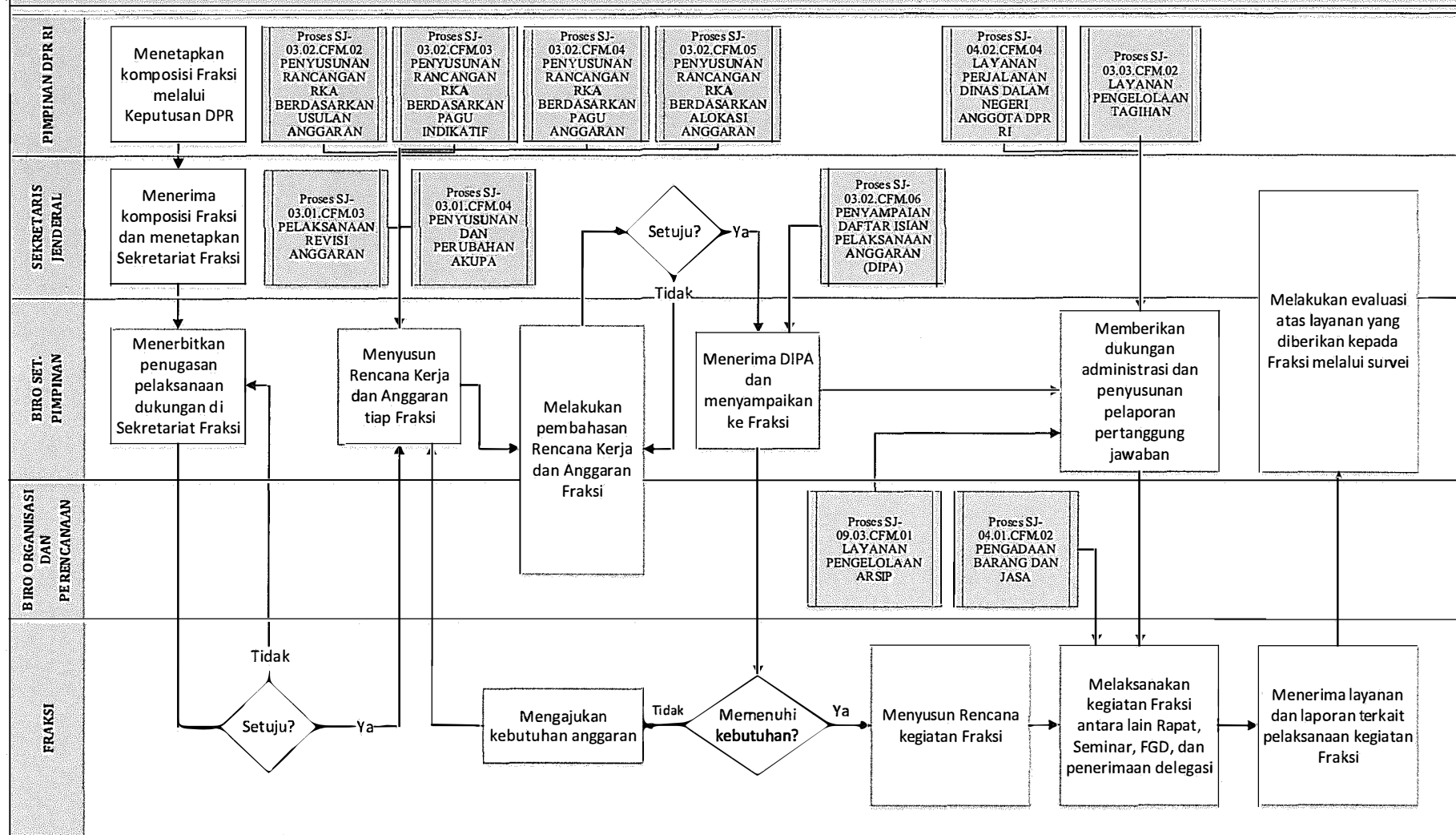
SJ – 04.04.CFM.01
LAYANAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR RI



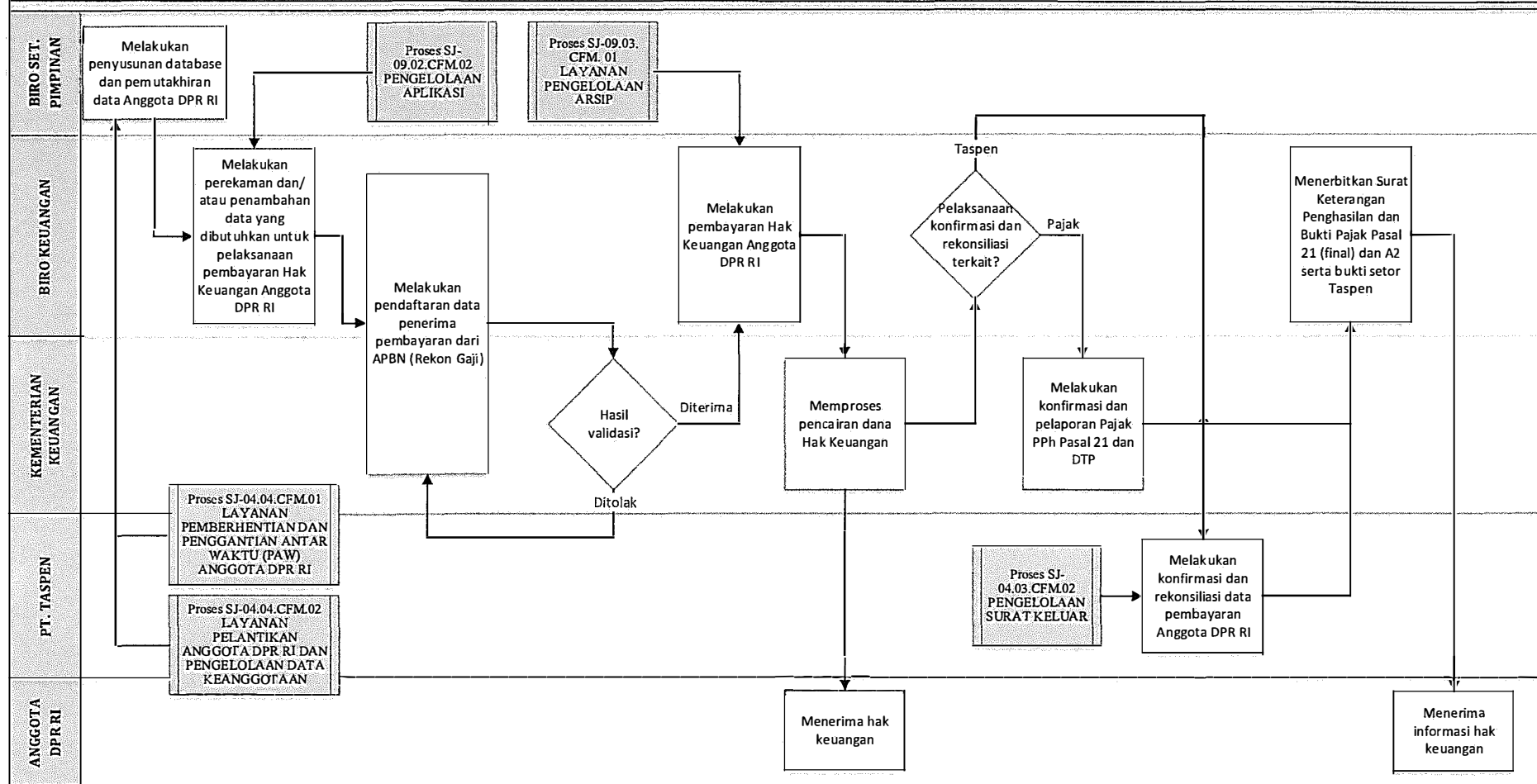
SJ – 04.04.CFM.02
LAYANAN PELANTIKAN ANGGOTA DPR RI DAN PENGELOLAAN DATA KEANGGOTAAN

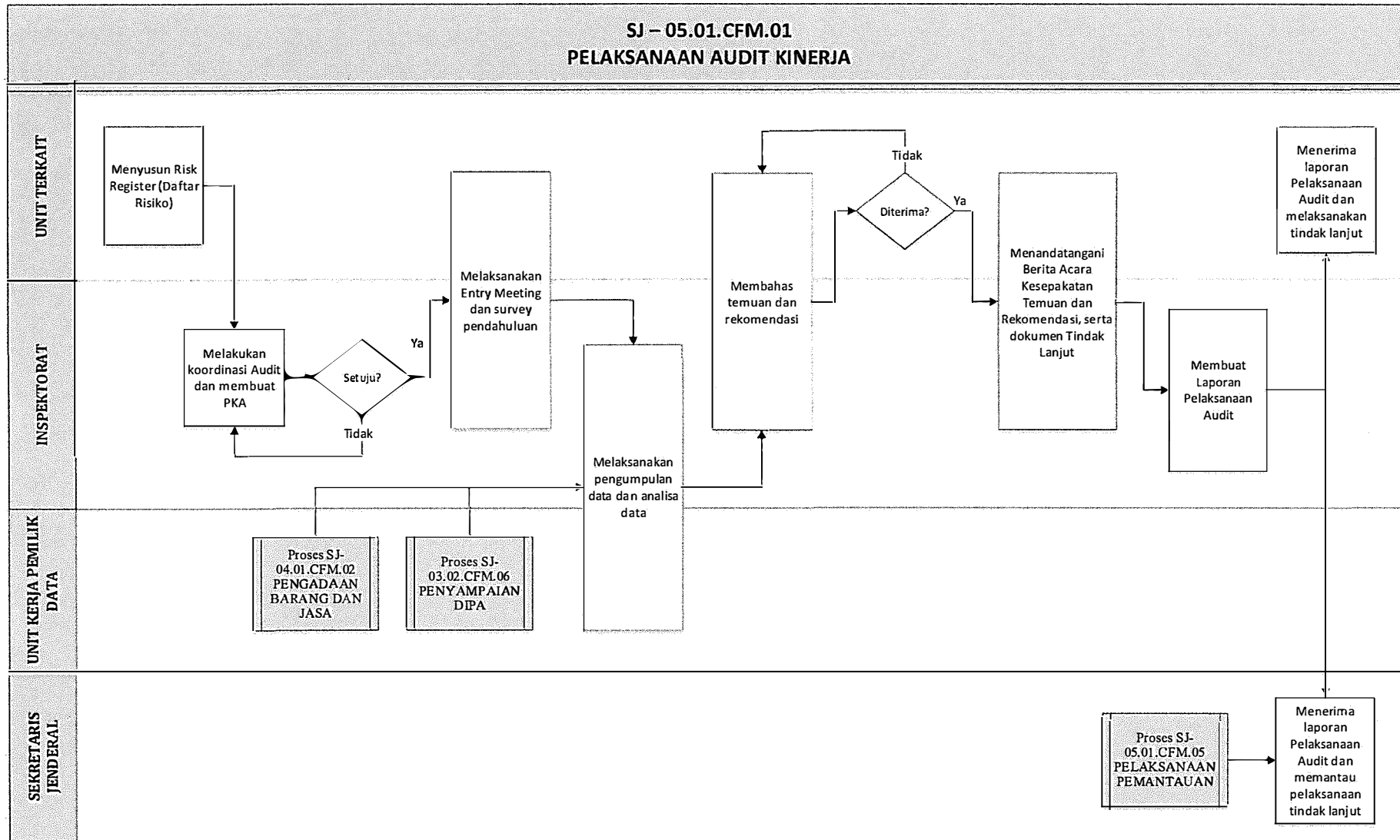


SJ – 04.04.CFM.03
LAYANAN KEPADA FRAKSI

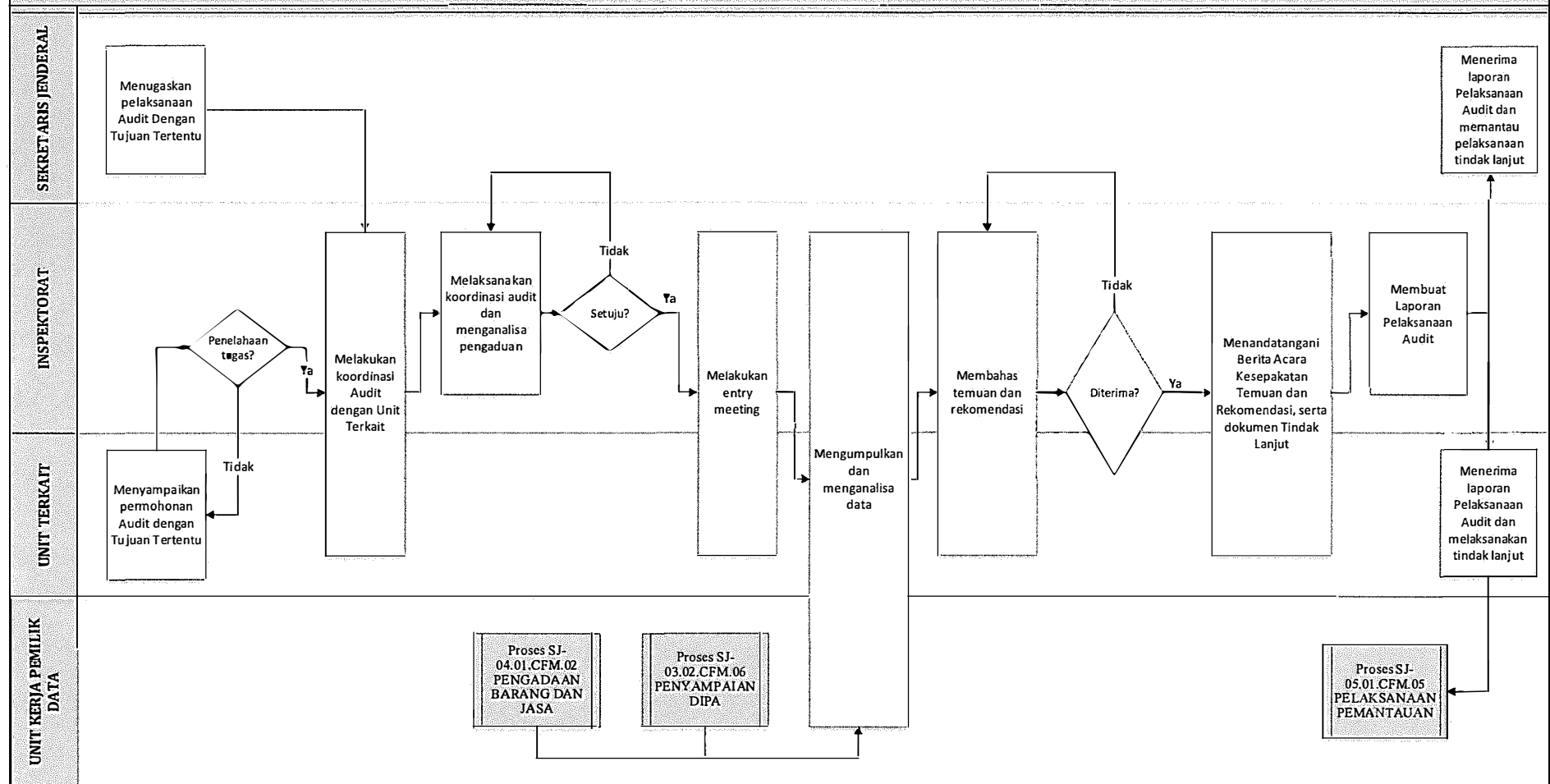


SJ – 04.04.CFM.04
LAYANAN HAK KEUANGAN ANGGOTA DPR RI

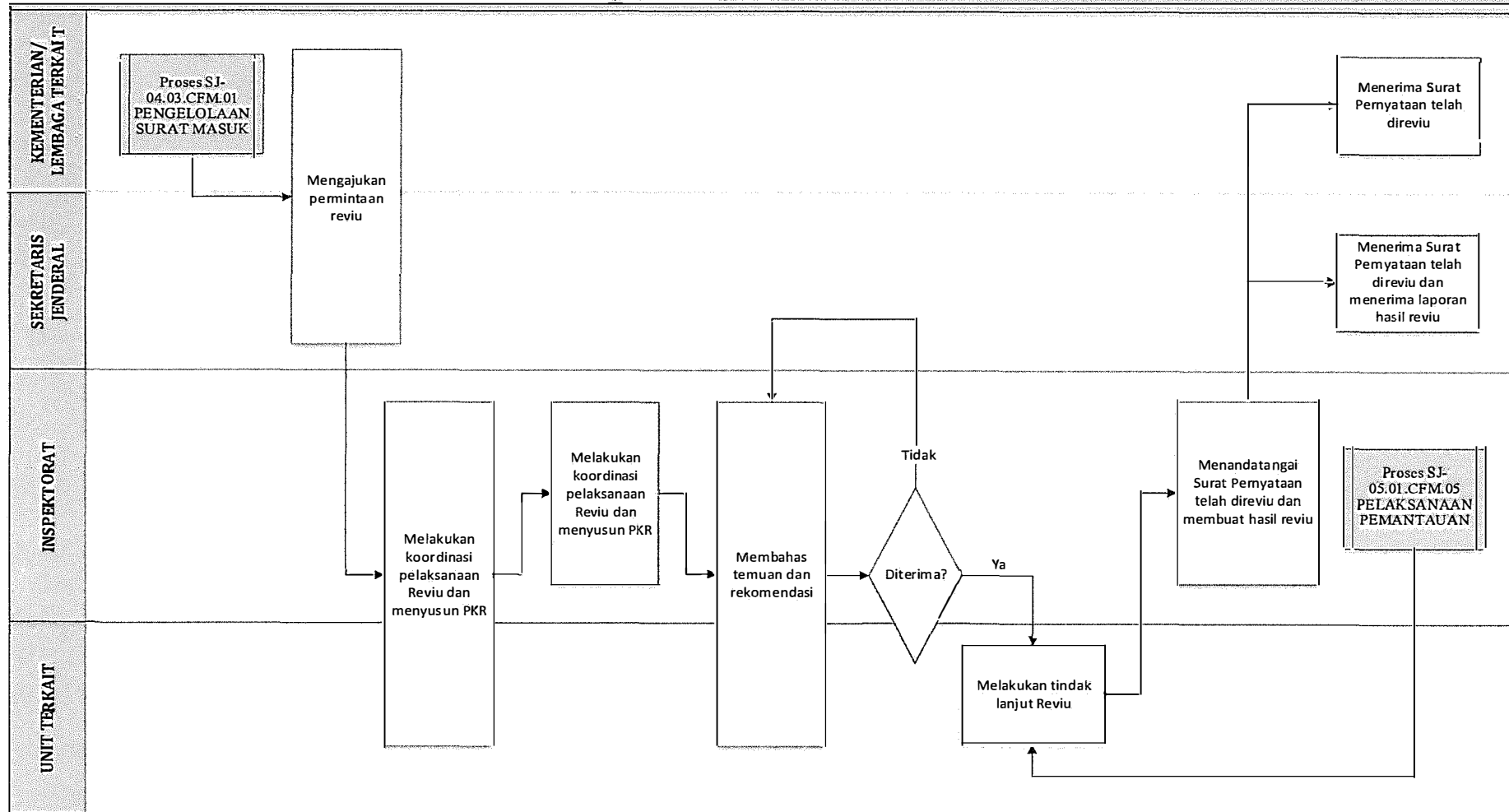


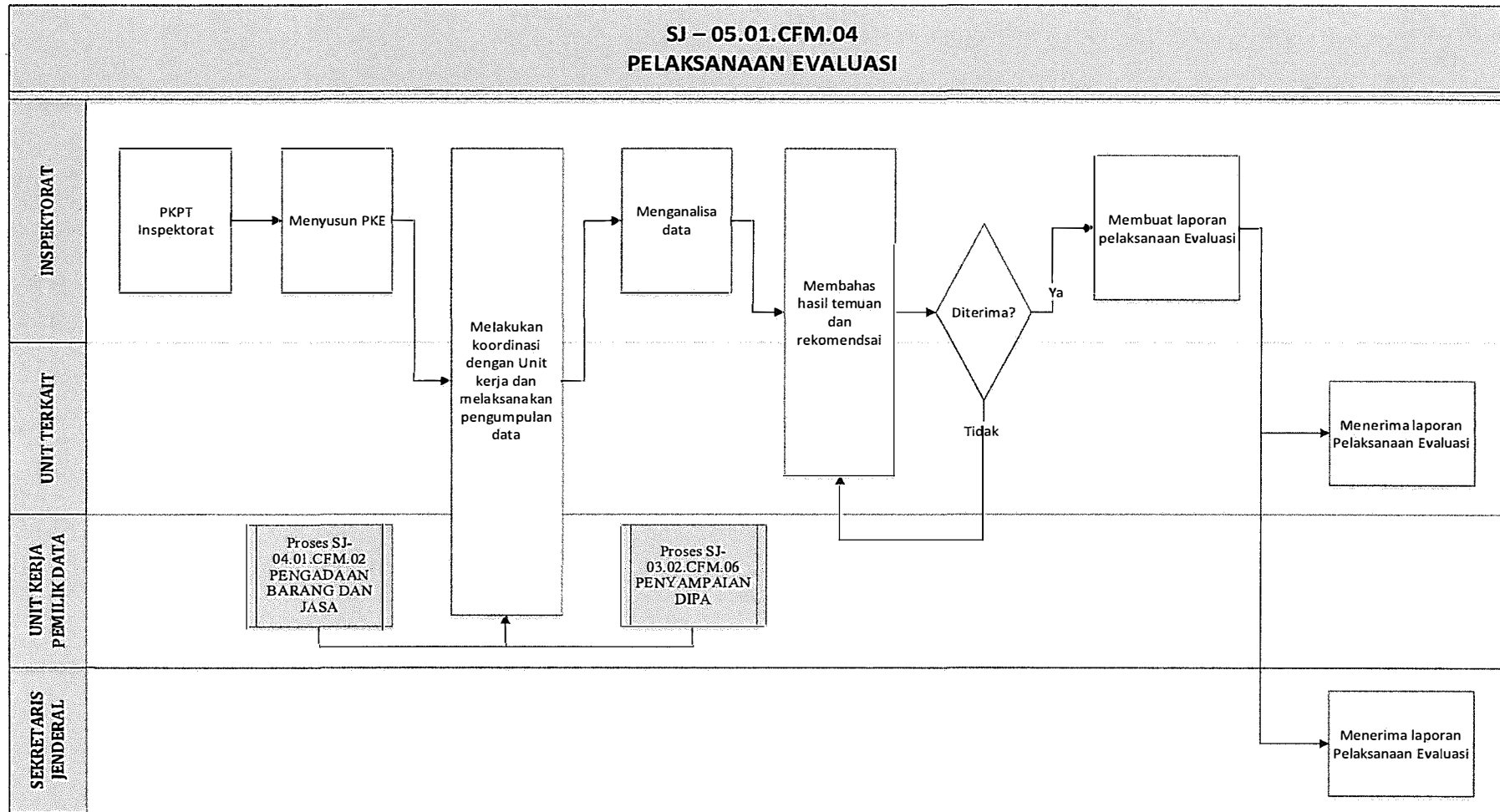


SJ – 05.01.CFM.02
PELAKSANAAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

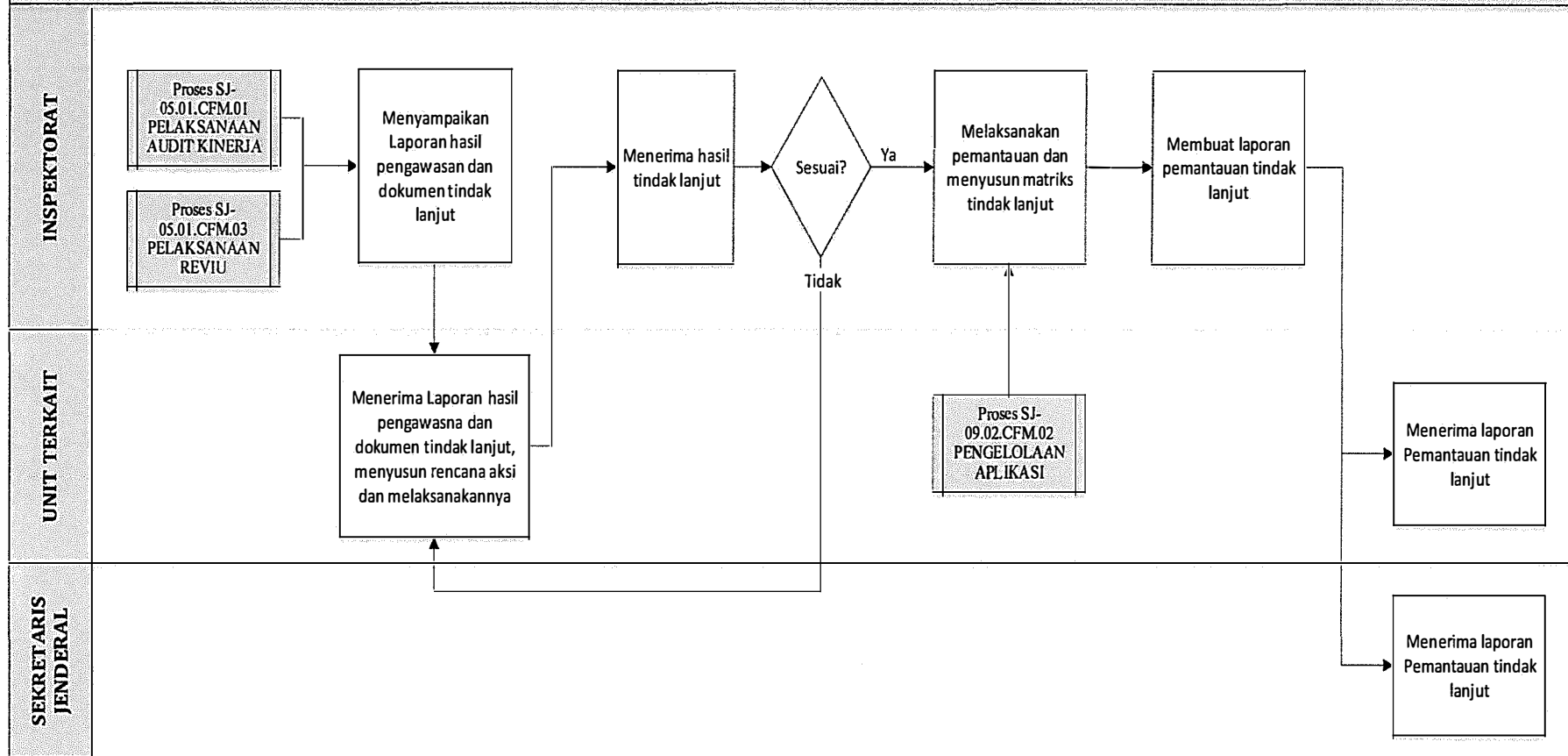


**SJ – 05.01.CFM.03
PELAKSANAAN REVIU**

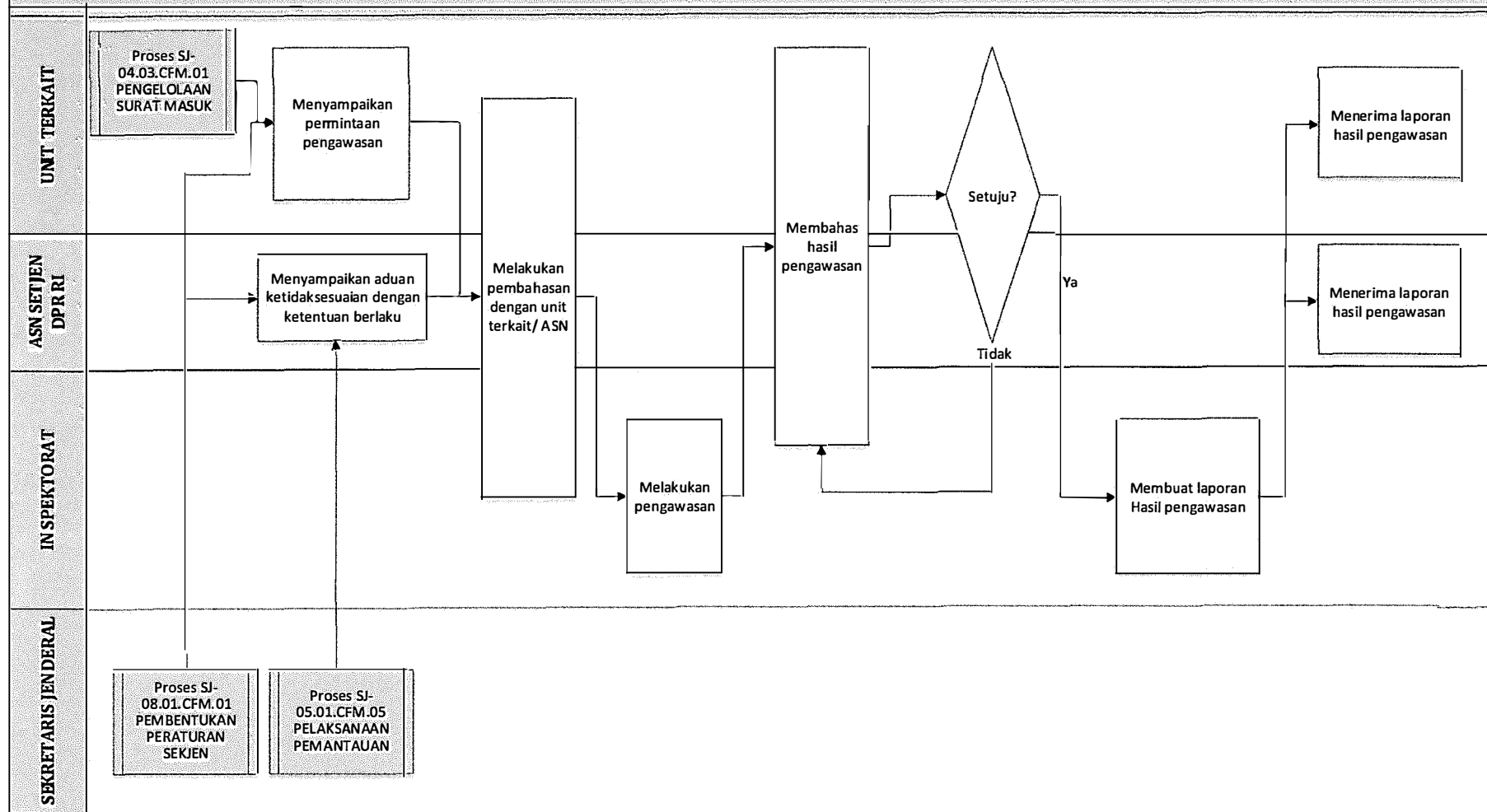




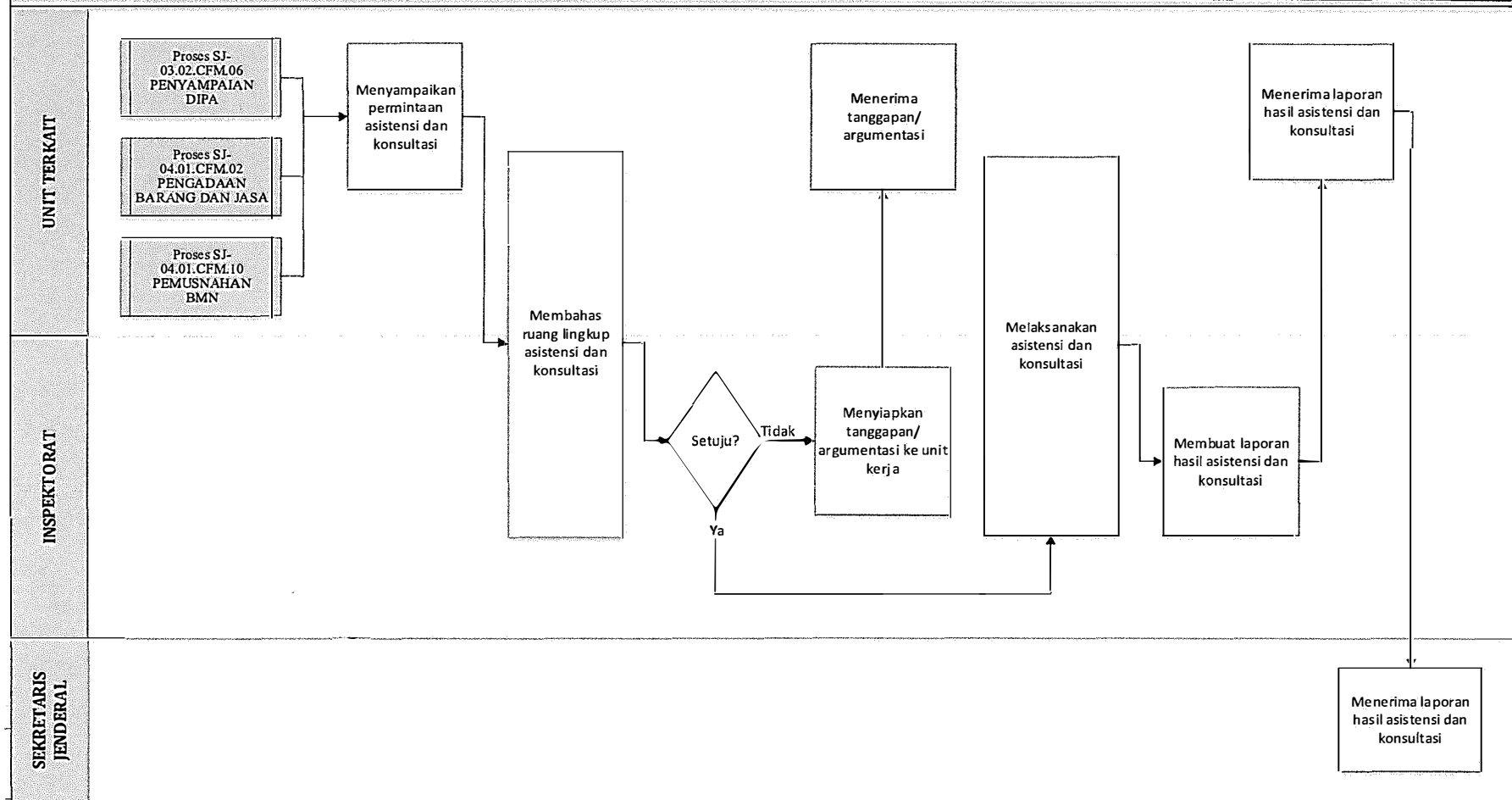
SJ – 05.01.CFM.05
PELAKSANAAN PEMANTAUAN

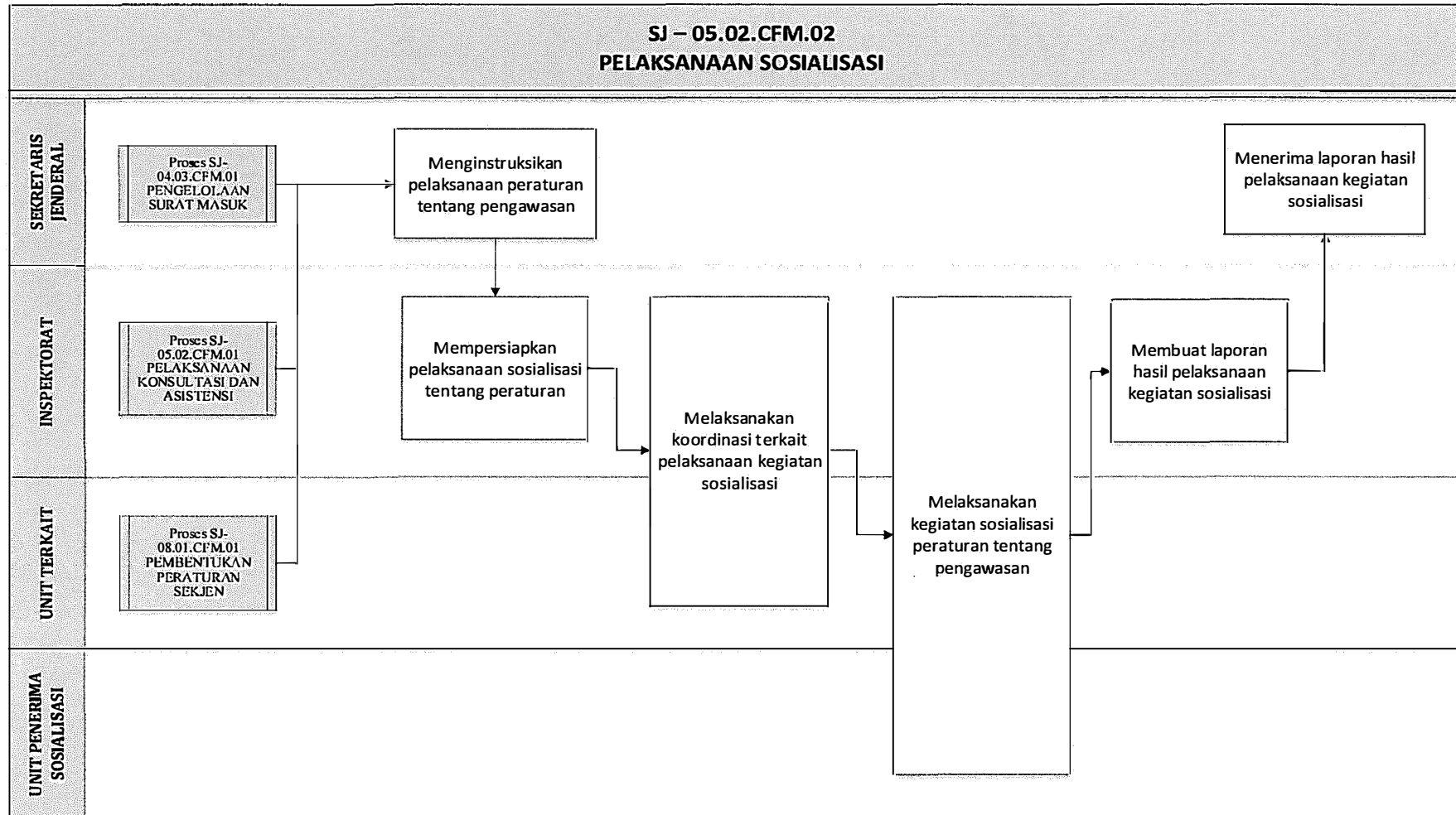


SJ – 05.01.CFM.06
PELAKSANAAN PENGAWASAN LAINNYA

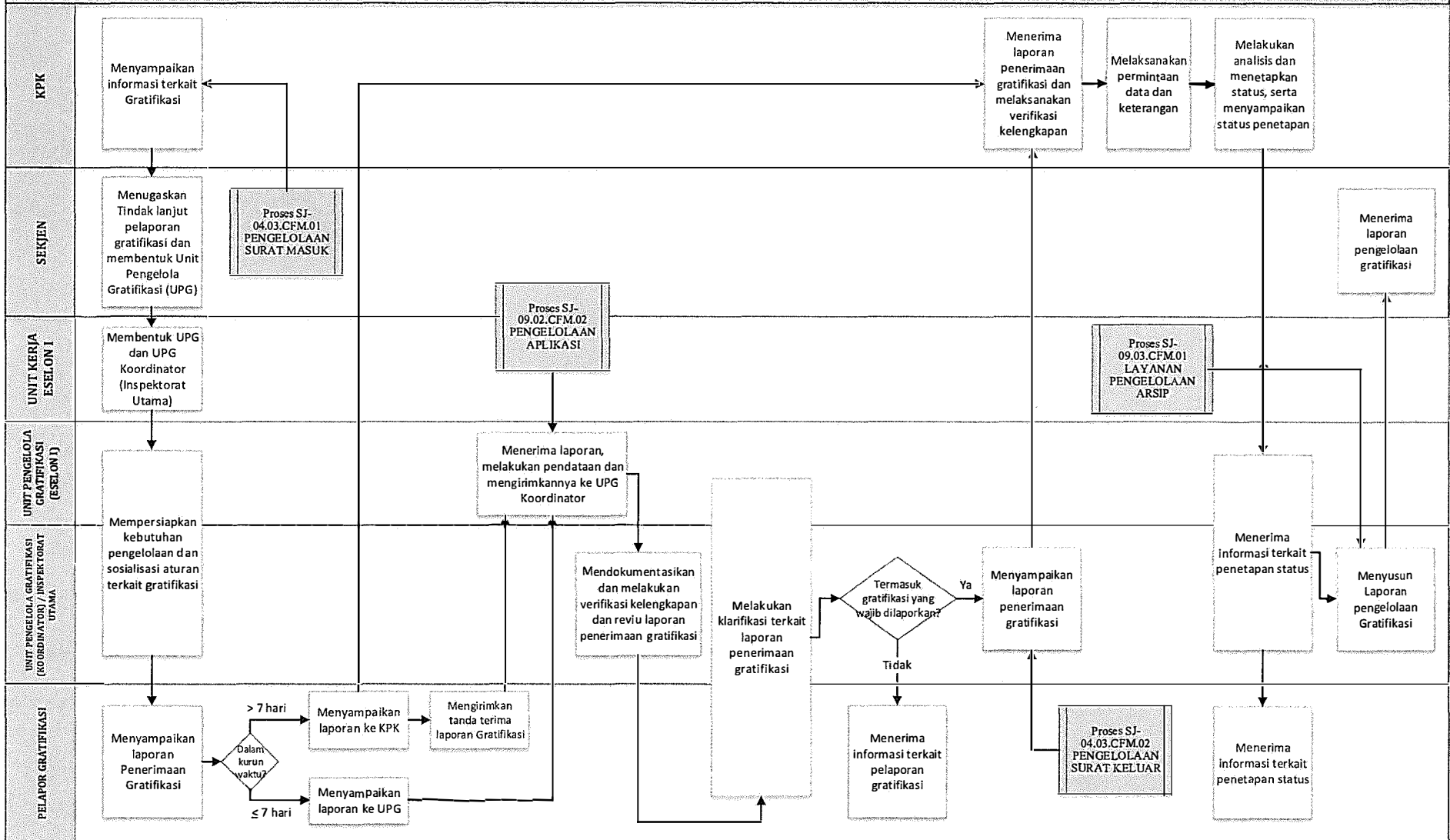


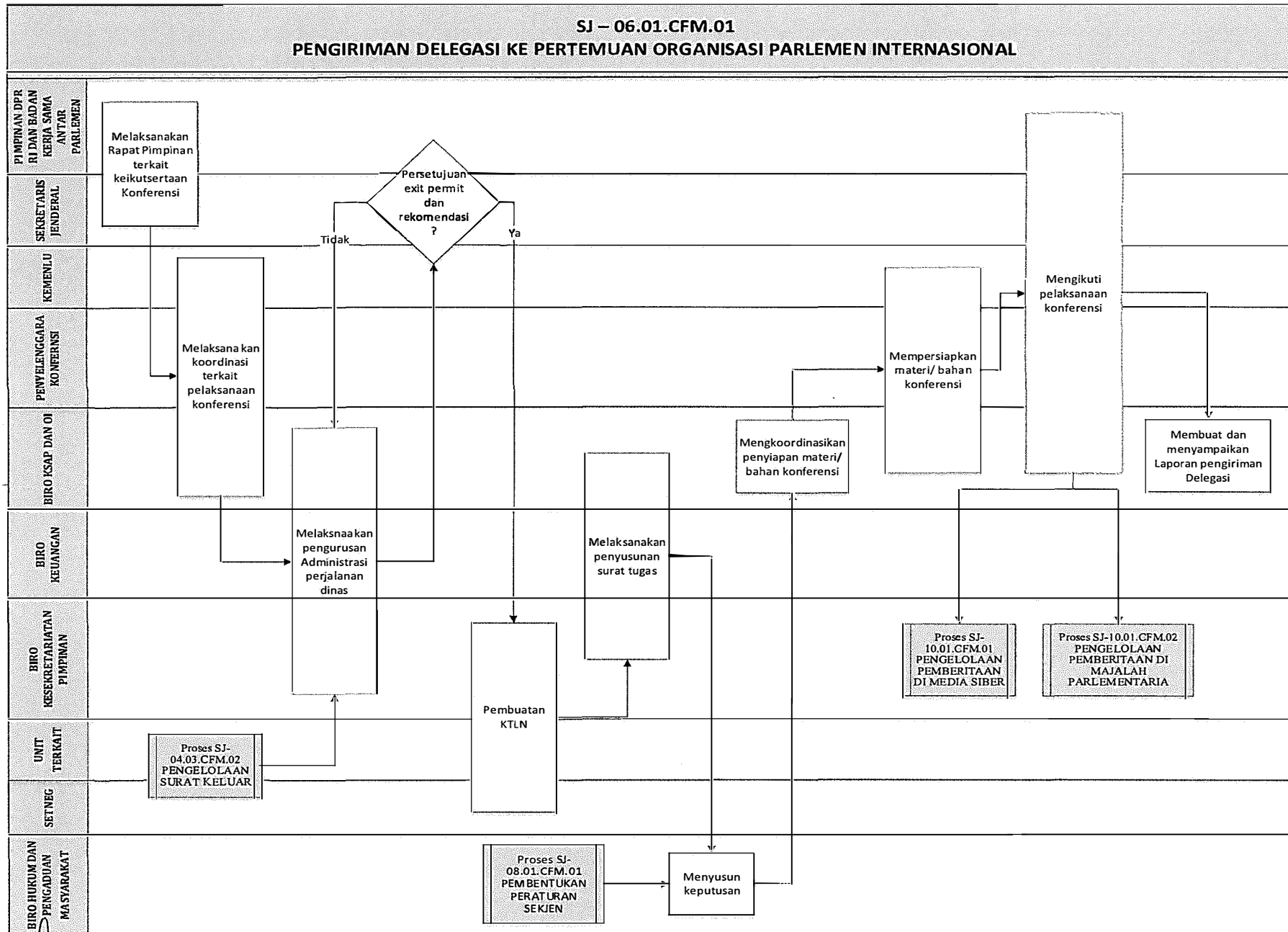
SJ – 05.02.CFM.01
PELAKSANAAN KONSULTASI DAN ASISTENSI



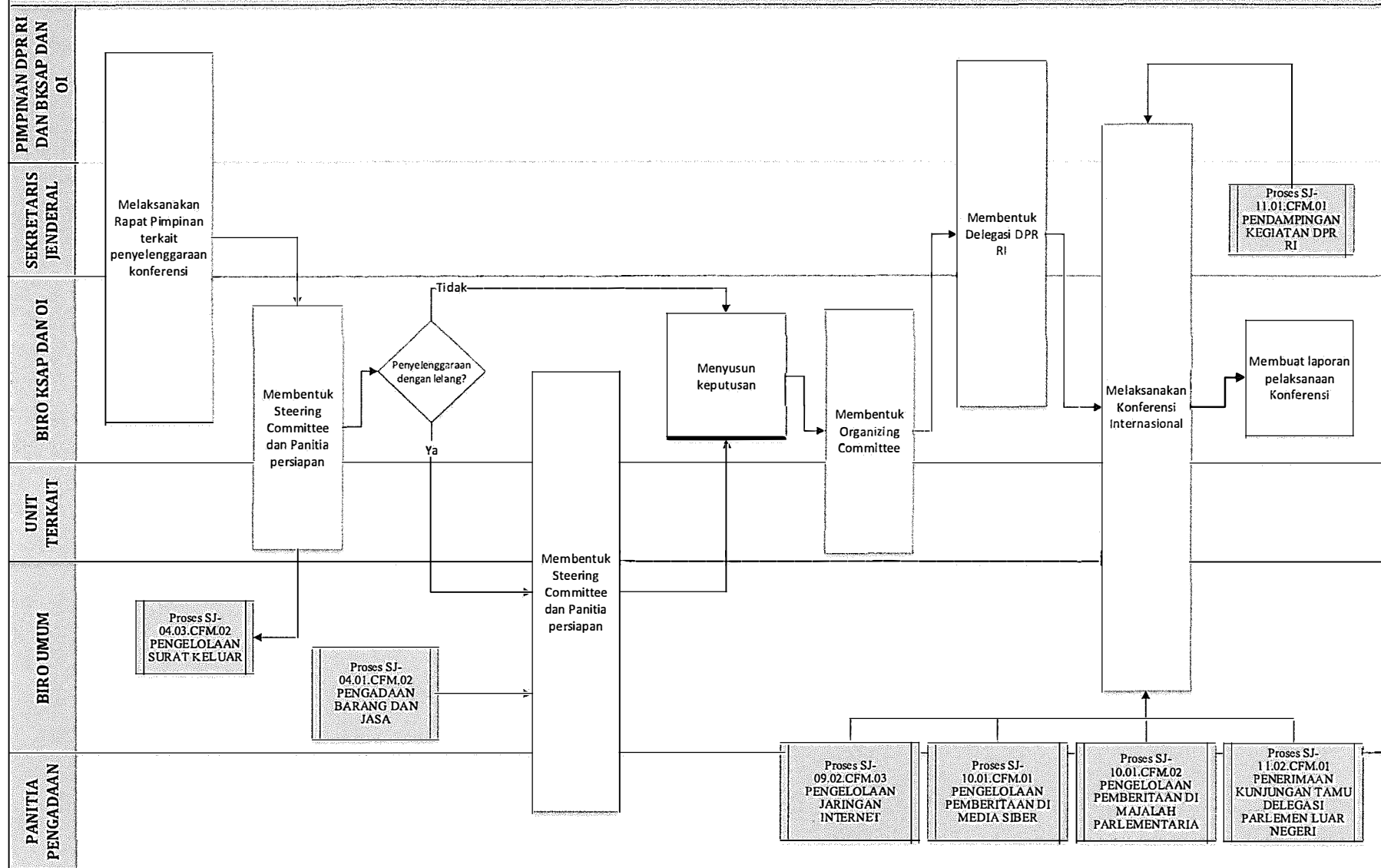


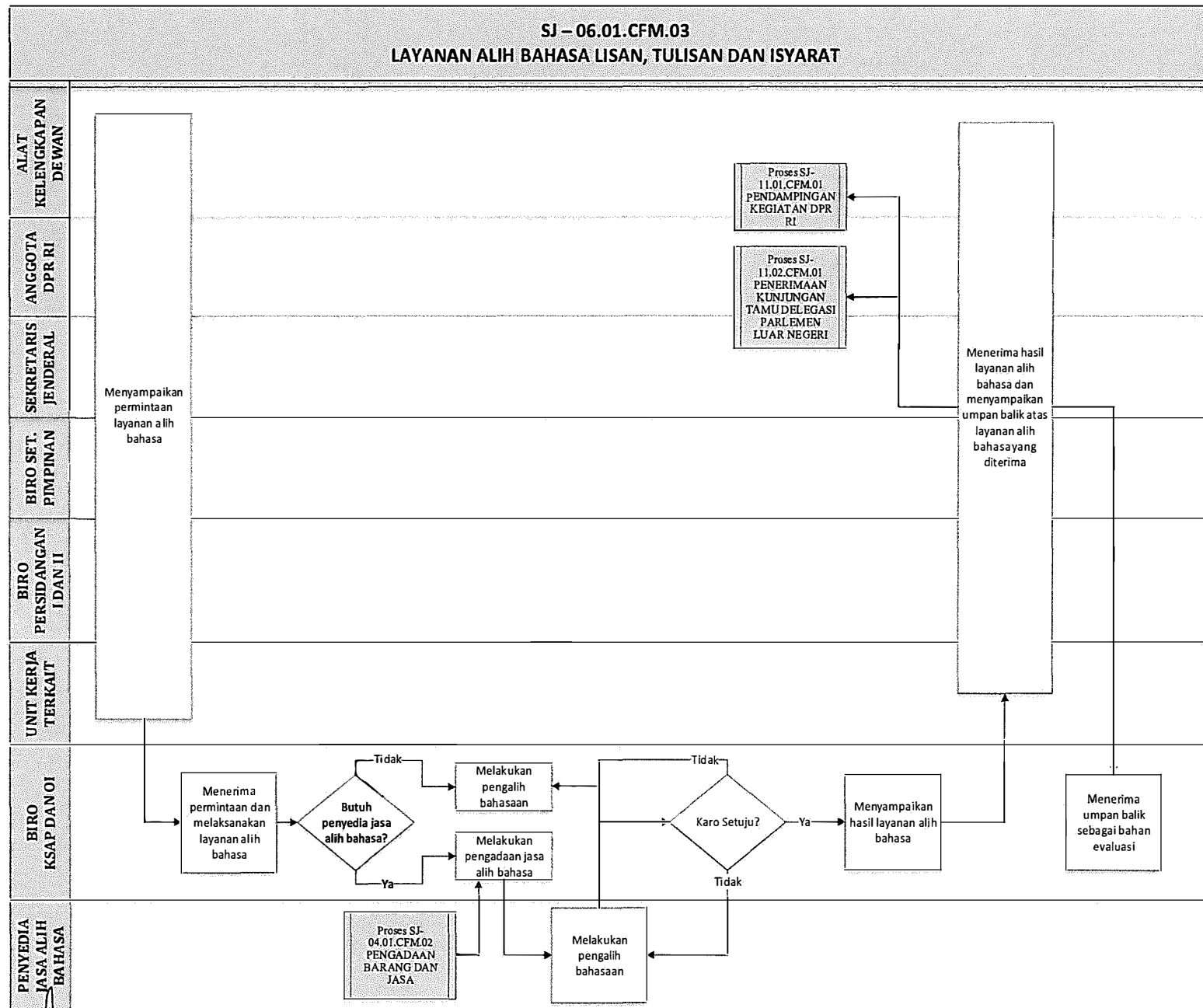
PENGELOLAAN LAPORAN GRATIFIKASI DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



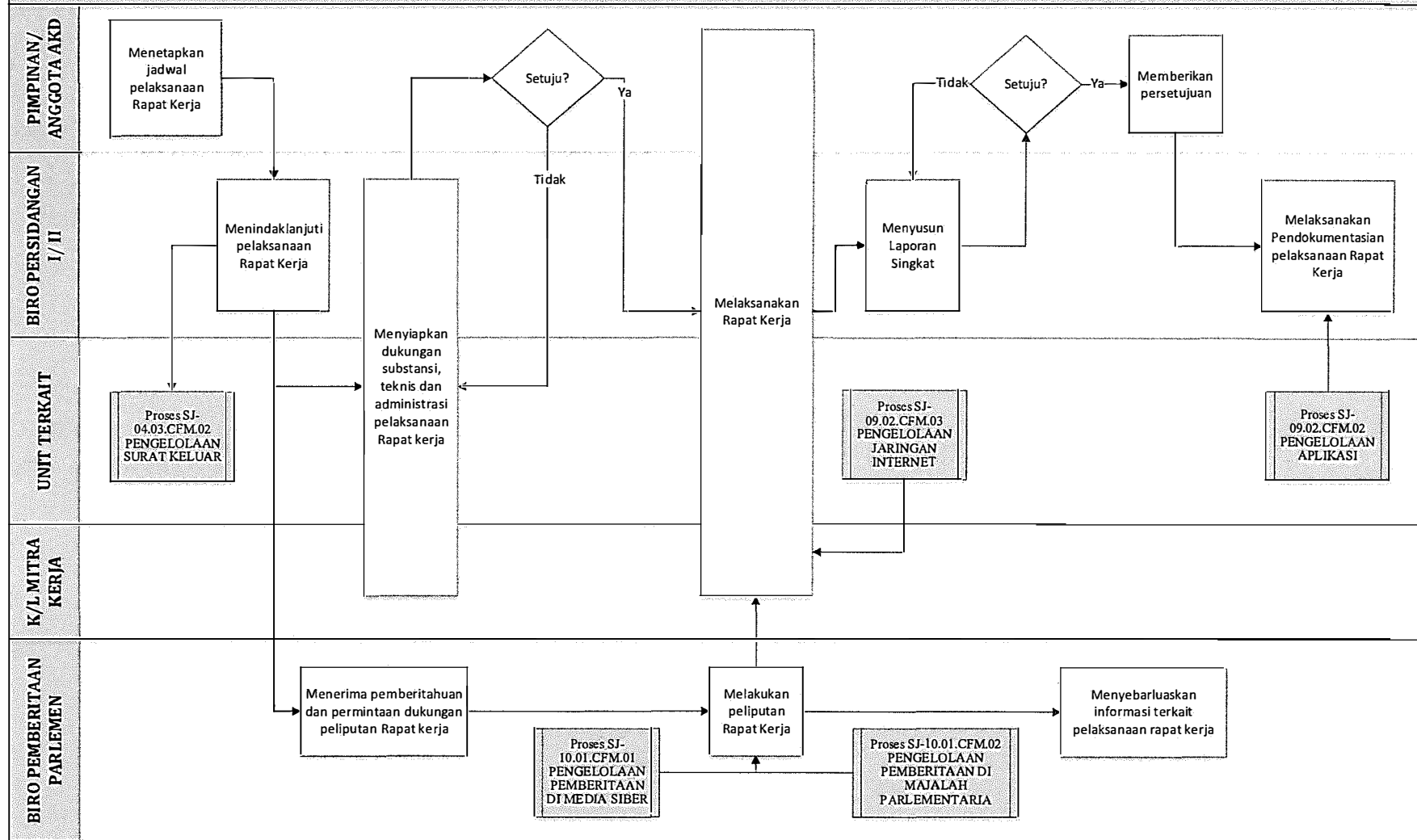


SJ – 06.01.CFM.02
PENYELENGGARAAN KONFERENSI PARLEMEN INTERNASIONAL

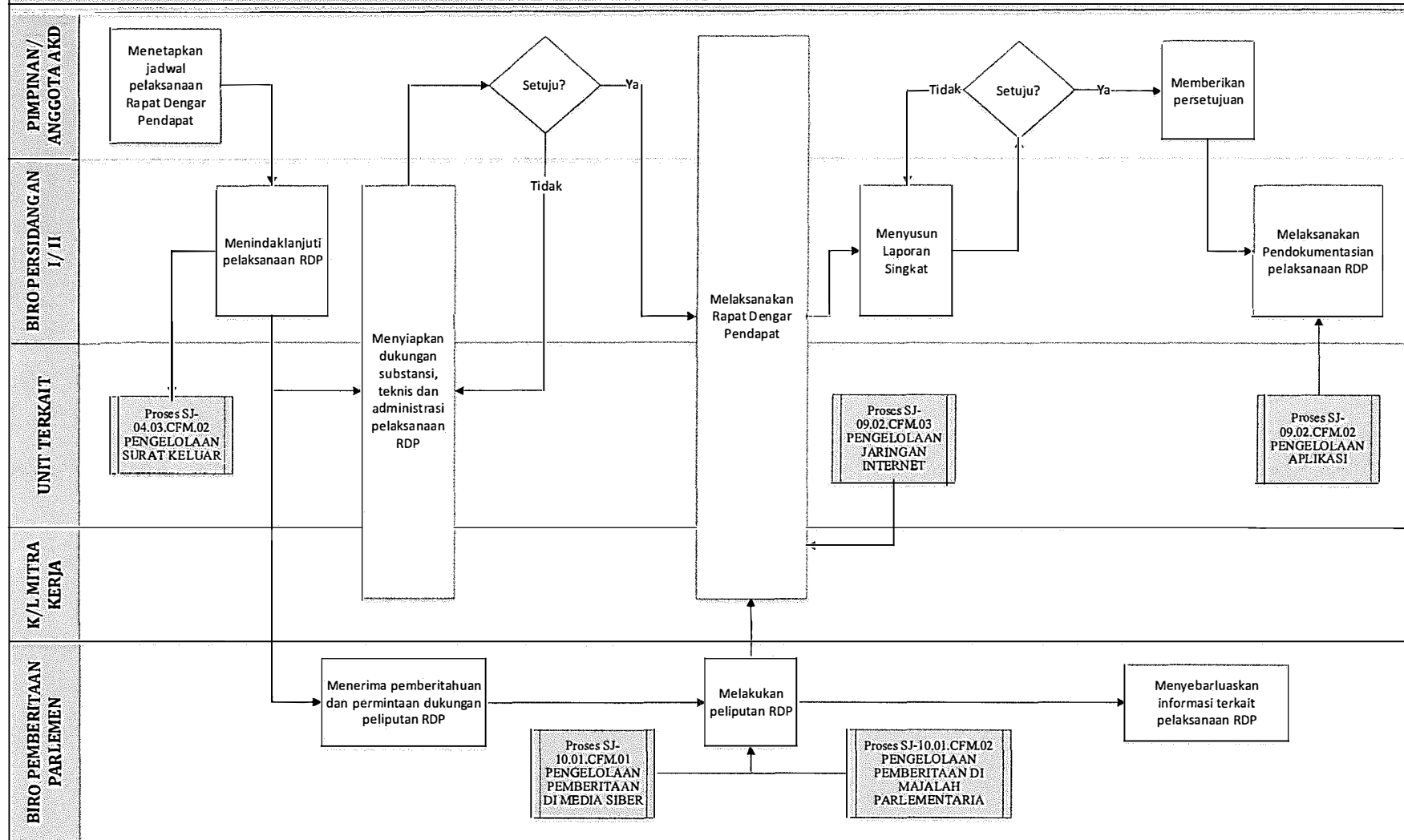




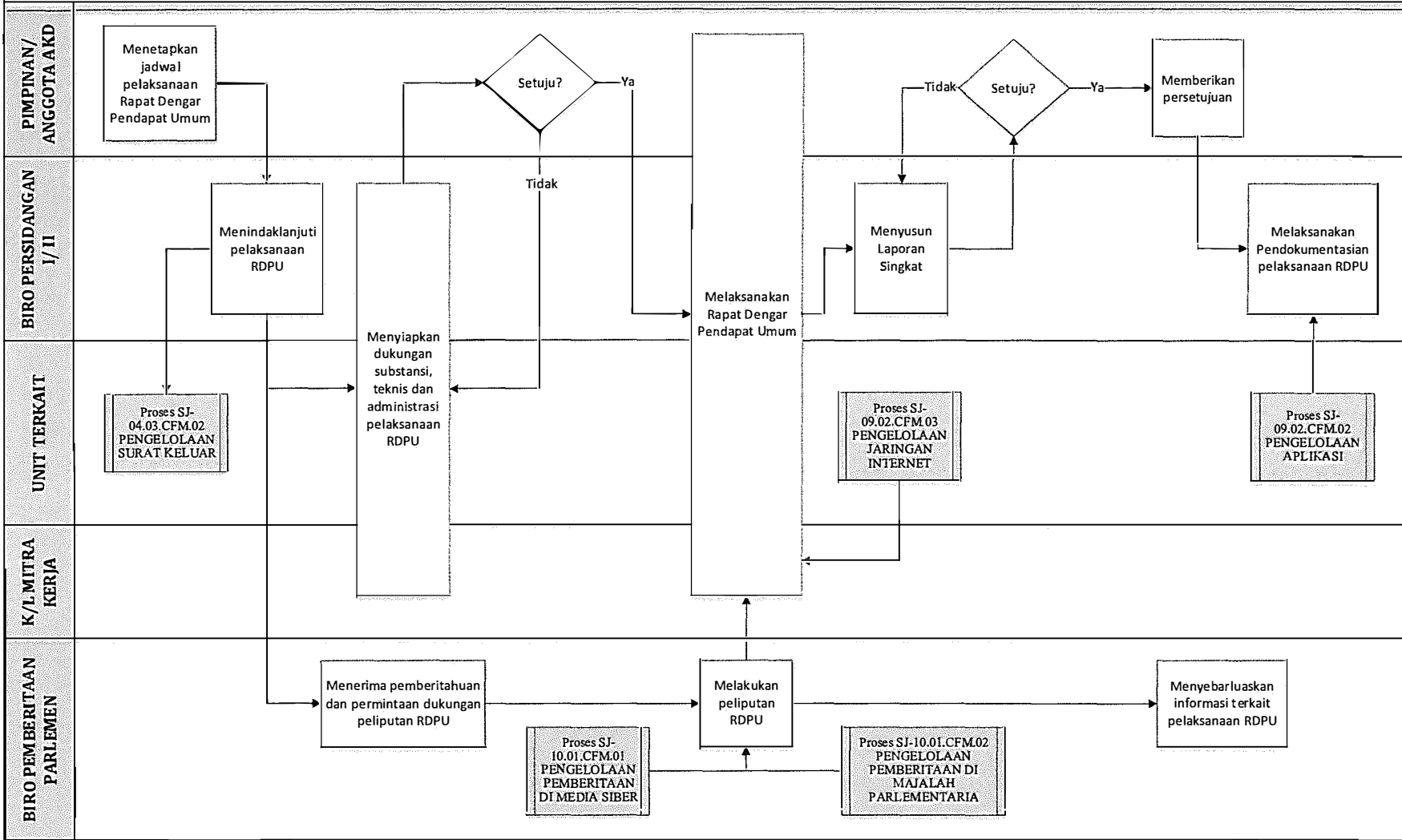
SJ – 06.02.CFM.01
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT KERJA



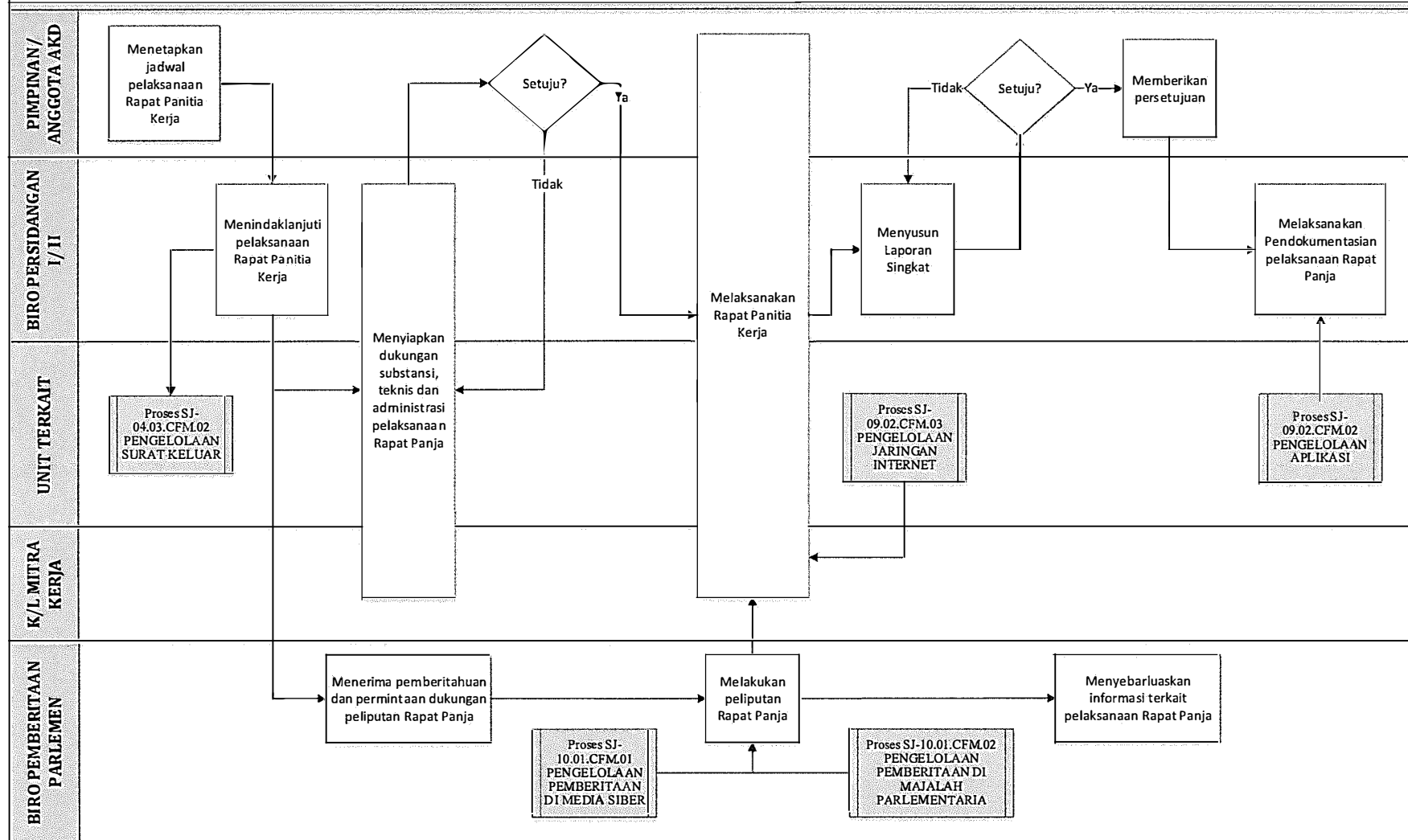
SJ – 06.02.CFM.02
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT DENGAR PENDAPAT



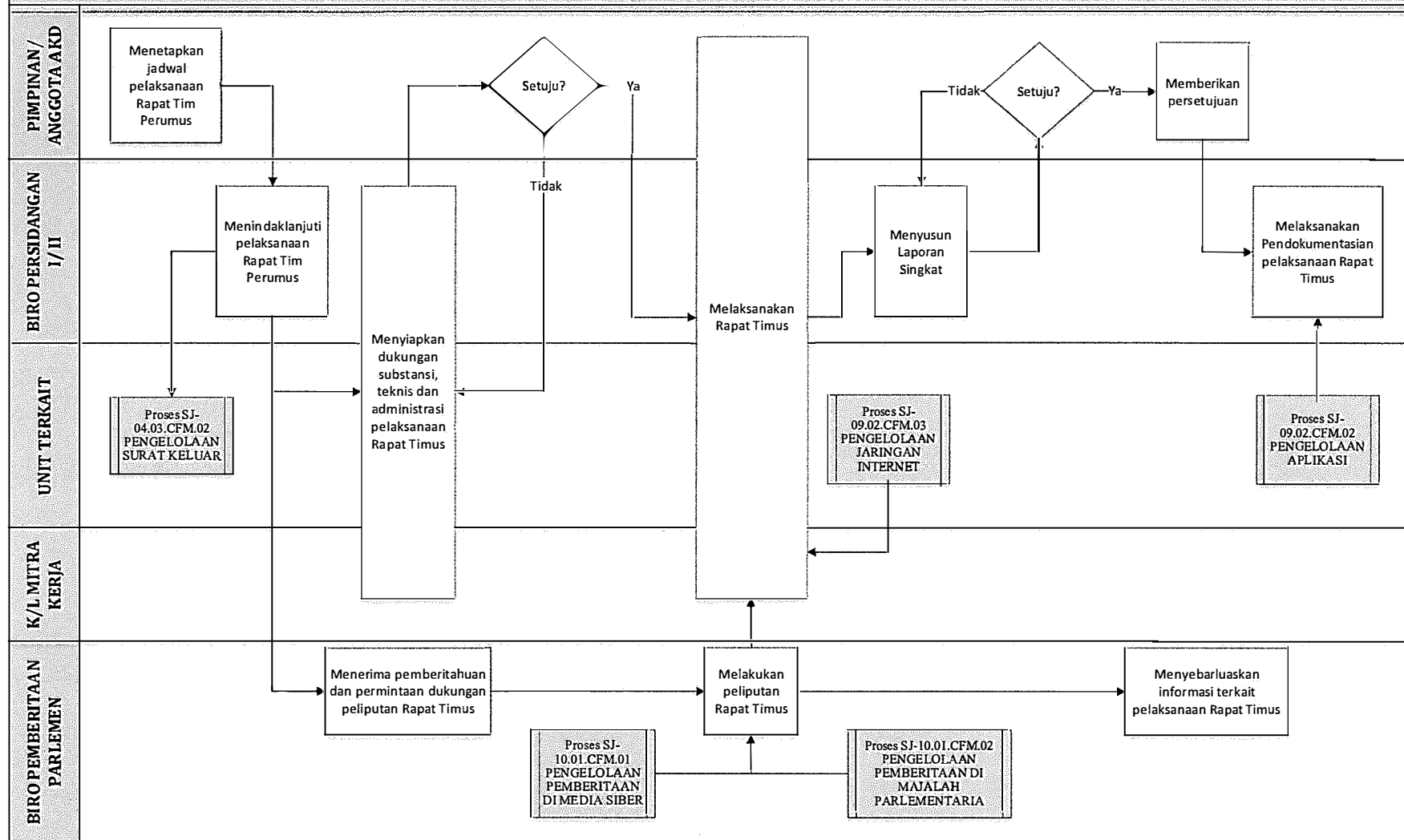
SJ – 06.02.CFM.03



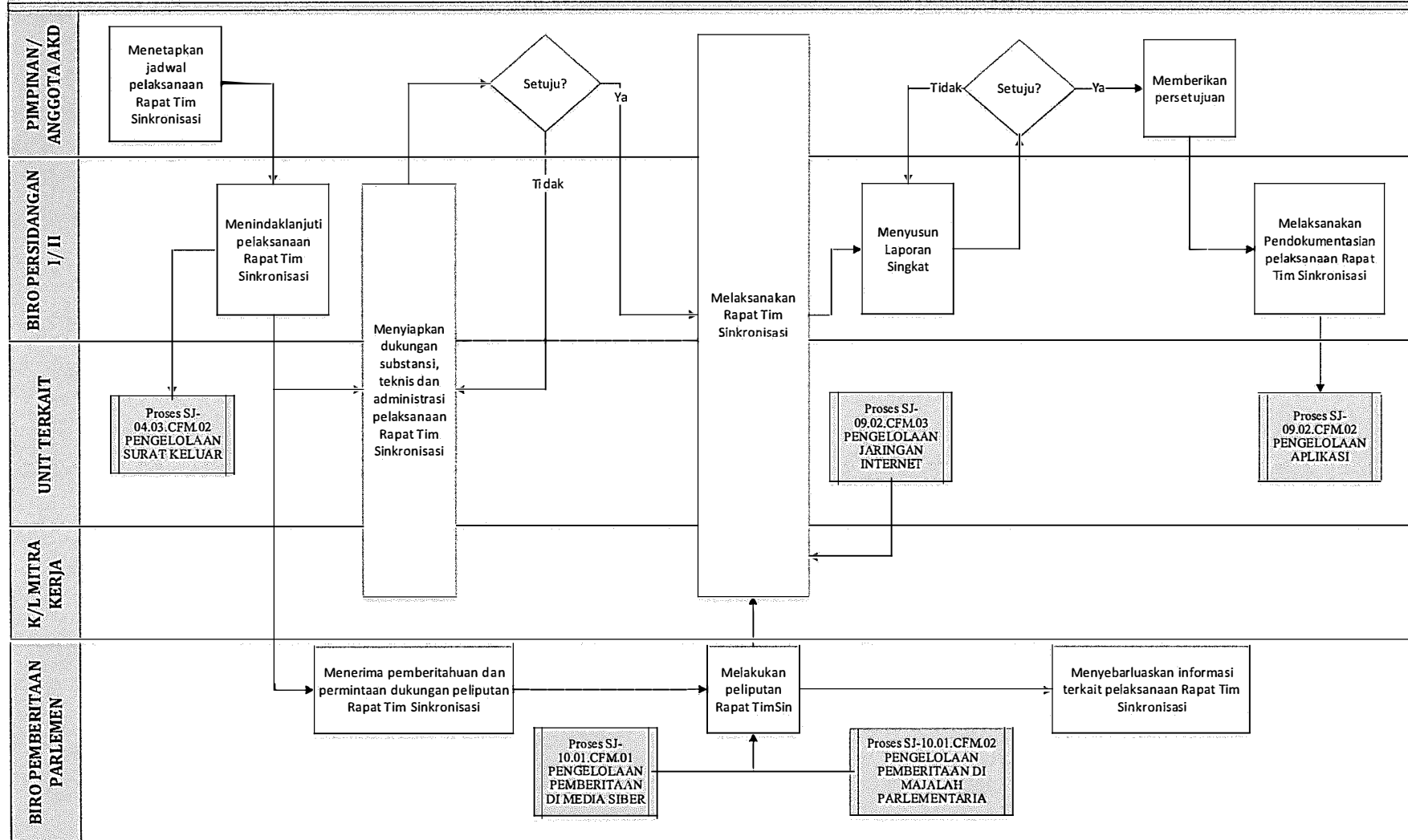
SJ – 06.02.CFM.04
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT PANITIA KERJA



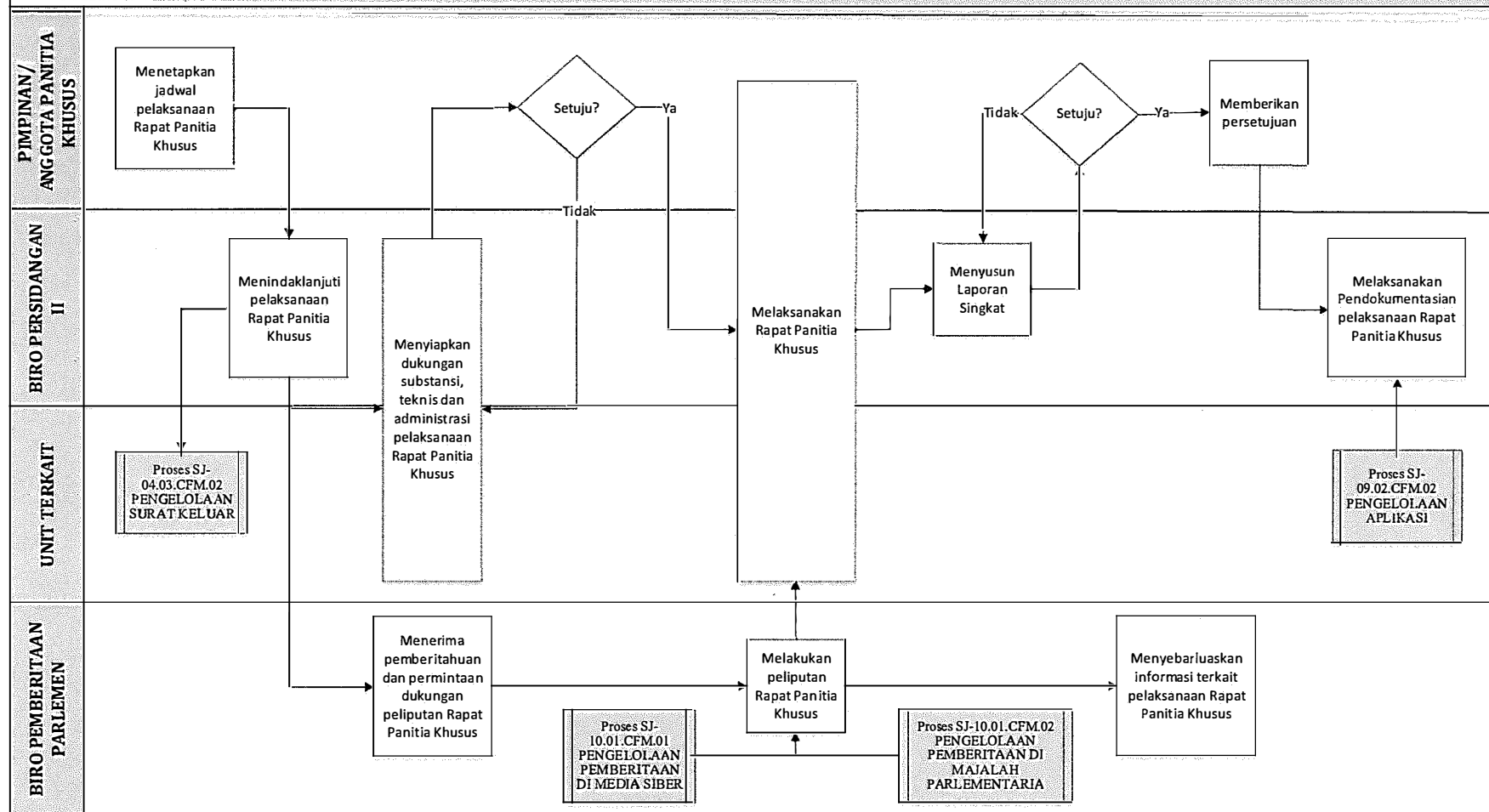
SJ – 06.02.CFM.05
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT TIM PERUMUS



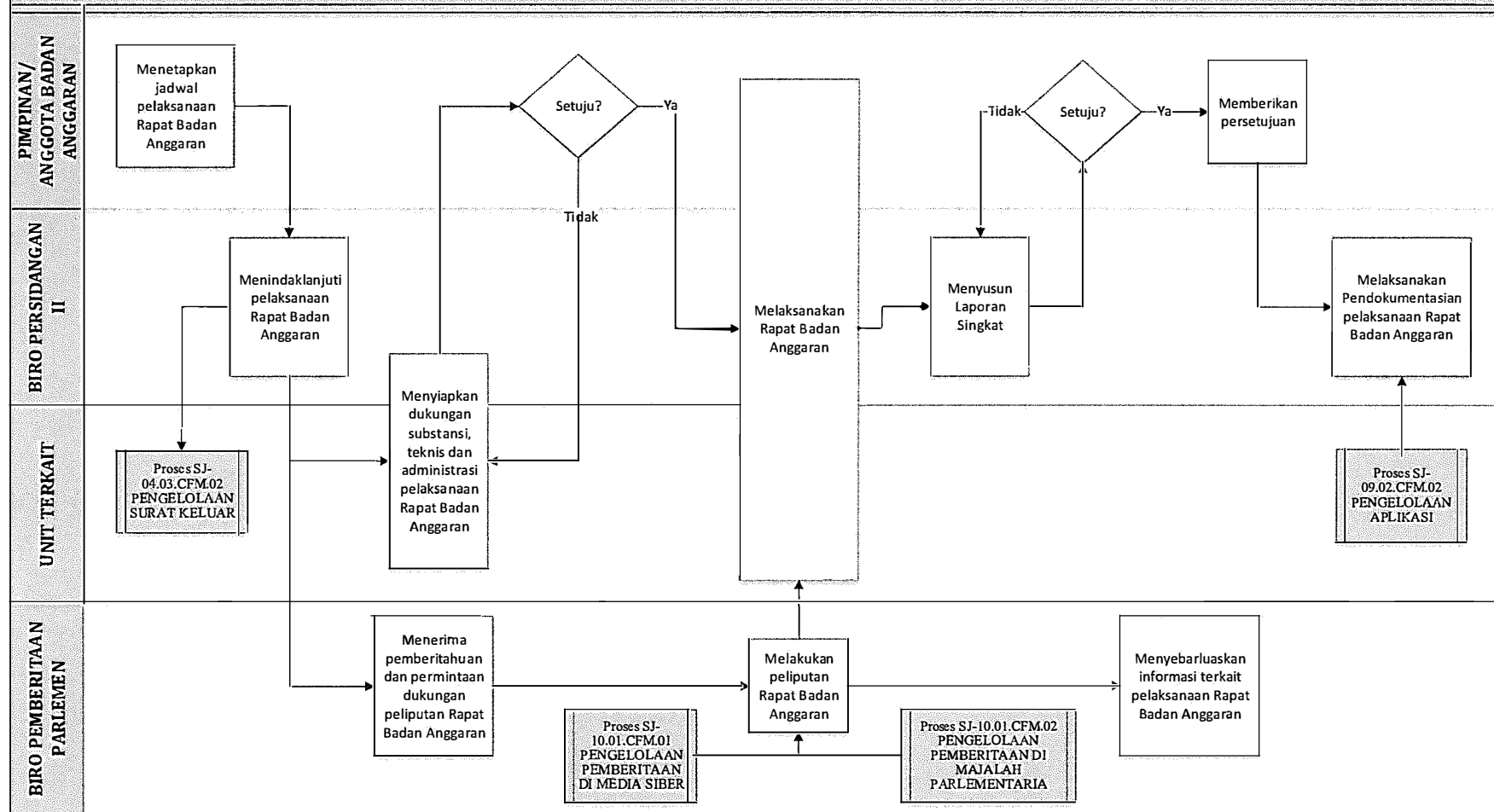
SJ – 06.02.CFM.06
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT TIM SINKRONISASI



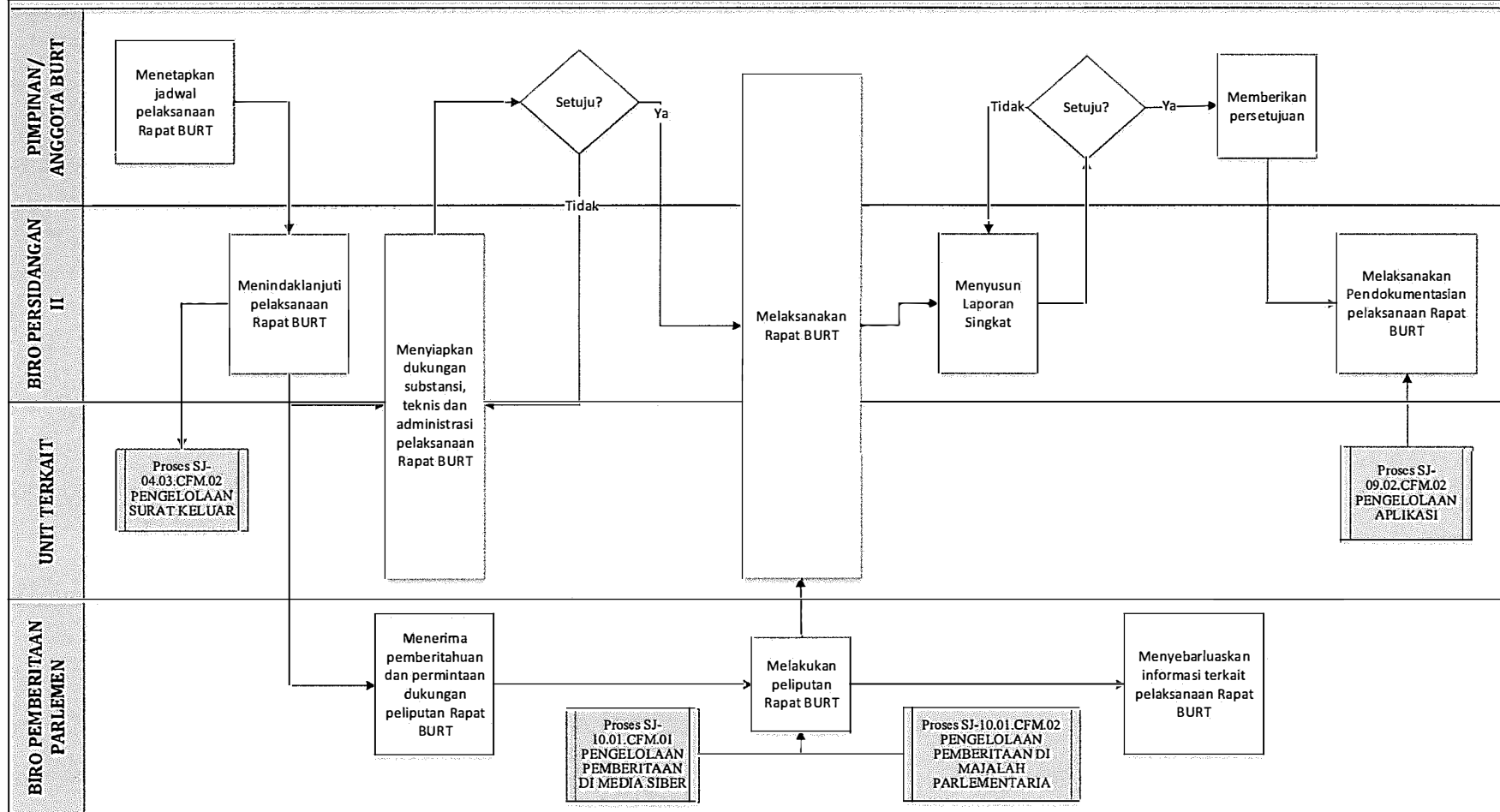
SJ – 06.02.CFM.07
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT PANITIA KHUSUS



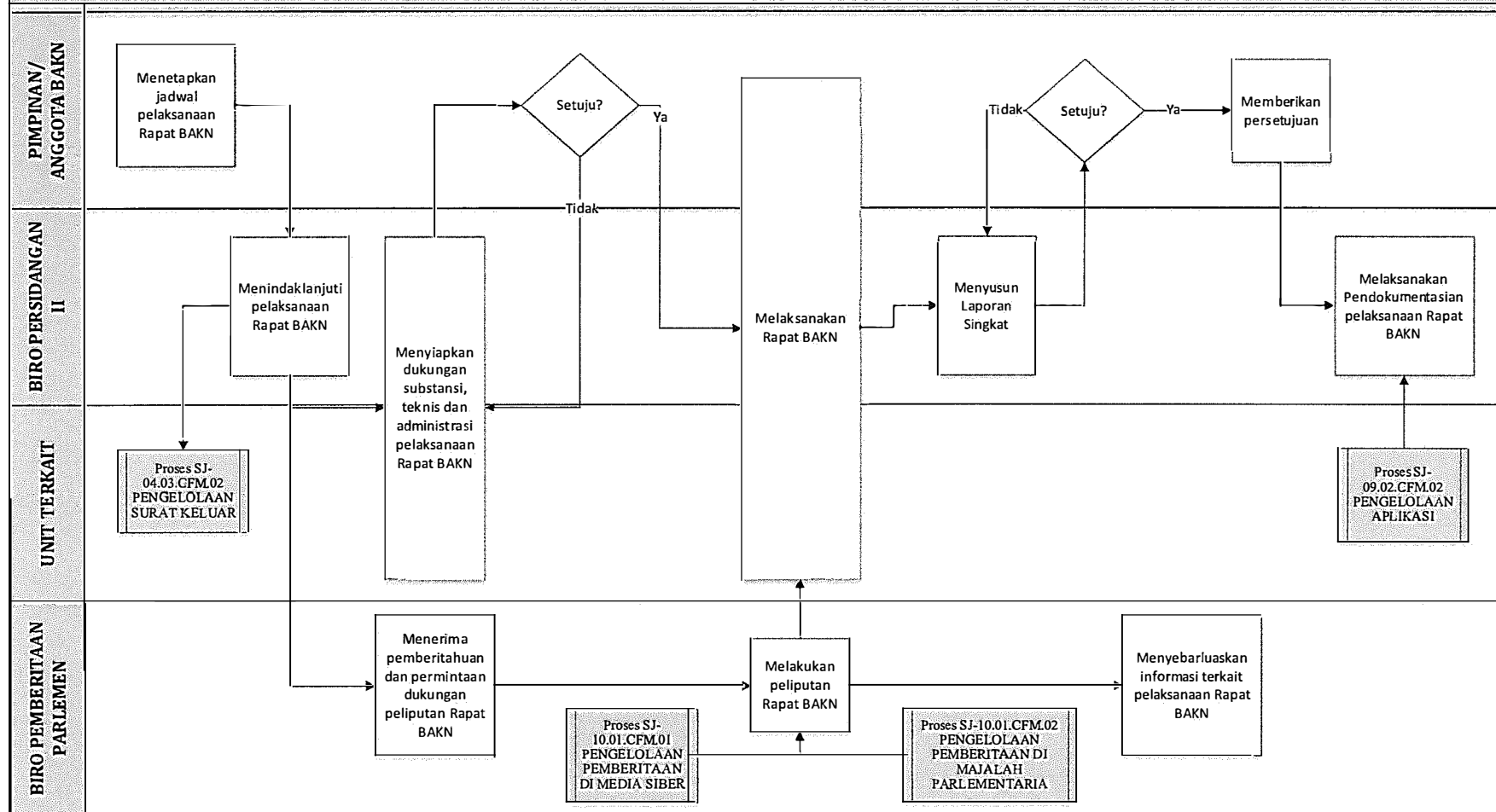
SJ – 06.02.CFM.08
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT BADAN ANGGARAN



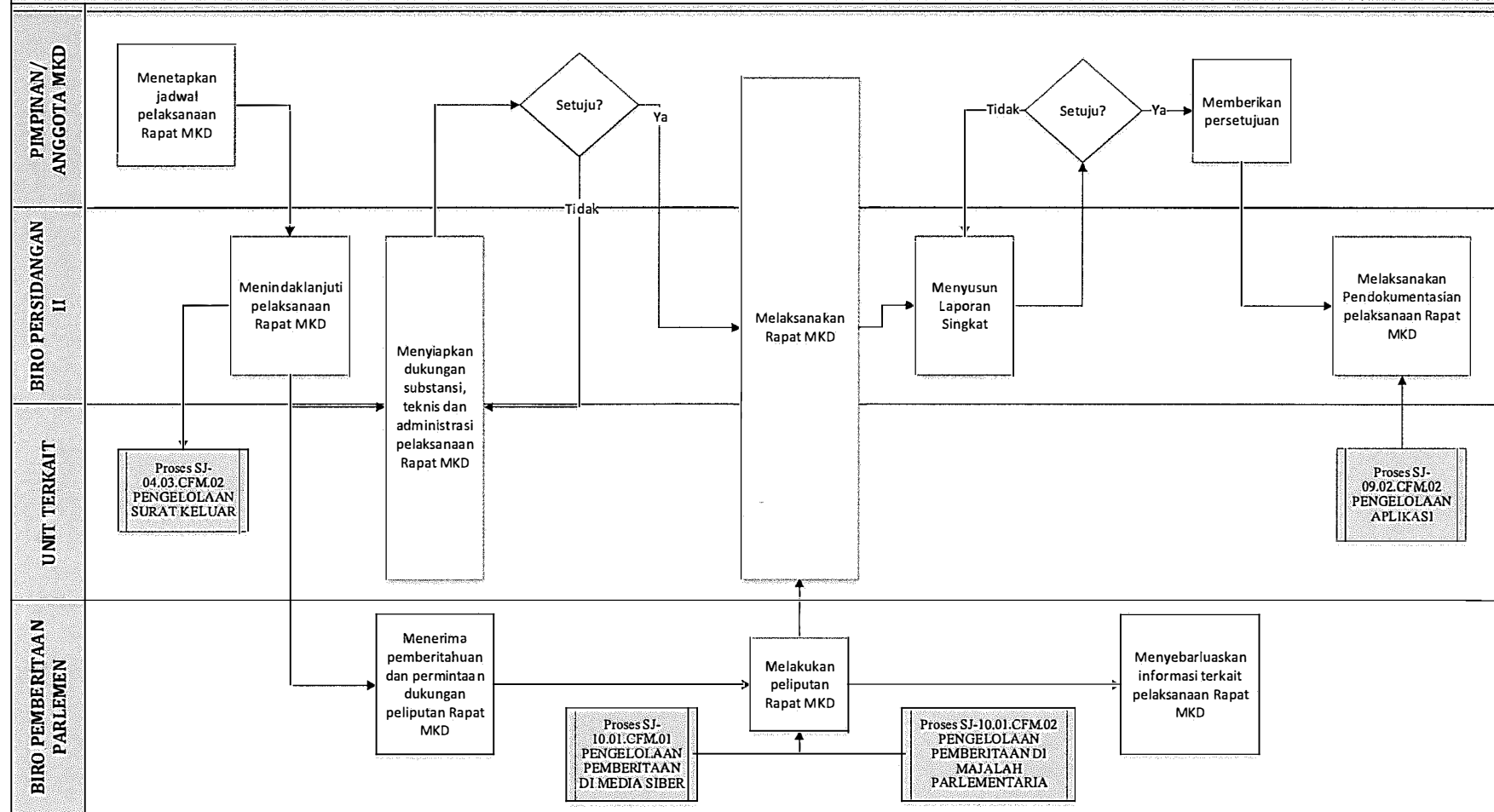
SJ – 06.02.CFM.09
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT BADAN URUSAN RUMAH TANGGA



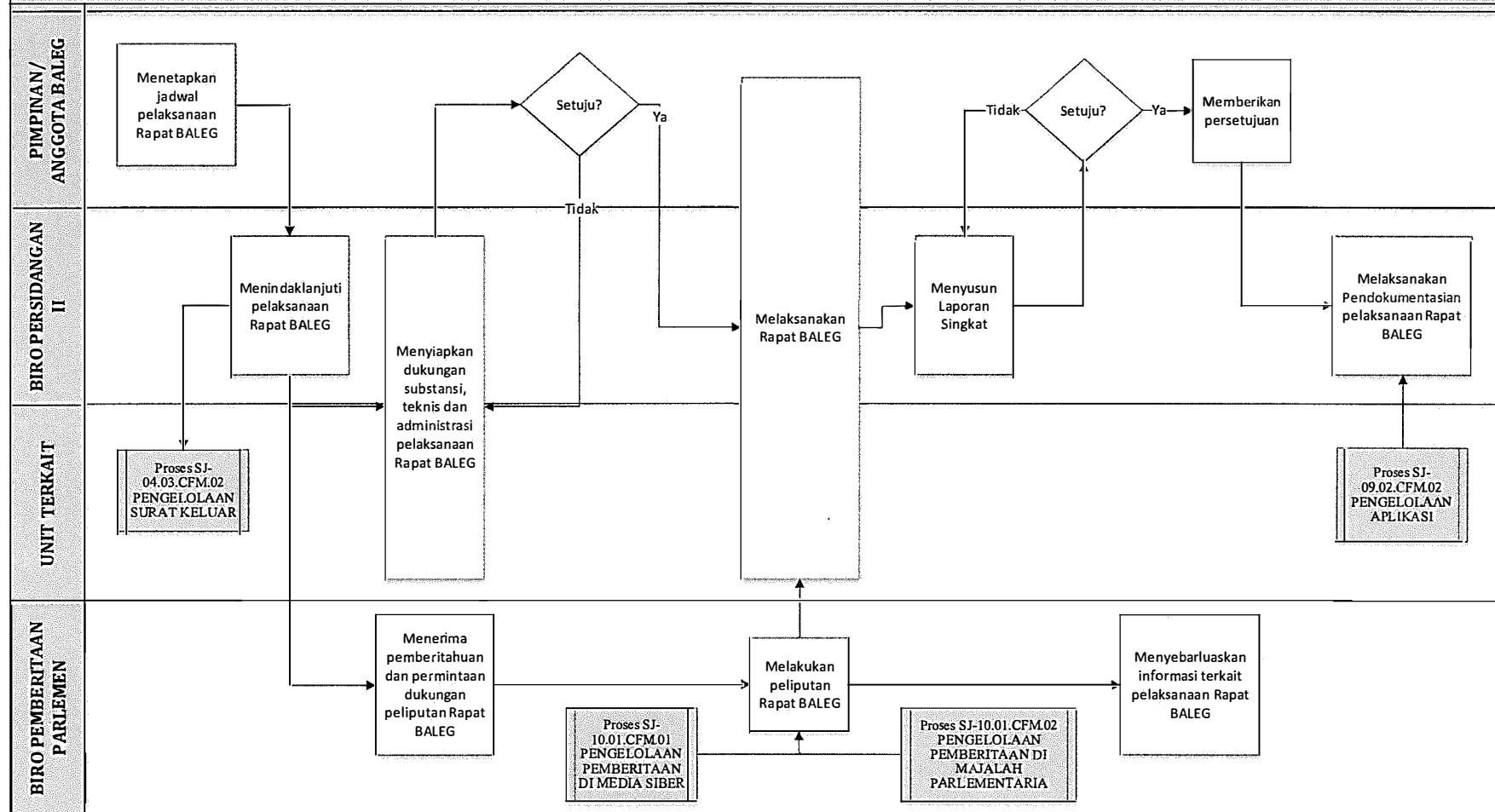
SJ – 06.02.CFM.10
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

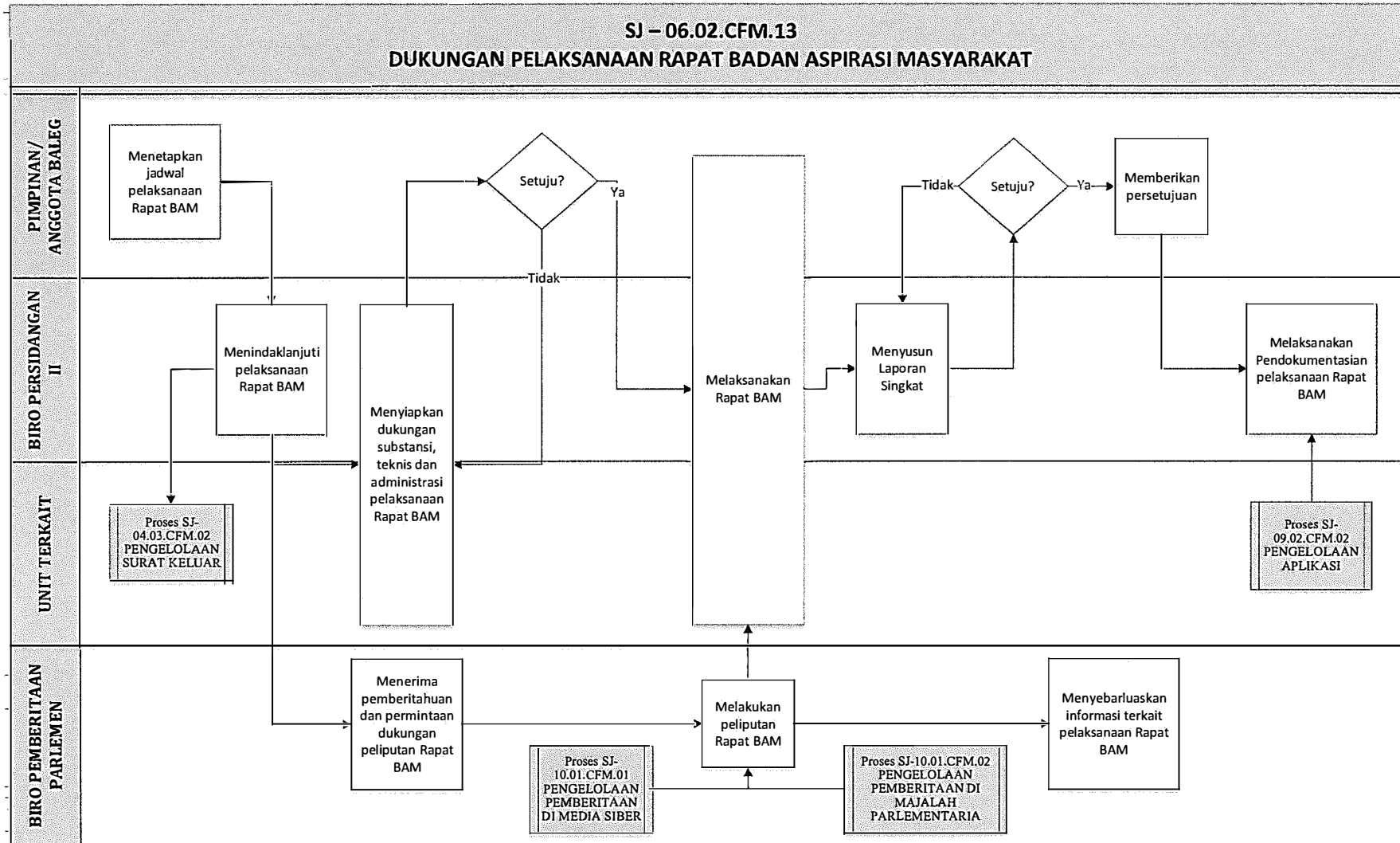


SJ – 06.02.CFM.11
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

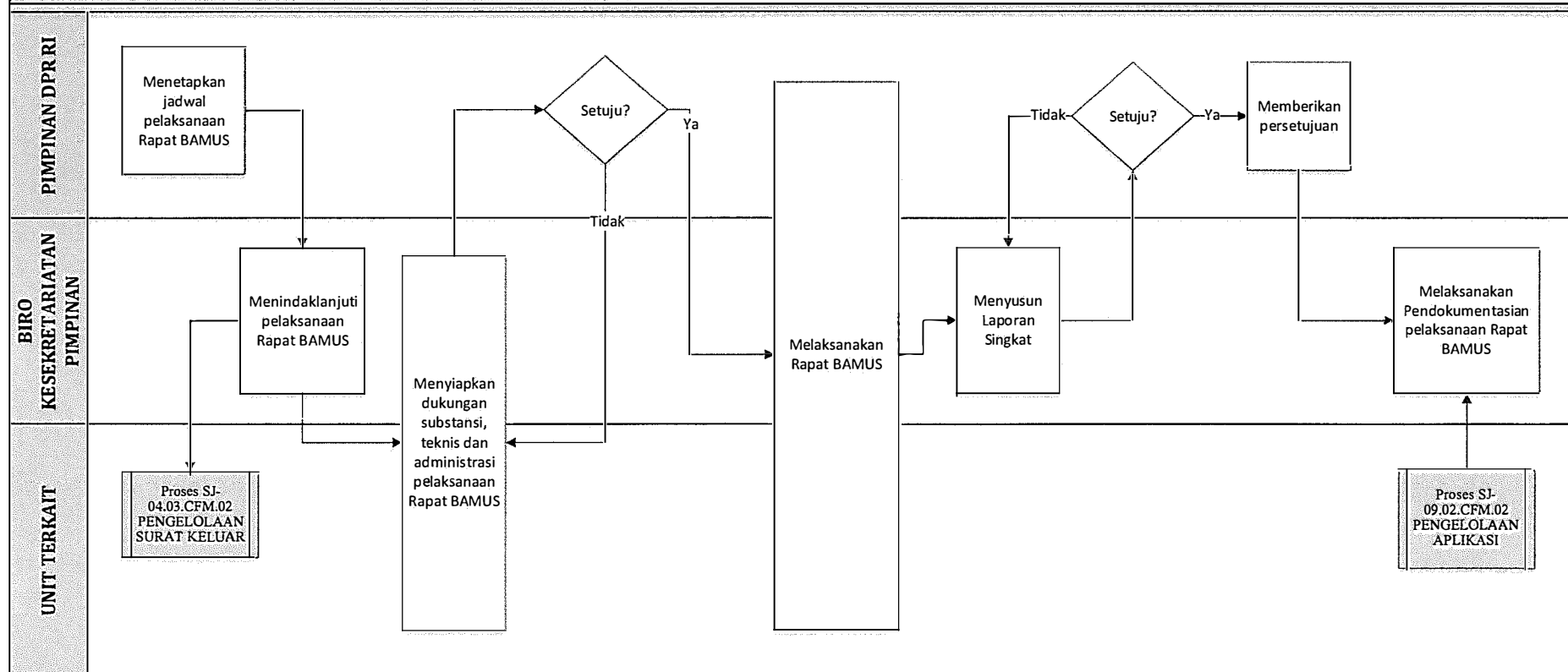


SJ – 06.02.CFM.12
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT BADAN LEGISLASI

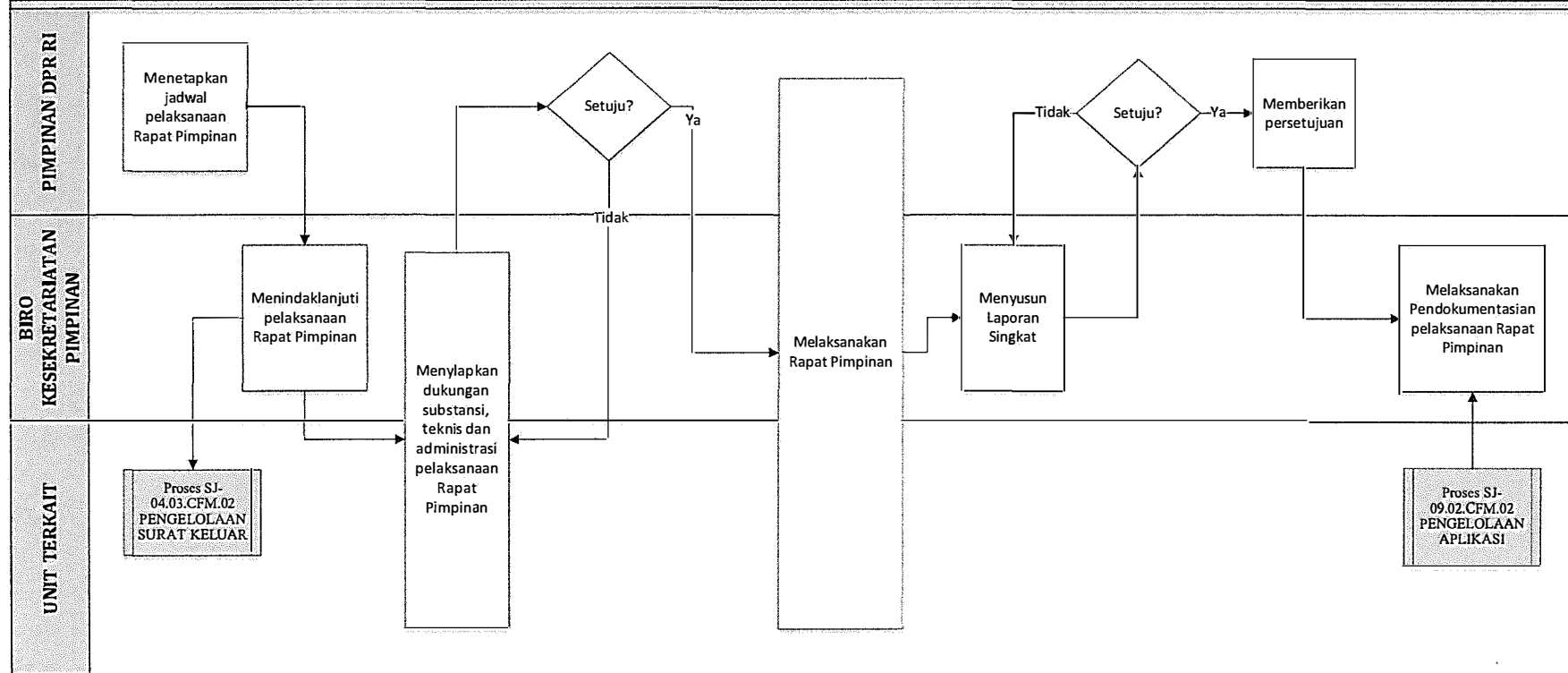




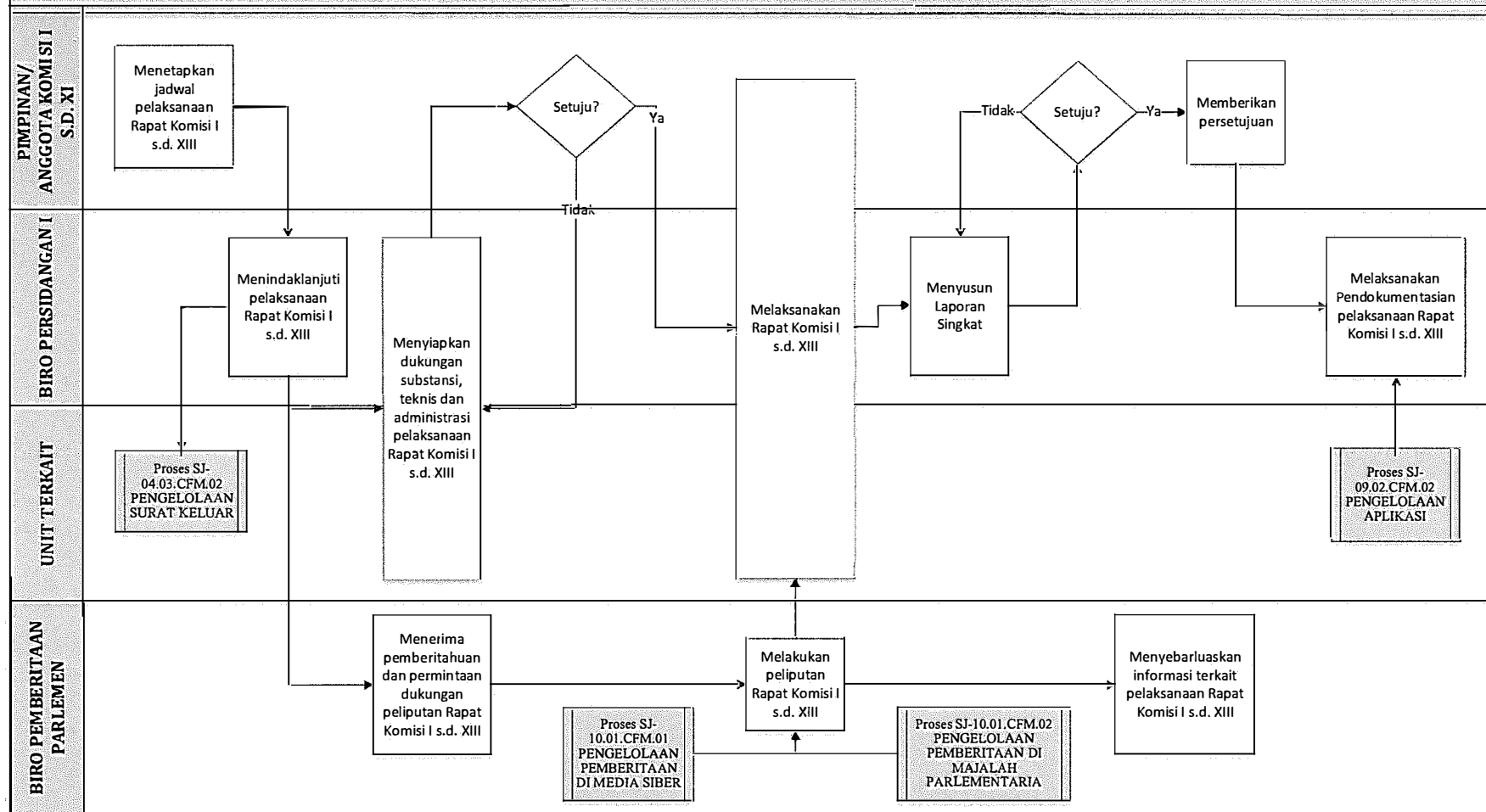
SJ – 06.02.CFM.14
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT BADAN MUSYAWARAH



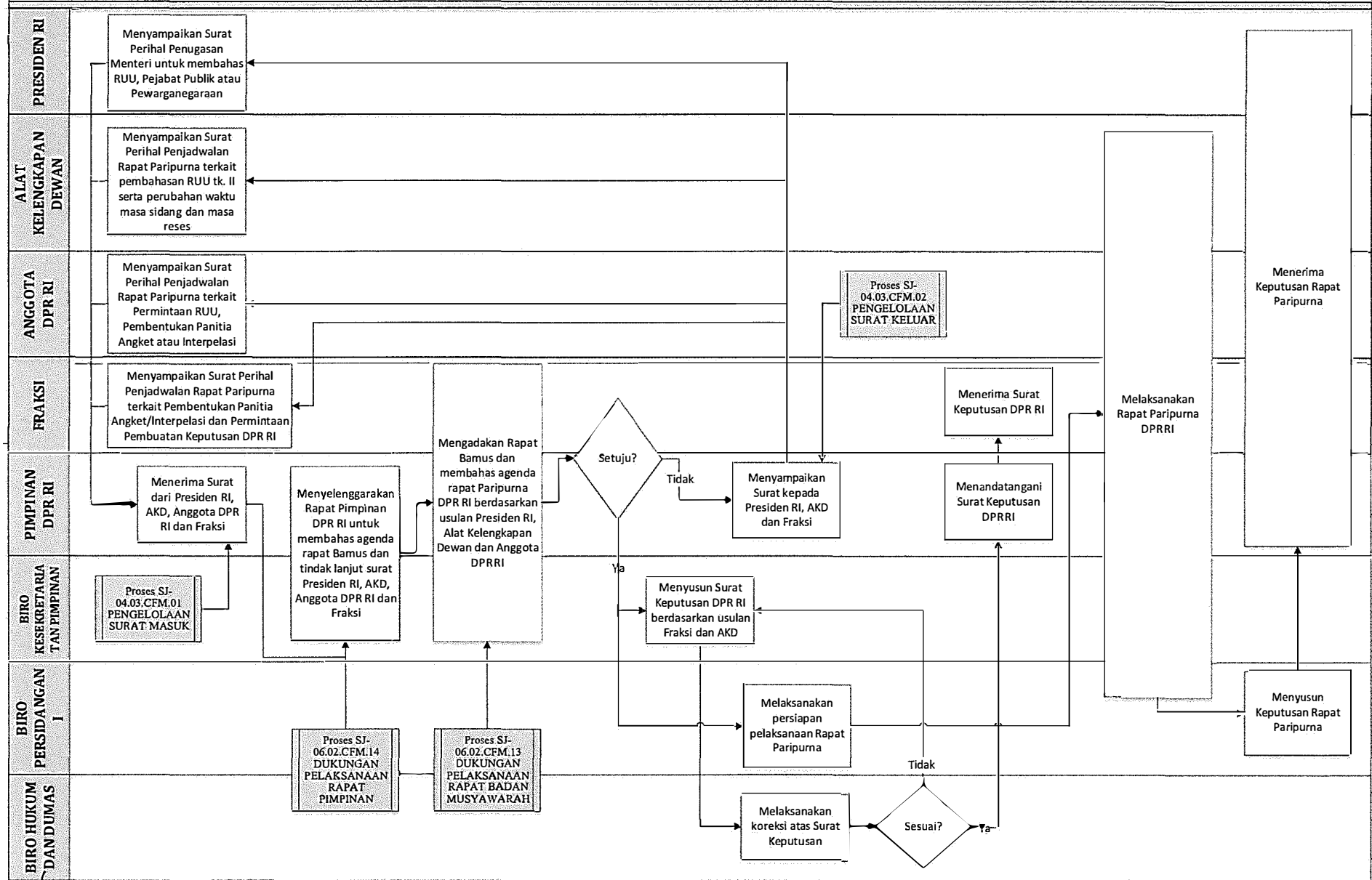
SJ – 06.02.CFM.15
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT PIMPINAN



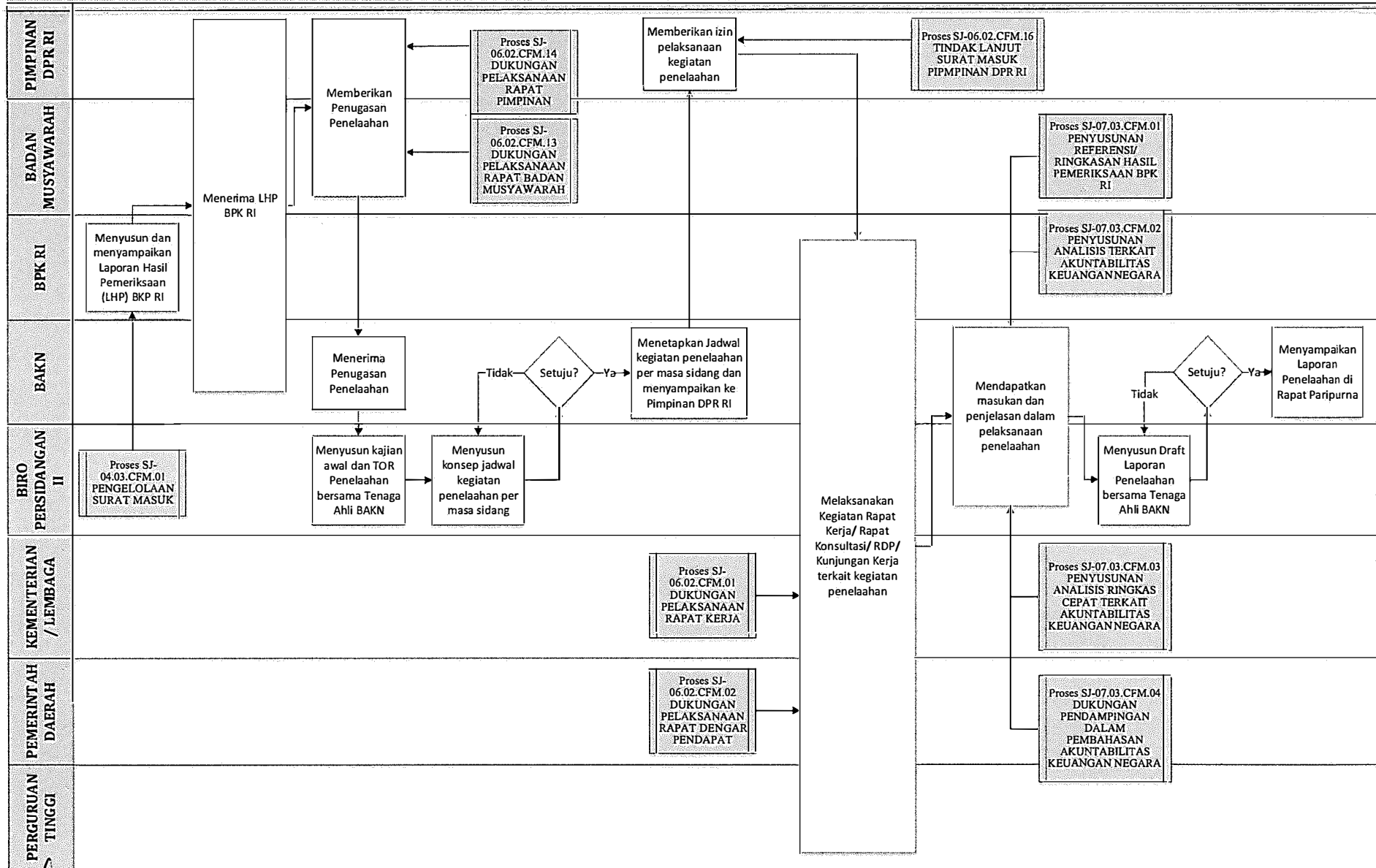
SJ – 06.02.CFM.16
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT KOMISI I S.D. XIII



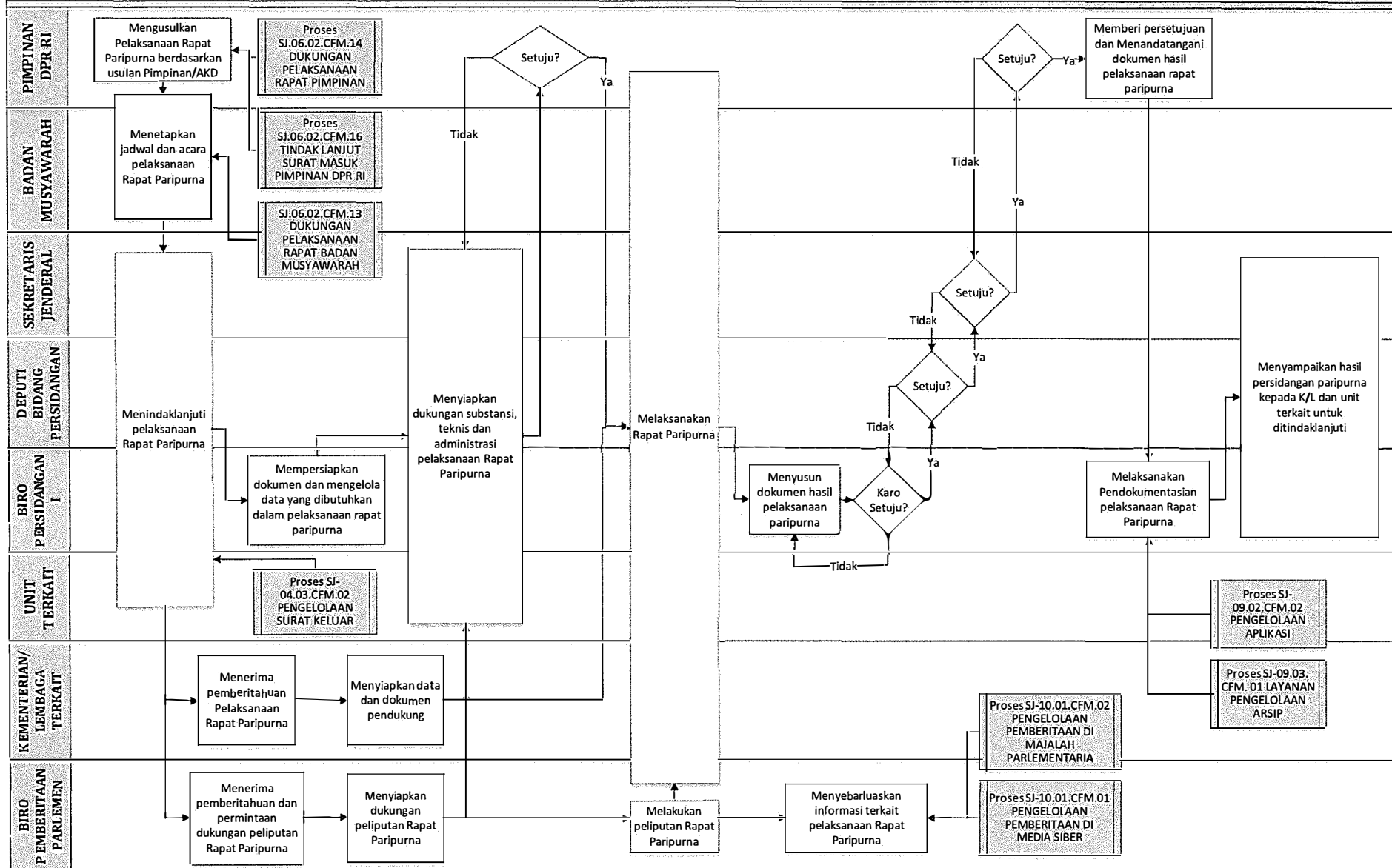
SJ – 06.02.CFM.17
TINDAK LANJUT SURAT MASUK PIMPINAN DPR RI

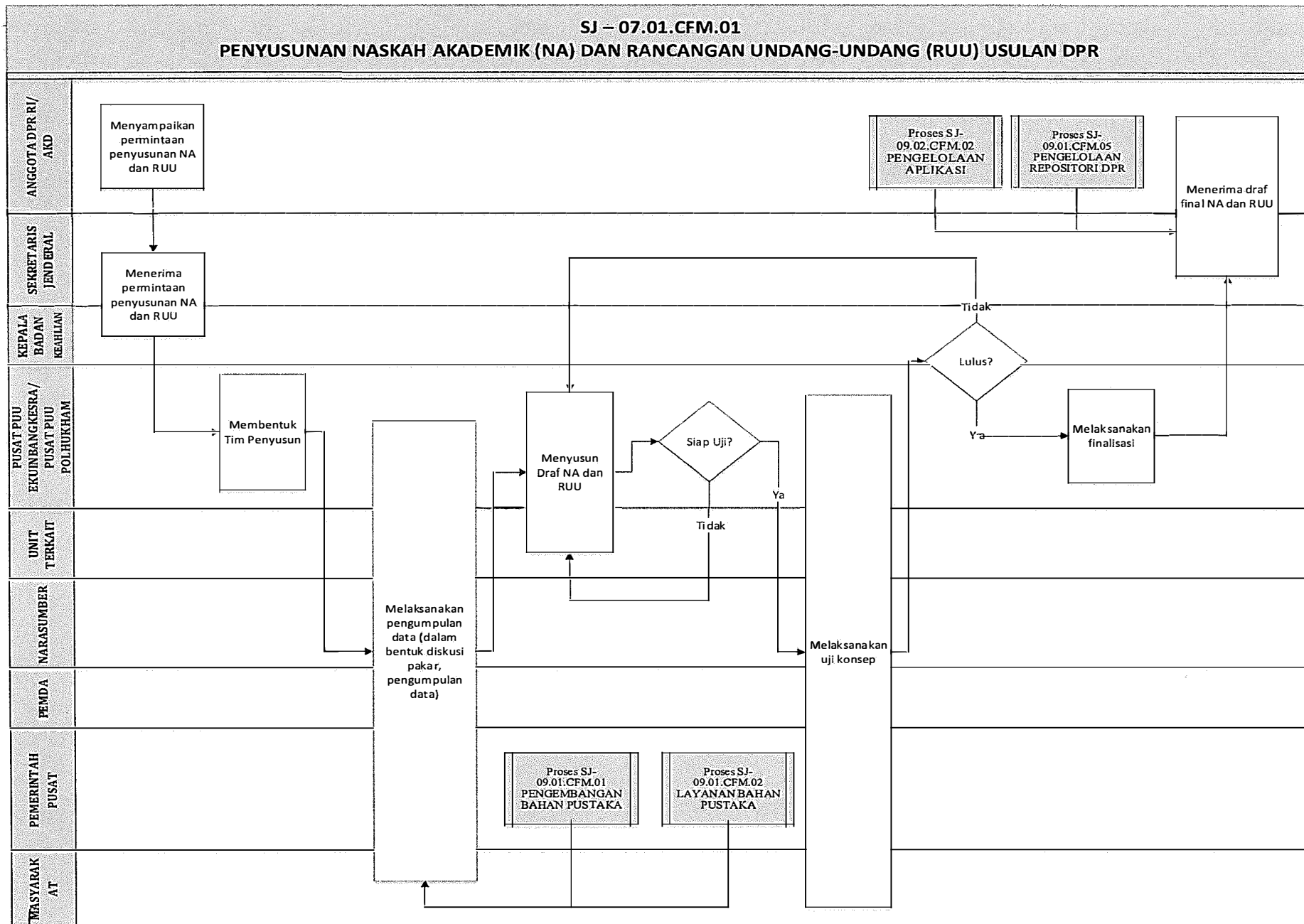


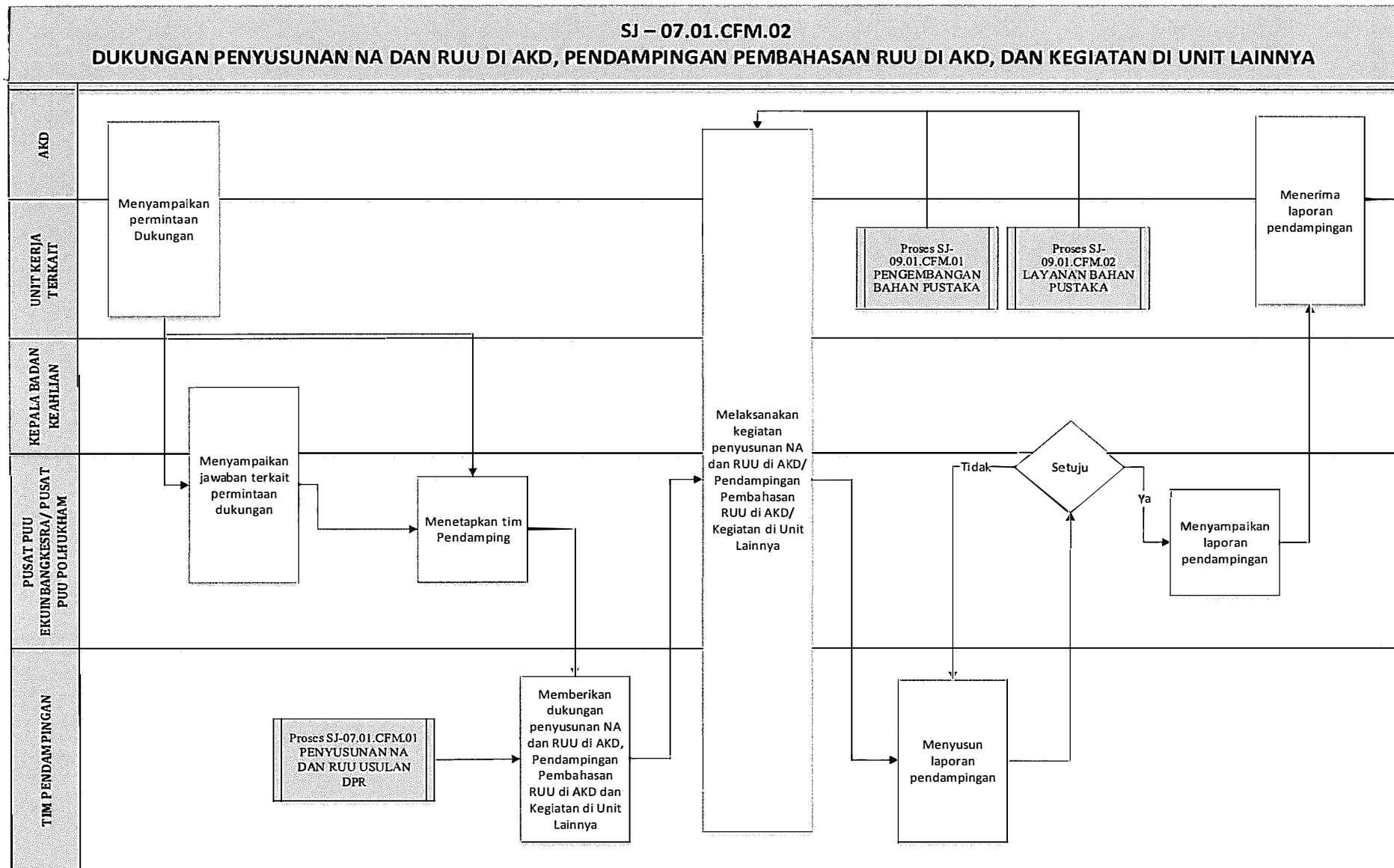
SJ – 06.02.CFM.18
DUKUNGAN PELAKSANAAN PENELITIAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA



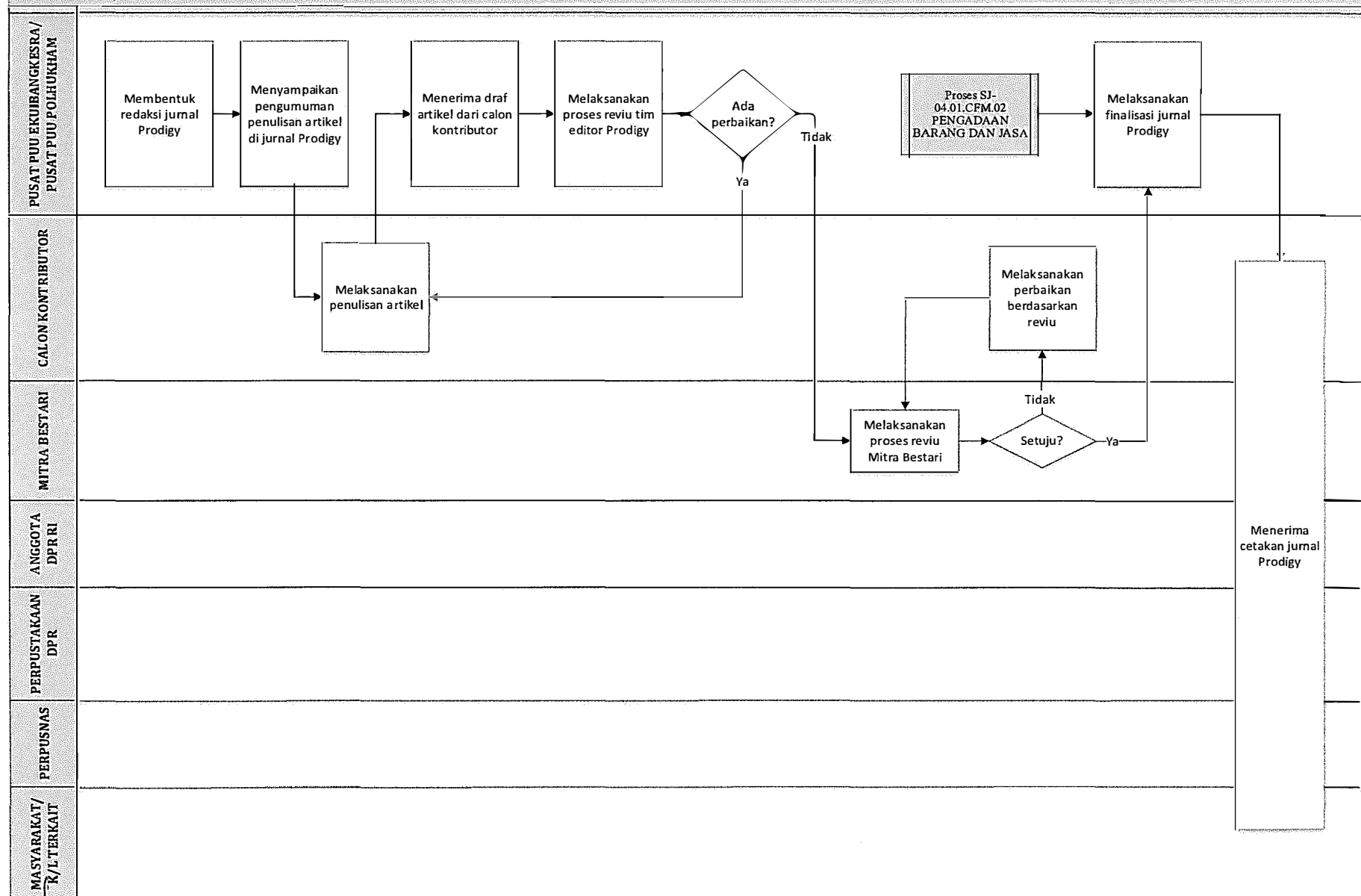
SJ – 06.02.CFM.19
DUKUNGAN PELAKSANAAN RAPAT PERSIDANGAN PARIPURNA





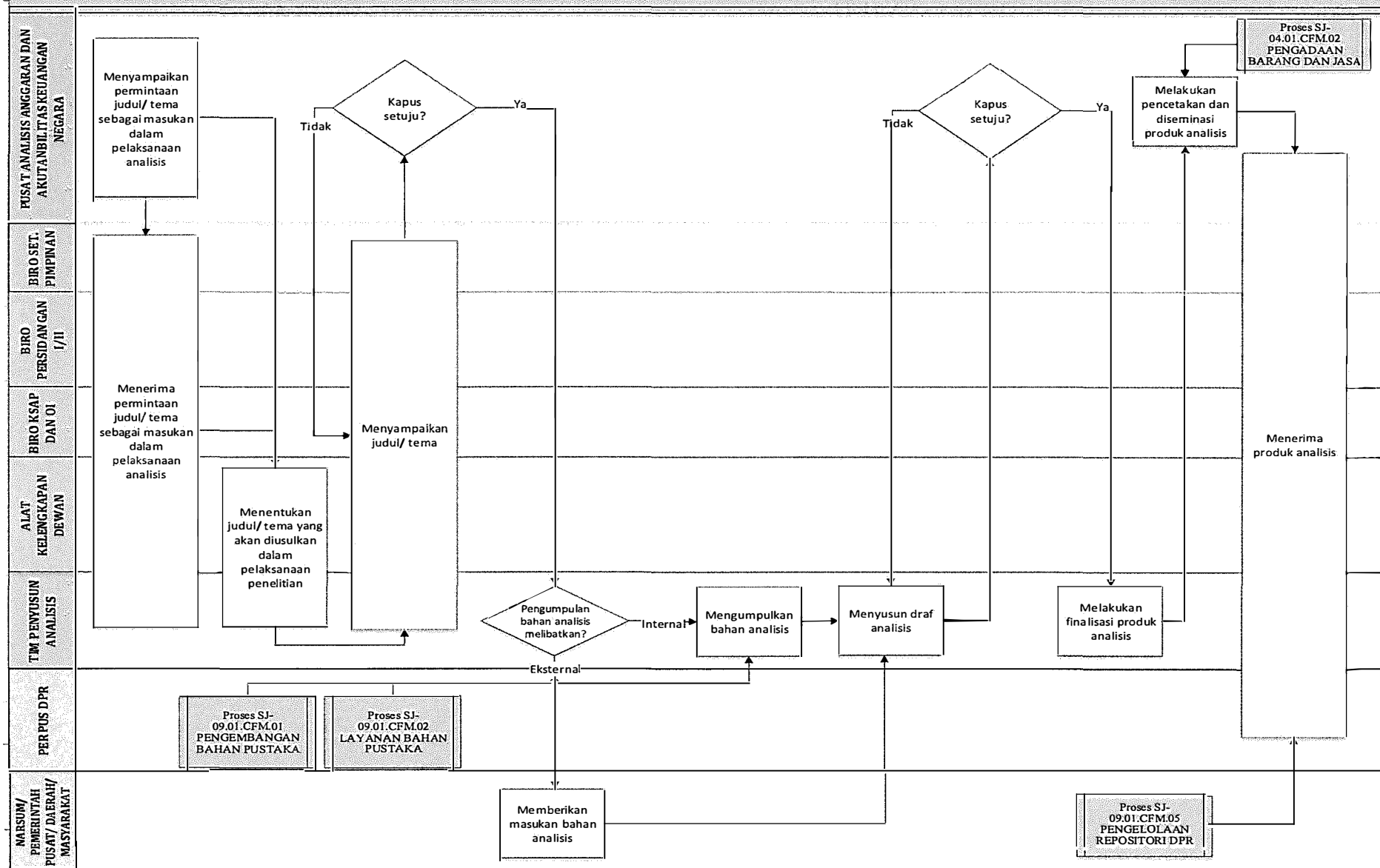


SJ – 07.01.CFM.03
PENYUSUNAN KARYA ILMIAH BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

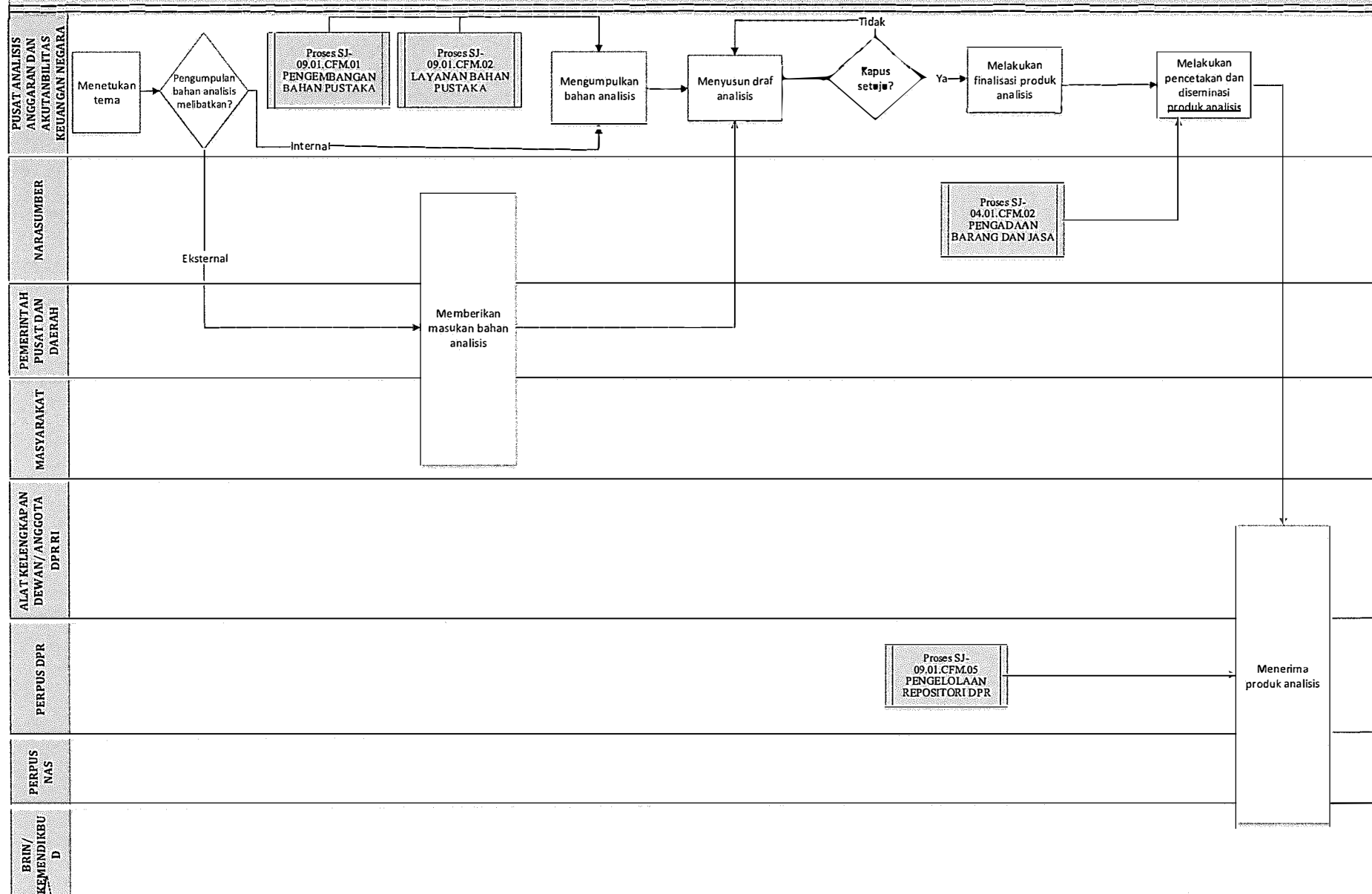


SJ-07.02.CFM.01

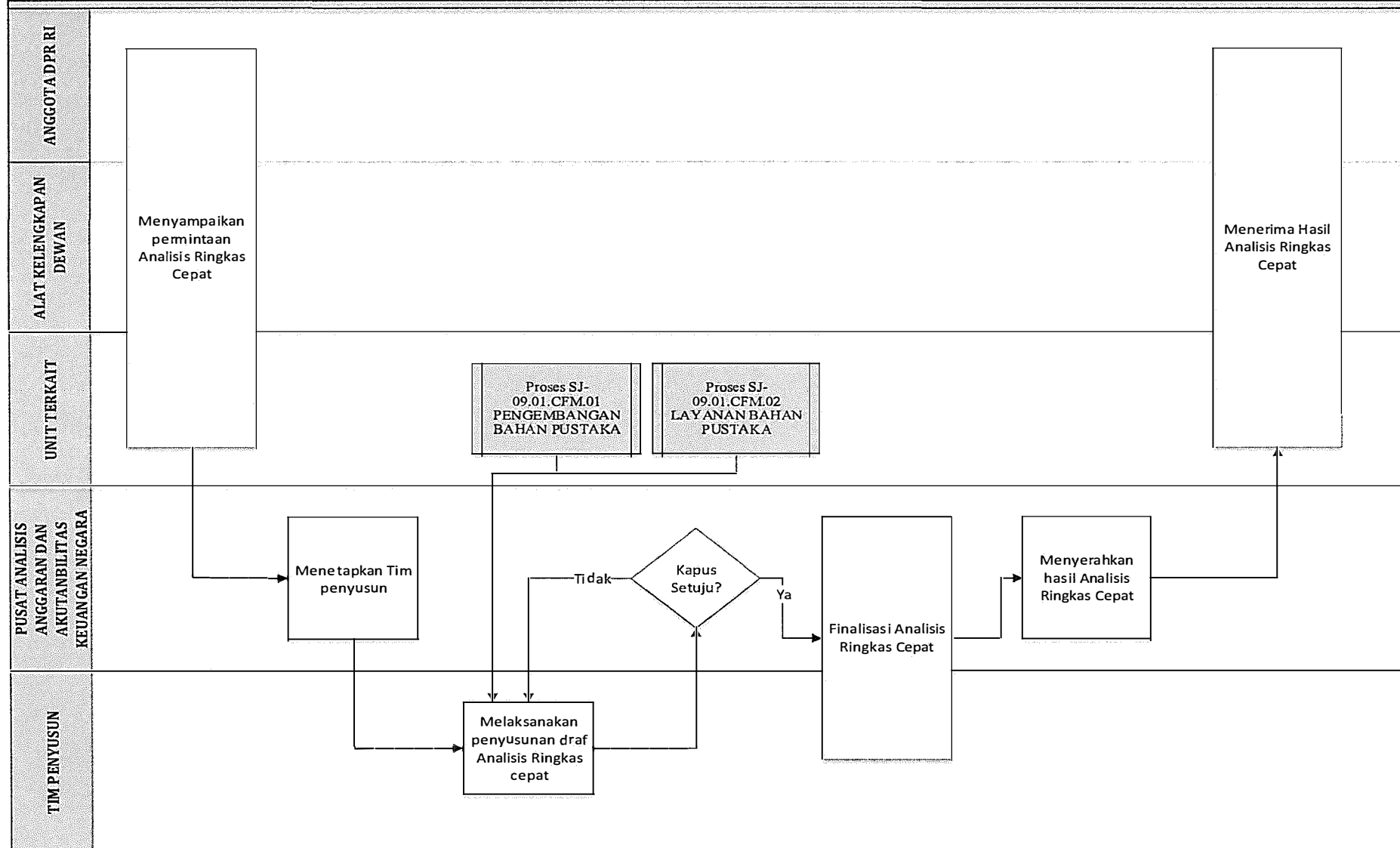
PENYUSUNAN ANALISIS/ REFERENSI SESUAI SIKLUS PEMBAHASAN APBN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA



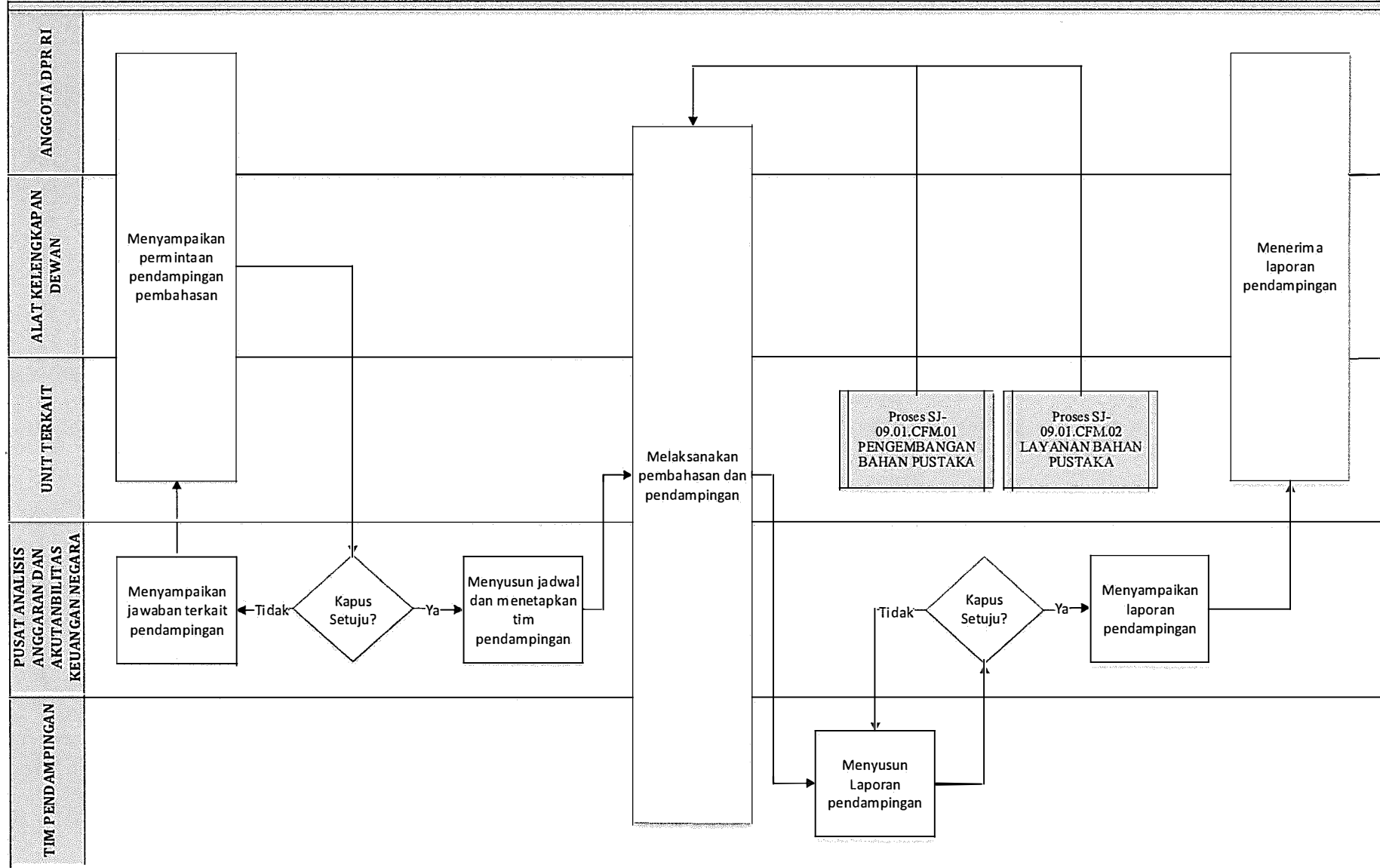
SJ – 07.02.CFM.02
PENYUSUNAN ANALISIS DILUAR SIKLUS PEMBAHASAN APBN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA



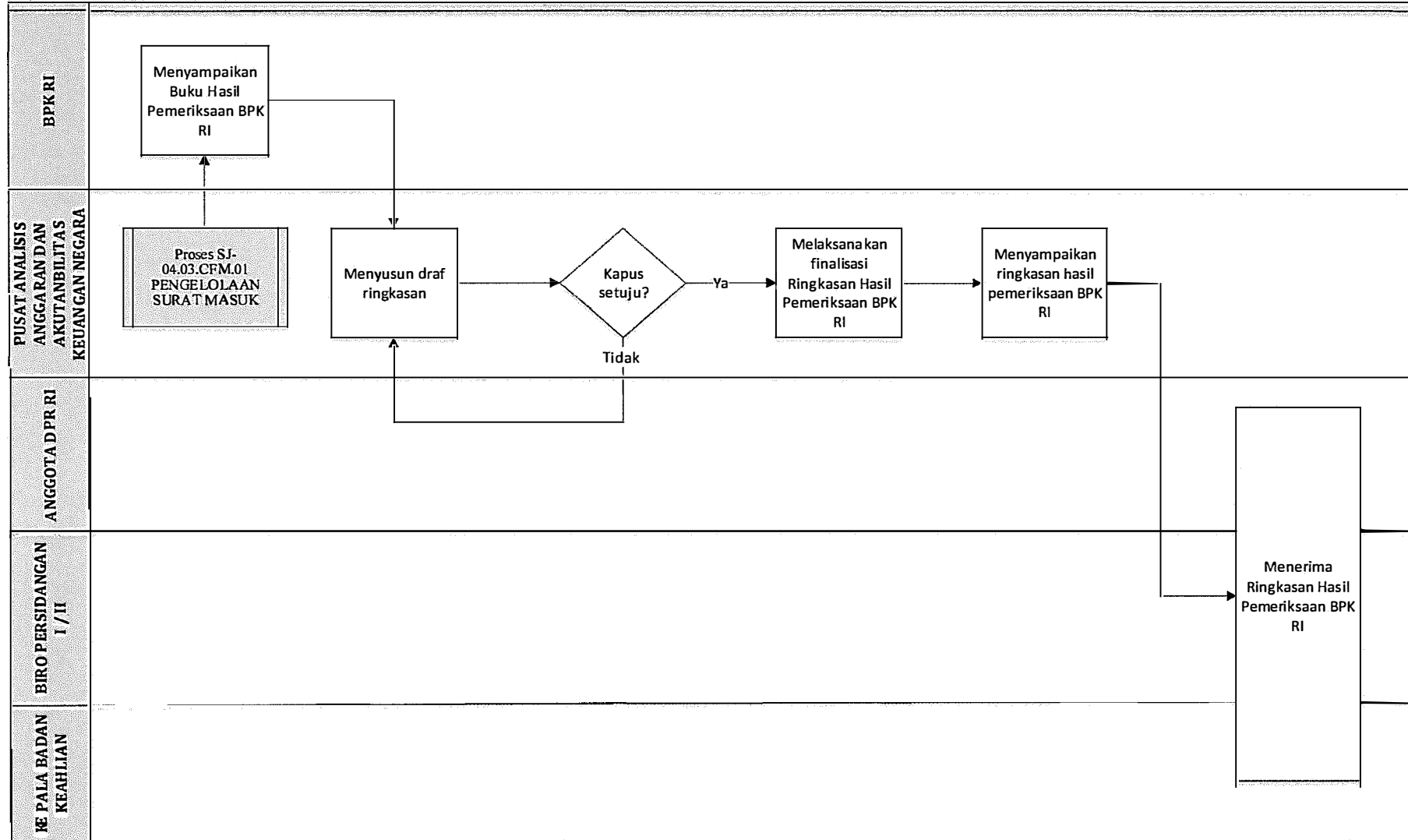
SJ – 07.02.CFM.03
PENYUSUNAN ANALISIS RINGKAS CEPAT (BY DEMAND)

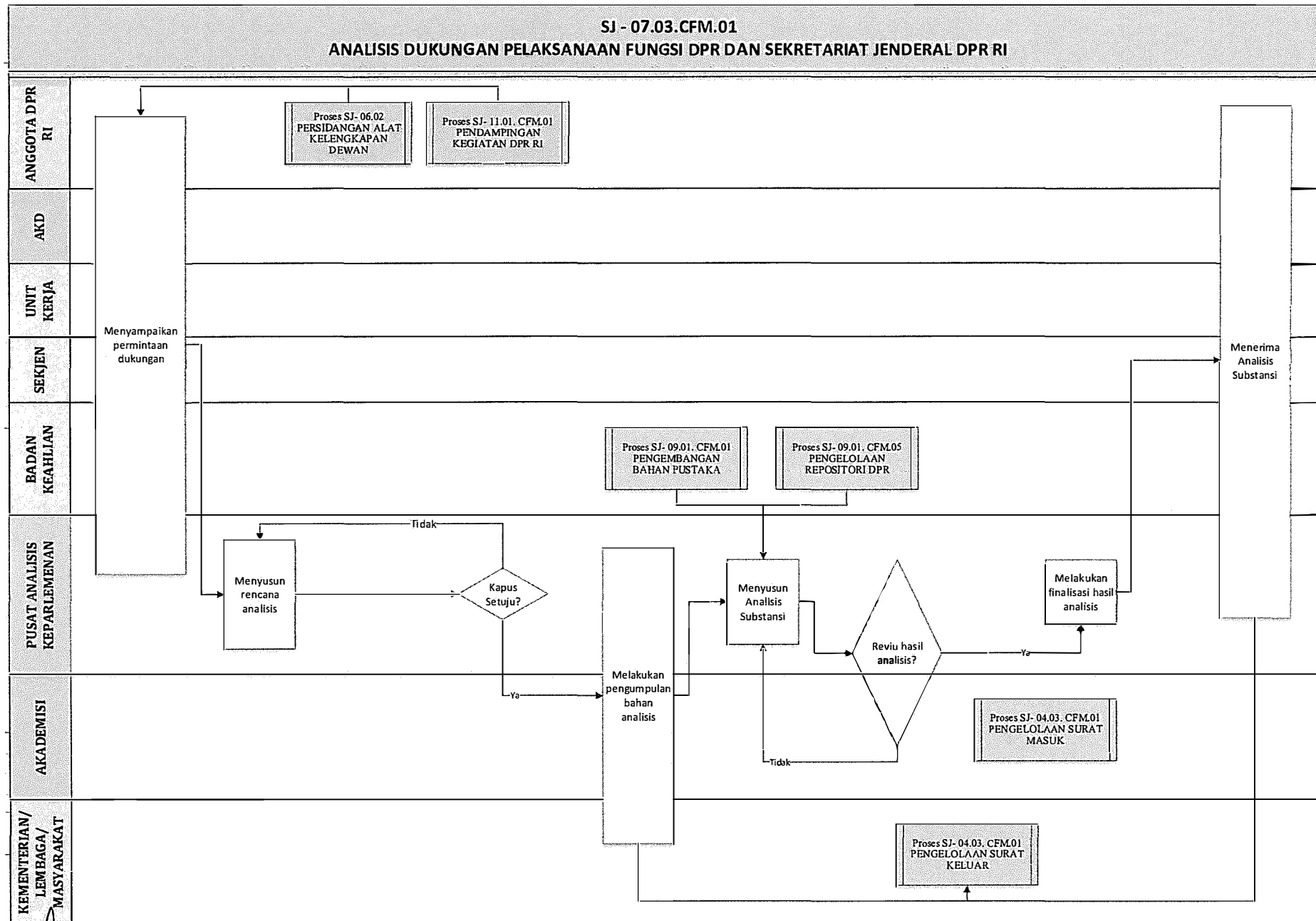


SJ – 07.02.CFM.04
DUKUNGAN PENDAMPINGAN PEMBAHASAN APBN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA



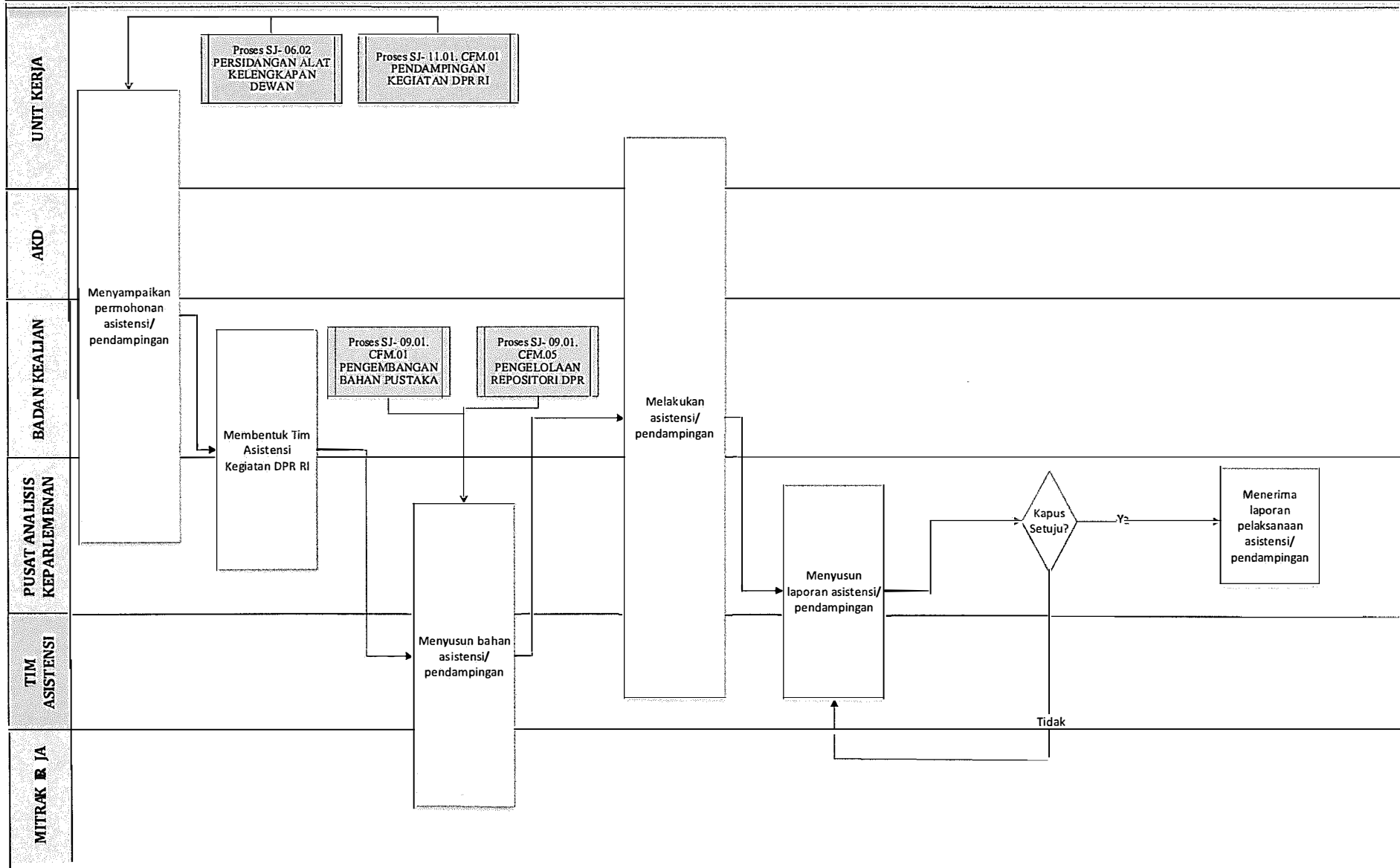
SJ – 07.02.CFM.05
PENYUSUNAN REFERENSI/ RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

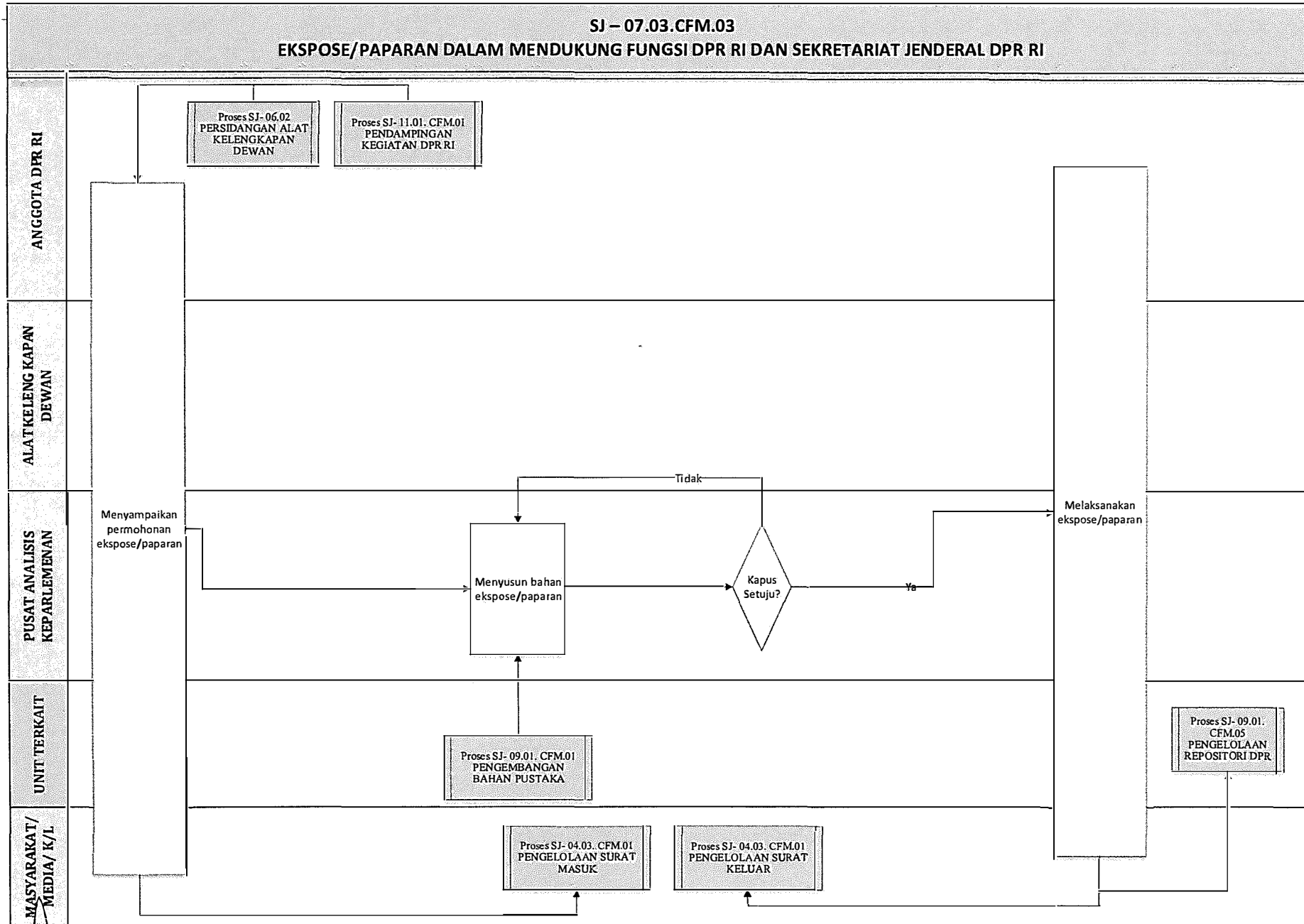




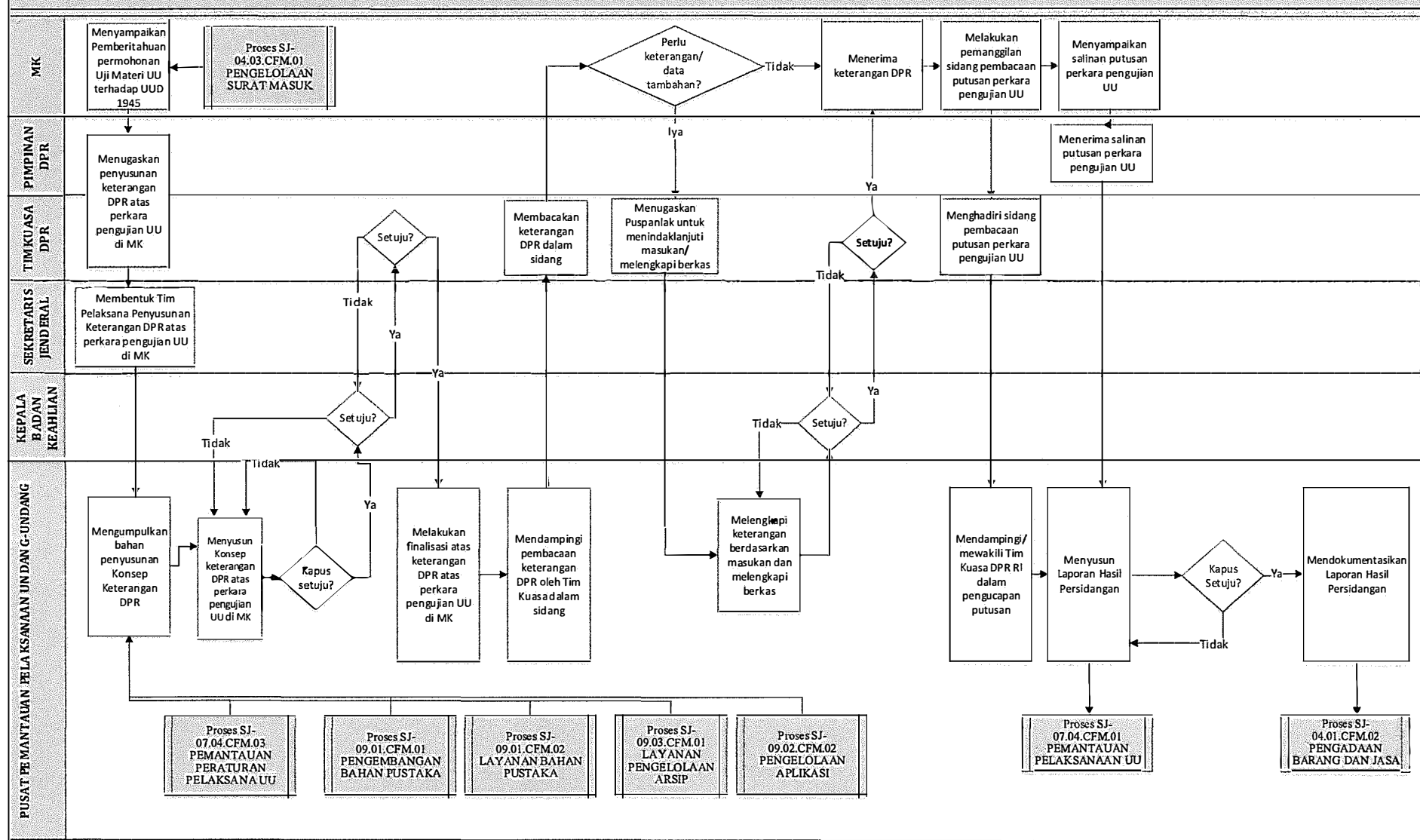
SJ - 07.03.CFM.02

ASISTENSI/PENDAMPINGAN DALAM MENDUKUNG FUNGSI DPR RI DAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

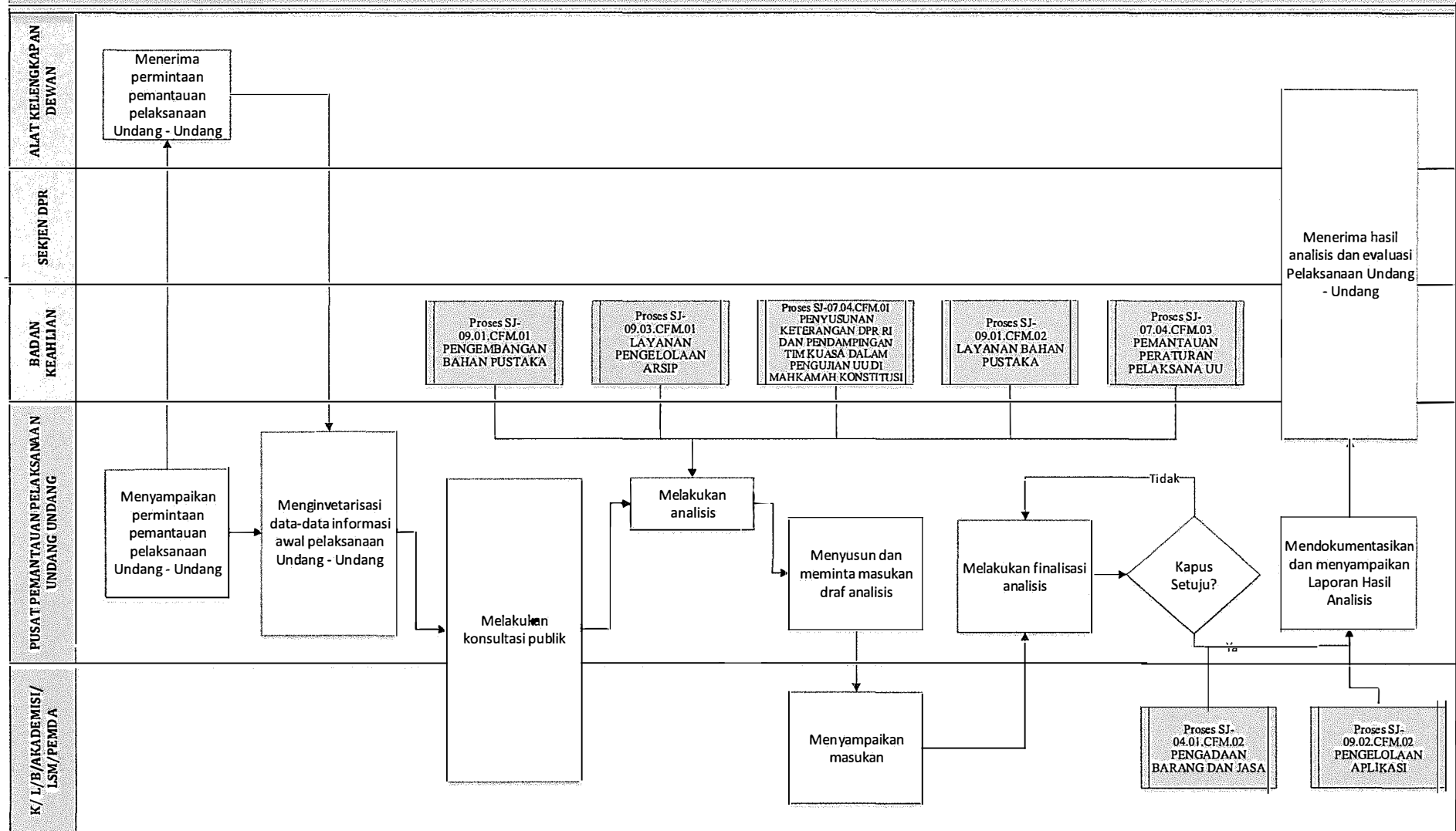


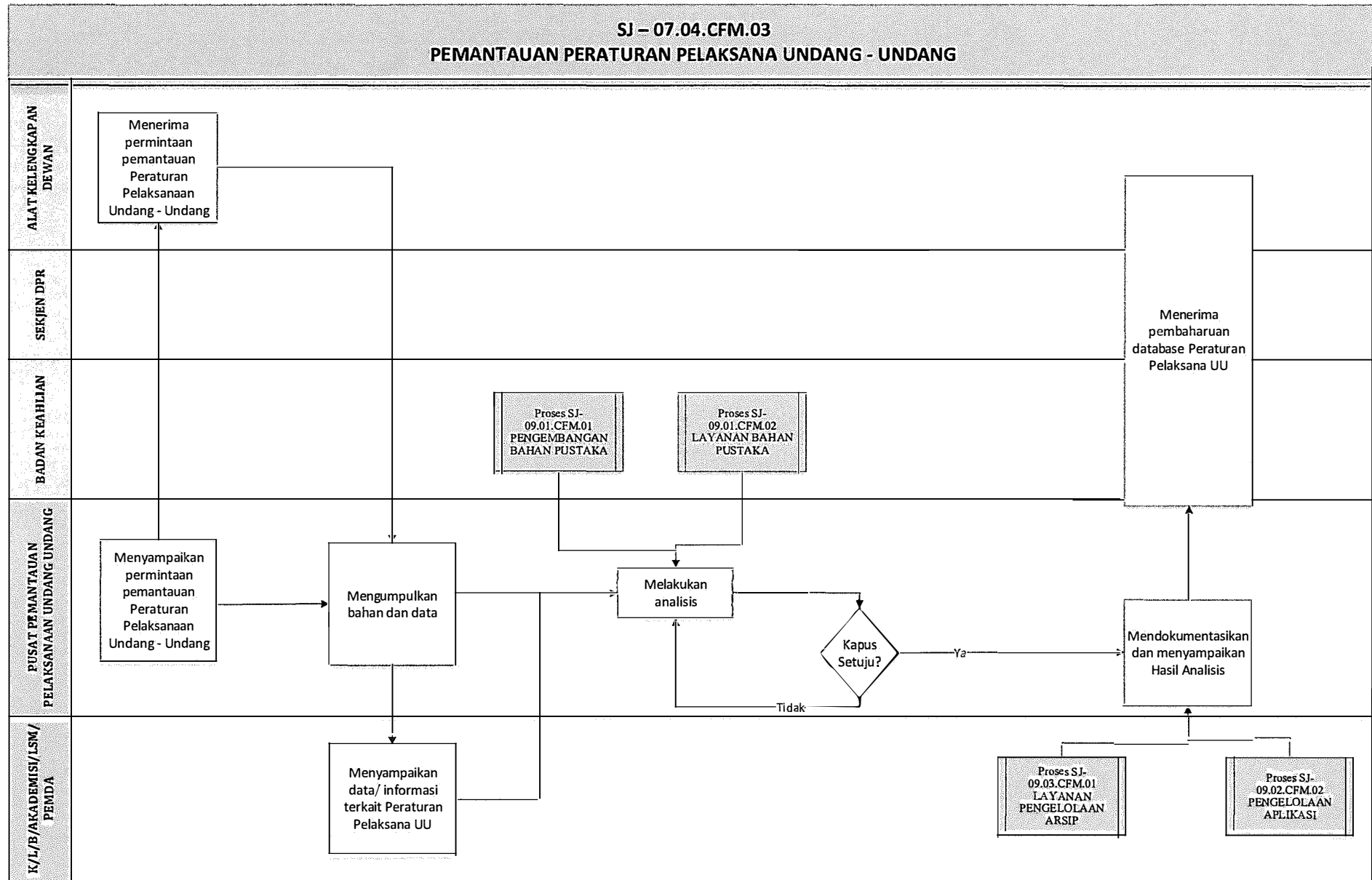


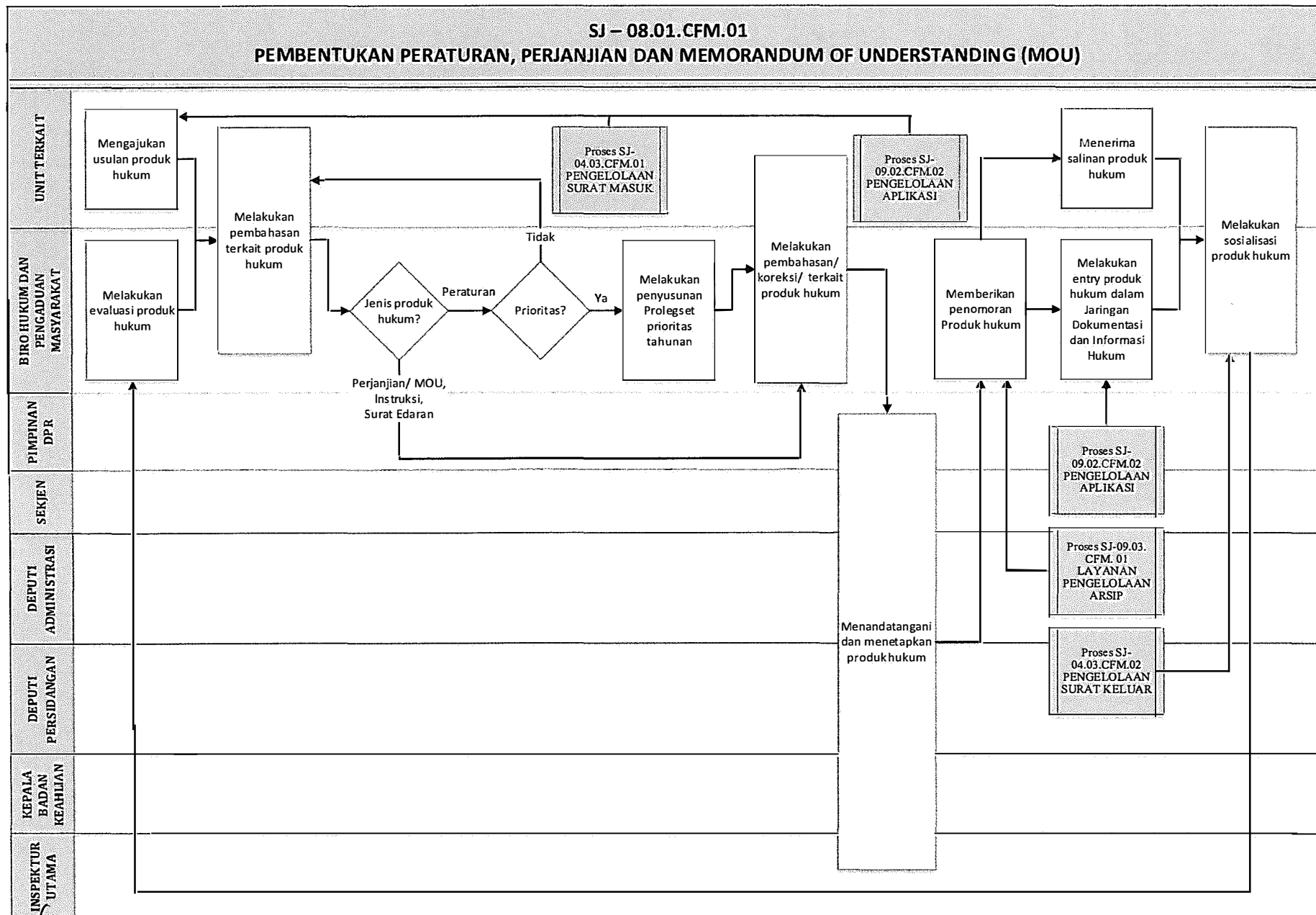
SJ – 07.04.CFM.01
PENYUSUNAN KETERANGAN DPR RI DAN PENDAMPINGAN TIM KUASA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

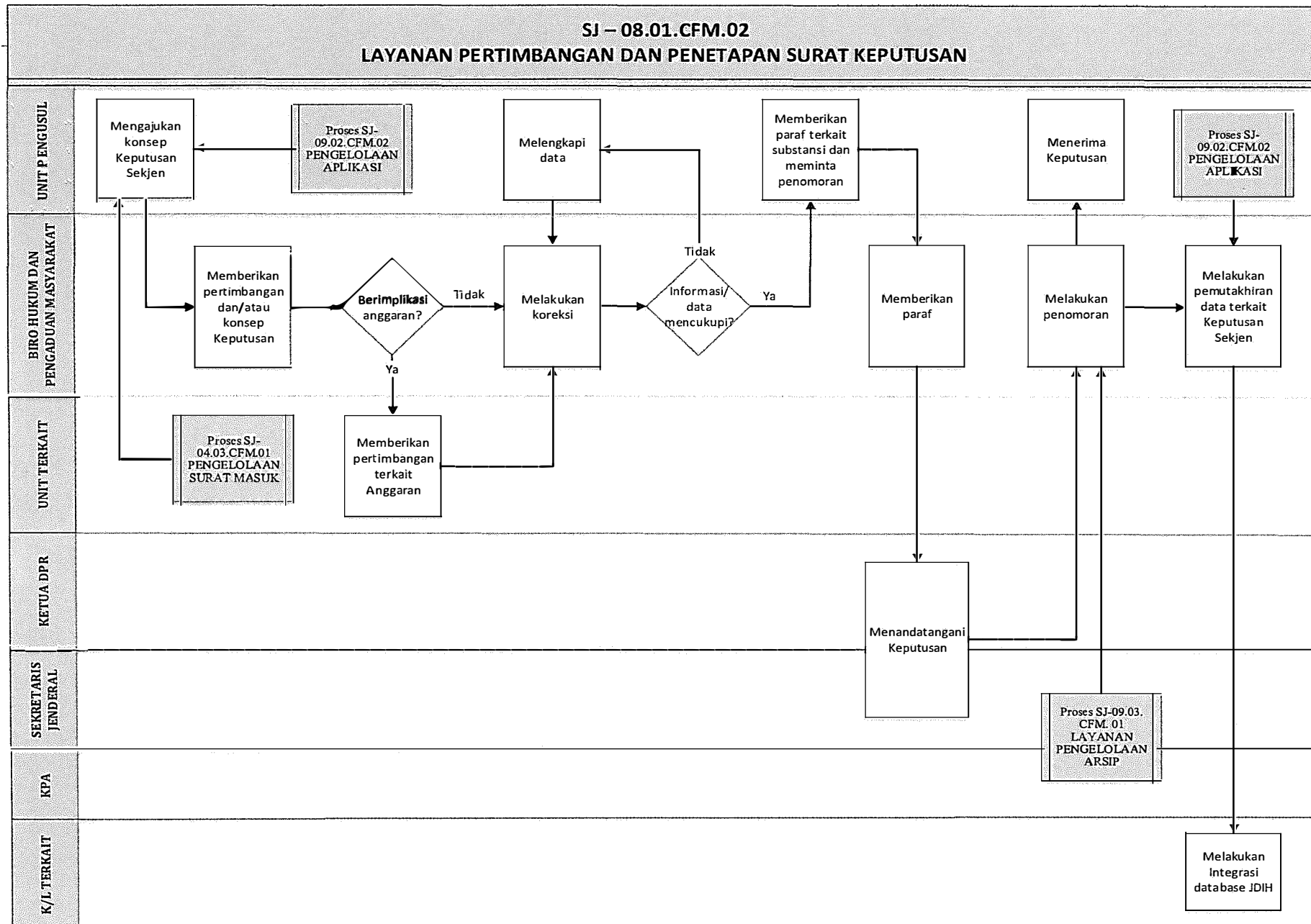


SJ – 07.04.CFM.02
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG

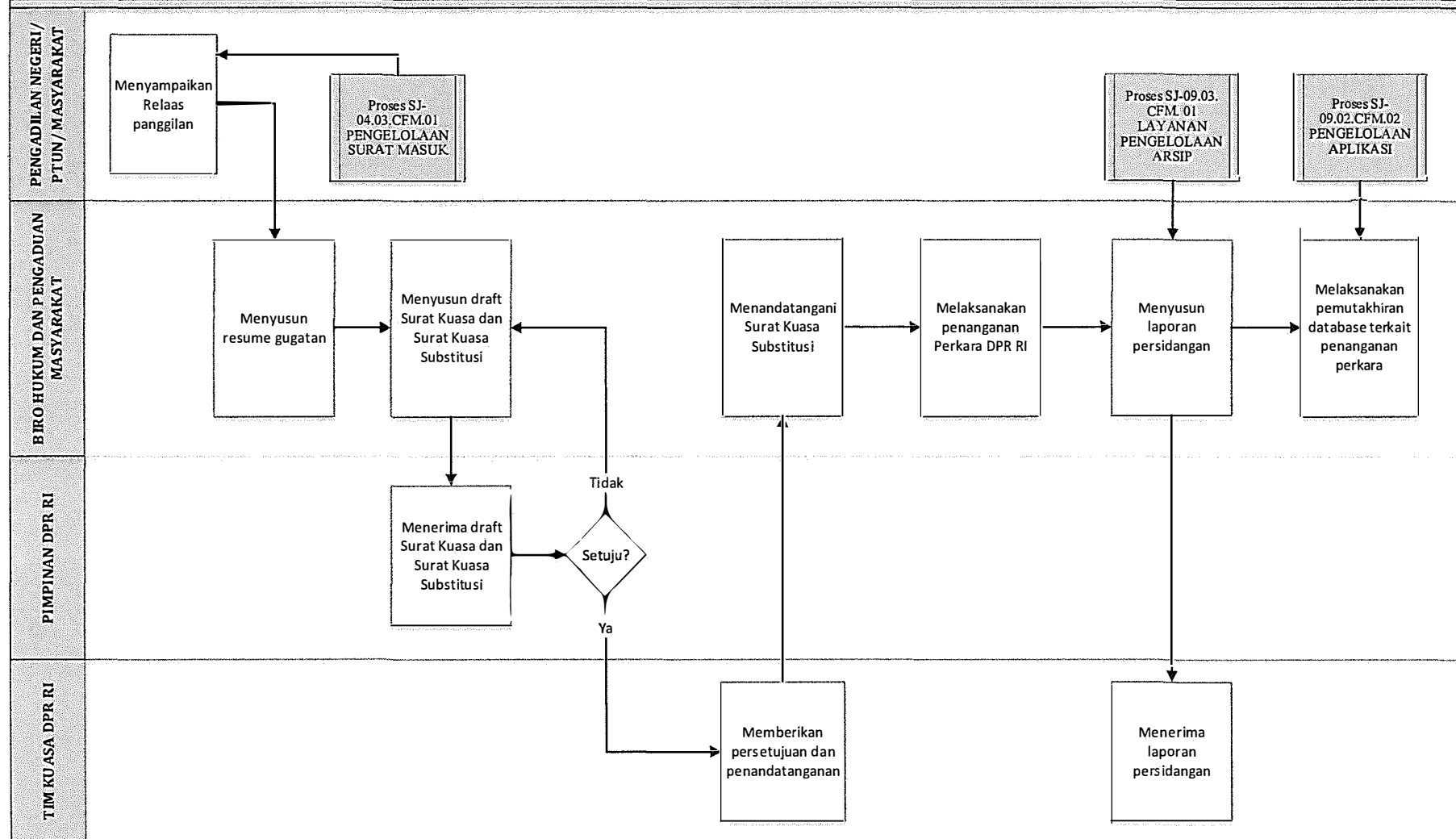




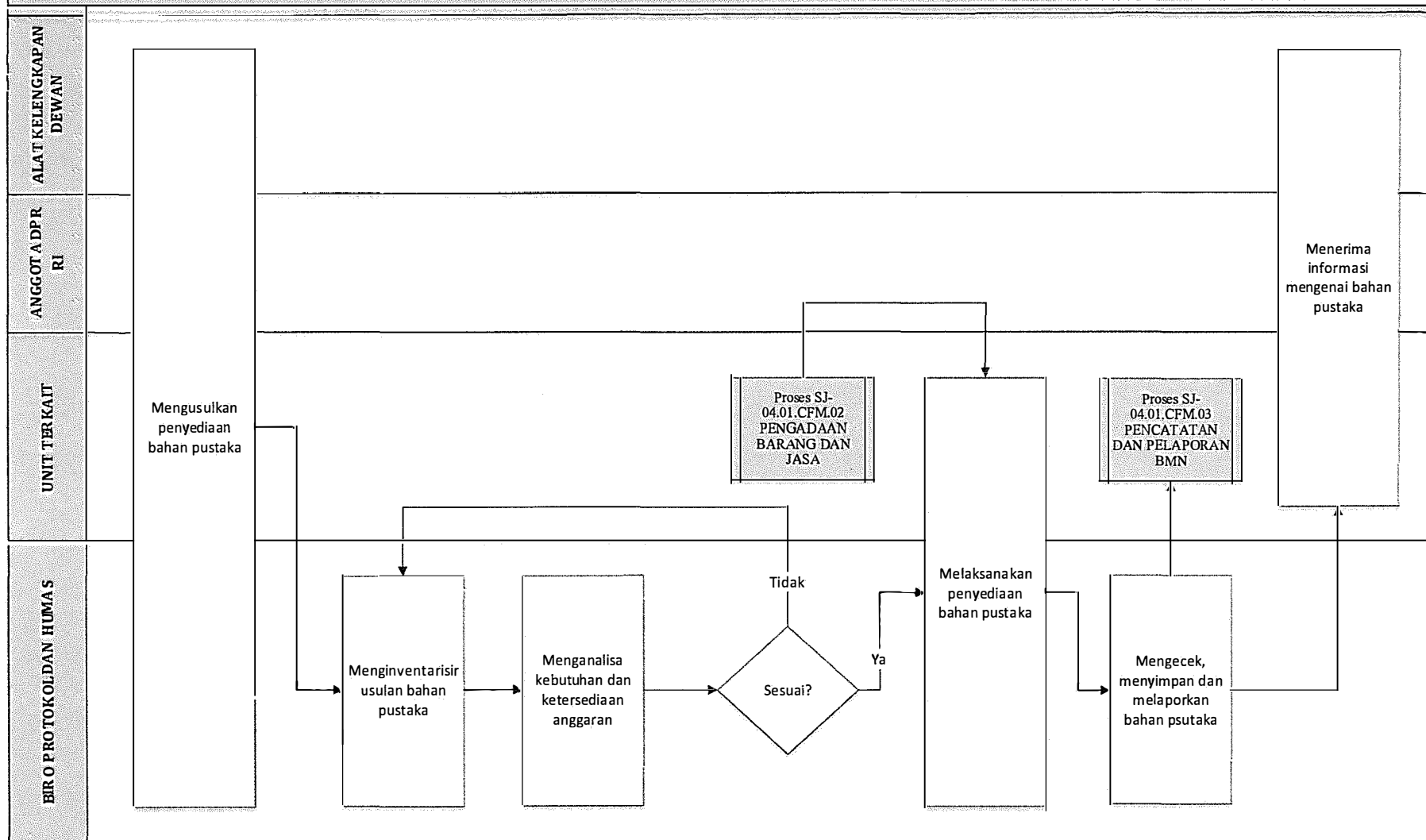




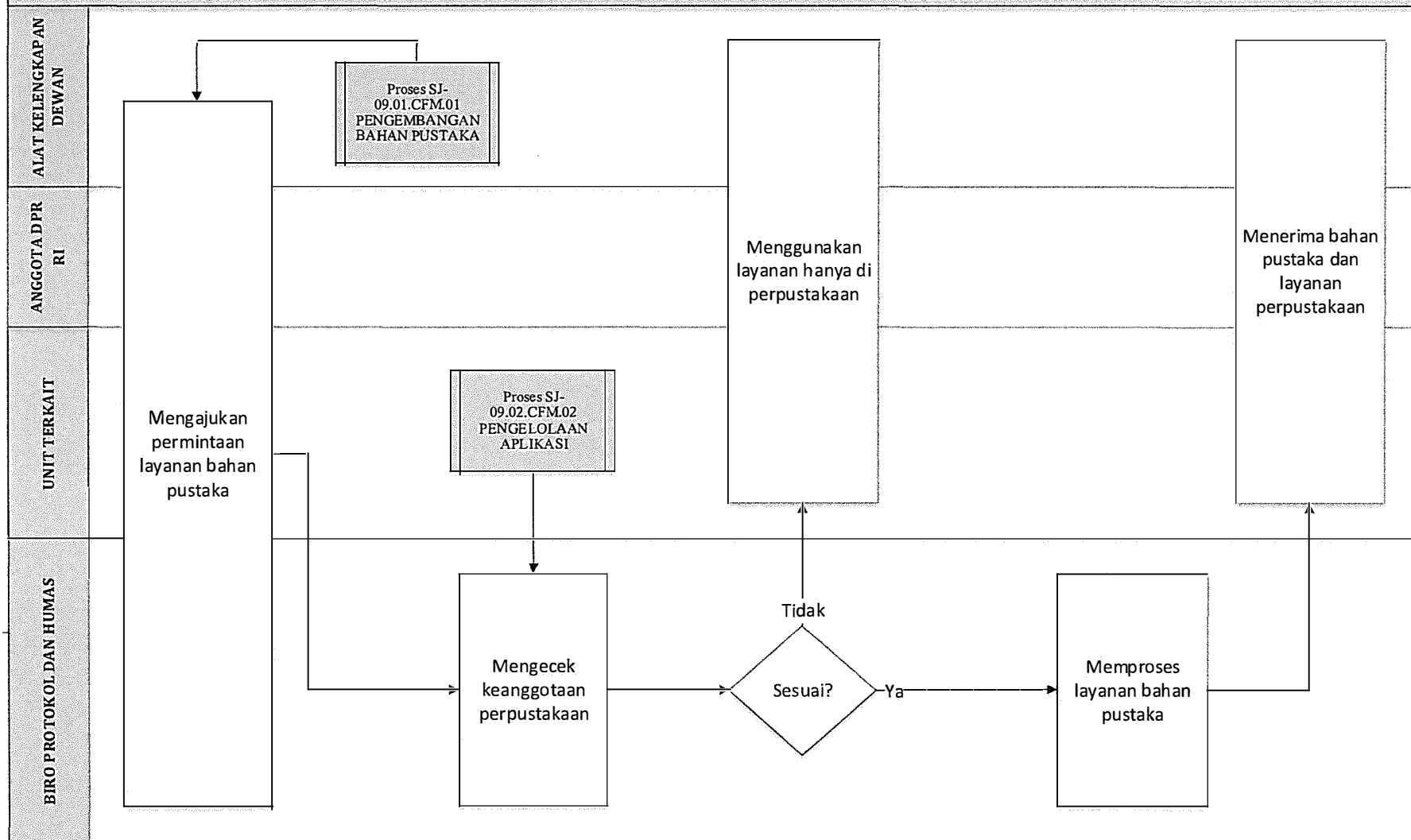
SJ – 08.01.CFM.03 PENANGANGAN PERKARA DPR (LITIGASI)



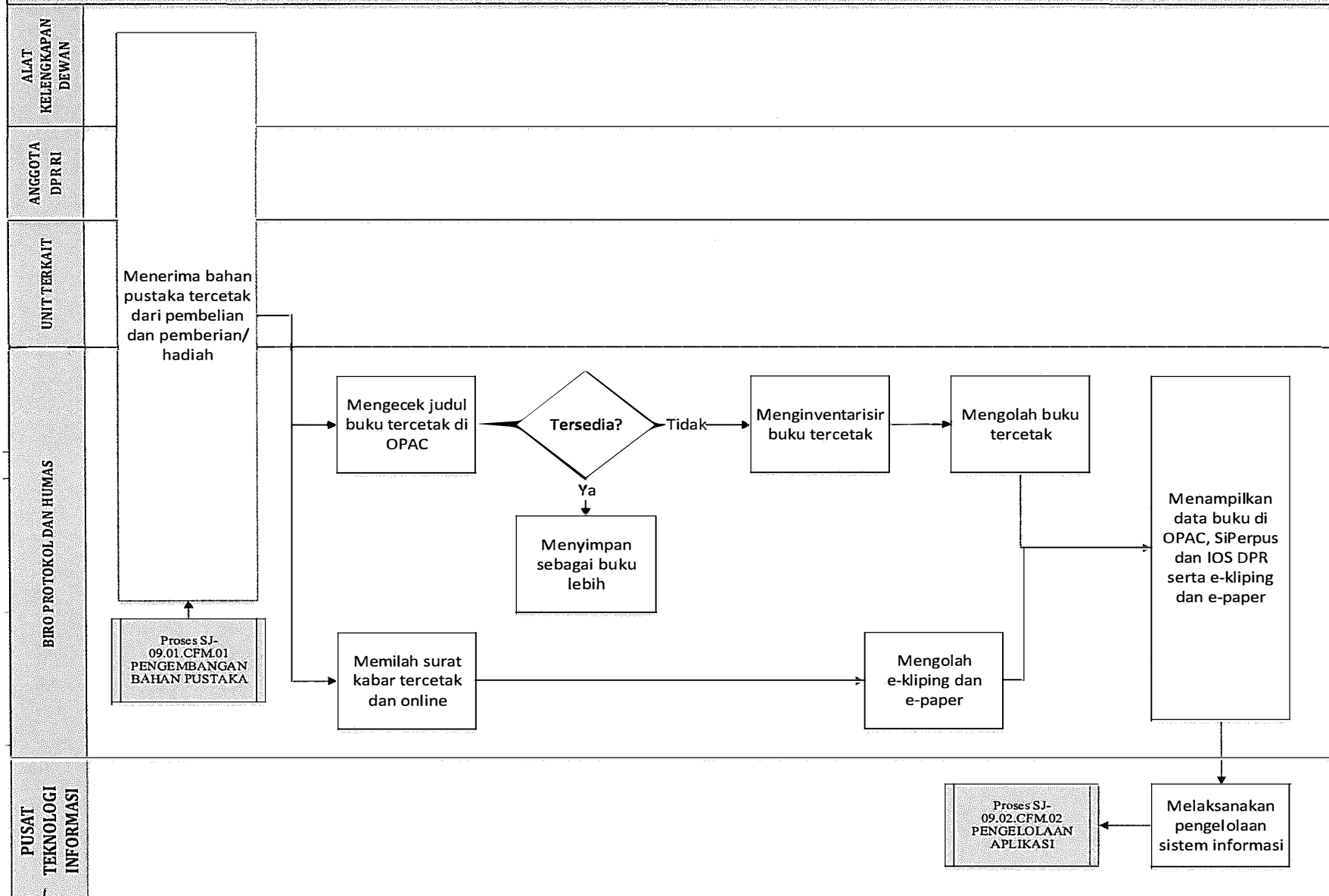
SJ – 09.01.CFM.01
PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA



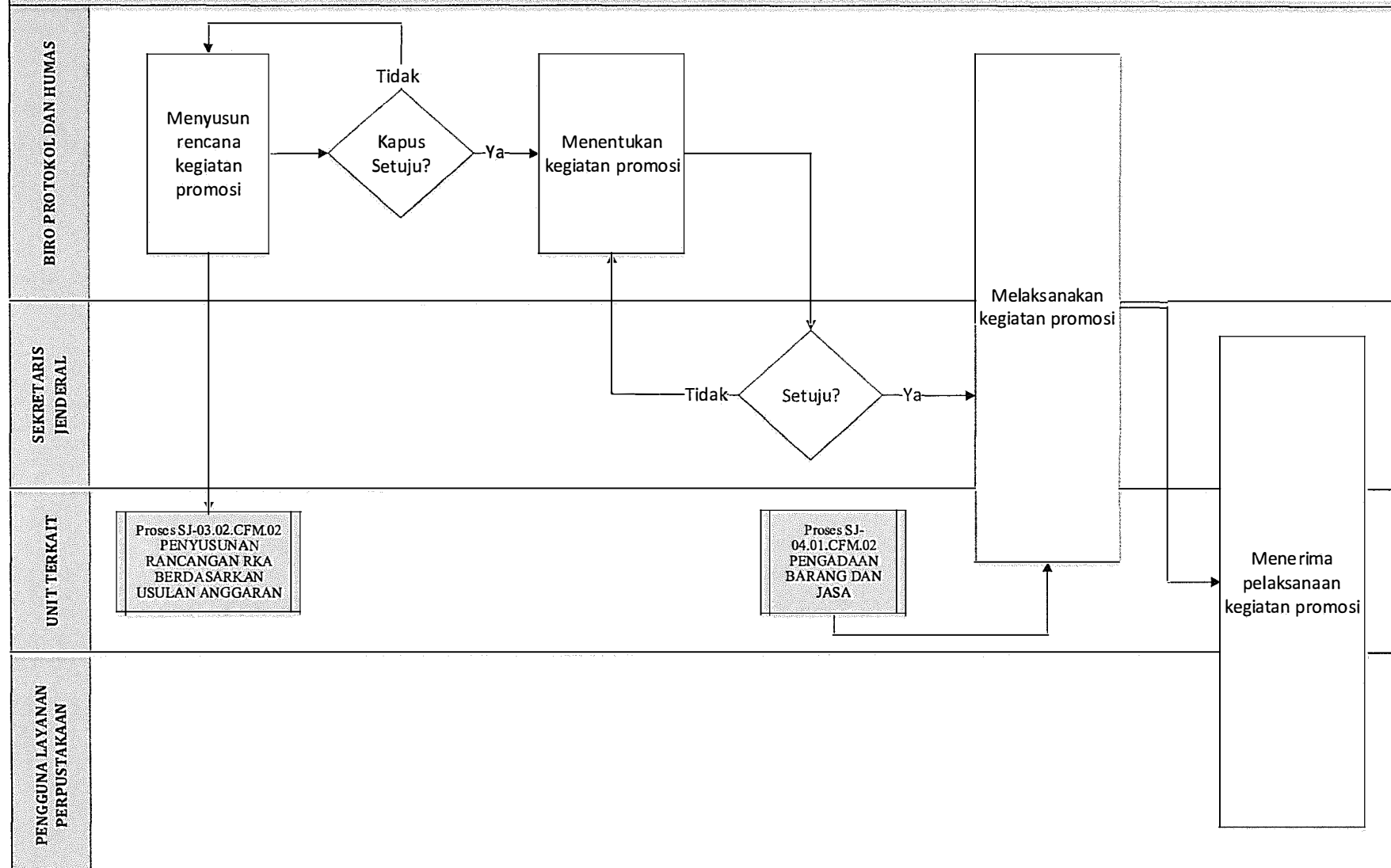
SJ – 09.01.CFM.02
LAYANAN BAHAN PUSTAKA



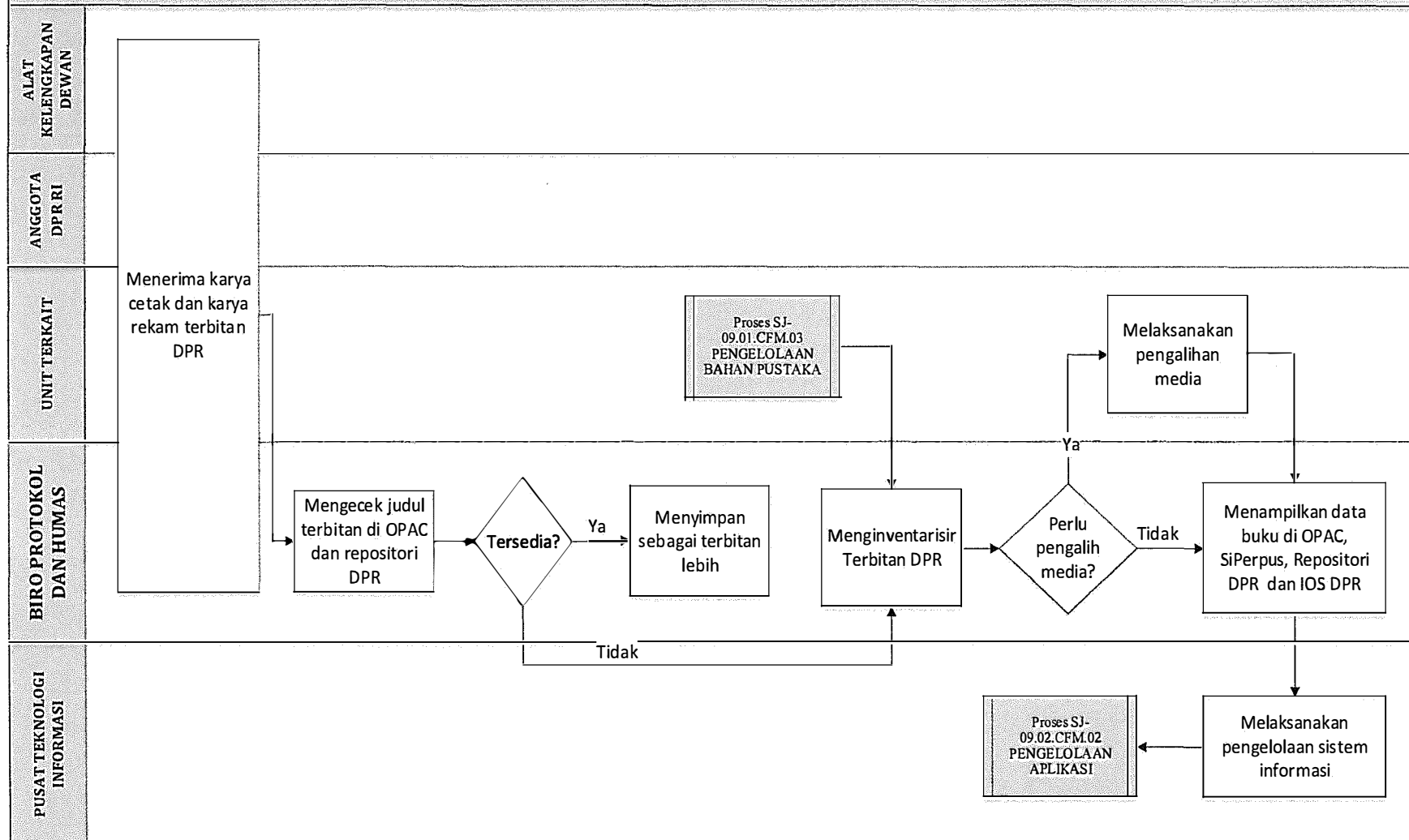
SJ – 09.01.CFM.03
PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA

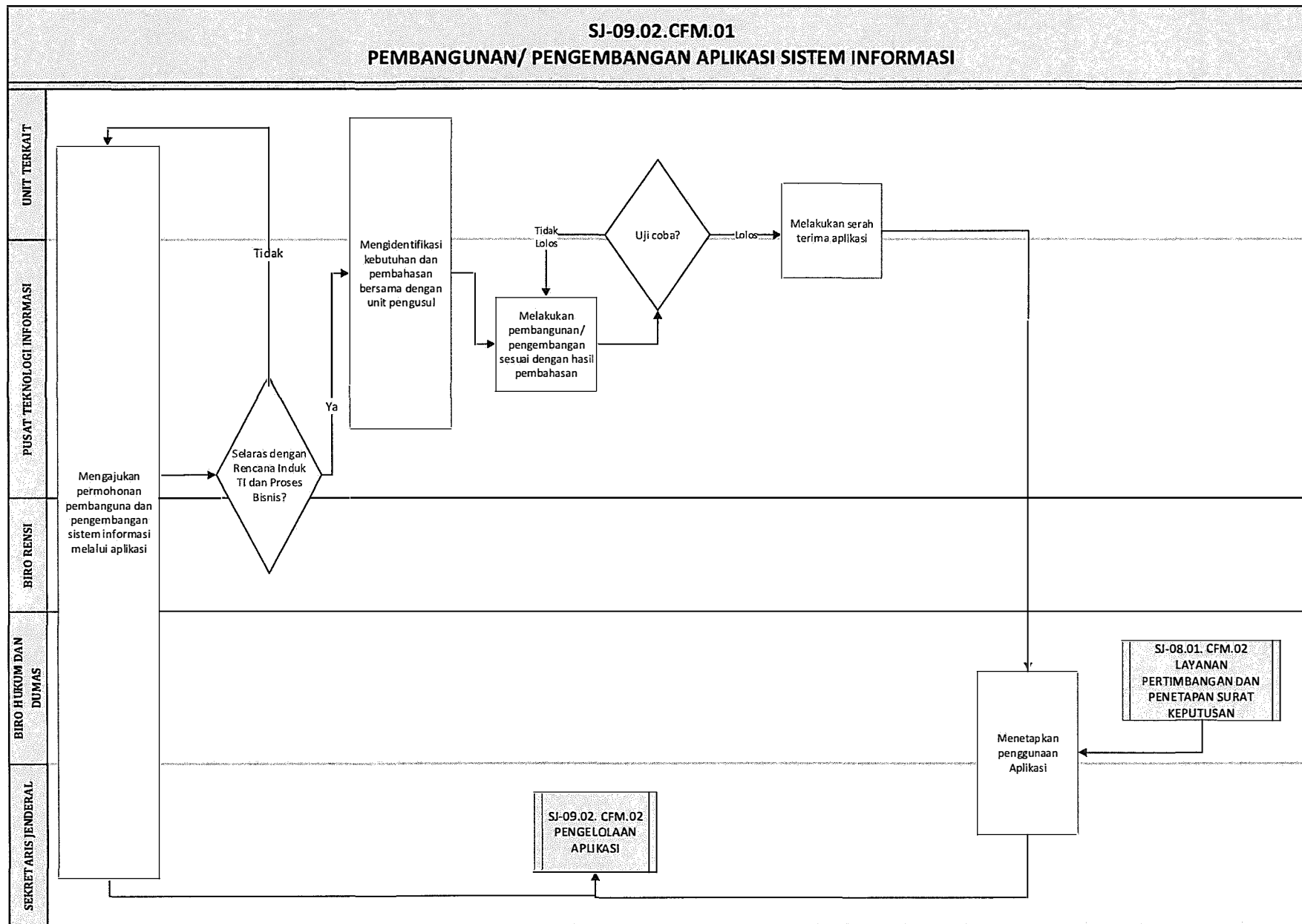


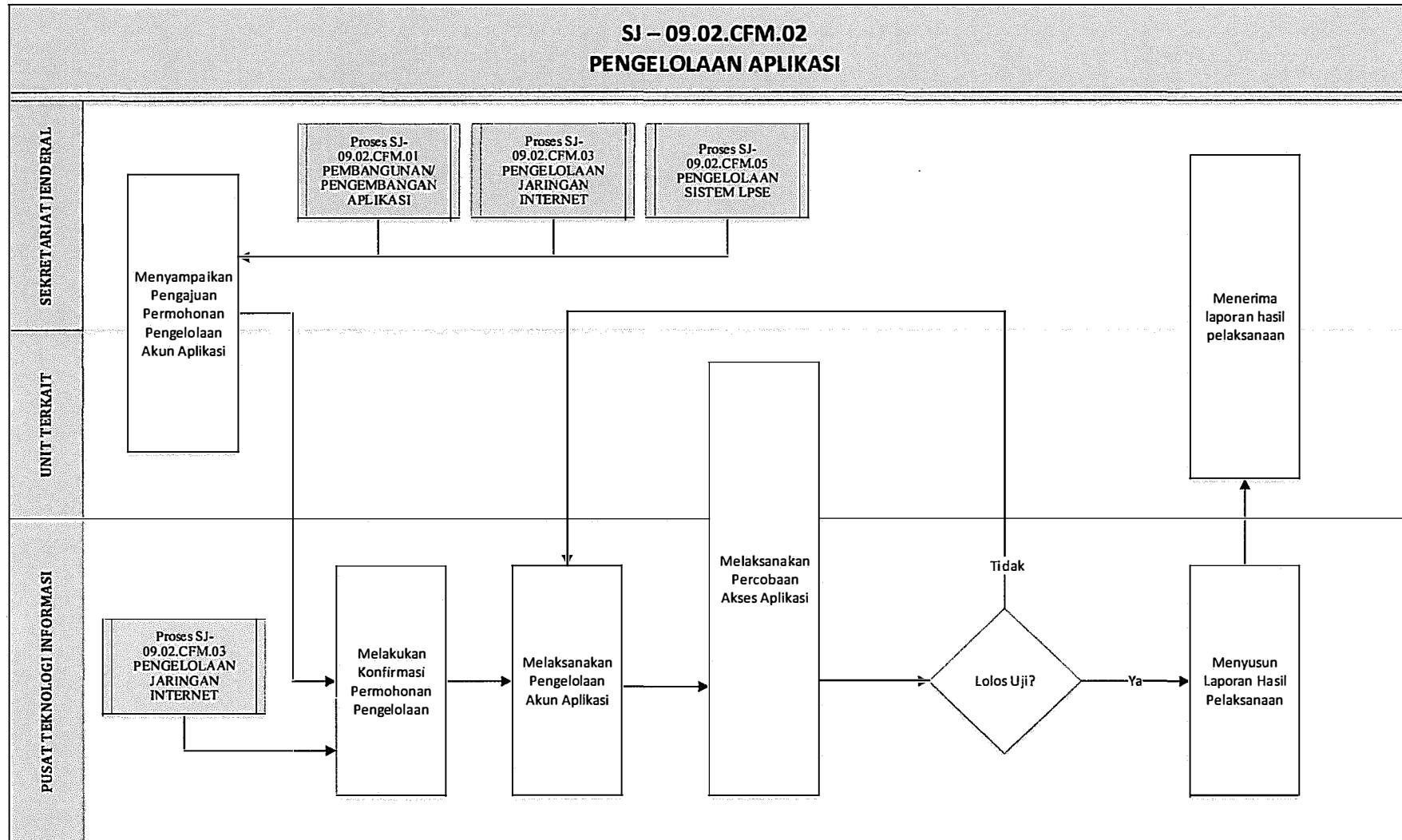
SJ – 09.01.CFM.04
PROMOSI PERPUSTAKAAN



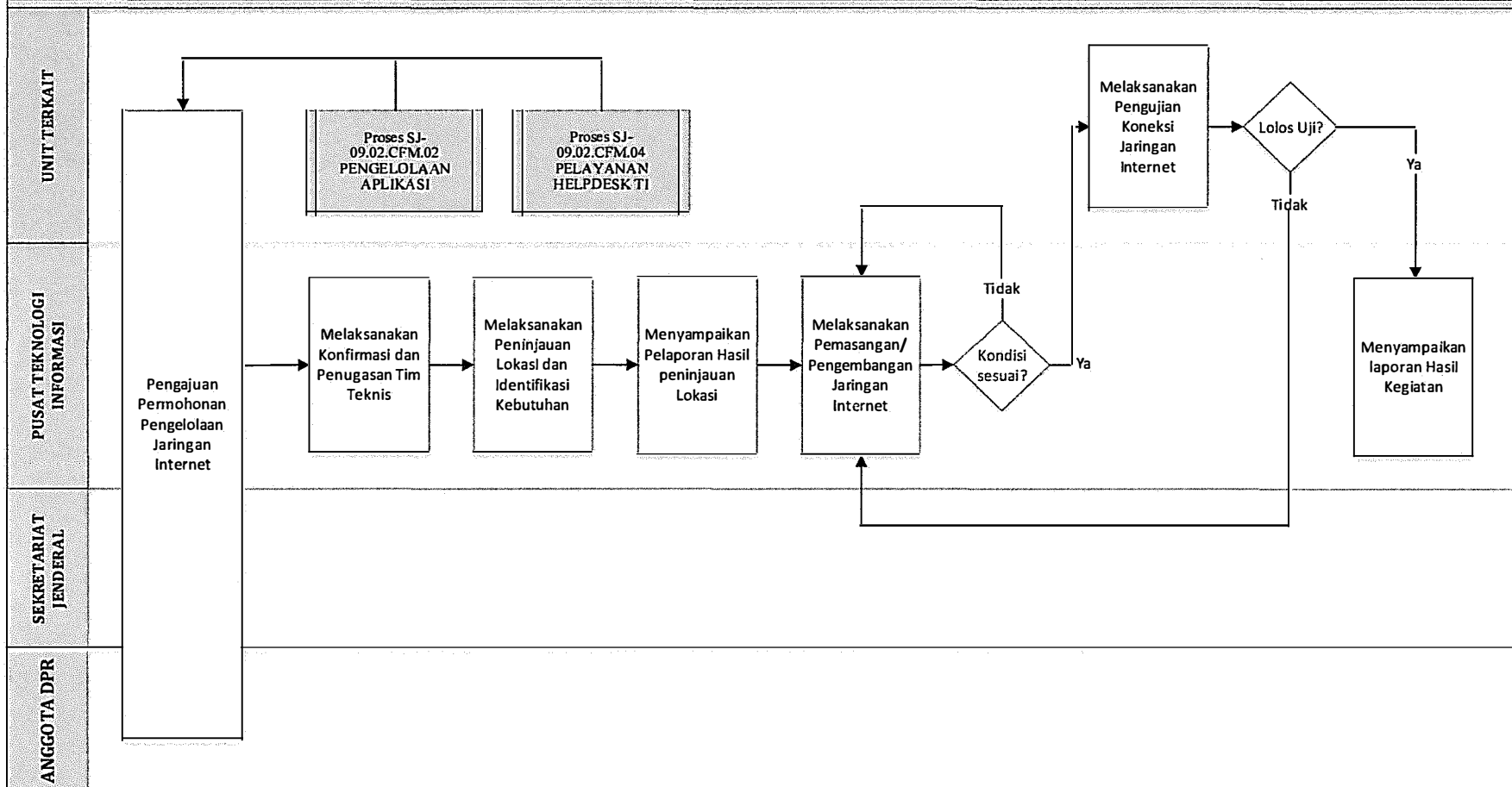
SJ – 09.01.CFM.05
PENGELOLAAN REPOSITORI DPR



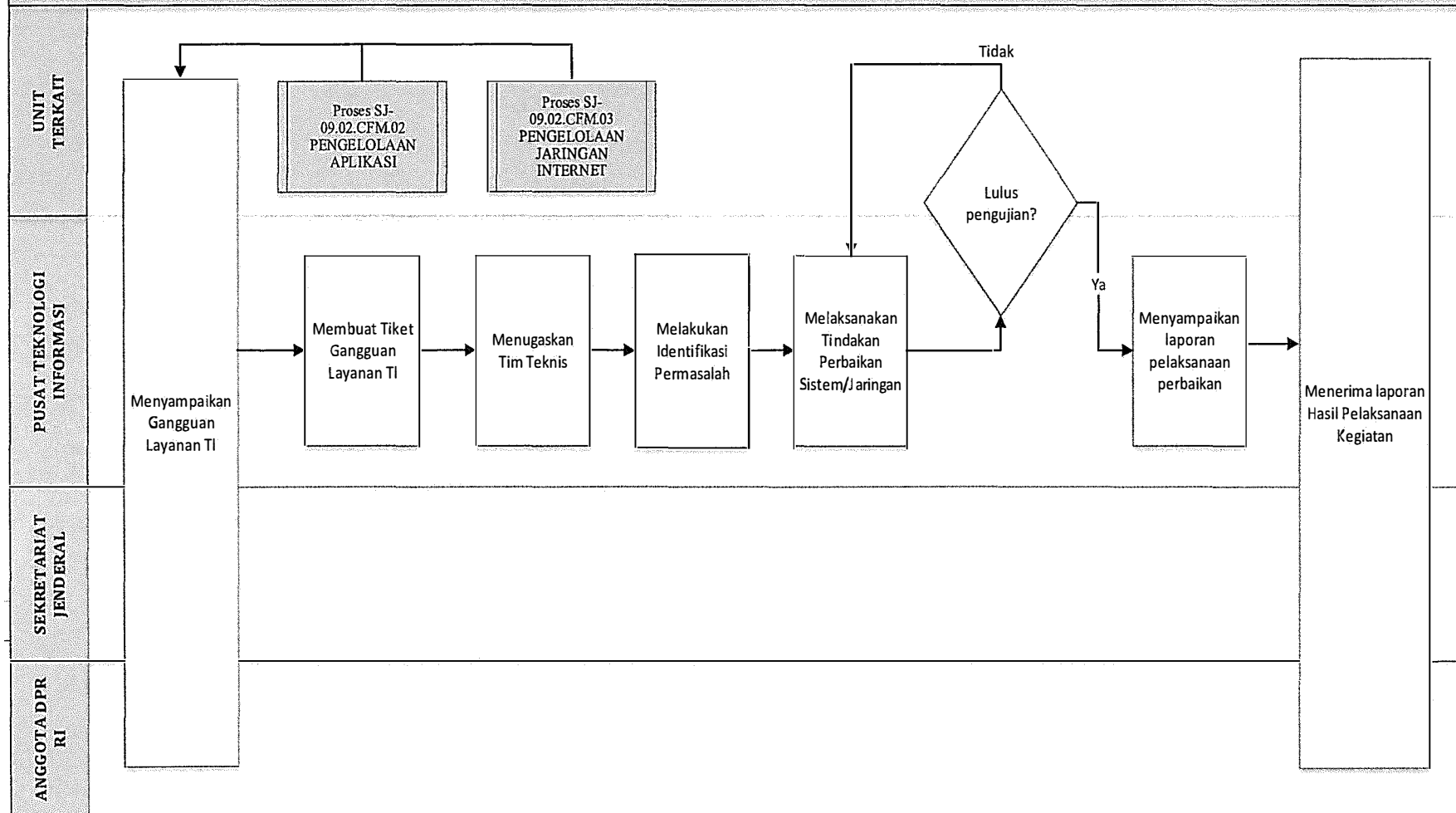




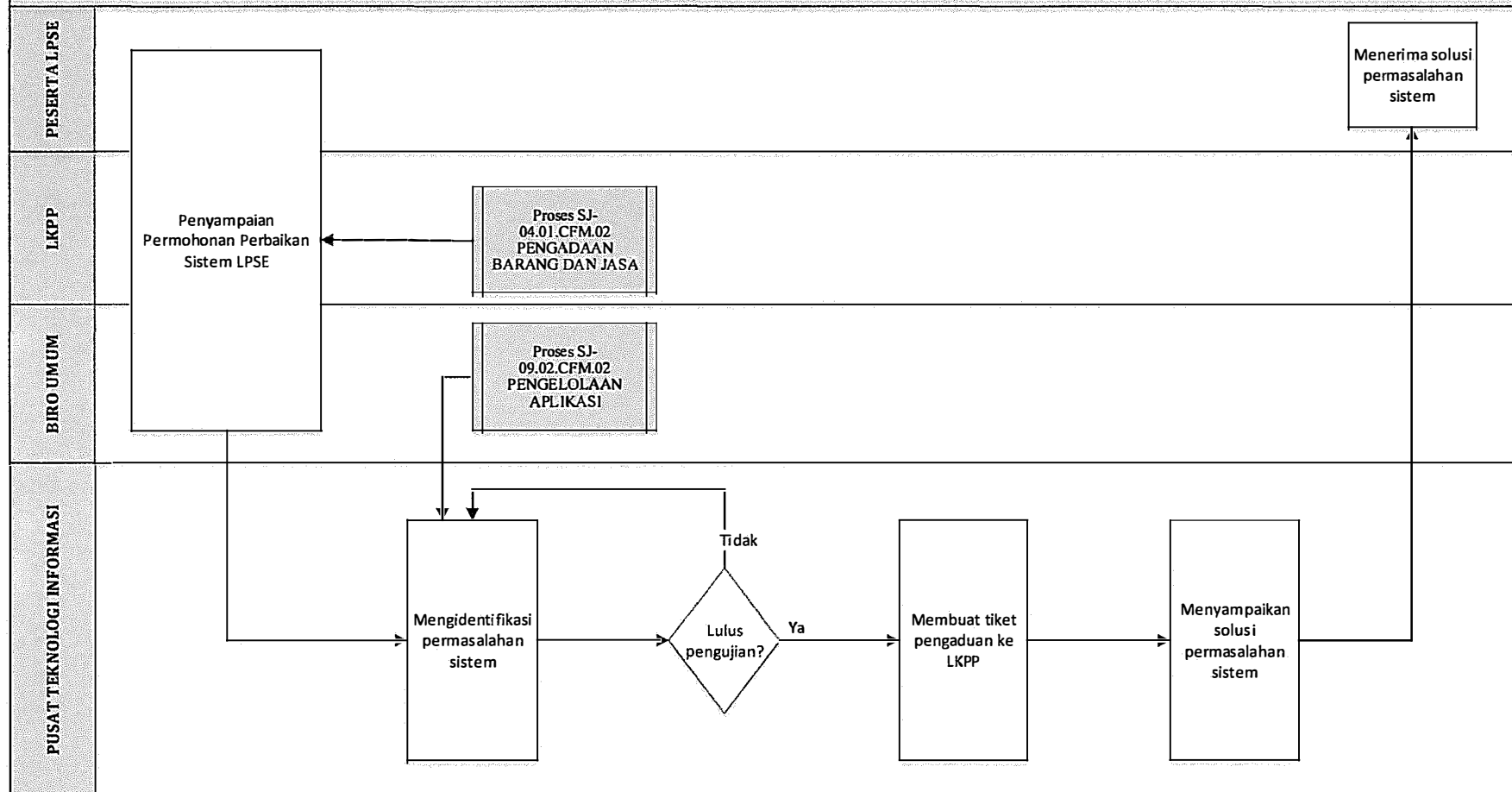
SJ – 09.02.CFM.03 PENGELOLAAN JARINGAN INTERNET



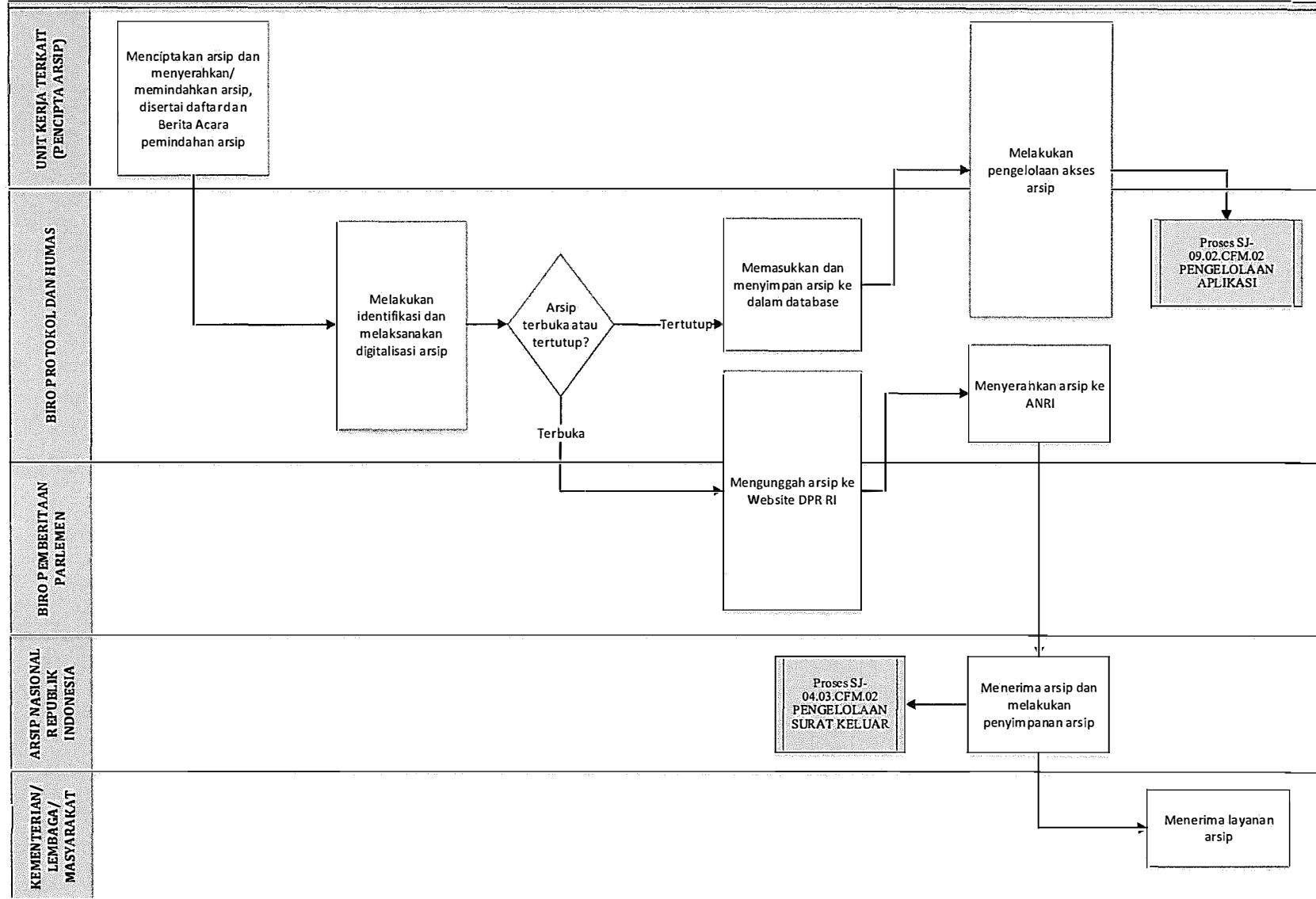
SJ – 09.02.CFM.04 PELAYANAN HELPDESK TI



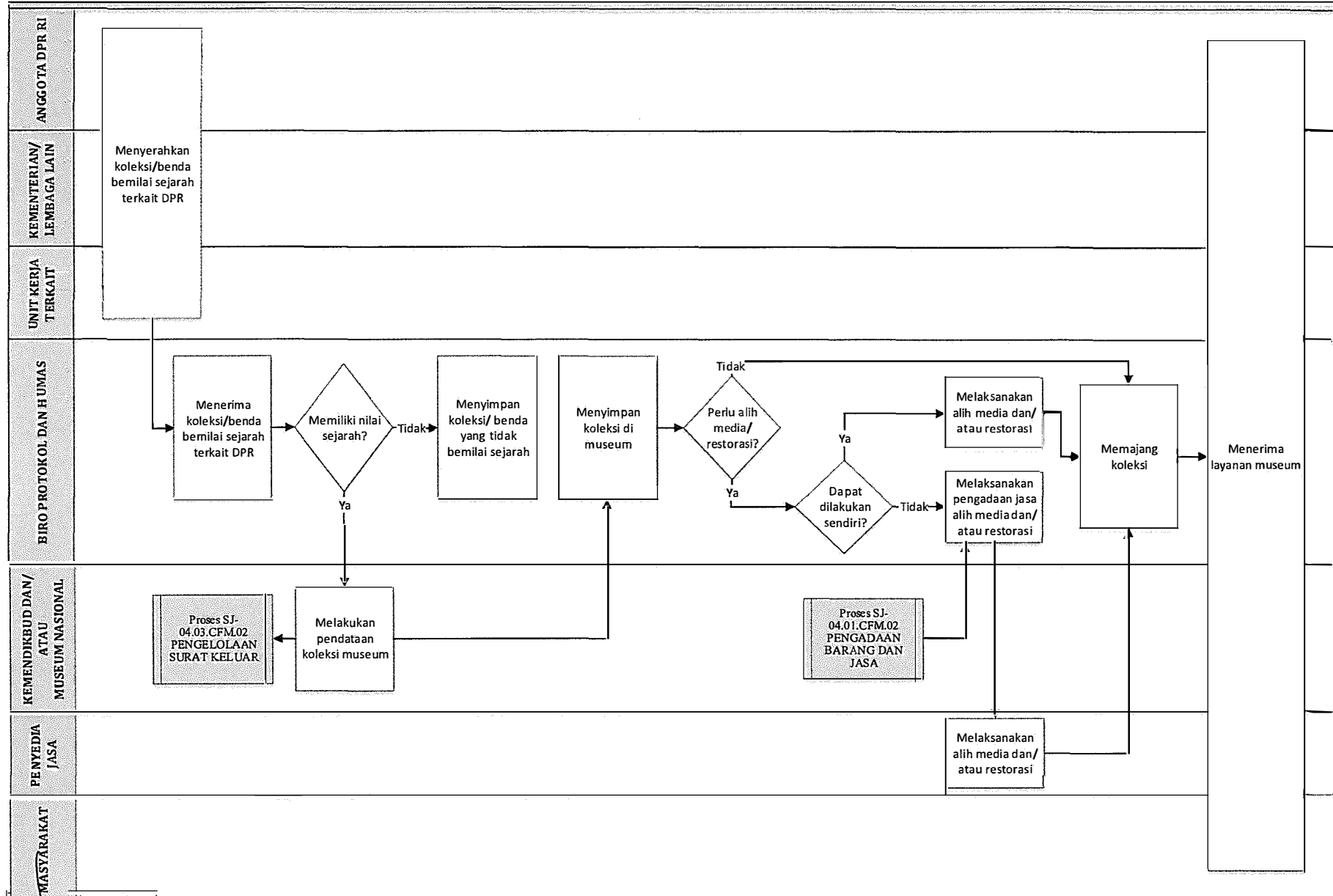
SJ – 09.02.CFM.05
PENGELOLAAN SISTEM LPSE



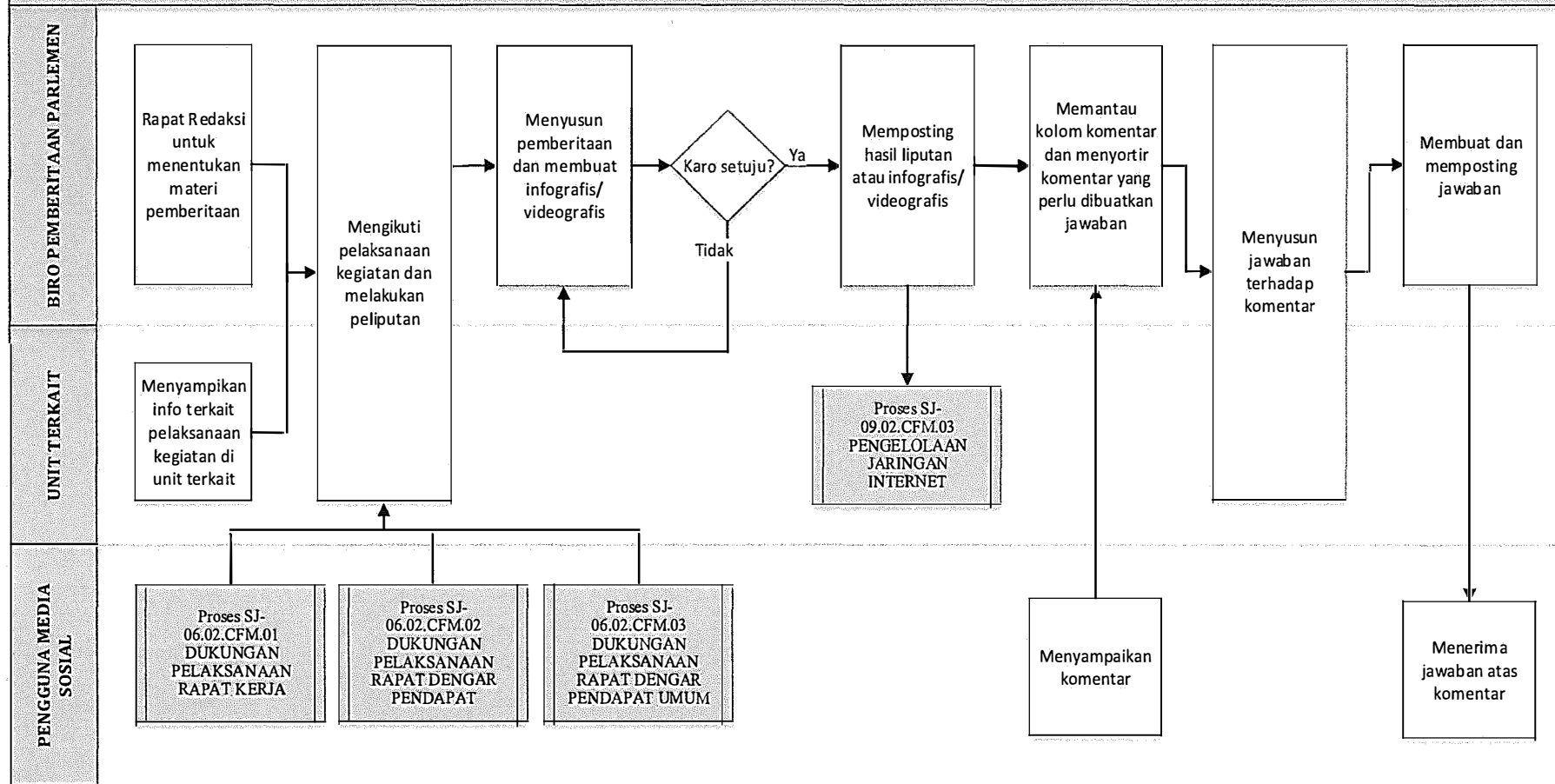
SJ – 09.03.CFM.01
LAYANAN PENGELOLAAN ARSIP



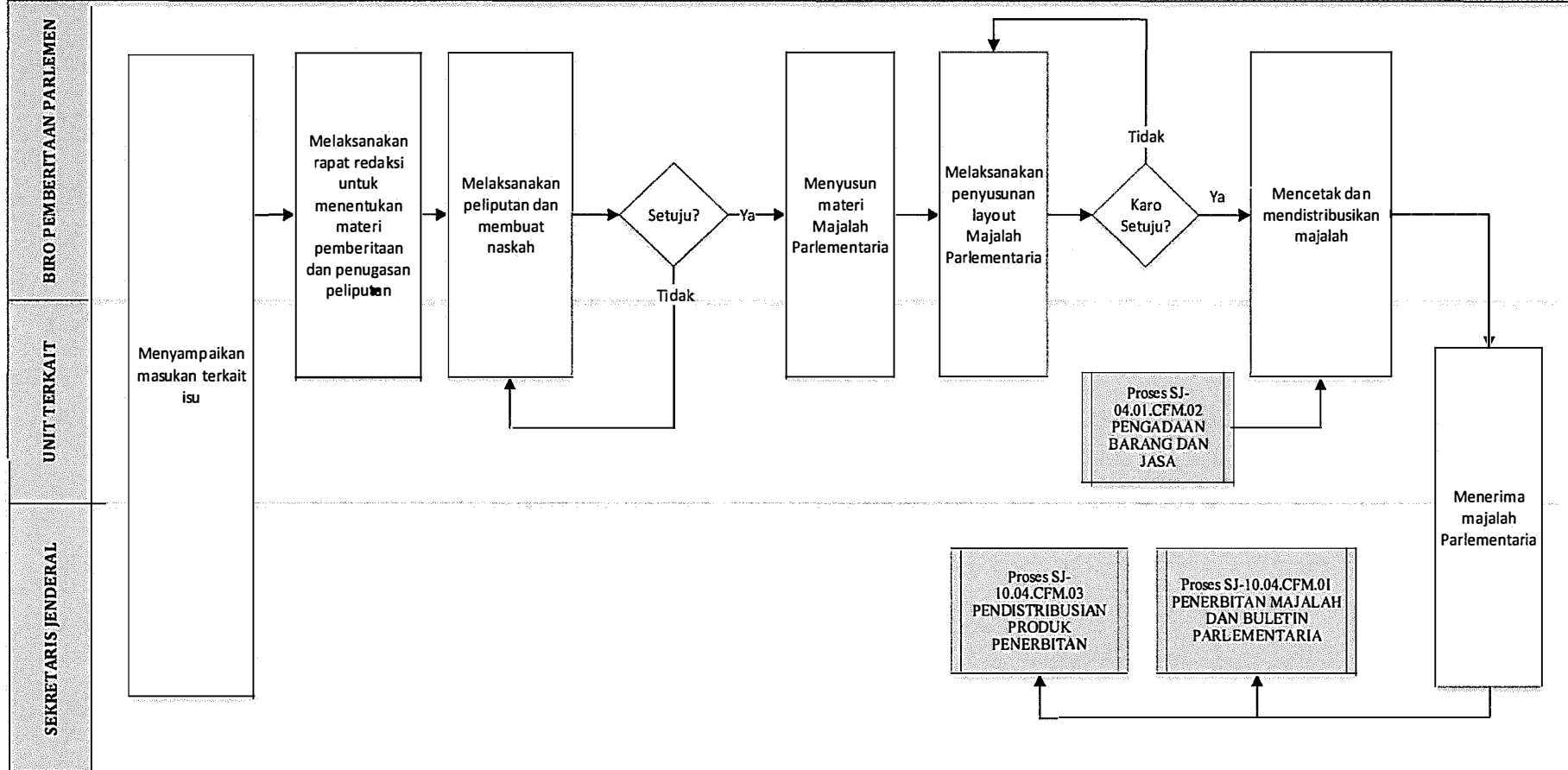
SJ – 09.03.CFM.02
LAYANAN PENGELOLAAN KOLEKSI DAN/ATAU BENDA MUSEUM



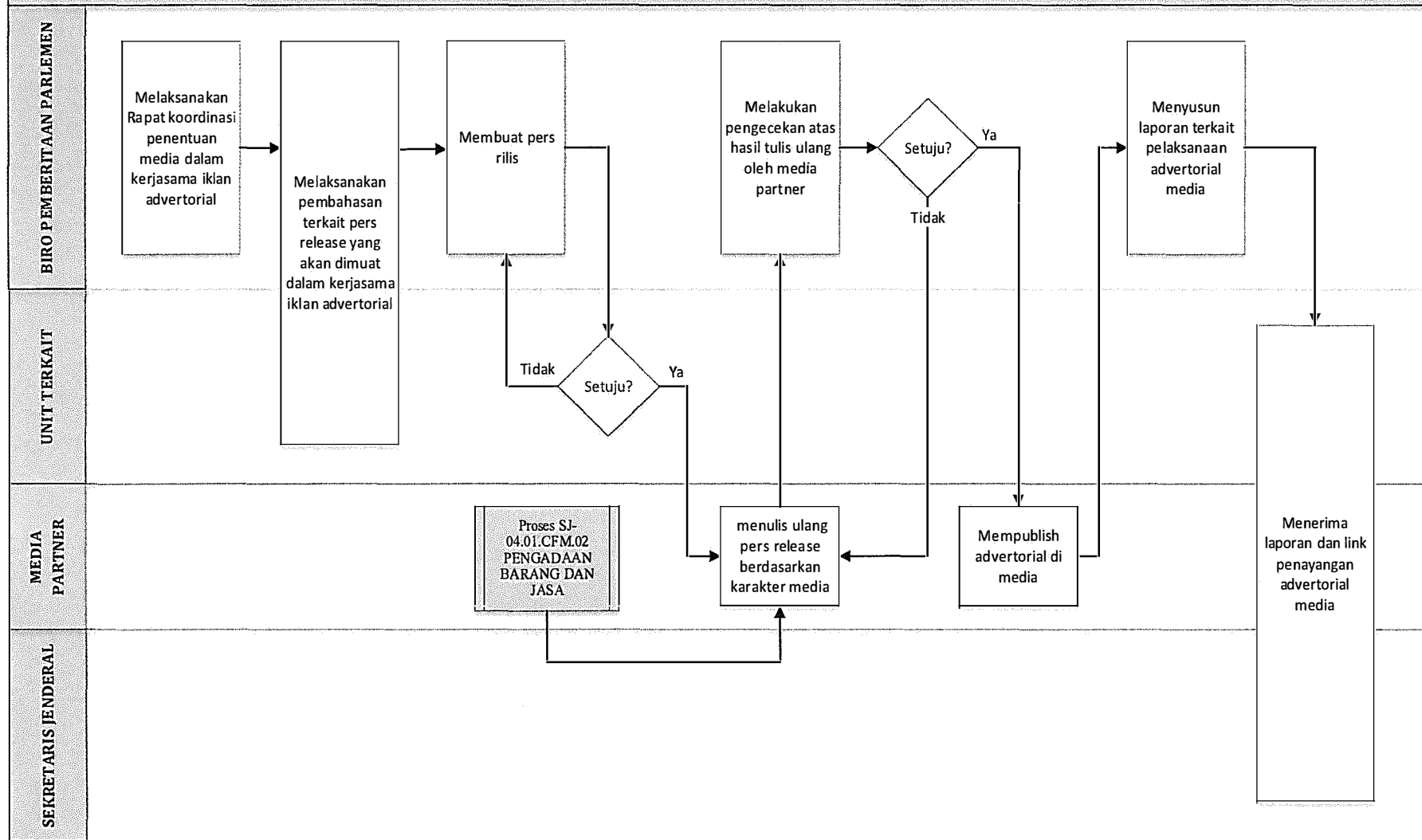
SJ – 10.01.CFM.01
PENGELOLAAN PEMBERITAAN DI MEDIA SOSIAL



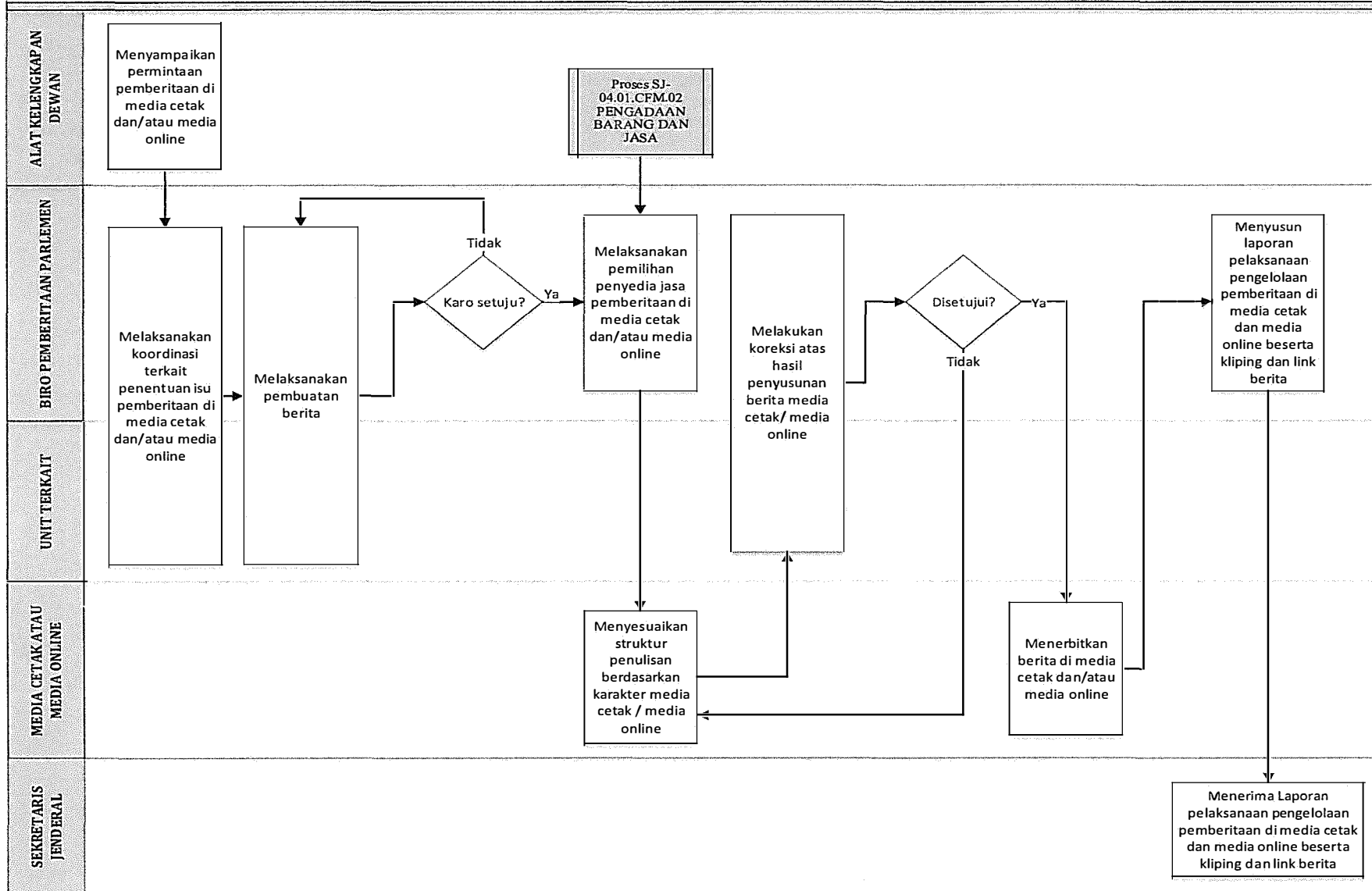
SJ – 10.01.CFM.02
PENGELOLAAN PEMBERITAAN DI MAJALAH PARLEMENTARIA



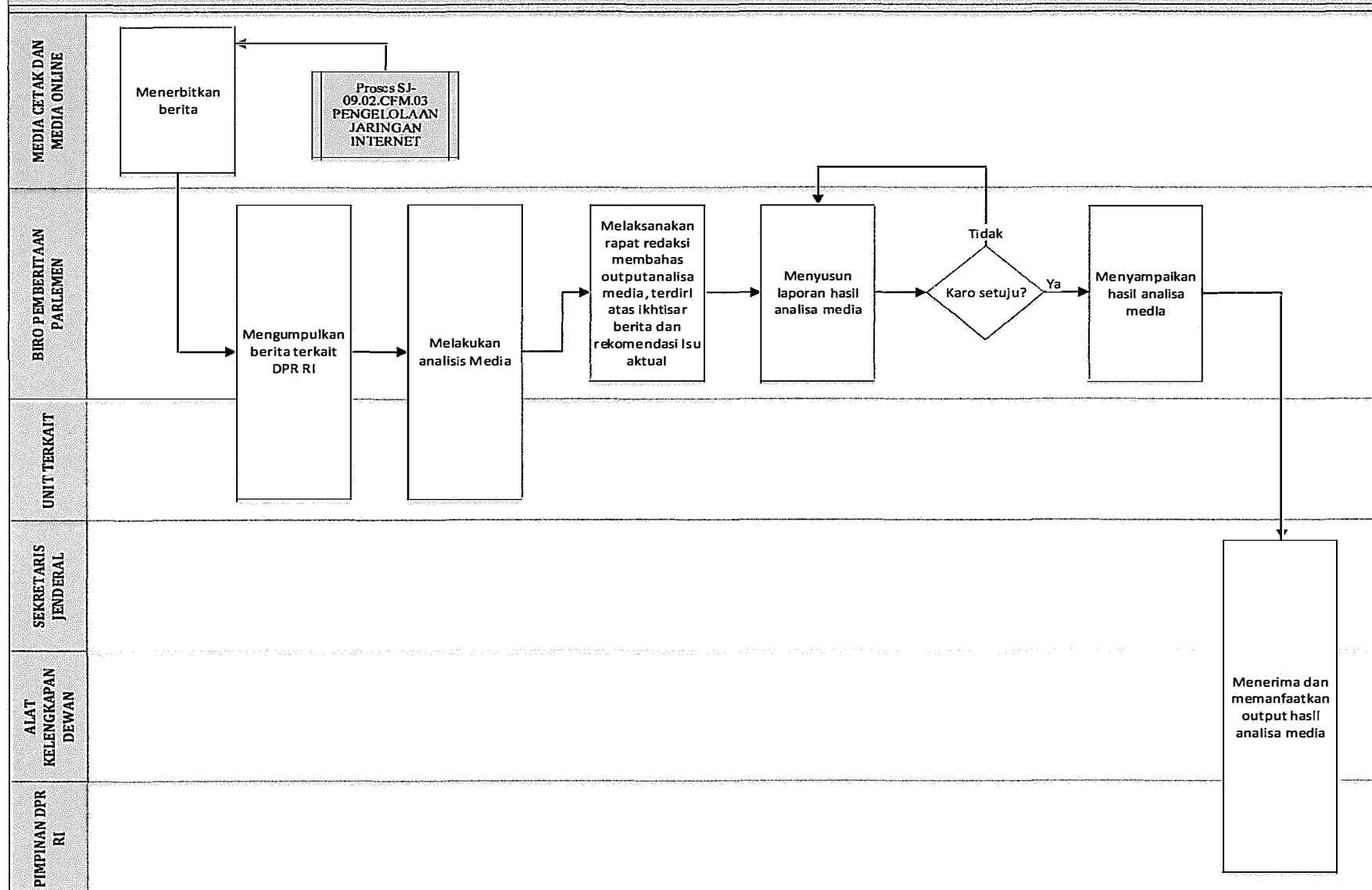
SJ – 10.01.CFM.03
PENGELOLAAN ADVERTORIAL MEDIA

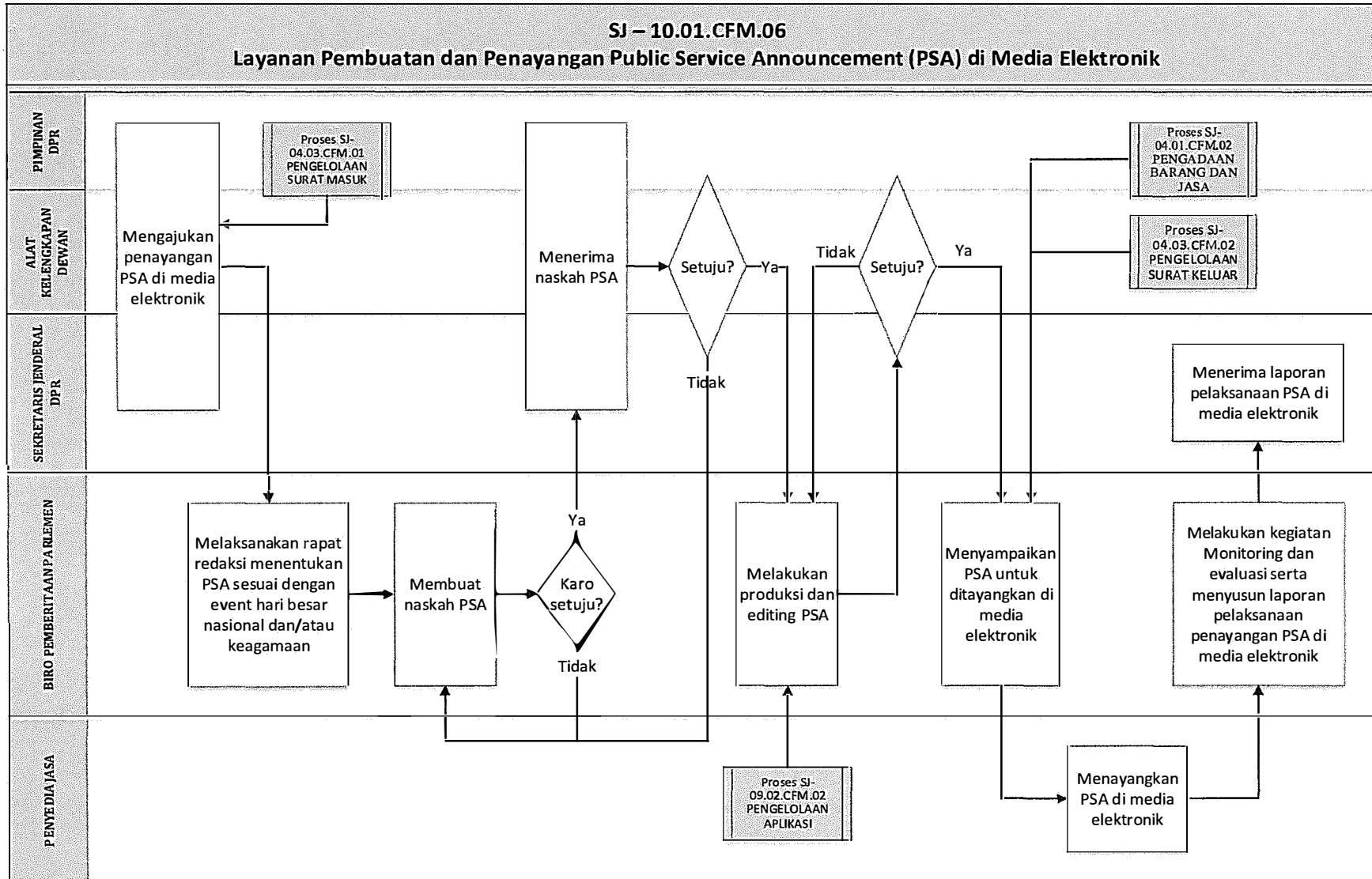


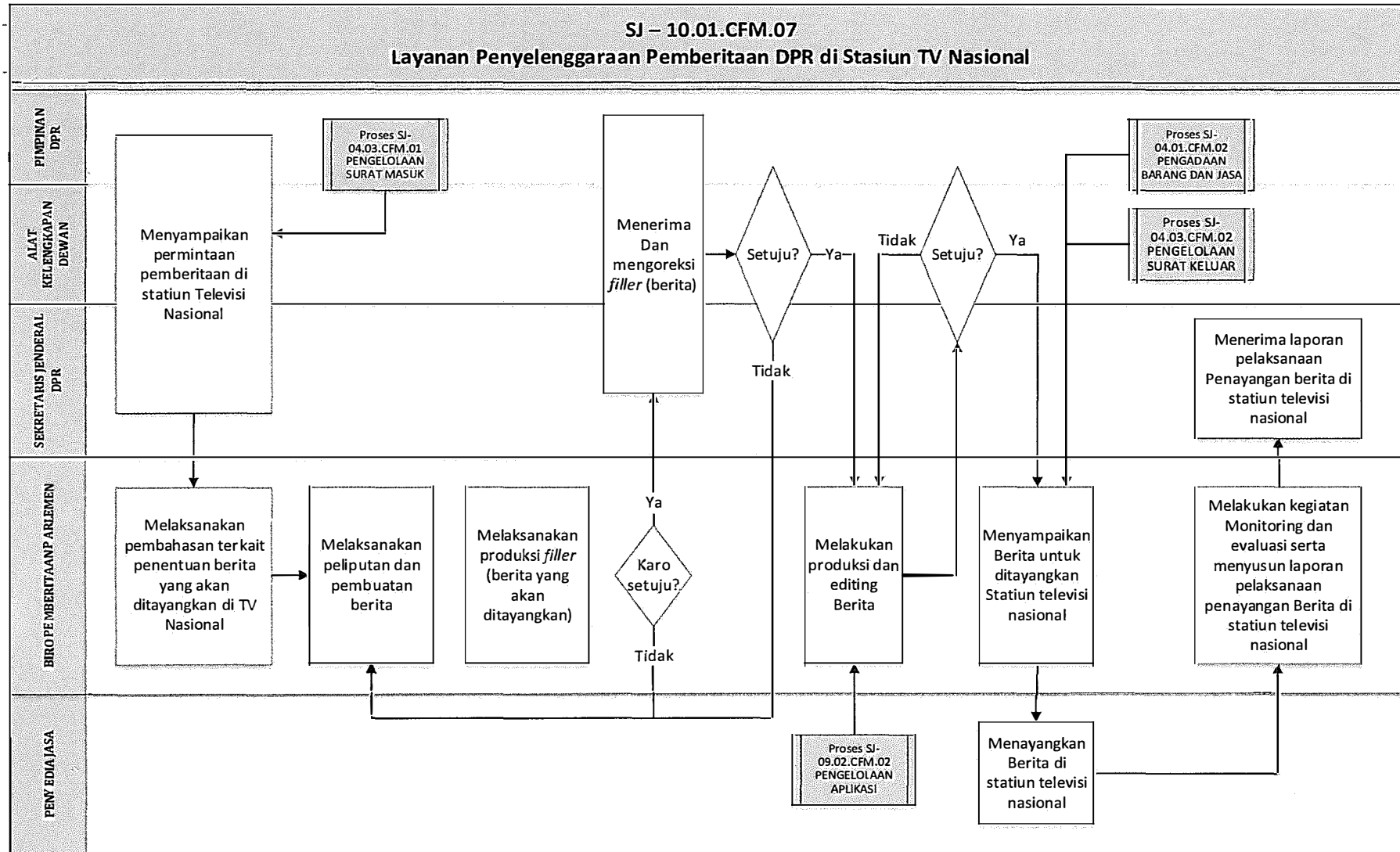
SJ – 10.01.CFM.04
PENGELOLAAN PEMBERITAAN DI MEDIA CETAK DAN ONLINE



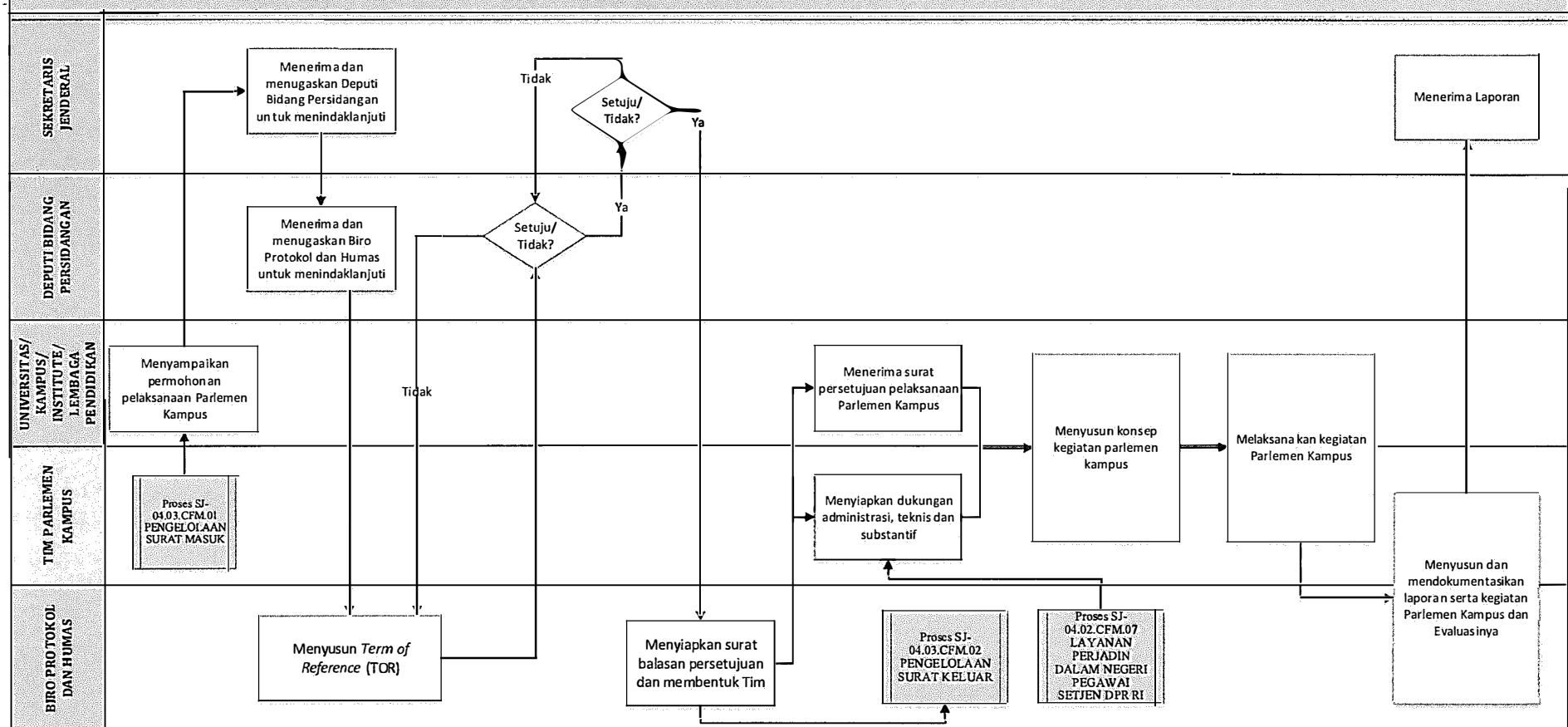
SJ – 10.01.CFM.05
PENGLOLAAN ANALISA MEDIA



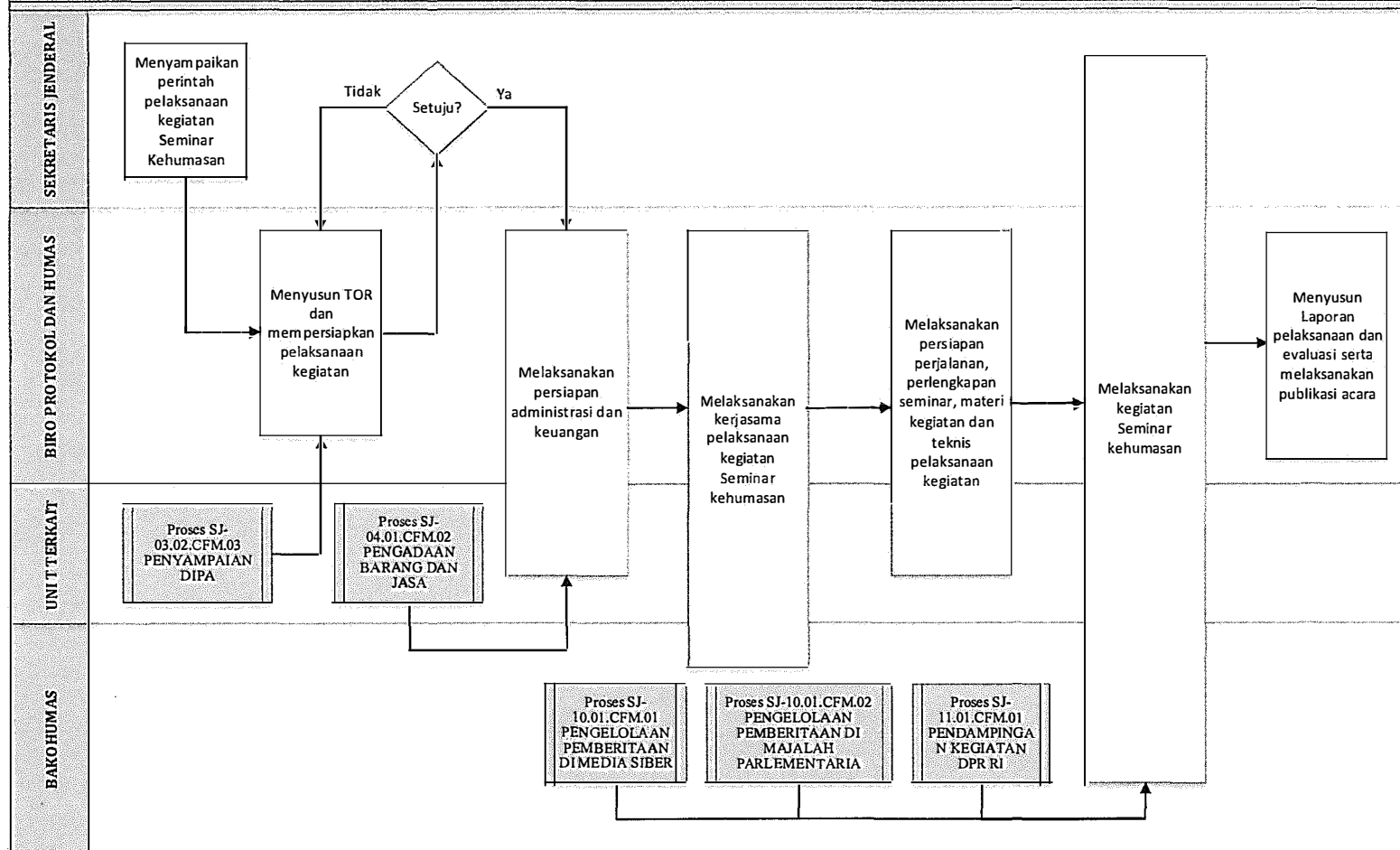




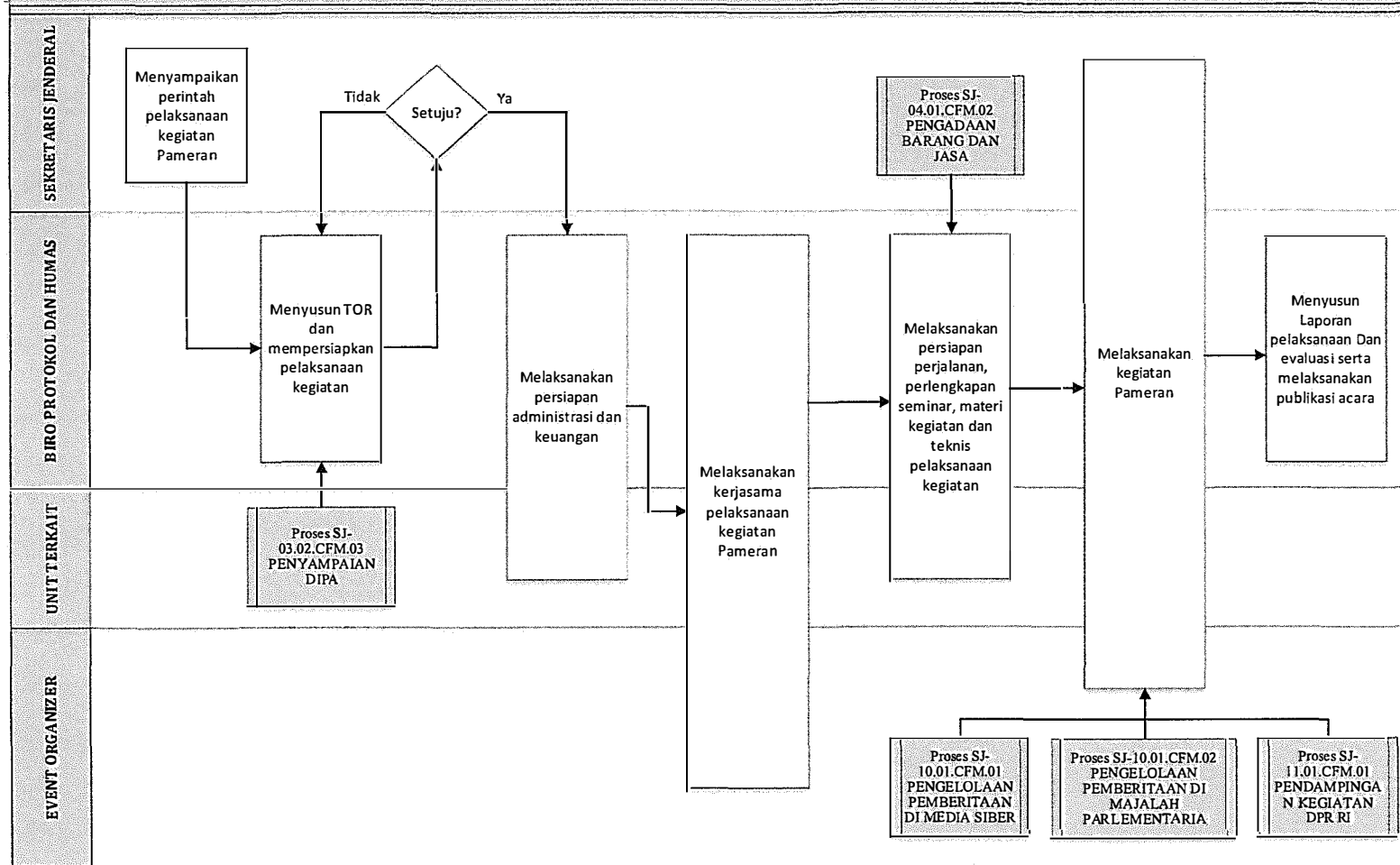
SJ – 10.02.CFM.01
PENGLOLAAN PARLEMEN KAMPUS



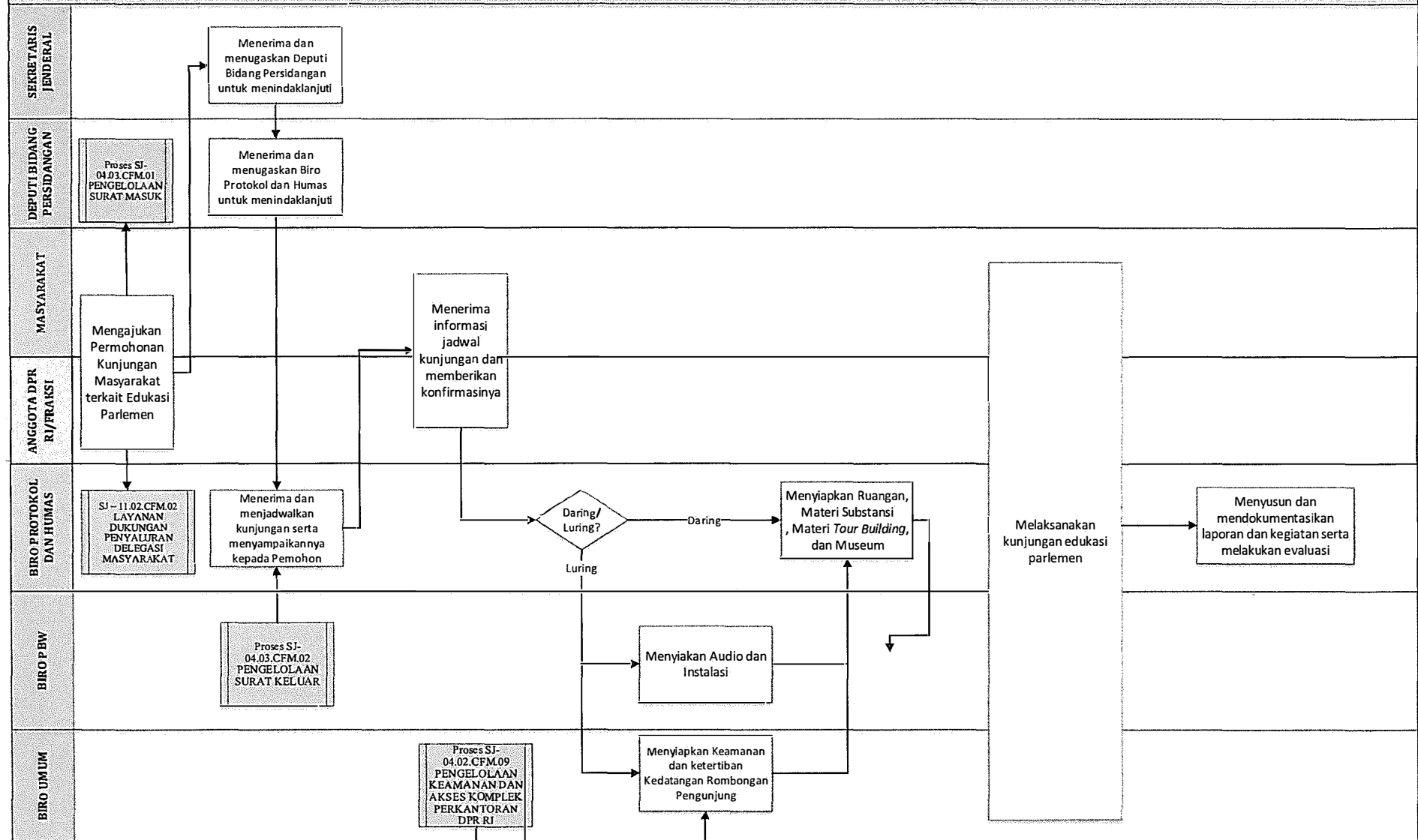
SJ – 10.02.CFM.02
PENGELOLAAN SEMINAR KEHUMASAN

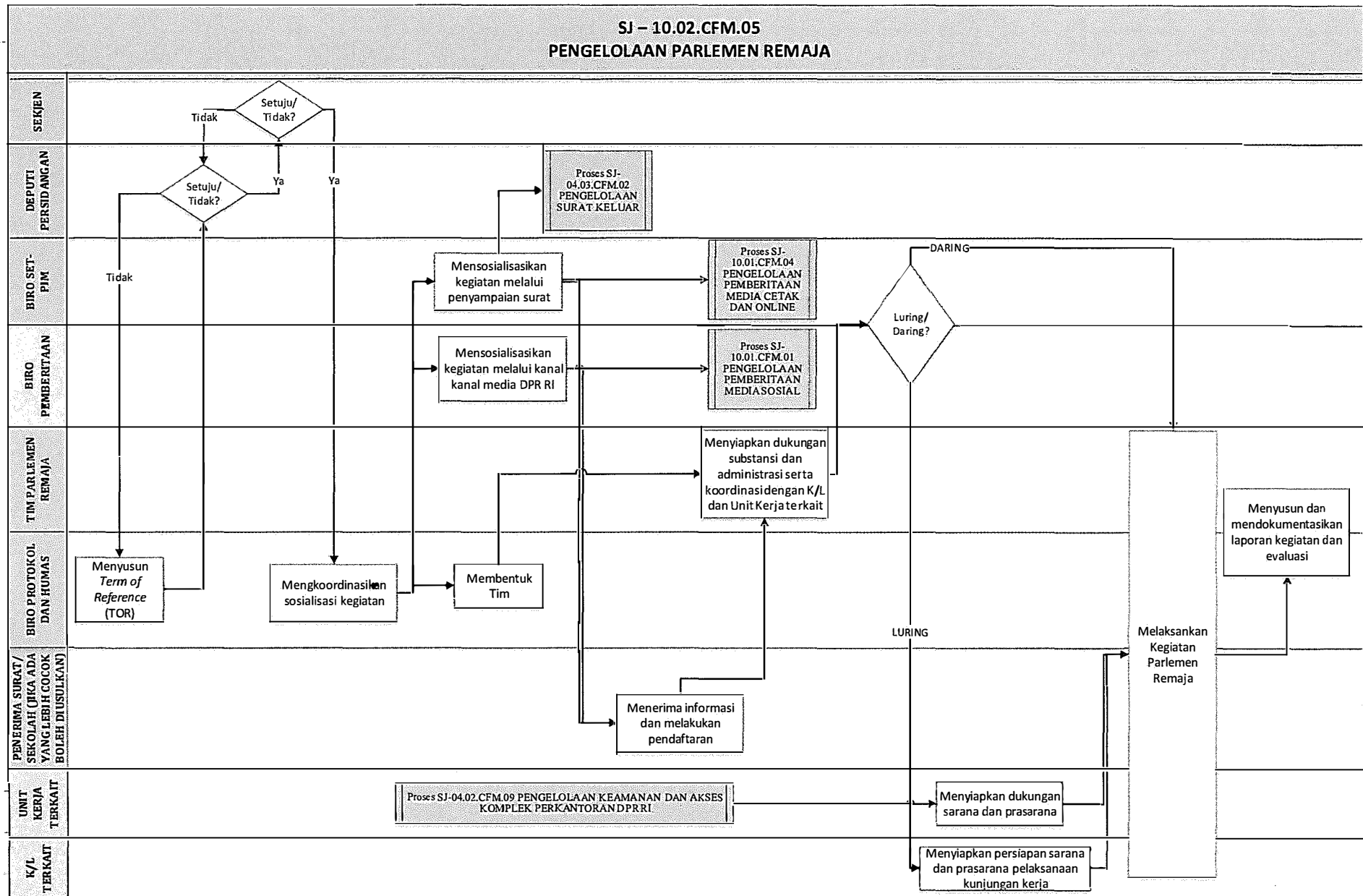


SJ – 10.02.CFM.03
PENGELOLAAN PAMERAN

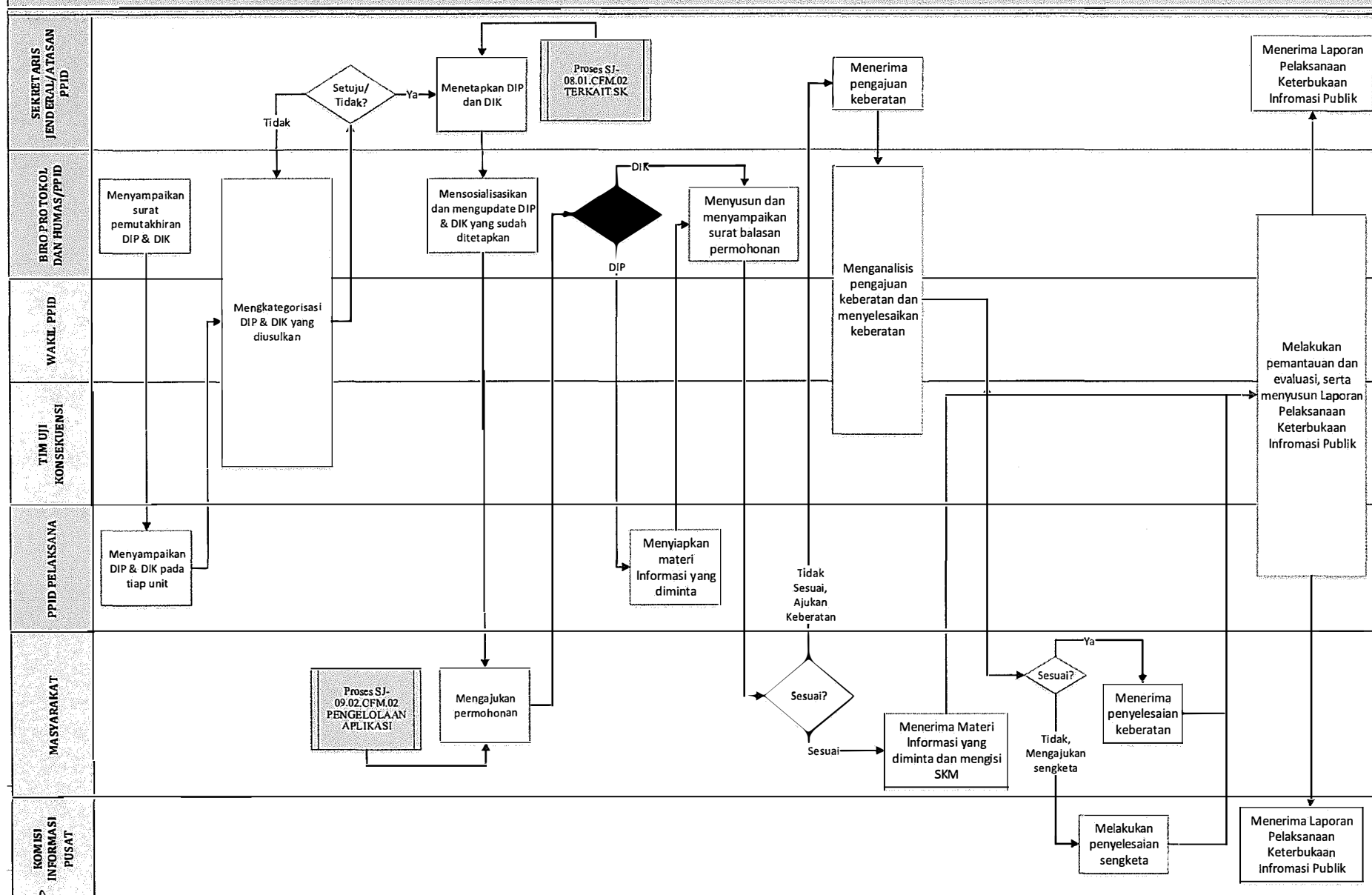


SJ – 10.02.CFM.04
LAYANAN EDUKASI PARLEMEN

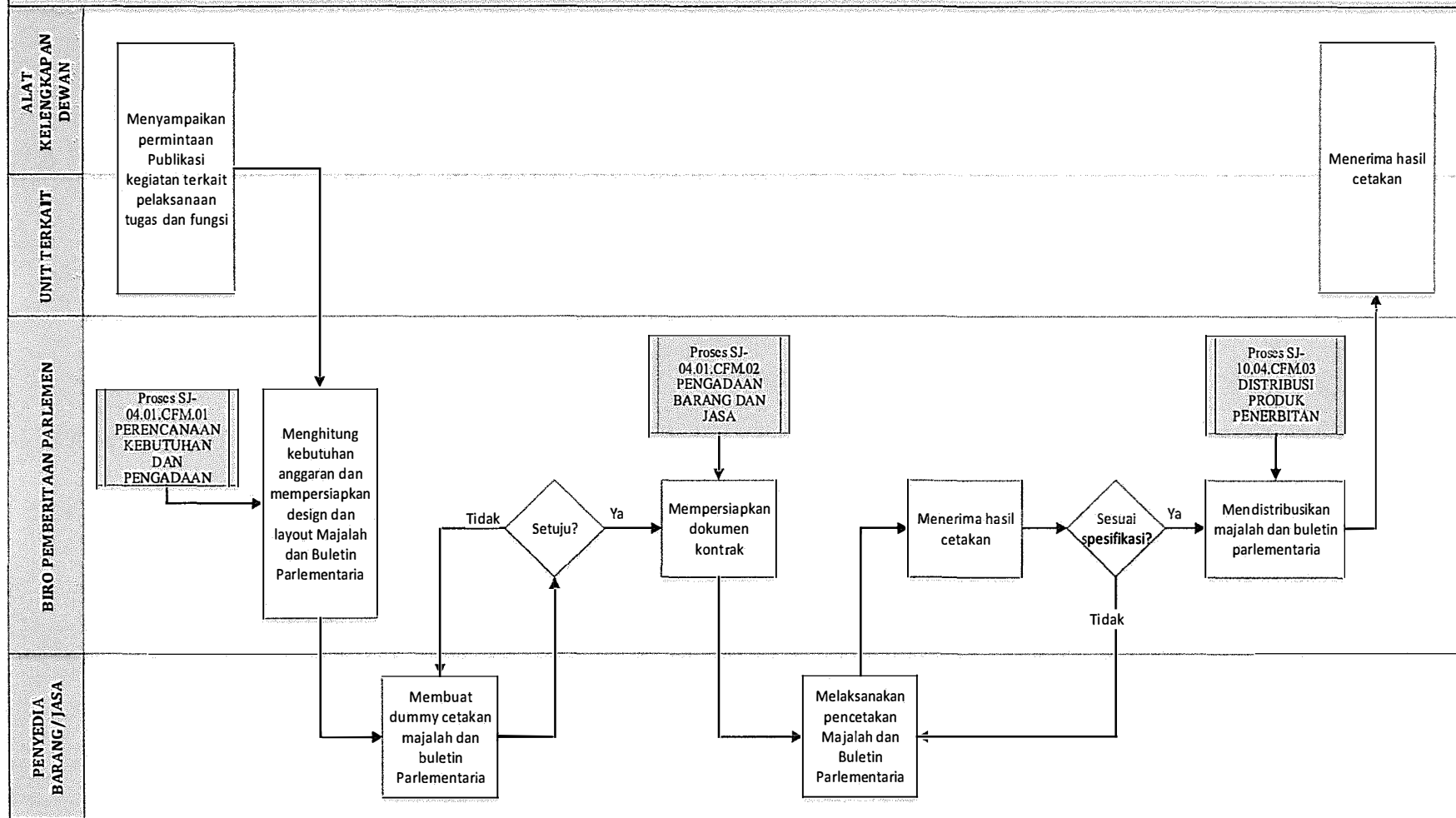




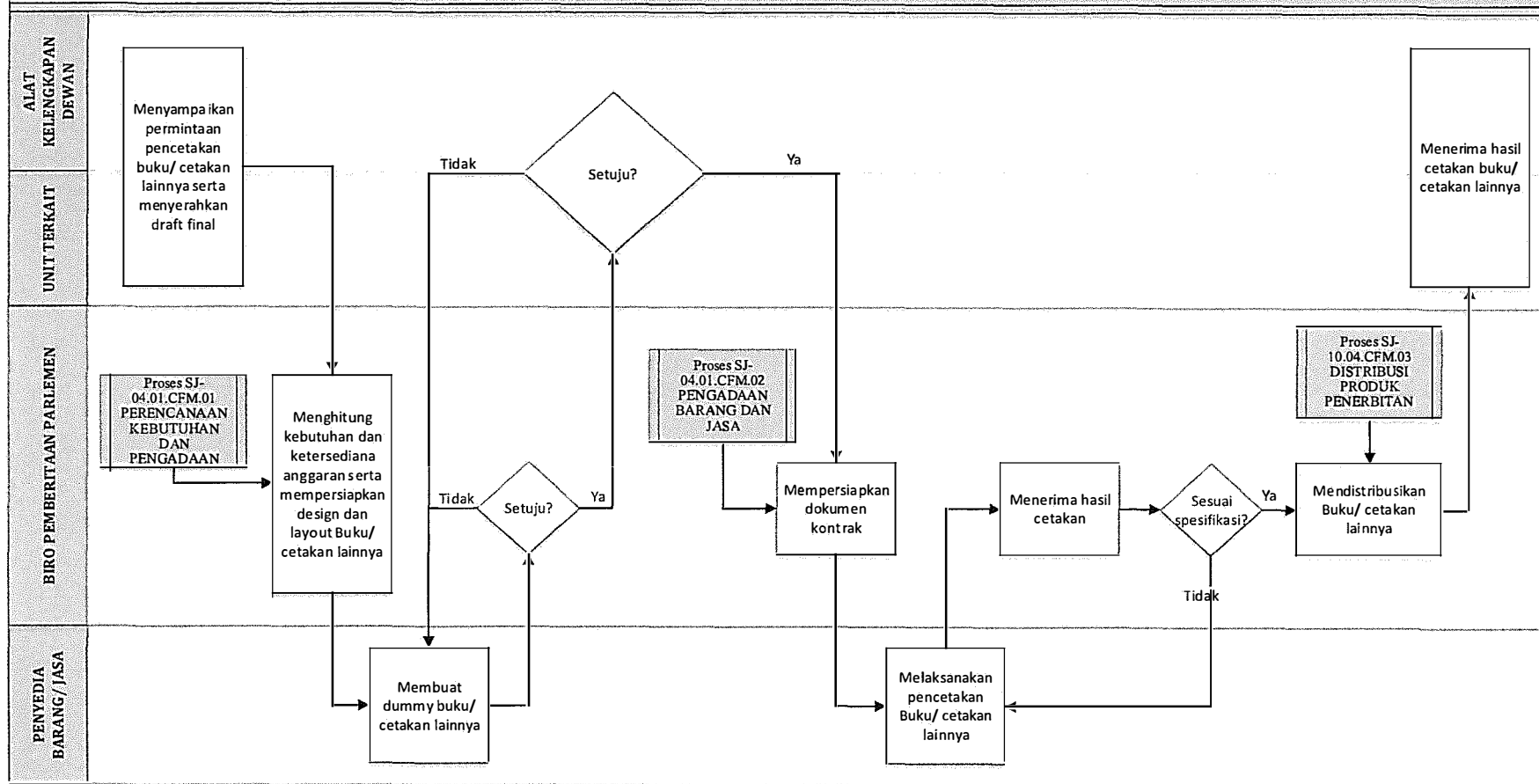
SJ – 10.03.CFM.01
PENGLOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



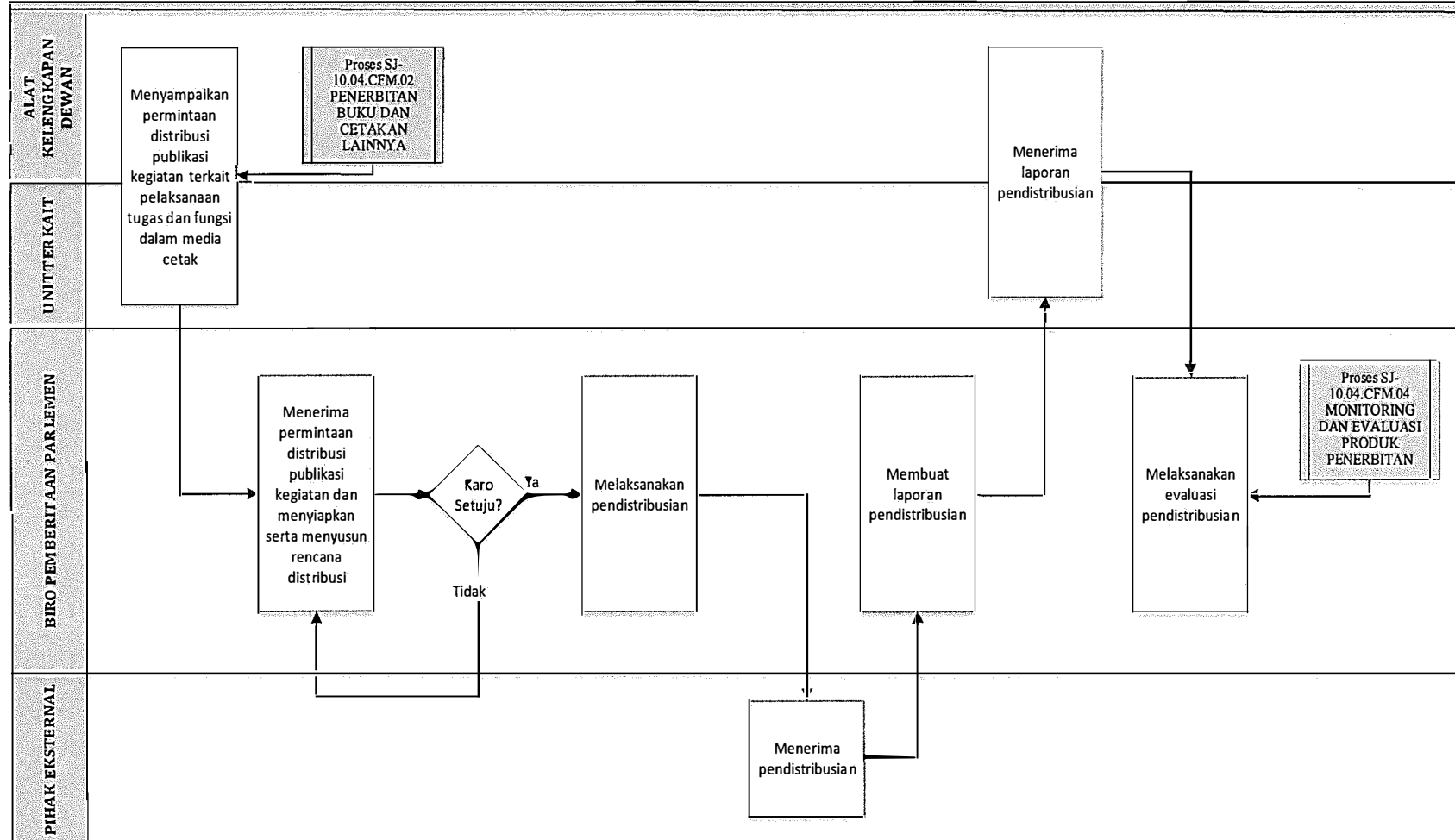
SJ – 10.04.CFM.01
PENERBITAN MAJALAH DAN BULETIN PARLEMENTARIA DPR RI



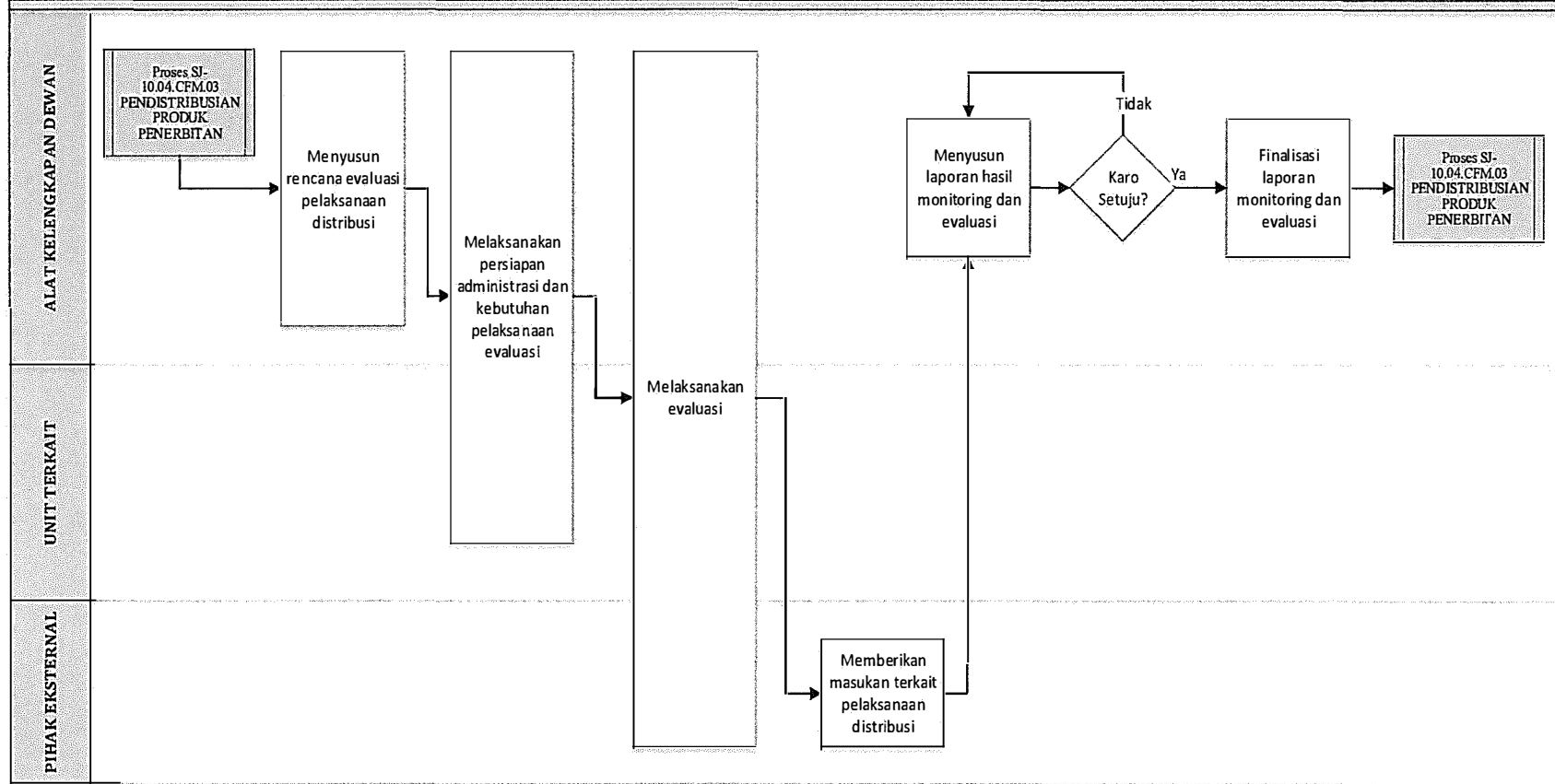
SJ – 10.04.CFM.02
PENERBITAN BUKU DAN CETAKAN LAINNYA



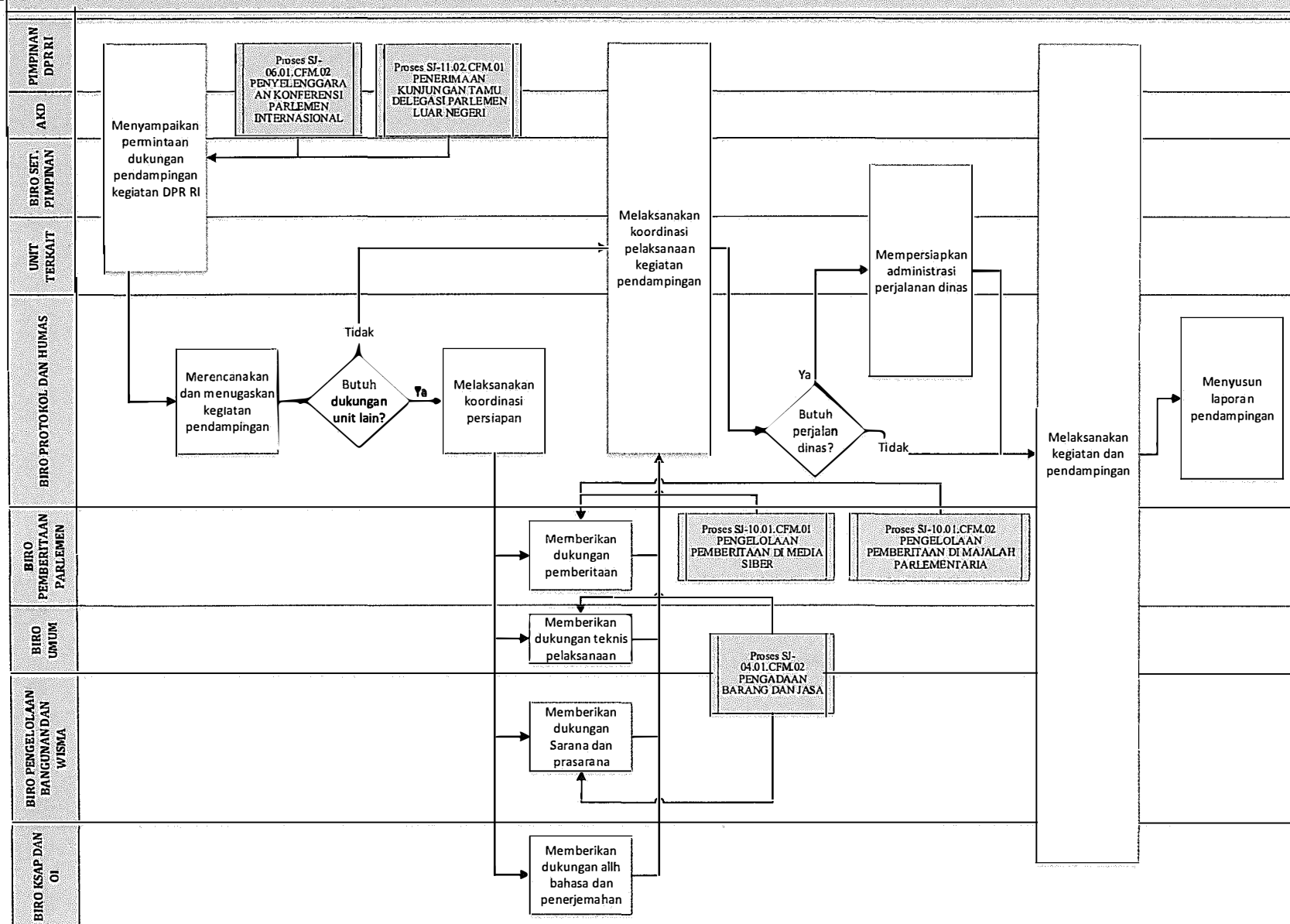
SJ – 10.04.CFM.03
PENDISTRIBUSIAN PRODUK PENERBITAN



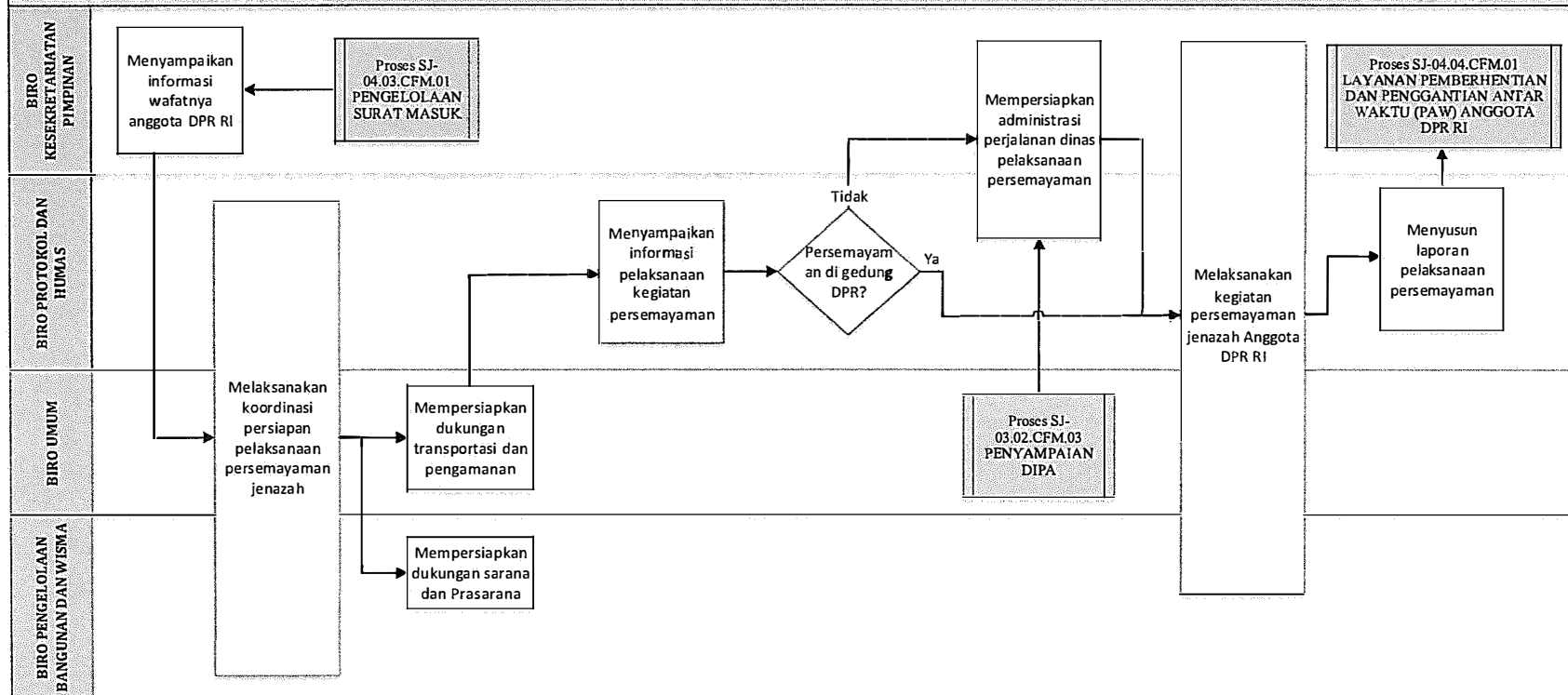
SJ – 10.04.CFM.04
MONITORING DAN EVALUASI PRODUK PENERBITAN



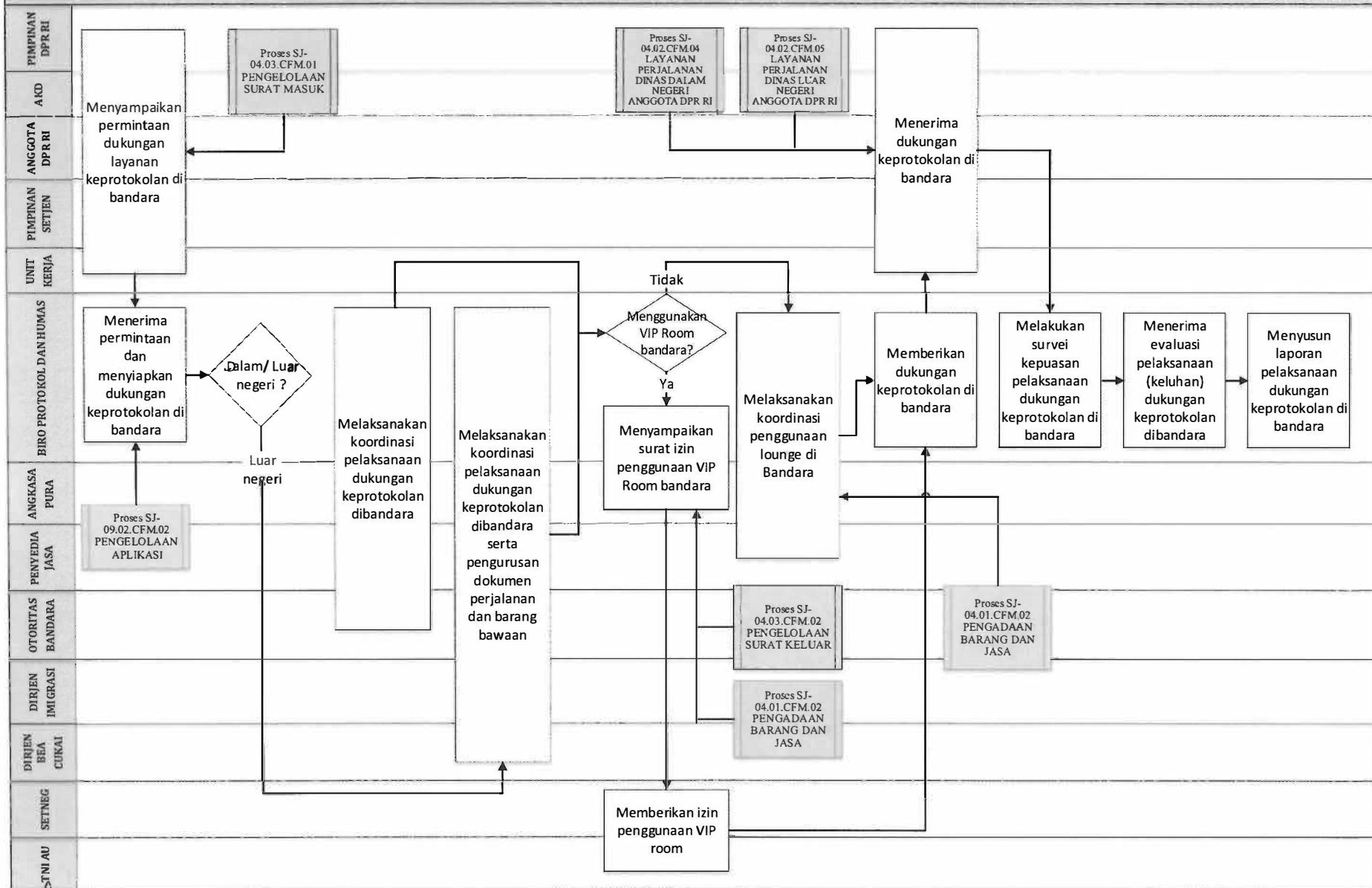
SJ – 11.01.CFM.01
PENDAMPINGAN KEGIATAN DPR RI

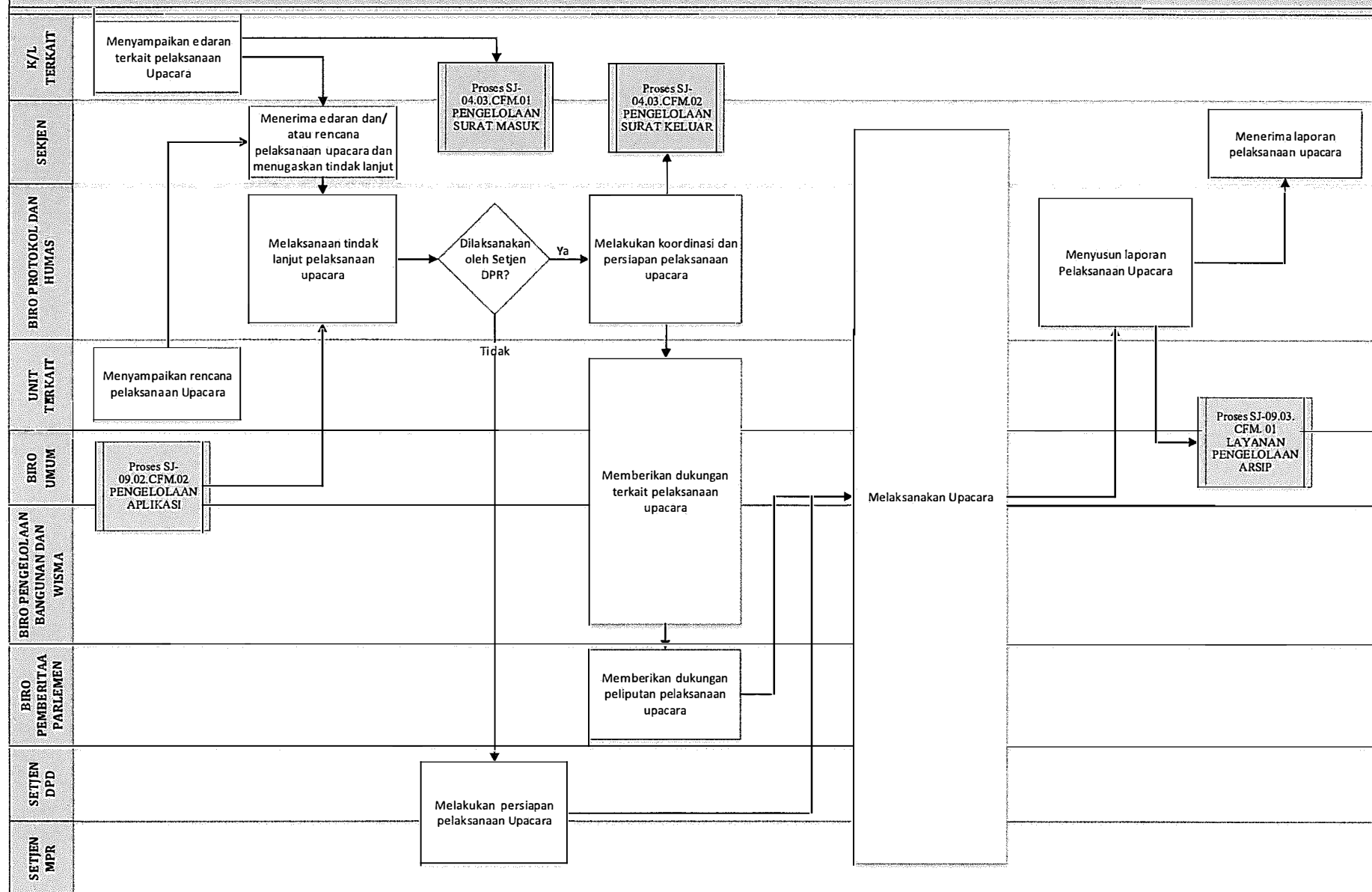


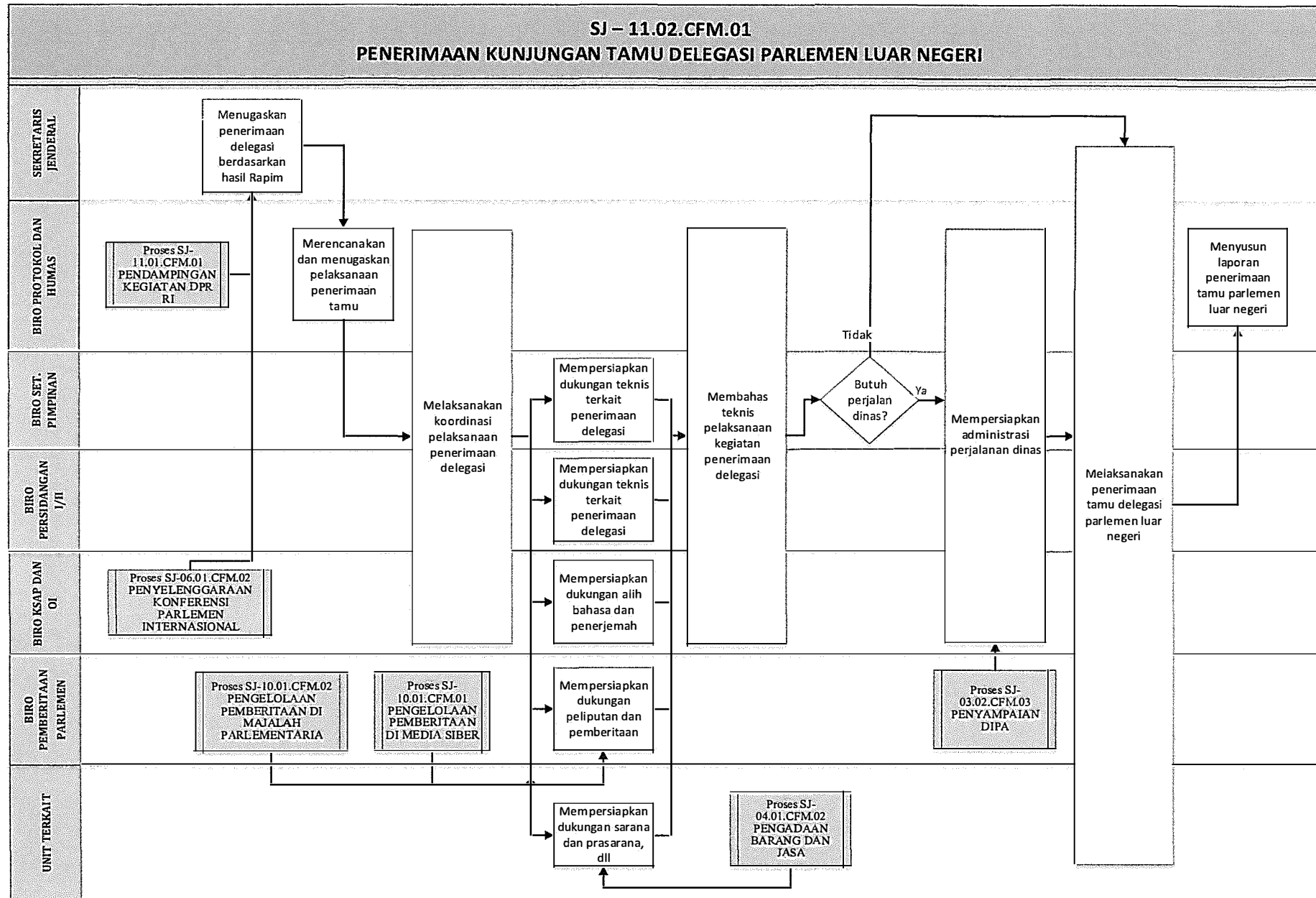
SJ – 11.01.CFM.02
PERSEMAYAMAN JENAZAH ANGGOTA DPR RI

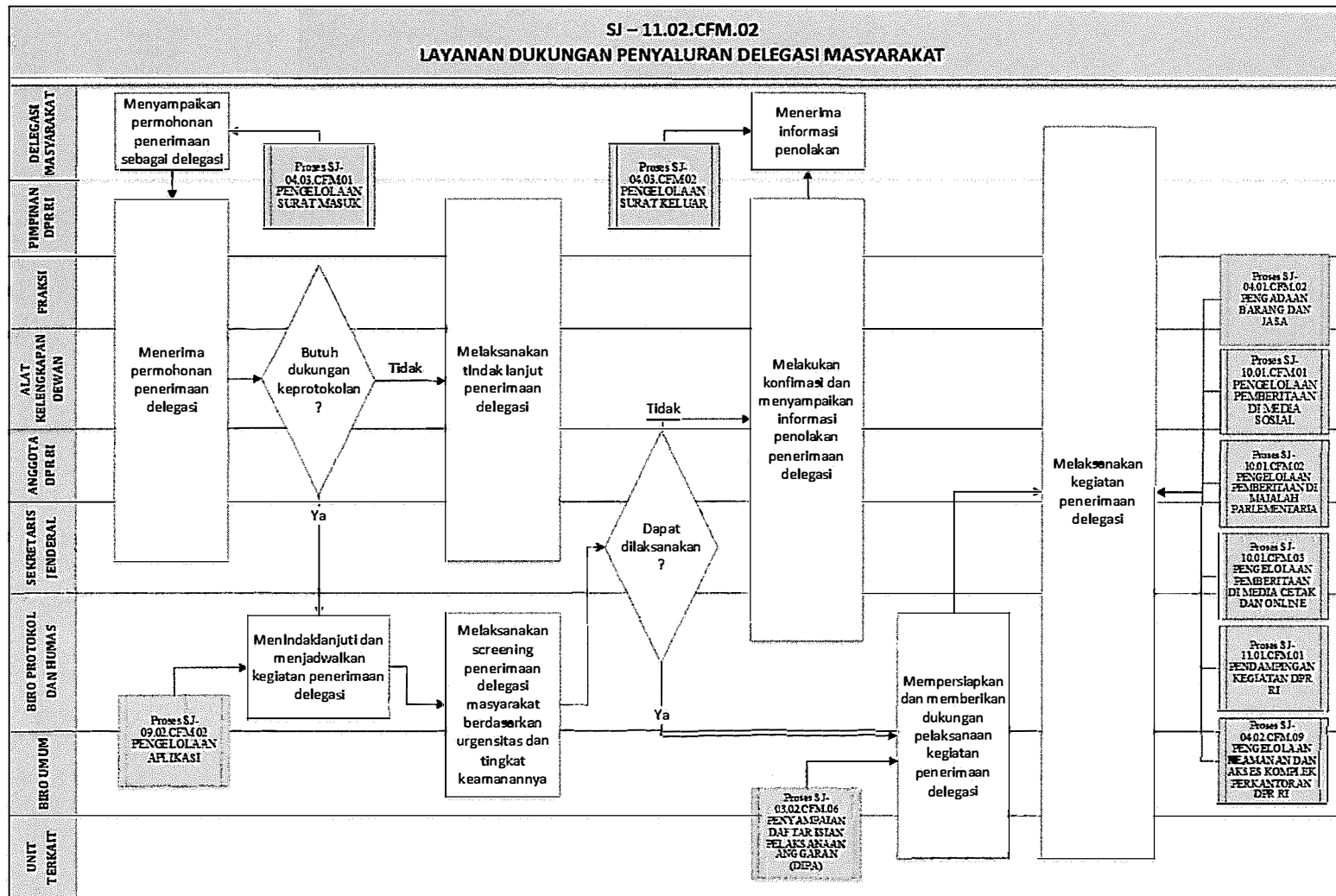


SJ – 11.01.CFM.03
LAYANAN DUKUNGAN KEPROTOKOLAN DI BANDARA









SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

INDRA ISKANDAR